

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

NOMOR : 2 TAHUN 2019

TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 263 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) merupakan penjabaran dari visi, misi dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN);
- b. bahwa Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana dimaksud pada huruf a, ditetapkan dengan Peraturan Daerah paling lambat 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 204, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 - 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
dan
GUBERNUR KALIMANTAN BARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2018-2023.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Provinsi Kalimantan Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Barat.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah.
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disingkat BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang memiliki fungsi dan tanggung jawab dibidang koordinasi perencanaan pembangunan di daerah.
8. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Barat adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2018 sampai dengan 2023.
10. Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2018-2023, yang selanjutnya disingkat RENSTRA PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun 2018 sampai dengan 2023.
11. Rencana Kerja Pemerintah Daerah, yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun

BAB II

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH

Pasal 2

- (1) RPJMD merupakan penjabaran dari Visi, Misi dan Program Gubernur yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- (2) Rincian Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Strategi, Arah Kebijakan pembangunan daerah dan keuangan daerah serta program perangkat daerah dan lintas perangkat daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) RPJMD menjadi acuan dalam penyusunan Renstra PD dan RKPD.

- (4) Sistematika RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari :
- BAB I : PENDAHULUAN
 - BAB II : GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH
 - BAB III : GAMBARAN KEUANGAN DAERAH
 - BAB IV : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - BAB V : VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN
 - BAB VI : STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH
 - BAB VII : KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH
 - BAB VIII : KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH
 - BAB IX : PENUTUP

Pasal 3

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur berkewajiban mengarahkan pelaksanaan RPJMD dengan menggerakkan semua potensi daerah secara optimal.
- (2) Sekretaris Daerah wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program-program di dalam RPJMD.
- (3) Perangkat Daerah wajib menyusun RENSTRA PD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan berpedoman pada RPJMD.
- (4) BAPPEDA wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran RPJMD kedalam RENSTRA PD.
- (5) BAPPEDA wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD.

BAB III

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 4

Pengendalian dan evaluasi terhadap RPJMD meliputi:

- a. pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan;
- b. pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan;
- c. evaluasi terhadap hasil.

Pasal 5

- (1) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa perumusan kebijakan perencanaan pembangunan jangka menengah daerah provinsi telah berpedoman pada RPJMN, RPJPD, dan RTRW Provinsi.
- (2) Pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud Pasal 4 huruf b digunakan untuk mengevaluasi dan memastikan bahwa program pembangunan daerah dan indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan pembangunan jangka menengah daerah telah dilaksanakan melalui RKPD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dilakukan untuk memastikan bahwa visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah provinsi dapat dicapai untuk mewujudkan visi pembangunan jangka panjang daerah provinsi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Dalam hal RPJMD Tahun 2018 – 2023 telah berakhir dan RPJMD periode berikutnya belum ditetapkan, maka penyusunan RKPD Tahun 2024 disusun dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

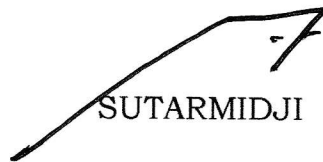
Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2019

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,


SUTARMIDJI

Diundangkan di Pontianak
pada tanggal 5 Maret 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN BARAT,



SYARIF KAMARUZAMAN

LEMBARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT TAHUN 2019 NOMOR 2
NO. REG. PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT: 2-75/2019

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak pada tanggal 27 Juni 2018 telah dilantik oleh Presiden pada tanggal 5 September 2018 di Istana Negara. Untuk memenuhi amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 pasal 263 ayat (1) dan ayat (3), maka setelah pelantikan, Pemerintah Kalimantan Barat harus menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023. RPJMD periode ini merupakan pelaksanaan periode lima tahunan ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 dengan visi “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Selanjutnya, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 pasal 41 huruf e, penyusunan RPJMD ini dimulai dengan penyusunan Rancangan Teknokratik yang dilakukan oleh Bappeda Kalimantan Barat dengan melibatkan para ahli (akademisi), praktisi, pejabat pemerintah daerah, dan *stakeholders* pembangunan lainnya.

Rancangan Teknokratik tersebut kemudian diselaraskan dengan visi dan misi Kepala Daerah terpilih sehingga menghasilkan suatu Rancangan Awal RPJMD yang akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat ini dilakukan dengan melibatkan partisipasi *stakeholder* pembangunan secara luas melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019-2023. Masukan atau saran yang disampaikan dalam Musrenbang tersebut menjadi bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi dokumen RPJMD yang definitif untuk selanjutnya ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

1.2. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5490);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
 13. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 14. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Pulau Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 10);
 15. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah

- Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan;
 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS dalam Penyusunan Rencana Pembangunan;
 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
 20. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
 21. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan;
 22. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 29 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
 23. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 9 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005 Nomor 9);
 24. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat;
 25. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);

26. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat; (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat No 8; Tambahan Lembaran Daerah No 6).

1.3. Hubungan Antar Dokumen

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan bagian dari pelaksanaan Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan demikian, penyusunan RPJMD merupakan penjabaran lima tahunan terhadap Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dokumen RPJMD periode 2018-2023 merupakan kelanjutan dari RPJMD sebelumnya dan mempersiapkan landasan bagi RPJMD berikutnya untuk mewujudkan visi jangka panjang Kalimantan Barat pada tahun 2025.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 agar terwujud sinergi antara kebijakan, strategi, program dan kegiatan di dalam RPJMD ini. Selain itu, penyusunan RPJMD ini juga memperhatikan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang memberikan acuan mengenai pola dan struktur ruang terkait dengan rencana pelaksanaan program-program pembangunan.

Selanjutnya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Strategis (Renstra) OPD yang berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional untuk memberikan arah kebijakan pembangunan yang disertai indikasi program dan kegiatan untuk setiap bidang/fungsi pemerintahan dalam jangka waktu 5 tahun. Dalam rangka mengefektifkan dampak kebijakan pembangunan dalam RPJMD di wilayah Kalimantan Barat, diharapkan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota untuk menjadikan RPJMD Provinsi sebagai acuan guna menyusun dan/atau mengevaluasi RPJMD Kabupaten/Kota.

Setiap tahun dalam periode pelaksanaannya, RPJMD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Di dalam RKPD inilah rencana program dan kegiatan indikatif

RPJMD dijabarkan menurut urusan dan fungsi, dilengkapi dengan indikator keluaran, alokasi pendanaan serta lokasi pelaksanaan kegiatan dan menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah untuk menjabarkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih ke dalam strategi, kebijakan umum, program pembangunan dan kegiatan-kegiatan indikatif selama periode 2018-2023.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018-2023 adalah untuk:

1. menjabarkan RPJPD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025;
2. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah setiap tahun dalam periode RPJMD sebagai dasar penyusunan APBD Provinsi Kalimantan Barat;
3. menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis PD;
4. menjadi pedoman dalam penyusunan dan evaluasi RPJMD Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat;
5. menjadi pedoman dalam penyusunan dokumen perencanaan lainnya di Provinsi Kalimantan Barat; serta
6. menjadi pedoman bagi DPRD dalam melaksanakan fungsi pengawasan agar penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan sejalan dengan aspirasi masyarakat.

1.5. Sistematika Rancangan Akhir Dokumen RPJMD

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dibagi menjadi 9 (sembilan) bab dengan penyajian sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3. Hubungan Antar Dokumen
- 1.4. Maksud dan Tujuan
- 1.5. Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

- 2.1. Aspek Geografi dan Demografi
- 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat
- 2.3. Aspek Pelayanan Umum
- 2.4. Aspek Daya Saing Daerah

BAB III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

- 3.1. Kinerja Masa Lalu
 - 3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD
 - 3.1.2. Neraca Daerah
- 3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu
 - 3.2.1. Proposisi Penggunaan Anggaran
 - 3.2.2. Analisis Pembiayaan
- 3.3. Kerangka Pendanaan
 - 3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja
 - 3.3.2. Perhitungan Kerangka Pendanaan

BAB IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

- 4.1. Permasalahan Pembangunan
- 4.2. Isu Strategis

BAB V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

- 5.1. Visi

5.2. Misi

5.3. Tujuan dan Sasaran

BAB VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

BAB VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT
DAERAH

BAB VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

BAB IX. PENUTUP

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

2.1. Aspek Geografis dan Demografi

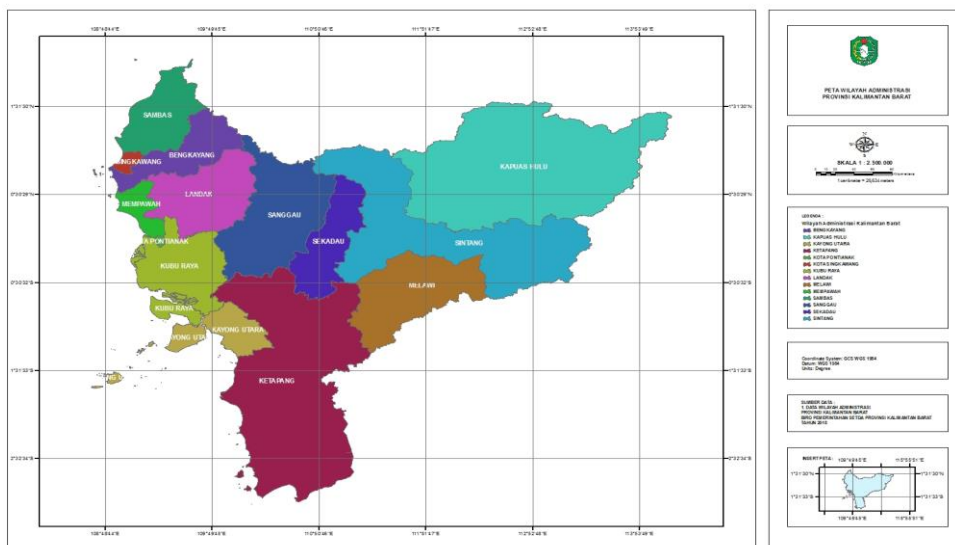
2.1.1. Karakteristik Lokasi Wilayah

2.1.1.1. Luas dan Batas Wilayah

Luas wilayah Kalimantan Barat sebesar 147.307 km² atau 1,13 kali luas Pulau Jawa dan termasuk Provinsi terbesar ketiga setelah Provinsi Papua (319.036,05 km²) dan Kalimantan Tengah (153.564,50 km²), sedangkan keempat adalah Kalimantan Timur (129.873 km² setelah dikurangi Provinsi Kalimantan Utara). Adapun batas-batas wilayah adalah sebagai berikut:

1. Bagian Barat berbatasan dengan Selat Karimata.
2. Bagian Utara berbatasan langsung dengan Sarawak (Malaysia Timur) dan Provinsi Kalimantan Timur.
3. Bagian Selatan berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah serta Laut Jawa.
4. Bagian Timur berbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur.

Gambar 2.1.
Peta Batas Administrasi Provinsi Kalimantan Barat



Secara administratif Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 14 (empat belas) kabupaten/kota yaitu dua belas kabupaten dan dua kota. Empat belas kabupaten/kota ini terbagi dalam 174 kecamatan, 99 Kelurahan dan 2.031 desa.

Tabel 2.1
Jumlah Kecamatan dan Jumlah Kelurahan/Desa di Kalimantan Barat

Kabupaten/Kota	Jumlah Kecamatan**)	Jumlah Kelurahan	Jumlah Desa
(1)	(2)	(3)	(4)
Kab. Sambas	19	-	193
Kab. Mempawah	9	7	60
Kab. Sanggau	15	6	163
Kab. Ketapang	20	9	253
Kab. Sintang	14	16	390
Kab. Kapuas Hulu	23	4	278
Kab. Bengkayang	17	2	122
Kab. Landak	13	-	156
Kab. Sekadau	7	-	87
Kab. Melawi	11	-	169
Kab. Kayong Utara	6	-	43
Kab. Kubu Raya	9	-	117
Kota Pontianak	6	29	-
Kota Singkawang	5	26	-
Kalimantan Barat	174	99	2.031

Sumber: Permendagri Nomor 137 Tahun 2017

2.1.1.2. Letak dan Kondisi Geografis

Kalimantan Barat secara geografis terletak pada posisi 2° 05' LU – 3° 05' LS dan 108° 30' – 114° 10' BT. Secara dimensi kewilayahan, Kalimantan Barat dapat dibagi menjadi 3 (tiga) dimensi wilayah, yakni wilayah pesisir dan kepulauan, wilayah pedalaman dan wilayah perbatasan antar negara.

Untuk wilayah pesisir dan kepulauan terdiri atas Kabupaten dan Kota yang berada di wilayah pesisir yakni Kota Pontianak, Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Kabupaten Mempawah, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Kubu Raya, Kabupaten Ketapang, dan Kabupaten Kayong Utara. Sedangkan untuk wilayah pedalaman terdiri atas Kabupaten Kapuas

Hulu, Kabupaten Sintang, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kabupaten Sekadau, Sanggau, Kabupaten Landak, dan Kabupaten Ketapang.

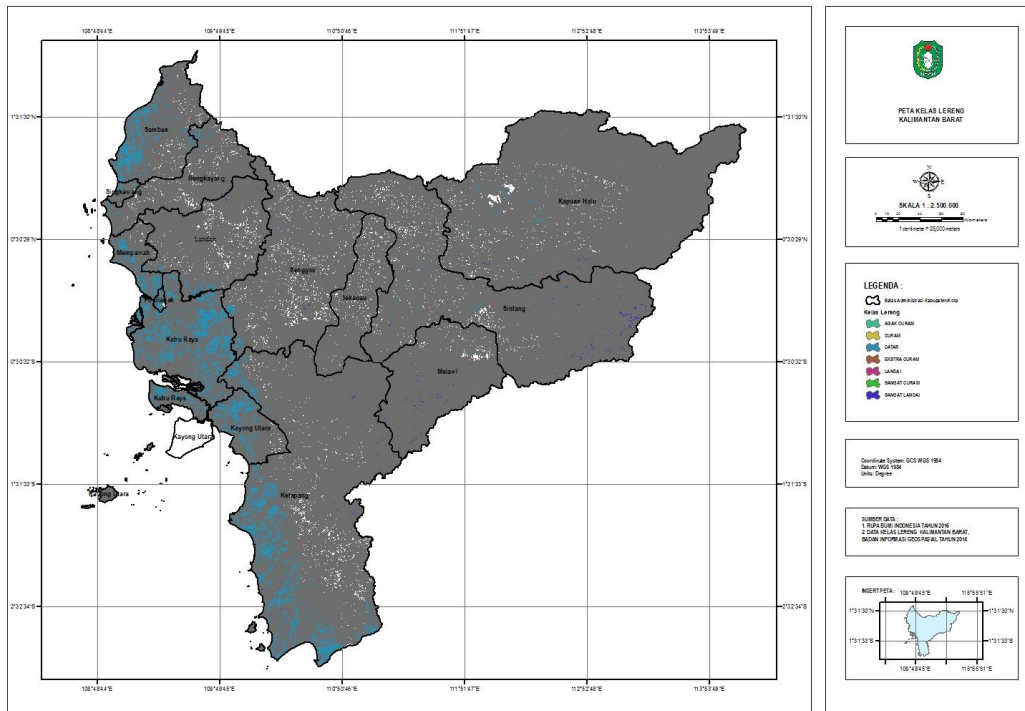
Sementara itu, untuk dimensi wilayah perbatasan antara negara merupakan wilayah yang berbatasan langsung dengan Malaysia disebelah utara yakni terdiri atas Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang dan Kabupaten Kapuas Hulu.

2.1.1.3. Topografi

Topografi Provinsi Kalimantan Barat dianalisis dari aspek ketinggian lahan dan kemiringan lahan. Secara umum, daratan Kalimantan Barat merupakan daratan rendah, sedikit berbukit yang menghampar dari Barat ke Timur di sepanjang Lembah Sungai Kapuas serta Laut Natuna/Selat Karimata, sepanjang daerah daratan berawa-rawa bercampur gambut dan hutan mangrove. Wilayah daratan diapit oleh Pegunungan Kalingkang/Kapuas Hulu di bagian Utara dan Pegunungan Schwaner di bagian Selatan sepanjang perbatasan dengan Provinsi Kalimantan Tengah. Dipengaruhi oleh daratan rendah yang amat luas, maka ketinggian gunung-gunung di Kalimantan Barat relatif rendah dan non aktif, adapun gunung yang paling tinggi adalah gunung Baturaya di Kec. Ambalau Kab. Sintang dengan ketinggian 2.278 meter dari permukaan laut dan terendah adalah gunung Cabang dengan ketinggian 103 meter di Kec. Pulau Maya Karimata Kab. Kayong Utara.

Sekitar 29,21 persen atau 4.287.880 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng < 2 persen atau cenderung landai. Sementara itu, sekitar 33,34 persen atau 4.894.333 Ha berada pada kelas lereng 2-15 persen atau cenderung bergelombang. Sedangkan 21,31 persen atau 3.127.844 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng 15-40 persen atau cenderung curam dan sekitar 16,15 persen atau 2.370.643 Ha wilayah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kelas lereng >40 persen atau cenderung sangat curam.

Gambar 2.2.
Peta Kelas Lereng Wilayah Kalimantan Barat

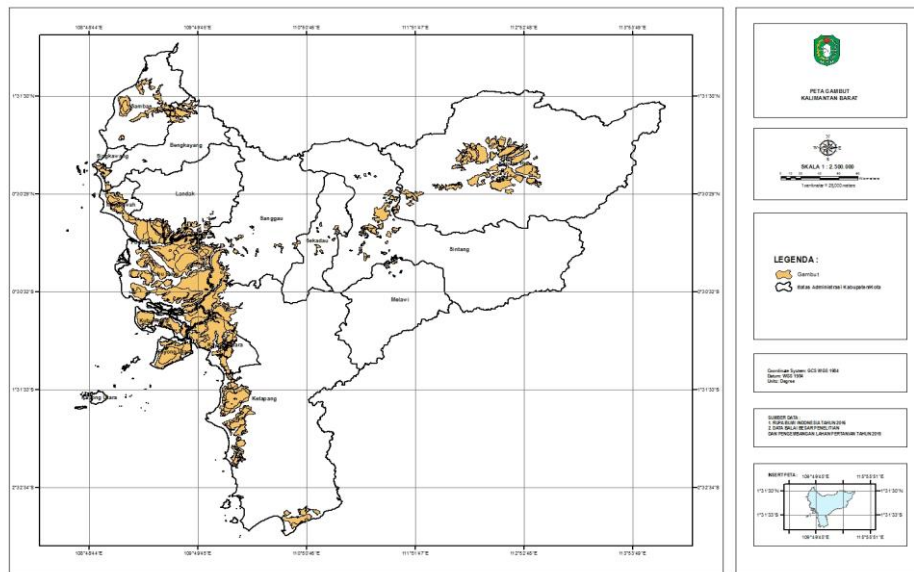


2.1.1.4. Geologi

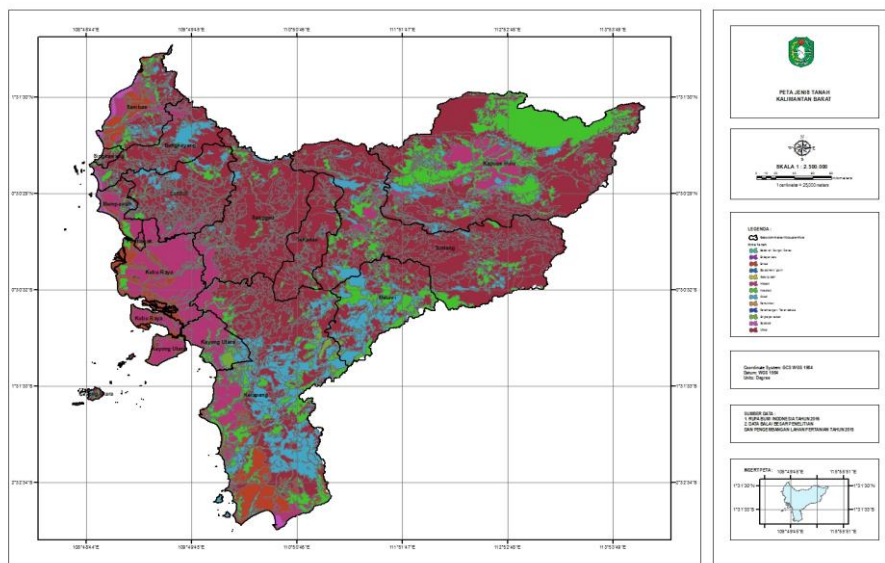
Dilihat dari tekstur tanahnya, sebagian besar daerah Kalimantan Barat memiliki jenis tekstur tanah Sedang yakni seluas 6.714.126 Ha, sementara 3.439.943 Ha merupakan jenis tekstur tanah halus, 2.762.006 Ha merupakan jenis tekstur tanah Kasar, 1.543.752 Ha merupakan jenis tekstur tanah Gambut dan 220.873 Ha merupakan jenis tekstur tanah rawa.

Sementara itu dilihat dari kandungan tanah, sebesar 5.806.633 Ha memiliki kandungan tanah Kwarter. Sedangkan 3.102.464 Ha memiliki kandungan tanah Carboniferous jenis Effusive, dan 1.468.680 Ha memiliki kandungan tanah intrusif dan plutonik asam. Beberapa wilayah lainnya memiliki kandungan tanah Naegon, Kapur, Jura, Trias, Permokarbon Trias Atas, dan beberapa jenis Carboniferus lainnya.

Gambar 2.3.
Peta Gambut Wilayah Kalimantan Barat



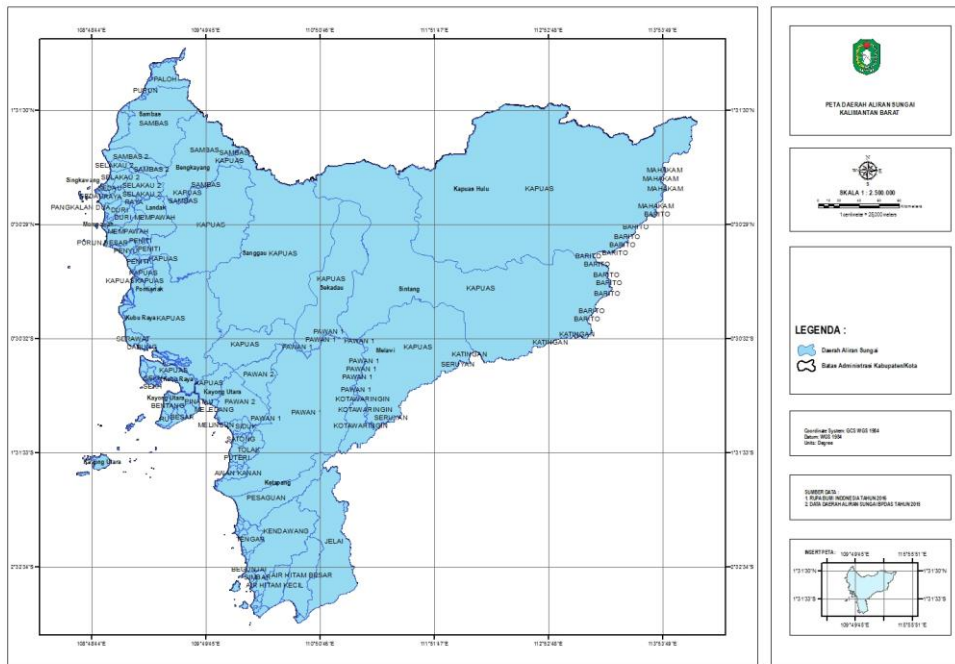
Gambar 2.4.
Peta Jenis Tanah Wilayah Kalimantan Barat



2.1.1.5. Hidrologi

Daerah Aliran Sungai di Kalimantan Barat cukup banyak, akan tetapi terdapat 3 (tiga) DAS terbesar diantaranya yakni DAS Kapuas, DAS Pawan dan DAS Jelai.

Gambar 2.5.
Peta Daerah Aliran Sungai Provinsi Kalimantan Barat



Kalimantan Barat termasuk salah satu daerah provinsi yang dijuluki dengan **“Seribu Sungai”**, julukan ini selaras dengan kondisi geografis Kalimantan Barat yang memiliki ratusan sungai besar dan kecil yang diantaranya dapat dan sering dilayari serta merupakan urat nadi dan jalur utama sarana transportasi daerah pedalaman, walaupun prasarana jalan darat telah menjangkau sebagian besar kecamatan.

Sungai besar utama dan terpanjang di Indonesia adalah Sungai Kapuas yaitu 1.086 km (daerah yang dilalui adalah Kabupaten Kapuas Hulu, Kab. Sintang, Kab. Sanggau, Kab. Sanggau, Kab. Sekadau, dan Kota Pontianak) dan sepanjang 942 dapat dilayari beragamnya sungai-sungai di Kalimantan Barat, maka sebaliknya yang terjadi dengan danau, di Kalimantan Barat danau-danau yang ada hanya ada dua yang cukup berarti. Kedua danau ini adalah Danau Sentarum dengan luas (117.500 hektar), Danau Luar I (5.400 hektar). Kedua danau ini berlokasi di Kabupaten Kapuas Hulu dan mempunyai potensi perikanan dan pariwisata yang baik.

2.1.1.6. Klimatologi

Oleh karena posisi geografis Kalimantan Barat yang terletak di garis Khatulistiwa maka iklim di Kalimantan Barat yakni Iklim Tropis dengan 2 (dua) musim, yakni musim panas dan musim penghujan. Suhu udara di Kalimantan Barat relatif panas yang diikuti dengan kelembaban udara yang tinggi. Berdasarkan catatan empiris dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat, suhu udara di daerah Kalimantan Barat cukup normal dengan suhu terendah yang tercatat 25,9°C di Stasiun Meteorologi Melawi pada bulan Desember 2017 dan suhu tertinggi yang tercatat adalah 28,4°C pada stasiun meteorologi Pontianak, Mempawah dan Ketapang pada bulan Juni 2017.. Pada Tahun 2017 tercatat dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat rata-rata curah hujan di Kalimantan Barat tertinggi pada bulan Agustus sebesar 406,9 mm dan bulan November sebesar 337,9 mm, sedangkan curah hujan terendah pada bulan Juni sebesar 196,5 mm. Semetara rata-rata dari 8 (delapan) stasiun meteorologi di Kalimantan Barat untuk Jumlah Hari Hujan Tahun 2017 terbanyak pada bulan November yakni 25 hari hujan.

2.1.1.7. Penggunaan Lahan

Penggunaan lahan terbagi menjadi Kawasan budidaya dan Kawasan lindung. Kawasan budidaya terdiri dari Kawasan peruntukan hutan produksi, pertanian, pertambangan, industry, pariwisata, pemukiman, pesisir dan pulau-pulau kecil. Berdasarkan data dari Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Barat yang terdapat dalam Kalimantan Barat Dalam Angka 2018, total luas Kawasan budidaya di Kalimantan Barat adalah 6.429.721. Ha dan Kawasan Non Budidaya 8.322.447 Ha

2.1.2. Demografi

Berdasarkan data Agregat Kependudukan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018, jumlah penduduk Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 semester II berjumlah sekitar 5.381.428 jiwa, dimana 51,44 persen atau 2.768.013 jiwa berjenis kelamin laki-laki dan 48,56 persen atau 2.613.415 jiwa adalah perempuan. Dengan luas wilayah 147.307 Km², maka kepadatan penduduk Kalimantan Barat tahun 2017 adalah 37 jiwa perkilometer persegi.

Dilihat dari sebaran penduduk, pada tahun 2017 Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terbesar yakni sebesar 6.108 jiwa per kilometer persegi. Sedangkan Kabupaten Kapuas Hulu merupakan daerah dengan tingkat kepadatan penduduk terkecil yakni sebesar 8 jiwa per kilometer persegi.

Tabel 2.2
Jumlah dan Kepadatan Penduduk Per Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Penduduk		Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
		Lk	Pr			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Sambas	323.027	310.155	633.182	6.716,52	94
2.	Mepawah	154.920	147.342	302.262	2.797,88	108
3.	Sanggau	251.238	232.743	483.981	12.857,80	38
4.	Ketapang	301.115	277.725	578.840	31.240,74	19
5.	Sintang	209.826	195.385	405.211	21.638,20	19
6.	Kapuas Hulu	122.937	115.860	238.797	29.842,00	8
7.	Bengkayang	147.951	136.884	284.835	5.075,48	56
8.	Landak	207.544	189.494	397.038	8.915,10	45
9.	Sekadau	108.159	101.578	209.737	5.444,20	39
10.	Melawi	118.732	111.023	229.755	10.640,80	22
11.	Kayong Utara	63.829	59.677	123.506	4.568,26	27
12.	Kubu Raya	309.173	293.133	602.306	6.958,22	87
13.	Kota Pontianak	330.554	327.923	658.477	107,80	6.108
14.	Kota Singkawang	119.008	114.493	233.501	504,00	463
Kalimantan Barat		2.768.013	2.613.415	5.381.428	147.307	37

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat, 2018

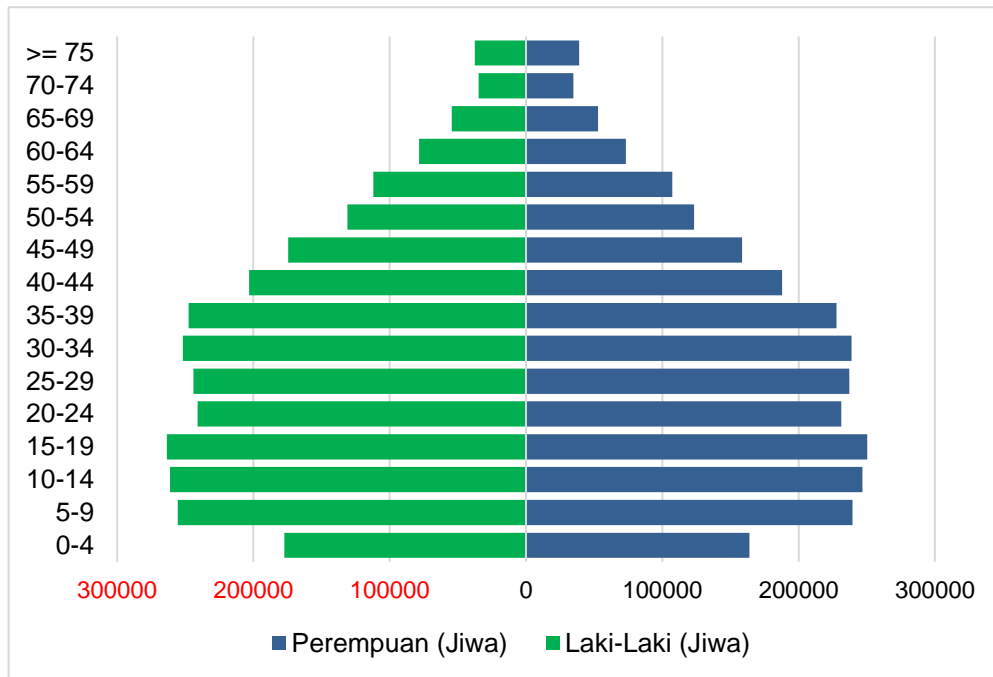
Berdasarkan kelompok umur, sebesar 70,30 persen atau sebanyak 3.783.249 jiwa merupakan kelompok penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tingginya penduduk usia produktif memberikan keuntungan untuk meningkatkan produktifitas masyarakat. Sementara itu untuk kelompok umur 0-14 tahun pada tahun 2017 yakni sebesar 24,99 persen atau sebanyak 1.344.662 jiwa, sedangkan untuk penduduk usia lanjut usia (kelompok 65 tahun ke atas) sebesar 4,71 persen atau sebanyak 253.517 jiwa. Informasi lebih lengkap terkait Jumlah Penduduk berdasarkan Kelompok Usia dapat dilihat pada tabel dan gambar piramida penduduk dibawah ini:

Tabel 2.3
Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Usia Per Kabupaten/Kota
di Kalimantan Barat Tahun 2017

Kelompok Usia	Jumlah Penduduk				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0-4	338.092	357.026	353.602	367.424	341.389
5-9	492.380	484.997	504.855	489.131	495.173
10-14	537.637	542.815	551.336	512.493	508.100
15-19	476.124	484.196	491.460	498.301	513.977
20-24	500.702	480.403	461.344	476.726	472.498
25-29	526.624	506.978	491.347	489.376	481.172
30-34	524.995	511.498	493.591	510.663	490.491
35-39	431.036	438.276	449.713	453.257	475.324
40-44	367.065	365.189	366.041	388.266	391.156
45-49	293.576	306.190	312.687	316.891	333.022
50-54	248.053	252.848	247.604	253.796	254.254
55-59	189.837	196.678	211.899	207.861	219.436
60-64	134.930	144.877	139.421	147.672	151.919
65-69	92.117	100.524	102.834	100.457	107.311
70-75	66.026	70.117	70.954	70.399	69.541
>75	62.727	70.720	75.297	66.241	76.665
Total	5.281.921	5.313.332	5.323.985	5.348.954	5.381.428

Sumber : SIPD-Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Prov. Kalbar

Gambar 2.6
Piramida Penduduk Kalimantan Barat Tahun 2017



Komposisi penduduk menurut agama diperlukan sebagai dasar untuk merencanakan penyediaan sarana dan prasarana peribadatan. Secara umum terdapat lima agama di Kalimantan Barat, yaitu Islam, Kristen, Katholik, Hindu, Budha, dan Khonghucu.

Berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Provinsi Kalimantan Barat tahun 2018 penduduk Kalimantan Barat berjumlah 5.381.428 seperti dalam tabel 2.2 di atas. Mayoritas penduduk Kalimantan Barat beragama Islam (57,93 persen), penganut agama Katholik (27,04 persen). Sedangkan penganut Kristen (14,42 persen), penganut Khonghucu (0,53 persen), Hindu (0,30 persen), dan Budha (0,01 persen). Rinciannya sebagai berikut:

Tabel 2.4
Penduduk Kalimantan Barat Berdasarkan Agama

No	Agama	Pemeluk (%)
(1)	(2)	(3)
1.	Islam	57,93
2.	Katholik	27,04
3.	Kristen	14,42
4.	Khonghucu	0,53

No	Agama	Pemeluk (%)
(1)	(2)	(3)
5.	Hindu	0,30
6.	Budha	0,01

Sumber: Kanwil Kemenag Kalimantan Barat, 2018

Untuk memfasilitasi kehidupan umat beragama, terdapat rumah ibadah. Rumah ibadah tersebut ada dalam kondisi baik, rusak ringan, dan rusak parah. Lebih jelasnya jumlah dan keadaan rumah ibadah di Kalimantan Barat seperti tabel berikut:

Tabel 2.5
Kondisi Rumah Ibadah di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Agama	Kondisi Rumah Ibadah			Jumlah
		Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Islam	2947	2431	1989	7367
2.	Katholik	2801	1936	865	5602
3.	Kristen	3000	450	660	4110
4.	Khonghucu	39	23	15	77
5.	Hindu		15	1	16
6.	Budha	519	317	180	1016

Sumber: Kanwil Kemenag Kalbar, 2018

2.1.3. Potensi Pengembangan Wilayah

1. Kawasan Budidaya

Berdasarkan RTRW Provinsi Kalimantan Barat Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2014-2034 Kawasan budidaya di Kalimantan Barat meliputi kawasan peruntukan hutan produksi; Kawasan peruntukan pertanian tanaman pangan; Kawasan peruntukan hortikultura; Kawasan peruntukan perkebunan; Kawasan peruntukan peternakan; Kawasan peruntukan perikanan; kawasan peruntukan pertambangan; Kawasan peruntukan industri; Kawasan peruntukan pariwisata; Kawasan peruntukan permukiman; dan Kawasan peruntukan pertahanan.

a. Kawasan Peruntukan Hutan Produksi

Pengembangan kawasan peruntukan hutan produksi di Provinsi Kalimantan Barat terdiri atas;

1. Hutan Produksi Terbatas (HPT) seluas kurang lebih 2.116.885,26 hektar yang tersebar di Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Landak, Sanggau, Sekadau, Sintang, Melawi, Kapuas Hulu, dan Ketapang;
2. Hutan produksi tetap (HP) seluas kurang lebih 2.097.484,16 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan di seluruh kabupaten; dan
3. Hutan produksi yang dapat dikonversi (HPK) seluas kurang lebih 206.098,54 hektar yang tersebar di Kota Singkawang dan Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, Ketapang, Sanggau, Sintang, Melawi, dan Kapuas Hulu.

Di dalam hutan produksi terdapat terdapat hutan desa dan hutan kemasyarakatan meliputi;

1. Hutan Desa Sungai Besar di Kabupaten Ketapang;
2. Hutan Desa Sungai Pelang di Kabupaten Ketapang;
3. Hutan Desa Laman Satong di Kabupaten Ketapang;
4. Hutan Desa Pematang Gadung di Kabupaten Ketapang;
5. Hutan Desa Sebadak Raya di Kabupaten Ketapang;
6. Hutan Desa Jasa di Kabupaten Sintang;
7. Hutan Desa Rasau di Kabupaten Sintang;
8. Hutan Desa Manua Sadap di Kabupaten Kapuas Hulu;
9. Hutan Desa Nanga Betung di Kabupaten Kapuas Hulu;
10. Hutan Desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu;
11. Hutan Desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu; dan

12. Hutan Kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau.

b. Kawasan Peruntukan Pertanian Tanaman Pangan

Pengembangan kawasan peruntukan lahan pertanian pangan berkelanjutan di Provinsi Kalimantan Barat seluas sekitar 542.455 hektar yang tersebar di seluruh kabupaten/kota dan Kawasan Perlindungan cadangan pertanian pangan berkelanjutan sebesar 460.000 hektar yang diarahkan tersebar diseluruh Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Barat.

c. Kawasan Peruntukan Hortikultura

Pengembangan Kawasan Hortikultura berada di kawasan pertanian lahan kering dan lahan basah yang diarahkan tersebar diseluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.

d. Kawasan peruntukan perkebunan

Pengembangan kawasan peruntukan perkebunan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang dan diarahkan diseluruh Kabupaten/Kota dengan tanaman komoditi unggulan berupa Kelapa Sawit, Karet, Kelapa, Lada, dan Kakao.

e. Kawasan peruntukan peternakan

Pengembangan kawasan peruntukan peternakan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kota Singkawang yang khusus untuk peternakan unggas, sedangkan untuk peternakan ruminansa maupun yang non ruminansa yang berada berada di seluruh kabupaten di wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

f. Kawasan peruntukan perikanan

Pengembangan kawasan peruntukan perikanan di Provinsi Kalimantan Barat berada di Kabupaten Sambas Kecamatan Pemangkat dan sekitarnya; Kota Singkawang di Kecamatan Singkawang Utara; Kabupaten Bengkayang di Kecamatan Sungai Raya dan Sungai Raya Kepulauan; Kabupaten Mempawah di Kecamatan Mempawah Hilir dan Segedong; Kabupaten Kubu Raya di Kecamatan Sungai Kakap dan Teluk Pakedai; Kabupaten Kayong Utara di

Kecamatan Pulau Maya dan Kepulauan Karimata; Kabupaten Ketapang di Kecamatan Matan Hilir Utara, Delta Pawan dan sekitarnya, serta Kendawangan; dan Kabupaten Kapuas Hulu di Kecamatan Jongkong dan sekitarnya.

Untuk menunjang pengembangan kawasan peruntukan perikanan, keluatan, dan pulau-pulau kecil adalah :

1. Pelabuhan perikanan nusantara (PPN) Pemangkat di Kabupaten Sambas yang direncanakan menjadi pelabuhan perikanan samudera (PPS);
2. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Teluk Batang di Kabupaten Kayong Utara yang direncanakan menjadi PPN;
3. Pelabuhan perikanan pantai (PPP) Sungai Rengas di Kabupaten Kubu Raya;
4. Pelabuhan pendaratan ikan (PPI) Mempawah di Kabupaten Mempawah yang direncanakan menjadi PPP; dan
5. PPI yang tersebar di:
 - a.) Kabupaten Sambas sebanyak 6 (enam) PPI;
 - b.) Kota Singkawang sebanyak 2 (dua) PPI;
 - c.) Kabupaten Bengkayang sebanyak 8 (delapan) PPI;
 - d.) Kabupaten Mempawah sebanyak 9 (sembilan) PPI;
 - e.) Kota Pontianak sebanyak 1 (satu) PPI;
 - f.) Kabupaten Kubu Raya sebanyak 8 (delapan) PPI;
 - g.) Kabupaten Kayong Utara sebanyak 11 (sebelas) PPI; dan
 - h.) Kabupaten Ketapang sebanyak 3 (tiga) PPI;
6. Rencana PPI Putussibau Kabupaten Kapuas Hulu.

g. Kawasan peruntukan pertambangan

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertambangan di Provinsi Kalimantan Barat yang merupakan bagian dari kegiatan usaha pertambangan berupa KPP mineral, batubara, minyak dan gas bumi, dan/atau panas bumi. Kawasan peruntukan pertambangan berada di Kota Singkawang dan diarahkan di seluruh kabupaten.

h. Kawasan peruntukan industri

Pengembangan kawasan peruntukan industri di Provinsi Kalimantan Barat :

1. Kawasan industri berada di daerah Semparuk, Singkawang, Sungai Raya (Kabupaten Bengkayang); Sungai Raya Kepulauan, Sungai Kunyit, Mandor, Siantan, Pontianak, Sungai Raya (Kabupaten Kubu Raya); Tayan, Teluk Batang, Matan Hilir Selatan, Kendawangan, Sintang, dan Badau; dan
2. Kawasan industri khusus pertambangan di Sungai Kunyit, Tayan, Kendawangan, dan Tanjung Api.

i. Kawasan peruntukan pariwisata

Pengembangan Kawasan pariwisata di Provinsi Kalimantan Barat berada di

1. Kawasan Metropolitan Pontianak dan sekitarnya;
2. Kawasan Pantai Pasir Panjang, Kota Singkawang dan sekitarnya;
3. Sekitar (di luar kawasan) CA Gunung Niyut-Penrinsen;
4. Danau Lait dan sekitarnya;
5. Gunung Palung dan sekitarnya;
6. Bukit Baka - Bukit Raya;
7. Sekitar (di luar kawasan) CAL Karimata dan; dan
8. Danau Sentarum dan sekitarnya.

j. Kawasan peruntukan permukiman

Pengembangan kawasan peruntukan permukiman meliputi :

1. Kawasan permukiman perkotaan berada di kawasan perkotaan ibukota provinsi, ibukota kabupaten dan kota, ibukota kecamatan dan desa yang sudah menampakkan gejala perkotaan; dan
2. Kawasan permukiman perdesaan berada di luar kawasan perkotaan yang didominasi oleh penggunaan pertanian lahan basah, pertanian lahan kering, dan perkebunan.

k. Kawasan peruntukan pertahanan.

Pengembangan Kawasan Peruntukan Pertahanan yang dimanfaatkan untuk kegiatan pertahanan baik wilayah darat, laut maupun udara diseluruh wilayah Provinsi Kalimantan Barat.

2. Kawasan Strategis Provinsi

Kawasan Strategis Provinsi adalah wilayah yang penataan ruangnya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup provinsi terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan yang meliputi:

a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi;

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi meliputi :

1. Kawasan Metropolitan Pontianak meliputi Kota Pontianak dan sekitarnya dengan sektor unggulan perdagangan dan jasa, industri, dan pariwisata;
2. Kawasan Pelabuhan Kecamatan Sungai Kunyit dan sekitarnya dengan sektor unggulan industri;
3. Kawasan Industri Tayan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
4. Kawasan Industri Semparuk dengan sektor unggulan pertanian dan industri;

5. Kawasan Industri Tanjung Api dengan sektor unggulan pertambangan;
 6. Kawasan Industri Mandor dengan sektor unggulan karet, kelapa sawit, dan pertambangan;
 7. Kawasan Industri Matan Hilir Selatan dan Kendawangan dengan sektor unggulan pertambangan, perkebunan, dan industri;
 8. Kawasan pertambangan bauksit di Kabupaten Sanggau, Ketapang, Landak, dan Mempawah dengan sektor unggulan pertambangan;
 9. Kawasan pertambangan batubara di Kabupaten Melawi, Sintang, dan Kapuas Hulu dengan sektor unggulan pertambangan;
 10. Kawasan Pariwisata Pasir Panjang dan sekitarnya di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang dengan sektor unggulan pariwisata, industri, dan perikanan;
 11. Kawasan Manismata - Sukaramai dengan sektor unggulan perkebunan dan industri; dan
 12. Kawasan pesisir dan pulau-pulau kecil di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang dengan sektor unggulan perikanan dan pariwisata.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi.**

Kawasan strategis dari sudut kepentingan pendayagunaan sumber daya alam dan/atau teknologi tinggi, yaitu kawasan pertambangan mineral radioaktif di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Melawi dengan sektor unggulan pertambangan.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan hidup meliputi:

1. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Palung di Kabupaten Kayong Utara dan Kabupaten Ketapang;

2. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Raya-Pasi di Kota Singkawang dan Kabupaten Bengkayang;
3. Kawasan Strategis Ekosistem Gunung Niyut-Penrinsen di Kabupaten Bengkayang, Landak, dan Sanggau;
4. Kawasan Strategis Ekosistem Danau Sentarum di Kabupaten Kapuas Hulu, dan
5. Kawasan Rawan Bencana Alam Gayung Bersambut di Kabupaten Sambas dan Kota Singkawang.

3. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah wilayah yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, kawasan lindung provinsi yang diarahkan ke seluruh Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari :

- a. Kawasan yang memberikan perlindungan terhadap kawasan bawahannya yang berupa kawasan hutan lindung;
- b. Kawasan perlindungan setempat yang terdiri atas :
 1. Sempadan pantai tersebar di daerah pantai di Kota Singkawang dan di enam kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang dengan lebar jalur paling sedikit 100 (seratus) meter dari titik pasang air laut tertinggi ke arah darat.
 2. Sempadan sungai terdiri atas:
 - Sempadan sungai besar yang terdapat di:
 - a. WS Sambas, yaitu Sungai Paloh, Sambas Besar, Bantan, Kumba, Sambas Kecil, Sebangkau, Selakau, dan Terusan Senujuh;

- b. WS Mempawah, yaitu Sungai Raya, Duri, Mempawah, dan Sungai Peniti;
 - c. WS Kapuas, yaitu Kapuas Kecil, Mandor, Landak, Menyuke, Behe, Pede, Ambawang, Kapuas, Tayan, Mengkiang, Kembayan, Sekayam, Sekadau, Belitang, Melawi, Kayan, Belimbing, Pinoh, Sayan, Keruas, Ella, Mentatai, Serawai, Ambalau, Ketungau, Silat, Tawang, Empanang, Embaloh Leboyan, Jongkong, Bunut, Embaloh, Palin, Mandai, Sibau, Mendalam, Keriyau (Kapuas Hulu), Mendawak, Labai, Lida, Kualan, Kerawang, dan Sungai Durian Sebatang;
 - d. WS Pawan, yaitu Sungai Simpang, Semandang, Matan, Tolak, Pawan, Kayung, Tayap, Laur, Jekah, Keriyau (Ketapang), Kerabai, Biya, dan Sungai Pesaguan; dan;
 - e. WS Kendawangan–Jelai, yaitu Sungai Kendawangan, Membuluh, Air Hitam Besar, Berais, Jelai, dan Sungai Kawah;
 - Sempadan kecil yang terdapat di seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Barat.
3. Kawasan sekitar danau atau waduk tersebar di Kota Singkawang dan di 5 (lima) kabupaten yaitu Sambas, Kubu Raya, Sanggau, Sintang, Kapuas Hulu, dan Ketapang.
- c. kawasan suaka alam, pelestarian alam, dan cagar budaya yang berupa kawasan cagar budaya dan ilmu pengetahuan;
 - d. Kawasan rawan bencana alam yang terdiri atas:
 - 1. Kawasan rawan gelombang pasang tersebar di Kota Pontianak, Kota Singkawang, dan di 6 (enam) kabupaten yaitu Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang yang merupakan bagian dari wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 2. Kawasan rawan banjir tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah di sekitar sungai besar.

3. Kawasan rawan tanah longsor tersebar di seluruh kabupaten/kota pada daerah-daerah yang kondisi topografinya berupa perbukitan-pegunungan, kecuali Kota Pontianak.
- e. Kawasan lindung geologi yang terdiri atas:
1. Kawasan rawan abrasi tersebar di daerah pesisir dan/atau pulau-pulau kecil Kota Singkawang, Kabupaten Sambas, Bengkayang, Mempawah, Kubu Raya, Kayong Utara, dan Ketapang.
 2. Kawasan sekitar mata air tersebar di seluruh kabupaten/kota.
- f. Kawasan lindung lainnya yang terdiri atas:
1. Kawasan terumbu karang tersebar di Kabupaten Bengkayang, Kayong Utara, dan Ketapang.
 2. Kawasan kebun raya berada di Kabupaten Sambas.
- Di dalam kawasan hutan lindung terdapat kawasan hutan desa dan hutan kemasyarakatan untuk pemanfaatan jasa lingkungan meliputi:
- a. Hutan desa Beringin Rayo di Kabupaten Ketapang;
 - b. Hutan desa Tanjung Beulang di Kabupaten Ketapang;
 - c. Hutan desa Dusun Besar di Kabupaten Kayong Utara;
 - d. Hutan desa Dusun Kecil di Kabupaten Kayong Utara;
 - e. Hutan desa Tanjung Satai di Kabupaten Kayong Utara;
 - f. Hutan desa Satai Lestari di Kabupaten Kayong Utara;
 - g. Hutan desa Kemboja di Kabupaten Kayong Utara;
 - h. Hutan desa Ensaid Panjang di Kabupaten Sintang;
 - i. Hutan desa Ujung Said di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - j. Hutan desa Nanga Lauk di Kabupaten Kapuas Hulu;
 - k. Hutan desa Penepian Raya di Kabupaten Kapuas Hulu;

- l. Hutan desa Tanjung di Kabupaten Kapuas Hulu;
- m. Hutan desa Nanga Jemah di Kabupaten Kapuas Hulu;
- n. Hutan desa Sri Wangi di Kabupaten Kapuas Hulu;
- o. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sanggau; dan
- p. Hutan kemasyarakatan di Kabupaten Sekadau.

2.1.4. Wilayah Rawan Bencana

Masalah menurunnya kualitas lingkungan di Kalimantan Barat menjadi fenomena yang kian mengawatirkan. Bencana lingkungan terus terjadi semakin intensif. Hingga tahun 2017 bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, angin puting beliung dan tanah longsor semakin meningkat intensitasnya. Bencana banjir serta kebakaran hutan dan lahan hampir terjadi di semua Kabupaten/ Kota. Telah diidentifikasi sebanyak 182 Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat sebagai daerah rawan kebakaran hutan dan lahan, sebanyak 190 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi banjir dan sebanyak 72 Desa/Kelurahan termasuk dalam daerah potensi longsor.

Tabel 2.6

Jumlah Desa/ Kelurahan Rawan Kebakaran Hutan, Banjir dan Longsor di Kalimantan Barat

No.	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla	Desa/ Kelurahan Potensi Banjir	Desa/ Kelurahan Potensi Longsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Kota Pontianak	3	3	0
2.	Kota Singkawang	17	7	2
3.	Kab. Kubu Raya	18	3	0
4.	Kab. Kapuas Hulu	12	12	2
5.	Kab. Bengkayang	10	5	11
6.	Kab. Sambas	9	6	1
7.	Kab. Kayong Utara	8	8	2
8.	Kab. Mempawah	5	20	7
9.	Kab. Landak	3	27	9
10.	Kab. Sanggau	3	5	6
11.	Kab. Sekadau	14	8	2
12.	Kab. Melawi	1	22	0

No.	Kabupaten/ Kota	Desa/ Kelurahan Potensi Karhutla	Desa/ Kelurahan Potensi Banjir	Desa/ Kelurahan Potensi Longsor
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
13.	Kab. Ketapang	45	26	13
14.	Kab. Sintang	34	38	7
Jumlah		182	190	72

Sumber : SIPD - BPBD Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Banjir dan tanah longsor menjadi indikasi menurunnya daya dukung lingkungan yaitu makin meningkatnya lahan kritis dan makin menyempitnya ruang terbuka sebagai daerah resapan. Ditambah lagi persoalan rob yang melanda beberapa kawasan pemukiman akibat air pasang yang cenderung semakin meningkat. Kerusakan dan bencana lingkungan memperburuk kondisi kemiskinan yang jumlahnya masih cukup tinggi.

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Gambaran kondisi aspek kesejahteraan masyarakat di Kalimantan Barat diuraikan dalam fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi dan fokus kesejahteraan sosial sebagai berikut.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

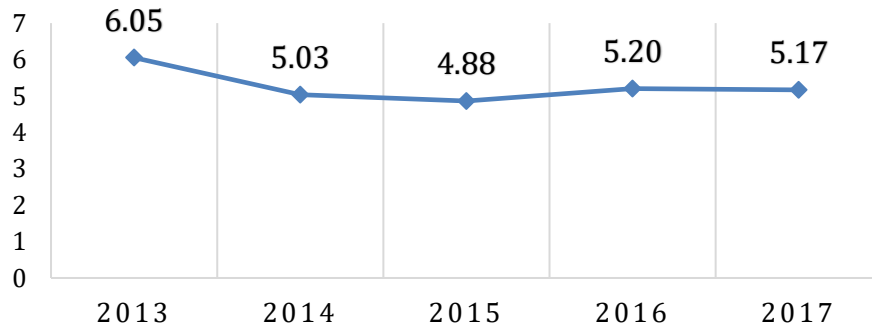
Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi diukur dari pertumbuhan ekonomi, PDRB Per Kapita, Indeks Gini, laju inflasi, tingkat kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia dan Tingkat Pengangguran Terbuka.

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kontribusi dari pertumbuhan berbagai macam sektor ekonomi, yang secara tidak langsung menggambarkan tingkat perubahan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi dihitung dari peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan setiap tahunnya. Selama kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat rata-rata tumbuh 5,3 persen tiap tahunnya dengan pertumbuhan tertinggi pada tahun 2013 sebesar 6,05 persen dan terendah pada tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Pada tahun 2017, pertumbuhan

ekonomi Kalimantan Barat tumbuh sebesar 5,17 persen lebih rendah dari pertumbuhan ekonomi tahun sebelumnya sebesar 5,20 persen.

Gambar 2.7.
Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Selama tahun 2013-2017, kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi relatif tinggi adalah Kubu Raya (rata-rata 6,39% per tahun); diikuti Sekadau (rata-rata 5,91% per tahun) dan Ketapang (rata-rata 5,87% per tahun). Sedangkan kabupaten/kota yang mengalami laju pertumbuhan ekonomi yang relatif rendah (di bawah rata-rata Kalbar) adalah Sanggau (rata-rata 4,20% per tahun), Bengkayang (rata-rata 4,70% per tahun), dan Melawi (rata-rata 4,72% per tahun).

Tabel 2.7
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/kota
di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	6,18	5,40	4,76	5,24	5,13
2	Bengkayang	5,90	4,02	3,96	5,15	5,66
3	Landak	5,23	4,93	5,11	5,28	5,21
4	Mempawah	5,44	5,67	5,62	5,99	5,93
5	Sanggau	5,98	3,26	3,68	5,34	4,50
6	Ketapang	4,55	2,76	5,53	7,97	7,21
7	Sintang	6,47	5,37	4,57	5,28	5,33

No	Kabupaten/Kota	Pertumbuhan Ekonomi (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
8	Kapuas Hulu	5,23	3,98	4,66	5,28	5,39
9	Sekadau	6,56	6,09	5,75	5,93	5,85
10	Melawi	4,85	4,73	4,70	4,75	4,79
11	Kayong Utara	5,26	5,66	5,03	5,98	5,42
12	Kubu Raya	6,66	6,28	6,35	6,37	6,56
13	Kota Pontianak	7,86	5,54	4,99	5,08	5,05
14	Kota Singkawang	6,62	6,62	6,17	5,17	5,42

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Selama kurun waktu 2013-2017, dari 17 (tujuh belas) sektor perekonomian penyusun PDRB di Kalimantan Barat, terdapat 4 (empat) sektor dengan kontribusi terbesar, yakni Sektor Pertanian, Kehutanan dan Perikanan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 21,08 persen; sektor Industri Pengolahan dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 16,18 persen, sektor Perdagangan Besar, Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 14,49 persen; dan sektor Konstruksi dengan rata-rata kontribusi per tahun sebesar 12,40 persen.

Tabel 2.8
Distribusi PDRB Atas Dasar Berlaku Tahun 2013-2017 (%)

NO	SEKTOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	22,77	21,56	20,54	20,21	20,30
2	Pertambangan dan Penggalian	5,03	4,79	4,90	5,61	5,40
3	Industri Pengolahan	16,33	16,48	15,78	16,12	16,21
4	Pengadaan Listrik dan Gas	0,06	0,06	0,08	0,09	0,10
5	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Daur Ulang	0,13	0,13	0,12	0,11	0,12
6	Konstruksi	11,45	12,21	13,10	12,44	12,80
7	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	14,52	14,51	14,81	14,47	14,13
8	Transportasi dan Pergudangan	4,22	4,30	4,40	4,52	4,57
9	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	2,29	2,31	2,38	2,37	2,31
10	Informasi dan Komunikasi	3,30	3,30	3,36	3,43	3,73
11	Jasa Keuangan dan Asuransi	3,61	3,63	3,56	3,64	3,69
12	Real Estate	3,08	3,04	3,01	2,96	2,88
13	Jasa Perusahaan	0,45	0,45	0,47	0,46	0,44

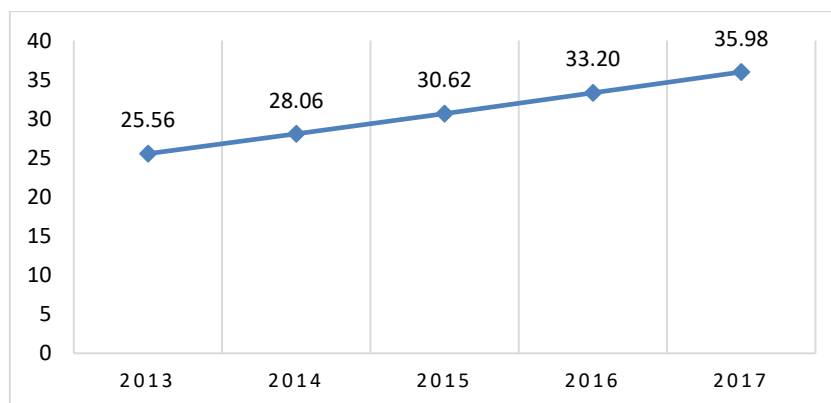
NO	SEKTOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
14	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,80	6,29	6,67	6,94	6,94
15	Jasa Pendidikan	4,44	4,42	4,30	4,20	4,01
16	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	1,49	1,49	1,51	1,45	1,40
17	Jasa Lainnya	1,03	1,03	1,01	0,99	0,98
PDRB		100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

b. PDRB Per Kapita

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita adalah hasil bagi antara nilai PDRB dengan jumlah penduduk periode tertentu. Nilai PDRB Per Kapita digunakan untuk mengetahui nilai PDRB per kepala atau per satuan penduduk di suatu wilayah. Nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan, pada tahun 2017 nilai PDRB Per Kapita Kalimantan Barat menunjukkan angka Rp 35,98 Juta meningkat 8,37 persen dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar Rp 33,20 Juta.

Gambar 2.8
Produk Domestik Regional Bruto per Kapita Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017 (Juta Rp)



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2017, *) Angka Sementara

c. Indeks Gini

Indeks Gini merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan secara menyeluruh. Nilai Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1. Apabila nilai Indeks Gini bernilai 0 berarti pemerataan sempurna sedangkan apabila bernilai 1 berarti terjadi ketimpangan sempurna.

Selama periode 2013-2017, nilai Indeks Gini Kalimantan Barat menunjukkan perbaikan dilihat dari nilai indeks yang bergerak menjauh dari angka 1. Untuk perhitungan bulan Maret dari tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami penurunan sebesar 17,5 persen atau turun 0,07 poin. Sedangkan perhitungan bulan September dari tahun 2013 sampai 2017 mengalami penurunan sebesar 13,16 persen atau 0,05 poin.

Tabel 2.9
Indeks Gini Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

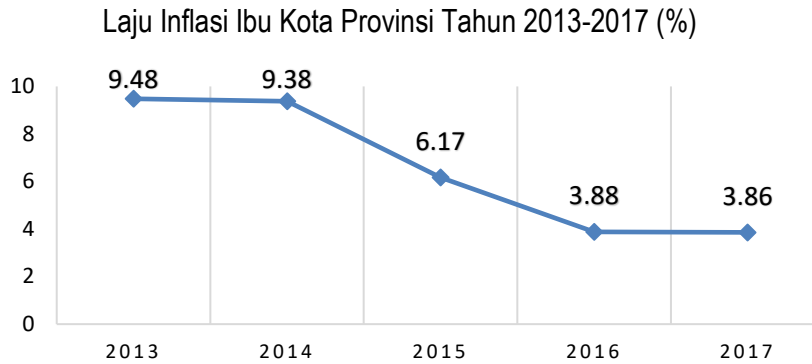
Semesteran	2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6
Maret	0,396	0,391	0,334	0,341	0,327
September	0,384	0,402	0,330	0,331	0,329

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat

d. Laju Inflasi

Laju Inflasi merupakan kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum.

Laju inflasi Kalimantan Barat diukur dari laju inflasi ibu kota provinsi yakni laju inflasi Kota Pontianak. Selama periode 2013-2017 laju inflasi Kota Pontianak cukup terkendali. Pada tahun 2013 inflasi Kota Pontianak sebesar 9,48 persen turun menjadi 3,86 persen pada tahun 2017.

Gambar 2.9

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

e. Tingkat Kemiskinan

Persentase penduduk miskin merupakan persentase penduduk suatu wilayah yang berada di bawah garis kemiskinan. Persentase penduduk miskin yang tinggi menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di suatu wilayah juga tinggi.

Selama periode 2013-2017, persentase penduduk miskin terus mengalami penurunan. Pada bulan Maret 2013 persentase penduduk miskin Kalimantan Barat sebesar 8,24 persen turun menjadi 7,88 persen pada bulan Maret 2017. Sedangkan untuk periode September 2013, persentase penduduk miskin di Kalimantan Barat adalah sebesar 8,74 persen turun menjadi 7,86 persen pada bulan September 2017. Jika dibandingkan antara periode Maret 2017 dengan periode September 2017, persentase penduduk miskin juga mengalami penurunan sebesar 0,02 poin.

Sementara itu, selama periode 2013-2017 jika dibandingkan, persentase penduduk miskin di perdesaan jauh lebih besar yakni rata-rata 4 hingga 6 persen per tahun dibandingkan dengan persentase penduduk miskin di perkotaan rata-rata sebesar 9 hingga 10 persen per tahun.

Tabel 2.10
Perkembangan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017

Indikator	2013		2014		2015		2016		2017	
	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September	Maret	September
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>
Persentase Penduduk Miskin (%) (Kota+Desa)	8,24	8,74	8,54	8,07	8,03	8,44	7,87	8,00	7,88	7,86
Kota	5,30	5,68	5,76	5,47	5,62	6,00	5,16	4,97	4,88	5,25
Desa	9,51	10,07	9,76	9,20	9,09	9,51	9,11	9,38	9,28	9,09
Garis Kemiskinan Rp/kapita/Bulan) Kota+Desa	248.592	270.305	282.835	298.212	323.615	340.413	347.880	363.027	377.219	396.842
Kota	264.149	279.331	291.533	307.789	334.575	347.516	353.143	366.477	379.187	401.588
Desa	242.322	265.898	279.049	294.044	318.793	337.288	345.480	360.940	375.621	394.313
Jumlah penduduk miskin (Jiwa) (Kota+Desa)	369.010	407.340	401.510	381.920	383.700	405.510	381.350	390.320	387.430	388.810
Kota	71.750	80.370	82.050	78.530	82.050	88.150	78.290	75.980	76.160	83.890
Desa	297.260	326.970	319.460	303.380	301.650	317.360	303.060	314.340	311.270	304.920

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2018

Persentase penduduk miskin di Kabupaten dan Kota se Kalimantan Barat selama periode 2013-2017 digambarkan melalui tabel 2.11. Pada tahun 2017 persentase penduduk miskin tertinggi berada di Kabupaten Melawi yakni sebesar 12,54 persen, sedangkan persentase terendah berada di Kabupaten Sanggau sebesar 4,52 persen.

Tabel 2.11
Persentase Penduduk Miskin Berdasarkan Kabupaten/kota
di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Lokasi	Persentase Penduduk Miskin (%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	9,90	9,46	9,42	8,54	8,59
2	Bengkayang	8,01	7,20	6,94	7,46	7,51
3	Landak	14,18	13,71	13,51	12,32	12,23
4	Mempawah	6,30	6,00	5,52	5,75	5,94
5	Sanggau	4,71	4,47	4,57	4,51	4,52
6	Ketapang	12,85	11,60	11,72	10,99	11,02
7	Sintang	10,09	9,11	9,33	10,07	10,20
8	Kapuas Hulu	11,11	10,03	9,66	9,82	9,45
9	Sekadau	6,93	6,31	6,50	6,14	6,46
10	Melawi	13,70	12,40	12,57	12,63	12,54
11	Kayong Utara	10,87	9,55	9,84	10,19	9,89

No	Lokasi	Persentase Penduduk Miskin				
		(%)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
12	Kubu Raya	6,04	5,45	5,22	5,04	5,26
13	Kota Pontianak	5,56	5,15	5,22	5,55	5,31
14	Kota Singkawang	6,50	5,88	5,76	5,33	5,42

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

f. Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) menunjukkan persentase penduduk angkatan kerja yang tidak bekerja. TPT Kalimantan Barat periode Februari 2017 mengalami penurunan sebesar 0,36 poin dibandingkan periode Februari 2016. Sementara TPT periode Agustus 2017 mengalami peningkatan 0,13 poin dibandingkan TPT periode Agustus tahun sebelumnya.

Tabel 2.12
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten/Kota
Se Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	3,03	3,70	4,85	n.a	4,24
2	Bengkayang	2,30	3,74	3,15	n.a	2,40
3	Landak	3,24	3,43	5,81	n.a	2,03
4	Mempawah	5,66	5,57	7,12	n.a	6,72
5	Sanggau	0,78	3,25	5,13	n.a	3,27
6	Ketapang	4,70	2,06	4,29	n.a	3,97
7	Sintang	2,24	3,06	2,48	n.a	1,93
8	Kapuas Hulu	2,09	2,02	3,00	n.a	2,21
9	Sekadau	1,44	0,31	2,97	n.a	0,64
10	Melawi	3,99	2,46	3,03	n.a	2,11
11	Kayong Utara	4,66	4,08	3,76	n.a	5,00
12	Kubu Raya	9,26	6,18	6,11	n.a	5,91
13	Kota Pontianak	6,12	7,05	9,44	n.a	9,36
14	Kota Singkawang	4,59	8,22	6,12	n.a	8,08

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Pada tahun 2013 Kabupaten Sanggau merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 0,78 persen sedangkan Kabupaten Kubu Raya merupakan daerah

dengan tingkat pengangguran tertinggi sebesar 9,26 persen. Sementara itu, pada tahun 2017 Kabupaten Sekadau merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka terendah yakni sebesar 0,64 persen, sedangkan Kota Pontianak merupakan daerah dengan tingkat pengangguran terbuka tertinggi sebesar 9,36 persen.

Tabel 2.13
Perkembangan Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

Periode	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Februari	3,09	2,53	4,78	4,58	4,22
Agustus	4,03	4,04	5,15	4,23	4,36

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

g. Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.

Selama periode 2013-2017, IPM Provinsi Kalimantan Barat terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 IPM Kalimantan Barat sebesar 64,30 poin meningkat sebesar 1,96 poin atau 3,05 persen pada tahun 2017 menjadi sebesar 66,26 poin. Meskipun terus mengalami peningkatan, status pembangunan manusia di Provinsi Kalimantan Barat masih berstatus sedang.

Untuk IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat selama kurun waktu 2013 hingga 2017 seluruhnya mengalami peningkatan dan sejak tahun 2015 seluruh Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat status pembangunan manusianya keseluruhannya telah masuk kategori sedang, terkecuali untuk Kota Pontianak dan Kota Singkawang yang status pembangunan manusianya masuk kategori tinggi.

Tabel 2.14
Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia
di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

No	Wilayah	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Sambas	62,47	63,28	64,14	64,94	65,92
2	Bengkayang	63,99	64,40	64,65	65,45	65,99
3	Landak	62,72	63,59	64,12	64,58	64,93
4	Mempawah	62,09	62,78	63,37	63,84	64,00
5	Sanggau	61,72	62,06	63,05	63,90	64,61
6	Ketapang	62,85	63,27	64,03	64,74	65,71
7	Sintang	62,64	63,19	64,18	64,78	65,16
8	Kapuas Hulu	62,63	62,90	63,73	63,83	64,18
9	Sekadau	61,02	61,98	62,34	62,52	63,04
10	Melawi	62,27	62,89	63,78	64,25	64,43
11	Kayong Utara	57,92	58,52	60,09	60,87	61,52
12	Kubu Raya	63,94	64,52	65,02	65,54	66,31
13	Kota Pontianak	75,98	76,63	77,52	77,63	77,93
14	Kota Singkawang	69,13	69,84	70,03	70,10	70,25
Kalimantan Barat		64,30	64,89	65,59	65,88	66,26

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018

h. Konflik Sosial

Faktor keamanan dan ketertiban masyarakat sangat berpengaruh dalam mendorong percepatan pembangunan di suatu daerah. Kondusifitas di suatu wilayah juga berperan dalam mendorong datangnya investasi di wilayah tersebut. Selama periode 2013-2018, kondisi keamanan dan ketertiban umum di Kalimantan Barat cukup kondusif dengan digambarkan tidak terdapatnya kasus konflik sosial di masyarakat.

i. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup

IKLH sebagai indikator pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia merupakan perpaduan antara konsep IKL dan konsep EPI. IKLH dapat digunakan untuk menilai kinerja program perbaikan kualitas lingkungan hidup. IKLH juga dapat digunakan sebagai bahan informasi dalam mendukung

proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup

Kriteria yang digunakan untuk menghitung IKLH adalah : (1) Kualitas Air, yang diukur berdasarkan parameter-parameter TSS, DO, BOD,COD, Total Fosfat, Fecal Coli, dan Total Coliform; (2) Kualitas udara, yang diukur berdasarkan parameter-parameter : SO₂ dan NO₂; dan (3) Kualitas tutupan lahan yang diukur berdasarkan luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 2.15.
Perkembangan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,1	68,3	67,1	66,1	

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Fokus Kesejahteraan Sosial digambarkan melalui indikator Jumlah Penduduk Usia Sekolah, Angka Melek Aksara, angka rata-rata lama sekolah, angka usia harapan hidup dan rasio penduduk yang bekerja.

a. Jumlah Penduduk Usia Sekolah

Gambaran umum tentang akses penduduk terhadap berbagai jenjang dan jenis pendidikan di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.16. Pada tabel tersebut, penduduk pada jenjang Sekolah Dasar memiliki jumlah yang paling banyak dibanding dengan jenjang sekolah lainnya. Apabila diperhatikan penduduk usia sekolah yang bersekolah dijenjang yang selanjutnya penduduk

itu sekolah tampak bahwa angka paling besar terjadi pada sekolah dasar sederajat. Sementara jumlah penduduk usia sekolah yang bersekolah di jenjang yang selanjutnya mereka sekolah yang paling kecil jumlahnya adalah jenjang pendidikan menengah.

Tabel 2.16
Jumlah Penduduk Usia Sekolah di Kalimantan Barat 2017

Jenjang Pendidikan	Keterangan	Jumlah
TK/PAUD	Usia 3-6 tahun	392,870
	Bersekolah di TK/APUD	229,676
SD/MI sederajat	Usia 7-12 tahun	581,000
	Bersekolah di SD/MI sederajat	656,561
	Usia 7-12 tahun bersekolah di SD/MI Sederajat	545,301
SMP/MTs sederajat	Usia 13-15 tahun	271,800
	Bersekolah di SMP/MTs sederajat	279,166
	Usia 13-15 tahun bersekolah di SMP/MTs Sederajat	199,634
SMA/MA sederajat	Usia 16-18 tahun	262,700
	Bersekolah di SMA/MA sederajat	196,995
	Usia 16-18 tahun bersekolah di SMA/MA Sederajat	141,355

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

b. Angka Melek Aksara

Angka melek aksara berdasarkan BPS yaitu persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis serta mengerti sebuah kalimat sederhana dalam hidupnya sehari-hari. Angka melek aksara merepresentasikan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat pada umumnya. Korelasi yang didapatkan dari perhitungan persentase ini adalah semakin besar nilai angka melek aksara maka semakin banyak masyarakat yang mampu membaca dan menulis. Tabel 2.17 menyajikan Angka Melek aksara di Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.17
Angka Melek Aksara Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	Angka Melek Aksara	Persen	92.75	93.15	91.81	93.28	93.25	-0.125

Sumber : SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalbar (Data BPS), 2018

Angka melek aksara Provinsi Kalimantan Barat menunjukkan tren negatif, dengan pertumbuhan rata-rata per tahunnya sebesar -0,125 persen pada periode 2013 – 2017. Pada tahun 2013 – 2014, angka melek huruf di Kalimantan Barat sebesar mengalami kenaikan 0,4 persen, namun kurun waktu 2014-2015 terjadi penurunan sebesar 1,34 persen. Pada tahun 2016, angka melek huruf kembali meningkat sebesar 1.47% persen, kemudian mengalami penurunan sebesar 0.03 persen pada 2017. Persentase angka melek huruf yang cukup besar ini menunjukkan adanya meningkatnya kesadaran masyarakat akan pendidikan yang lebih baik.

Sebaran angka melek aksara setiap kabupaten/kota Provinsi Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.18. Pada tahun 2017 angka melek aksara paling tinggi ada pada Kota Pontianak sebesar 96,43 persen, sedangkan paling rendah ada pada Kabupaten Mempawah, yakni sebesar 90,90 persen. Pada beberapa kabupaten, angka melek aksara ini mengalami fluktuasi, namun pada Kabupaten Ketapang, Sekadau dan Melawi angka melek huruf di kabupaten tersebut terus mengalami kenaikan walaupun persentasenya relatif kecil. Semua ini menunjukkan bahwa angka buta huruf penduduk Kalimantan Barat relatif masih besar.

Tabel 2.18
Angka Melek Aksara Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Kalimantan Barat	92.75	93.15	91.81	93.28	93.25

Kab/Kota	Persentase Penduduk Berumur 10 Tahun Ke Atas Melek Aksara (Persen)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Sambas	92.55	92.04	92.1	94.44	93.09
Bengkayang	92.62	92.76	89.14	91.1	92.26
Landak	94.84	95.95	92.75	91.84	92.87
Mempawah	93.45	93.45	90.12	91.53	90.9
Sanggau	92.81	93.83	92.44	93.61	93.12
Ketapang	91.72	92.89	91.38	94.21	94.66
Sintang	91.41	92.27	88.58	91.74	91.23
Kapuas Hulu	92.9	92.55	93.84	92.33	93.65
Sekadau	93.35	92.83	92.48	94.03	95.14
Melawi	87.8	90.09	88.14	90.06	91.06
Kayong Utara	90.45	91.27	88.93	88.16	90.58
Kubu Raya	89.91	90.22	93.67	92.84	92.56
Kota Pontianak	96.35	95.71	95.99	97.13	96.43
Kota Singkawang	93.9	94.85	90.38	93.18	92.56

Sumber: <http://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/6100> diakses 14 Juli 2018

c. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah merupakan rata-rata jumlah tahun yang dibutuhkan oleh penduduk usia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani. Indikator rerata lama sekolah ini dihitung dari variabel pendidikan tertinggi yang ditamatkan dan tingkat pendidikan yang sedang dijalankan. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Semakin cepat atau mendekati ideal waktu yang dibutuhkan untuk lulus, maka kualitas pendidikan semakin baik. Tabel 2.19 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.19
Angka rata-rata Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata-rata lama Sekolah	Tahun	6.69	6.83	6.93	6.98	7.05	0.09

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar), 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan rata-rata lama sekolah dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,09 tahun. Pertumbuhan yang cukup signifikan terjadi pada tahun 2014-2015, yang mencapai 0,1 tahun. Angka rata-rata lama sekolah yang terus mengalami peningkatan ini menunjukkan adanya kesadaran masyarakat untuk mendapatkan hak dasar pendidikan makin tinggi dari waktu ke waktu.

Angka rata-rata lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.20. Pada tabel tersebut tampak bahwa angka rata-rata lama sekolah paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, sebesar 9,79 tahun, sedangkan rata-rata lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 5,85 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak berpendidikan setara dengan kelas VIII SMP, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara umumnya berpendidikan setara dengan kelas VI SD/MI.

Tabel 2.20
Angka rata-rata Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

Kab/Kota	Angka Rata-rata Lama Sekolah				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	6.69	6.83	6.93	6.98	7.05
Sambas	5.48	5.80	6.13	6.42	6.67
Bengkayang	5.96	5.97	5.98	6.08	6.09
Landak	6.99	7.05	7.06	7.07	7.08
Pontianak	6.15	6.33	6.45	6.46	6.47
Sanggau	6.35	6.37	6.74	6.92	6.93
Ketapang	6.17	6.22	6.56	6.68	7.03
Sintang	6.26	6.63	6.70	6.71	6.72
Kapuas Hulu	6.60	6.65	7.00	7.01	7.02
Sekadau	6.16	6.54	6.55	6.56	6.57
Melawi	5.81	6.00	6.42	6.52	6.53
Kayong Utara	5.14	5.19	5.37	5.84	5.85
Kubu Raya	6.16	6.41	6.56	6.57	6.58
Kota Pontianak	9.36	9.62	9.77	9.78	9.79
Kota Singkawang	7.14	7.26	7.28	7.29	7.30

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018

d. Harapan Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang. Angka rata-rata lama sekolah menunjukkan seberapa lama penduduk mengenyam pendidikan di bangku sekolah. Tabel 2.21 menunjukkan angka rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.21
Angka Harapan Lama Sekolah Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Harapan lama Sekolah	Tahun	11,60	11,89	12,25	12,37	12,50	0,23

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data BPS Prov. Kalbar), 2018

Tabel di atas menunjukkan bahwa ada tren positif dari pertumbuhan Harapan lama sekolah dari tahun 2013-2017 di Provinsi Kalimantan Barat. Secara umum, pertumbuhan rata-rata lama sekolah di Kalimantan Barat mencapai 0,23 tahun. Pada tahun 2017 HLS Provinsi Kalimantan Barat sebesar 12,50 tahun. Artinya, secara rata-rata anak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah selama 12,50 tahun atau setara dengan Diploma I.

Angka harapan lama sekolah setiap Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.22 Pada tabel tersebut tampak bahwa angka harapan lama sekolah paling tinggi terdapat di Kota Pontianak, sebesar 14,72 tahun, sedangkan harapan lama sekolah yang paling rendah ada di Kabupaten Kayong Utara, sebesar 11,12 tahun. Dengan kata lain, umumnya penduduk Kota Pontianak usia 7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah setara dengan Diploma III, sementara penduduk Kabupaten Kayong Utara usia

7 tahun yang masuk jenjang Pendidikan formal pada tahun 2017 memiliki peluang untuk bersekolah hingga dengan SMA Kelas 2.

Tabel 2.22
Angka Harapan Lama Sekolah Per Kabupaten di Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

Kab/Kota	Angka Harapan Lama Sekolah				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	11,60	11,89	12,25	12,37	12,50
Sambas	11,22	11,46	11,70	11,92	12,38
Bengkayang	10,98	11,11	11,14	11,60	12,00
Landak	11,50	12,00	12,03	12,35	12,36
Pontianak	11,48	11,75	11,91	12,29	12,30
Sanggau	10,38	10,60	10,67	11,05	11,53
Ketapang	10,61	10,90	10,95	11,34	11,76
Sintang	10,30	10,25	10,84	11,27	11,54
Kapuas Hulu	11,73	11,80	11,83	11,84	11,85
Sekadau	10,84	11,12	11,23	11,34	11,53
Melawi	10,46	10,65	10,78	11,05	11,12
Kayong Utara	10,58	10,89	11,74	11,75	11,78
Kubu Raya	12,14	12,34	12,55	12,84	13,21
Kota Pontianak	13,58	13,84	14,48	14,49	14,72
Kota Singkawang	12,34	12,80	12,84	12,85	12,86

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018

e. Angka Pendidikan yang Ditamatkan

Indikator angka pendidikan yang ditamatkan merupakan perhitungan persentase masyarakat yang menyelesaikan jenjang pendidikan tertentu pada tahun tertentu. Dengan mengetahui angka rata-rata pendidikan tertinggi yang ditamatkan, maka dapat diketahui tingkat partisipasi dan pendidikan masyarakat pada jenjang pendidikan tersebut. Sehingga dapat disusun program atau bentuk intervensi lain untuk meningkatkan angka pendidikan yang ditamatkan pada jenjang pendidikan tertentu. Pada indikator ini, semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan, maka semakin baik pula kualitas pendidikan penduduknya yang juga menggambarkan kemajuan

suatu daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Barat. Berikut Tabel 2.23 menunjukkan angka pendidikan yang ditamatkan di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.23
Angka Pendidikan yang Ditamatkan di Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

Status Pendidikan	Persentase Penduduk 7-24 tahun menurut Pendidikan yang ditamatkan				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tidak/ Belum Pernah Sekolah	1.51	1.24	1.21	0.96	1.03
SD/MI/Paket A	40.9	41.26	40.58	39.2	36.87
SLTP/MTs/Paket B	13.21	13.99	14.5	14.8	14.61
SMU/SMK/MA/Paket C	8.89	9.98	11.72	13.04	13.76
Diploma I s.d Universitas	4.74	6.07	3.91	4.2	4.9
Jumlah yang Masih Sekolah	67.73	71.29	70.71	71.24	70.14
Tidak Bersekolah Lagi	30.77	27.47	28.08	27.79	28.83

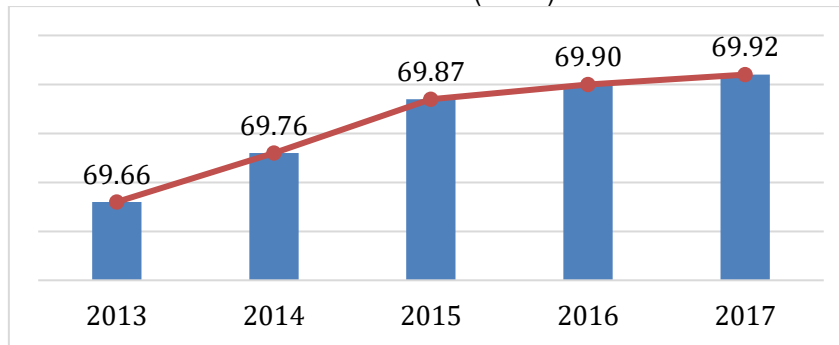
Sumber: <http://ipm.bps.go.id/data/provinsi/metode/baru/6100> diakses 14 Juli 2018

Data Tabel 2.23 menunjukkan bahwa secara umum tingkat pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk Kalimantan Barat adalah pendidikan dasar (SD/MI/Paket – SMP/MTs/Paket B). Pada tahun 2017 persentase penduduk 7–24 tahun yang menamatkan pendidikan pasar mencapai 51,48 persen. Selain itu, tabel tersebut juga menunjukkan bahwa penduduk yang tamat pendidikan menengah (SMA/SMK/MA/Paket) baru mencapai 13,76 persen. Pada jenjang pendidikan tinggi persentasenya bahkan baru mencapai 4,9 persen. Data ini menunjukkan bahwa tingkat pendidikan penduduk Kalimantan Barat masih didominasi oleh lulusan pendidikan dasar.

f. Angka Harapan Hidup

Usia harapan hidup Kalimantan Barat, bila dibandingkan dengan rata-rata nasional, masih berada dibawah capaian secara nasional. Namun, pergerakan usia harapan hidup pertahun menunjukkan kinerja yang meningkat. Angka usia harapan hidup tahun 2017 mencapai 69,92 tahun meningkat 0,02 tahun bila dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 69,90 tahun.

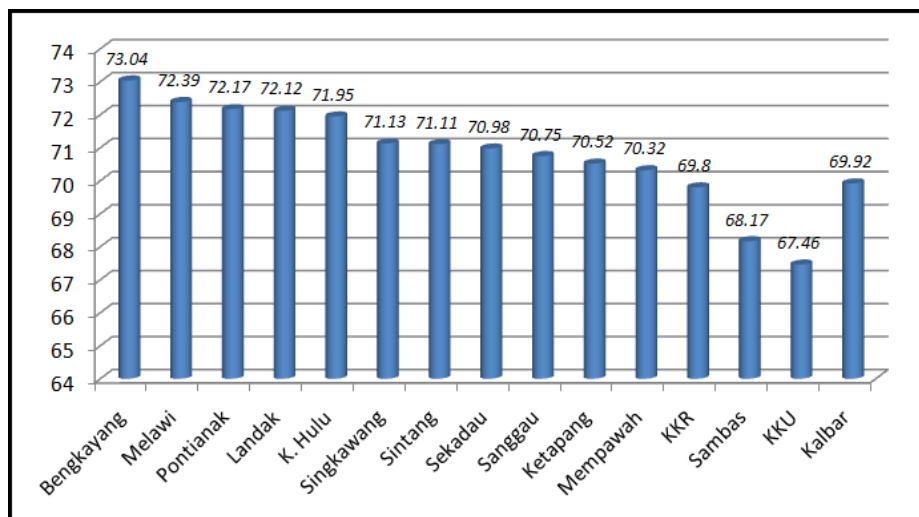
Gambar 2.10
Angka Harapan Hidup Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017 (tahun)



(Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat, diolah), 2018

Angka Harapan Hidup tertinggi dicapai oleh Kabupaten Bengkayang (73,04 tahun) meskipun masih termasuk dalam kategori Kabupaten Tertinggal menurut Perpres Nomor 21 tahun 2018. Merujuk pada kondisi faktual tersebut, maka perlu pencapaian yang merata seperti pada Kabupaten Kayong Utara yang juga merupakan Kabupaten Tertinggal dan memiliki Angka Harapan Hidup terendah, yaitu 67,46 tahun, sebagaimana tergambar pada grafik berikut :

Gambar 2.11
Angka Harapan Hidup di Setiap Kabupaten di Kalimantan Barat
Tahun 2017



g. Rasio Penduduk yang Bekerja

Rasio penduduk yang bekerja merupakan perbandingan antara jumlah penduduk usia 15 tahun ke atas yang bekerja dengan angkatan kerja. Rasio ini menggambarkan hubungan antara angkatan kerja dengan kemampuan penyerapan tenaga kerja atau bisa disebut sebagai gambaran permintaan tenaga kerja.

Dari Tabel 2.24 dapat diketahui bahwa jumlah penduduk yang bekerja setiap tahunnya fluktuatif. Berdasarkan data pada tabel tersebut pada akhir tahun 2017 dapat disimpulkan bahwa 96,64 % dari angkatan kerja yang ada memperoleh pekerjaan sedangkan sisanya masih mencari kerja atau belum mendapatkan pekerjaan.

Tabel 2.24
Persentase Penduduk Bekerja
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

URAIAN	TAHUN				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Persentase penduduk yang bekerja (%)	95.97	95.96	94.85	95.77	95.64

2.3. Aspek Pelayanan Umum

Pelayanan publik atau pelayanan umum merupakan segala bentuk jasa pelayanan, baik dalam bentuk barang publik maupun jasa publik yang menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah provinsi dan kabupaten/kota dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

2.3.1. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib

2.3.1.1. Pendidikan

Indikator kinerja dalam bidang pendidikan pada aspek pelayanan umum bidang pendidikan digambarkan melalui angka putus sekolah SD/MI, SMP/MTs,

a. Angka Putus Sekolah

Angka putus sekolah menunjukkan keadaan proporsi kelompok usia sekolah yang sudah tidak bersekolah lagi atau yang tidak menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Angka putus sekolah tahun 2017 pada semua jenjang menunjukkan perkembangan yang positif jika dibandingkan kondisi tahun 2016. Angka putus sekolah SD/MI tahun 2017 sebesar 0,19 persen turun sebesar 0,19 poin dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,38 persen. Sedangkan angka putus sekolah SMP/MTs tahun 2017 juga menunjukkan kondisi perkembangan positif dari tahun sebelumnya yaitu sebesar 0,36 persen, menurun 0,27 poin dari tahun 2016 (0,63 persen). Sementara itu, untuk angka putus sekolah SMA/MA pada tahun 2017 sebesar 0,31 persen turun 0,70 poin dari kondisi tahun 2016 sebesar 1,01 persen.

Tabel 2.25
Perkembangan Angka Putus Sekolah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017 (%)

NO	BIDANG URUSAN/INDIKATOR	TAHUN				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Angka Putus Sekolah SD/MI	0,83	0,83	0,55	0,38	0,19
2	Angka Putus Sekolah SMP/MTs	0,79	0,79	0,75	0,63	0,36
3	Angka Putus Sekolah SMA/MA	0,86	0,86	0,96	1,01	0,31

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Barat, 2018

b. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) menurut Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu perbandingan antara rasio jumlah siswa, pada jenjang usia manapun, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan

tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. APK adalah indikator yang dianggap paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Pada APK, korelasinya yaitu semakin tinggi angka partisipasi kasar menunjukkan semakin besar jumlah siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan, walaupun dengan mengesampingkan aspek usia dari siswa yang bersekolah pada suatu jenjang pendidikan.

Berdasarkan data Kemdikbud 2017, jumlah penduduk usia 16-18 tahun di Kalimantan Barat adalah 262.700 orang. Dari jumlah tersebut ternyata yang bersekolah di jenjang Sekolah Menengah baik SMA, SMK, MA maupun Paket C sebanyak 141.355 orang, sedangkan jumlah yang bersekolah di sekolah menengah mencapai 196.995 orang. Tabel 2.18 menunjukkan APK pendidikan yang menjadi urusan wajib Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.26
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017 (%)

NO	INDIKATOR	TAHUN					Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK/MA/Paket C	67,33	69,45	70,14	72,31	72,33	1,25%

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar, 2018

Secara umum, dari tahun 2013-2017 terjadi peningkatan APK pendidikan menengah sebesar 5 persen atau tumbuh rata-rata pertahun sebesar 1,25%. Pada tahun 2013, APK pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 67,33 persen. Pada tahun 2014, angka itu meningkat sebesar 2,12 persen. Peningkatan tertinggi terjadi pada tahun 2015-2016 yang mencapai 2,17 persen. Dengan demikian berarti minat penduduk usia pendidikan menengah untuk mendapatkan pendidikan menengah terus mengalami peningkatan dari waktu ke waktu.

Jumlah penduduk yang bersekolah di jenjang sekolah menengah dan penduduk usia 16-18 tahun yang bersekolah di sekolah menengah pada setiap kabupaten/kota disajikan pada Tabel 2.27.

Tabel 2.27

Penduduk Usia 16-18 Tahun dan Penduduk yang Bersekolah di Sekolah Menengah Berdasarkan Kabupaten di Kalimantan Barat 2017

Kab/Kota	Penduduk Usia 16-18 tahun	Penduduk Bersekolah di Sekolah Menengah	Penduduk Usia 16-18 Bersekolah di Sekolah Menengah
(1)	(2)	(3)	(4)
KALIMANTAN BARAT	262.700	196.995	141.355
Sambas	24,850	18,002	13,550
Bengkayang	11,505	8,970	6,506
Landak	19,299	16,338	11,640
Mempawah	48,510	35,662	25,002
Sanggau	19,559	14,189	10,112
Ketapang	29,151	17,184	12,601
Sintang	19,702	15,428	10,938
Kapuas Hulu	11,443	8,986	6,505
Sekadau	8,796	7,500	5,144
Melawi	9,815	8,141	5,849
Kayong Utara	5,708	4,684	3,500
Kubu Raya	27,631	20,446	14,649
Kota Pontianak	11,360	9,823	7.128
Kota Singkawang	15,371	11,642	8,231

Sumber: APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun Ajaran 2016/2017

Angka partisipasi kasar (APK) setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.28. Pada Tahun 2016 angka partisipasi kasar (APK) pendidikan menengah tertinggi ada di Kota Pontianak yakni sebesar 103,65 persen, sedangkan paling rendah di Kabupaten Ketapang, sebesar 49,67 persen. Fluktuasi Angka Partisipasi Kasar (APK) pendidikan menengah pada setiap kabupaten/kota menunjukkan adanya fluktuasi dari tahun ke tahun partisipasi penduduk usia pendidikan menengah pada setiap kabupaten/kota di Kalimantan Barat.

Tabel 2.28
Perkembangan Angka Partisipasi Kasar
Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMA/SMK /Paket C				
	2013*	2014*	2015*	2016**	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT		66.89	81.88	72.33	Na
Sambas	65.96	70.83	90.57	74.09	Na
Bengkayang	51.69	64.08	68.79	66.06	Na
Landak	62.33	68.6	77.9	66.03	Na
Mempawah	49.17	66.42	76.46	73.27	Na
Sanggau	51.9	54.95	51.57	63.07	Na
Ketapang	40.52	46.31	73.79	49.67	Na
Sintang	47.87	45.13	77.04	68.83	Na
Kapuas Hulu	65.71	73.2	72.93	62.35	Na
Sekadau	57.14	71.67	60.43	72.34	Na
Melawi	50.45	62.35	76.69	76.14	Na
Kayong Utara	65.52	75.9	81.82	75.24	Na
Kubu Raya	53.06	67.83	91.66	61.39	Na
Kota Pontianak	83.83	83.82	121.61	103.65	Na
Kota Singkawang	88.89	86.09	69.36	87.04	Na

Sumber : *) BPS Kalbar 2018

**) Data Profil Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan, tahun 2016/2017

***) APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun 2016/2017. Kemdikbud 2017

c. Angka Partisipasi Murni

Angka partisipasi murni (APM) adalah suatu persentase yang menunjukkan partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di tingkat pendidikan tertentu. Apabila dibandingkan dengan Angka Pendidikan Kasar (APK), APM dianggap lebih baik karena mampu menggambarkan partisipasi penduduk kelompok usia tertentu yang berada di jenjang pendidikan tertentu. Perhitungan APM di suatu jenjang pendidikan diambil dari pembagian jumlah siswa dengan kelompok umur tertentu (16–18 tahun untuk SMA/SMK/MA) dibagi dengan jumlah penduduk pada kelompok usia tertentu. Berikut Tabel 2.29. menunjukkan angka partisipasi murni di Kalimantan Barat tahun 2013 – 2017.

Tabel 2.29
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

NO	INDIKATOR	TAHUN					Pertumbuhan
		2013	2014	2015	2016	2017	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK/MA/Paket C	72,41	60	58,15	55,39	57,88	-4,22

Sumber: SIPD – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar

Secara umum, dari tahun 2013-2017 terjadi penurunan APM pendidikan menengah sebesar -17,29 persen atau tumbuh negatifrata-rata pertahun sebesar 4,22 persen Pada tahun 2013, APM pendidikan menengah di Kalimantan Barat baru mencapai 72,41 persen. Pada tahun 2014, angka itu turun sebesar -12,41 persen, dan terus mengalami penurunan hingga tahun 2016 sebesar -2,49. Dari tahun 2016-2017 terjadi peningkatan sebesar 2,49 persen. Hal tersebut menunjukkan kecenderungan kondisi daya serap pendidikan yang masih belum baik serta partisipasi masyarakat yang belum besar dari penduduk usia sekolah jenjang pendidikan menengah. Hal tersebut juga menunjukkan masih fluktuasinya penduduk usia pendidikan menengah yang menikmati jenjang pendidikan sesuai dengan usia mereka.

Sebaran Angka Partisipasi Murni (APM) tahun 2013-2017 kabupaten/kota di Kalimantan Barat disajikan pada Tabel 2.30. Pada tahun 2017, kabupaten/kota yang memiliki APM pendidikan menengah tertinggi ada di Kota Pontianak sebesar 63,95 persen, sedangkan APM pendidikan menengah paling rendah ada di Kabupaten Mempawah, sebesar 37,70 persen. APM pendidikan menengah di kabupaten/kota yang masih berada di bawah 70 persen menunjukkan banyak penduduk usia 16-18 tahun yang belum menikmati pendidikan menengah yang selayaknya mereka dapatkan.

Tabel 2.30
Perkembangan Angka Partisipasi Murni
Kabupaten Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013-2017 (%)

Kab/Kota	Angka Partisipasi Murni (APM) SMA/SMK /Paket C				
	2013*	2014*	2015*	2016**	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
KALIMANTAN BARAT	72.41	60	58.15	55.39	na
Sambas	66.67	46.6	49.33	45.09	na
Bengkayang	78.57	49.59	47.68	52.19	na
Landak	48.28	47.76	45.76	56.33	na
Mempawah	56	42.34	43.92	37.7	na
Sanggau	32.2	37.58	34.48	52.35	na
Ketapang	66.67	38.94	39.11	45.6	na
Sintang	60	57.73	57.4	54.47	na
Kapuas Hulu	71.43	48.33	47.08	33.8	na
Sekadau	72.73	48.24	45.34	40.67	na
Melawi	75	51.81	49.72	60.04	na
Kayong Utara	50.94	47.55	46.82	46.16	na
Kubu Raya	61.08	63.58	64.45	58.43	na
Kota Pontianak	67.42	69.57	70.5	63.95	na
Kota Singkawang	58.98	50.9	50.13	50.43	na

Sumber : *) BPS Kalbar 2018

**) Data Profil Pendidikan Kabupaten/Kota Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kalimantan, tahun 2016/2017

***) APK dan APM PAUD, SD, SMP dan SM Tahun 2016/2017. Kemdikbud 2017

2.3.1.2. Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan merupakan salah satu pembangunan yang sangat strategis untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan kesehatan di Kalimantan Barat telah menunjukkan pencapaian yang cukup positif. Terdapat 4 (empat) Indikator Kerja Utama pada sektor kesehatan yang perlu dicapai, yang salah satunya telah dipaparkan di atas yaitu Angka Harapan Hidup. Tiga indikator lainnya adalah Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (AKI), dan Angka Kematian Balita (AKaBa) dengan kondisi faktual saat ini (tahun 2017) secara umum AKB Kalbar adalah 8 per 1.000 kelahiran hidup. Sementara untuk AKI di Kalbar dengan angka sebesar 113, kajian per daerahnya yang terbaik dicapai oleh Kabupaten Kapuas Hulu yang hanya menyumbang 2 dari 113 tersebut, sedangkan terburuk terjadi di Kabupaten Sanggau yaitu

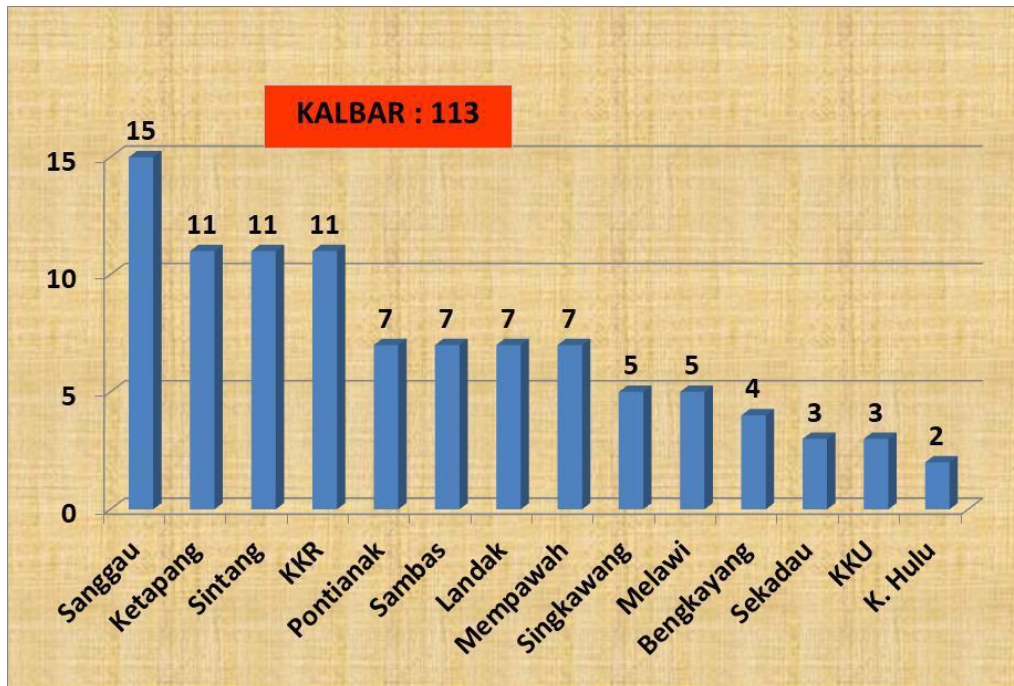
menyumbang 15 kematian ibu dari 113 kematian ibu di Kalbar per 100.000 kelahiran. Adapun untuk AKaBa kondisi 2017 menunjukkan angka sebesar 9 per 1000 kelahiran hidup.

Tabel 2.31
Perkembangan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB) dan Angka Kematian Balita (AKABA) Provinsi Kalimantan Barat

Indikator	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	138	141	95	113
Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	8
Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran	8	8	8	9

Sumber: SIPD – Dinas Kesehatan Prov. Kalbar

Gambar 2.12
Angka Kematian Ibu (AKI) di Setiap Kabupaten di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017



Keterangan: Prevalensi tiap kabupaten/kota dari total 113 AKI per 100.000 kelahiran di Kalbar

2.3.1.3. Perumahan dan Kawasan Pemukiman

Kondisi perumahan dan permukiman Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui indikator rumah layak huni dan prosentase perumahan sehat. Capaian tahun 2017 menunjukkan indikator rumah layak huni sebesar 89,59 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya capaian tersebut lebih rendah dari tahun sebelumnya. Sementara itu, untuk indikator prosentase perumahan sehat, capaian tahun 2017 sebesar 44,31 persen. Kondisi tersebut jauh lebih baik dibandingkan capaian tahun 2016 sebesar 17,03 persen.

Tabel 2.32
Kondisi Perumahan Pemukiman Provinsi Kalimantan Barat 2013-2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Rumah yang layak huni	%	92,2	89,32	89,83	90,56	89,59
2	Prosentase Perumahan Sehat	%	8,15	12,86	15,94	17,03	44,31

Sumber : Dinas Perumahan, Pemukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat 2018

2.3.1.4. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kondisi pekerjaan umum dan penataan ruang Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013-2017 dijelaskan melalui beberapa indikator berikut :

a. Jalan dan Jembatan

Pada tahun 2017 kondisi Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap yakni sebesar 83,54 persen dari total Panjang jalan provinsi sepanjang 1.534,75 Kilometer. Sedangkan dari hasil pembaharuan data yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2018 kondisi Jalan Provinsi dalam kondisi mantap adalah 762,98 Kilometer atau 49,71 persen. Untuk Jumlah Jembatan yang dikelola pada tahun 2018 yakni sebanyak 906 unit dengan total Panjang jembata yakni 11.392,74 Meter

Tabel 2.33
Kondisi Jalan dan Jembatan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Kilometer	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,18	762,98
2	Panjang Jalan Provinsi	Kilometer	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75	1.534,75
3	Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	Persen	80,67	81,07	80,38	83,54	49,71
4	Panjang Jembatan Provinsi	Meter	13.807,59	13.807,59	11.392,74	11.392,74	11.392,74
5	Jumlah Jembatan	Unit	1.179	1.179	906	906	906

Sumber : SIPD-Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

b. Sumber Daya Air

1) Jenis dan Kriteria Status Daerah Irigasi

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 14 /PRT/M/2015 Tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah Irigasi, jenis dan kriteria status Daerah Irigasi diklasifikasikan sebagai berikut:

Berdasarkan jenisnya, Daerah Irigasi terdiri dari:

- a. Daerah Irigasi Permukaan;
- b. Daerah Irigasi Air Bawah Tanah;
- c. Daerah Irigasi Rawa;
- d. Daerah Irigasi Pompa;
- e. Daerah Irigasi Tambak.

Kriteria penetapan status Daerah Irigasi, yakni sebagai berikut:

- a. Kewenangan Pemerintah Pusat
 - Luasan > 3.000 Ha;
 - Lintas Negara;

- Lintas Provinsi.
- b. Kewenangan Pemerintah Provinsi
 - Luasan 1.000 - 3.000 Ha;
 - Lintas Kabupaten/Kota.
- c. Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota
 - Luasan < 1.000 Ha.

2) Daerah Irigasi Provinsi

Luas Daerah Irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan jenisnya, sebagaimana tercantum pada Tabel 2.34 berikut :

Tabel 2.34
Kondisi Daerah Irigasi Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2018

No.	Jenis Daerah Irigasi	Jumlah Daerah Irigasi	Luasan (Ha)
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	12	6.765
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	35	54.520
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1	1.350
Total		48	62.635

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar

3) Kondisi Irigasi Provinsi

Kondisi irigasi diklasifikasikan, sebagai berikut:

1. Kondisi baik : Tingkat kerusakan < 10%
2. Kondisi rusak ringan : : Tingkat kerusakan 10 - 20%
3. Kondisi rusak sedang : : Tingkat kerusakan 21 - 40%
4. Kondisi rusak berat : Tingkat kerusakan > 40%

Kondisi irigasi kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat per Tahun 2018 berdasarkan jenisnya diuraikan pada 2.35 di bawah.

Tabel 2.35
Kondisi Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017

No.	Jenis Daerah Irigasi	Luas Areal (Ha)	Kondisi per Tahun 2018							
			Baik		Rusak Ringan		Rusak Sedang		Rusak Berat	
			(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)	(Ha)	(%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
1.	Daerah Irigasi Permukaan (D.I.)	6.765	2.468,15	36,48	1.481,00	21,89	471,00	6,96	2.344,85	34,66
2.	Daerah Irigasi Rawa (D.I.R.)	54.520	26.142,24	47,95	6.794,60	12,46	6.859,54	12,58	14.723,62	27,01
3.	Daerah Irigasi Tambak (D.I.T.)	1.350	675,00	50,00	202,50	15,00	67,50	5,00	405,00	30,00
Total		62.635	29.285,39	46,76	8.478,10	13,54	7.398,04	11,81	17.473,47	27,90

Sumber : Dinas PUPR Prov. Kalbar

Indikator lainnya untuk sumber daya air digambarkan melalui Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir, kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok dan berkurangnya persentase pantai kritis. Untuk capaian selama periode 2014-2018 digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 2.36
Kondisi Pekerjaan Umum Bidang Sumber Daya Air Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Persentase peningkatan/pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	%	56,20	40,05	39,85	35,90	29,57

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2	Kapasitas tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	Liter/detik	2	2	2	2	2
3	Berkurangnya persentase pantai kritis	%	-	48,85	48,18	51,11	56,86

Sumber : SIPD – Dinas PUPR Prov. Kalbar

c. Cipta Karya

Capaian tahun 2018 menunjukkan prosentase rumah tangga yang bersanitasi capaian adalah sebesar 47,52 persen mengalami peningkatan dari capaian tahun sebelumnya sebesar 47,36 persen. Sedangkan prosentase Rumah Tangga Air Bersih tahun 2018 sebesar 54,69 persen meningkat dari kondisi tahun sebelumnya sebesar 54,67 persen. Sementara itu Panjang jalan permukiman perkotaan dan perdesaan yang telah dibangun pada tahun 2018 yakni 142.111 Kilometer yang tersebar di 14 (empat belas) Kabupaten/Kota di Kalimantan Barat.

Tabel 2.37
Perkembangan Kondisi Bidang Cipta Karya Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2014-2018

No	Indikator	Satuan	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(5)	(6)	(7)	(8)	
1	Pengguna Rumah Tangga Air Bersih	%	54,54	54,58	54,61	54,67	54,69
2	Prosentase Rumah Tangga yang Bersanitasi	%	46,72	46,92	47,12	47,36	47,52
3	Panjang Jalan Permukiman Perkotaan dan Perdesaan	Kilometer	82.778	134.797	194.514	296.967	142.111

Sumber : SIPD - Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat

d. Penataan Ruang

Sementara itu, untuk urusan penataan ruang yang digambarkan melalui persentase Ruang Terbuka Hijau Publik pada tahun 2017 adalah sebesar 29,24 persen mengalami peningkatan dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 28,73 persen.

Tabel 2.38

Kondisi RTH Publik Provinsi Kalimantan Barat

Kab/Kota	Luas Kawasan Perkotaan (Ha)	Luas RTH Publik (Ha)				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sambas	31.829	7.321	7.321	7.321	7.321	7.321
Singkawang	50.400	11.097	11.097	12.054	12.054	12.054
Bengkayang	17.789	7.471	7.471	7.471	7.471	7.471
Mempawah	20.000	7.225	7.225	7.225	7.225	7.225
Landak	598	179	179	179	179	179
Sanggau	5.026	1.488	1.488	1.488	1.488	1.488
Sekadau	13.065	5.226	5.226	5.226	5.226	5.226
Sintang	27.705	3.339	3.339	3.339	3.339	3.339
Kapuas Hulu	17.720	10.632	10.632	10.632	10.632	10.632
Melawi	24.227	727	727	727	727	727
Ketapang	10.468	8.376	8.376	8.376	8.376	8.376
Kayong Utara	4.568	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650
Kubu Raya	14.000	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Pontianak	10.782	2.371	2.371	2.687	2.687	2.687
Provinsi Kalimantan Barat	248.177	71.302	71.302	72.575	72.575	72.575
Persentase RTH Kalimantan Barat		28,73	28,73	29,24	29,24	29,24

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Prov. Kalbar

2.3.1.5. Sosial

a. Sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo dan rehabilitasi

Fasilitas sosial disediakan untuk membantu masyarakat yang kurang beruntung. Pemerintah melalui Dinas Sosial menyediakan fasilitas yang dimaksud. Fasilitas yang disediakan oleh pemerintah Kalimantan Barat berupa Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Anak, Panti Jompo Berbasis Masyarakat, UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia, dan Rumah Rehabilitasi NAPZA.

Tabel 2.39
Sarana Sosial di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Panti Asuhan Anak Berbasis Masyarakat	Unit	139	118	120	156	131	0,57
2	UPT Panti Sosial Anak	Unit	1	1	1	1	1	0
3	Panti Jompo Berbasis Masyarakat	Unit	2	3	3	2	2	0
4	UPT Panti Sosial Rehabilitasi Lanjut Usia	Unit	0	0	0	0	2	0
5	Rumah Rehabilitasi NAPZA	Unit	1	1	1	1	5	400
	Jumlah seluruh sarana sosial	Unit	143	123	125	160	143	80,11

Sumber : Dinas Sosial

Dapat dilihat dalam Tabel 2.39 bahwa dalam kurun waktu 2013-2017 jumlah sarana sosial di Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2014 dan 2015 mengalami penurunan jika dibanding tahun 2013. Sedangkan untuk tahun 2016 mengalami peningkatan. Berdasarkan data di atas pula, fasilitas sosial yang tersedia di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari Panti sosial yang berbasis masyarakat dan panti sosial milik pemerintah daerah dengan status sebagai unit pelaksana teknis Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Barat. Tersedianya sarana sosial ini diharapkan dapat membantu bagi orang-orang yang kurang beruntung untuk mendapatkan kehidupan yang lebih baik.

b. PKMS yang memperoleh bantuan sosial

Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) adalah seseorang, keluarga atau kelompok masyarakat yang karena suatu hambatan, kesulitan, atau gangguan tidak dapat melaksanakan fungsi sosialnya sehingga tidak terpenuhi kebutuhan hidupnya baik jasmani,

rohani, maupunsosial secara memadai dan wajar. Hambatan, kesulitan, atau gangguan tersebut dapat berupa permasalahanpermasalahan sosial seperti kemiskinan, ketelantaran, kecacatan, ketunaan sosial, keterbelakangan,keterasingan/ketertinggalan, dan bencana alam maupun bencana sosial. PMKS yang memperoleh bantuanadalah proporsi jumlah PMKS yang memperoleh bantuan terhadap jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan.

Tabel 2.40
PMKS yang Memperoleh Bantuan Sosial di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	PMKS yang memperoleh bantuan sosial	jiwa	36.372	47.258	54.657	3.822	4.356	- 46,02
2	Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan	jiwa	351.368	317.817	312.244	327.929	327.889	-6,26
3	PMKS yang memperoleh bantuan	Persen	10,35	14,87	17,50	1,16	1,33	-9,04

Sumber : Dinas Sosial, 2018

Pada Tabel 2.40 dapat dilihat bahwa, perkembangan jumlah PMKS yang memperoleh bantuan sosial dalam kurun waktu 2013-2017 mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat di tahun 2013 sampai 2015. Tingginya bantuan sosial pada tahun 2013-2015 dikarenakan pada tahun itu terjadi bencana alam (banjir serta kebakaran lahan dan hutan) yang menimbulkan jumlah korban yang cukup besar. Pada tahun 2013,PMKS yang memperoleh bantuan sosial sebanyak 10,35 persen, dan mengalami penurunan yang signifikan pada tahun 2017 menjadi 1,33 persen. Jumlah penyaluran Bantuan Sosial Rastra di Provinsi Kalimantan Barat periode Januari-September 2018 sebesar 18.642.260 kg atau telah mencapai 93,70 % dari pagu pada periode yang sama sebesar 19.895.940 kg. Masih banyaknya jumlah PMKS di Provinsi

Kalimantan Barat mengindikasikan banyaknya masalah kesejahteraan sosial. Masalah ini menjadi tanggungjawab pemerintah melalui dinas-dinas terkait.

d. Cakupan Anak Terlantar yang Dibina

Sebagaimana yang tertera dalam Undang Undang Dasar 1945 pasal 34 ayat 1, bahwa fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara. Oleh karena itu, seluruh anak terlantar yang ada di Provinsi Kalimantan Barat seharusnya menjadi tanggungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui dinas-dinas terkait. Berikut ini merupakan data jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat tahun 2013 - 2017.

Tabel 2.41
Anak Terlantar yang Dibina di Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

No	Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017	Pertumbuhan Rata-Rata (%Tahun)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Anak terlantar yang dibina	Jiwa	7.820	7.839	8.019	7.900	6.987	-0,09

Sumber: Dinas Sosial, 2018

Data pada Tabel 2.41 menunjukkan bahwa jumlah anak terlantar yang dibina di Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013-2017 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2013, jumlah anak terlantar yang dibina sebanyak 7.820 jiwa dan terus mengalami penurunan sehingga mencapai 6.987 jiwa pada tahun 2017. Sedangkan jumlah penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat tersaji dalam tabel di bawah ini:

Tabel 2.42
Data Sebaran Penyandang Disabilitas
di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas	766	5,83
2.	Bengkayang	1.136	8,65
3.	Landak	1.419	10,81
4.	Mempawah	513	3,83
5.	Sanggau	767	5,84
6.	Ketapang	1.528	11,64
7.	Sintang	475	3,62
8.	Kapuas Hulu	568	4,32
9.	Sekadau	1.167	8,89
10.	Melawi	1.145	8,72
11.	Kayong Utara	1.500	11,42
12.	Kubu Raya	1.070	8,15
13.	Singkawang	795	6,05
14.	Pontianak	281	2,14
JUMLAH		13.130	100

Sumber: Dinas Sosial, 2018

Berdasarkan data di atas sebaran penyandang disabilitas di Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017 terbanyak di Kabupaten Ketapang yakni 1.528 orang (11,64%) disusul Kabupaten Kayong Utara 1.500 orang (11,42%) dan yang paling sedikit terdapat di Kota Pontianak yakni 281 orang (2,14%).

Sementara itu penerima baru anak terlantar di Kalimantan Barat terlihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.43
Anak Terlantar Baru Penerima Bantuan (2018)

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Sambas	0	
2.	Bengkayang	0	
3.	Landak	50	5,46
4.	Mempawah	282	30,79
5.	Sanggau	118	12,88
6.	Ketapang	148	16,16
7.	Sintang	0	
8.	Kapuas Hulu	33	3,60

No	Kabupaten/Kota	Jumlah	Persen
(1)	(2)	(3)	(4)
9.	Sekadau	0	
10	Melawi	0	
11	Kayong Utara	0	
12	Kubu Raya	198	21,61
13	Singkawang	0	
14	Pontianak	87	9,50
	JUMLAH	916	100

Sumber: Dinas Sosial, 2018

Berdasarkan data pada tabel 2.43 di atas anar terlantar baru penerima bantuan ada di Kabupaten Mempawah yakni sebanyak 282 anak atau 30,79% dari keseluruhan penerima bantuan baru pada tahun 2018. Kabupaten kedua penerima bantuan terbanyak adalah Kabupaten Kubu Raya 21,61% disusul Kabupaten Ketapang 16, 16%. Ada tujuh daerah tingkat II yang tidak menerima bantuan baru bagi anak terlantar yakni: Kabupaten Sambas, Kabupaten Bengkayang, Kabupaten Sintang, Kabupaten Sekadau, Kabupaten Melawi, Kabupaten Kayong Utara, dan Kota Singkawang.

2.3.1.6. Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

a. Keamanan dan Ketertiban Umum

Gambaran kondisi ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat sebagai pelaksanaan urusan wajib bidang pelayanan dasar digambarkan melalui perkembangan jumlah aparatur pamong praja, aparatur linmas serta jumlah kasus unjuk rasa seperti termuat dalam tabel 2.44 berikut :

Tabel 2.44

Perkembangan Kondisi Aparatur Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Aparat Pamong Praja	Orang	105	108	102	109	113
Jumlah Aparat Linmas	Orang	n/a	n/a	n/a	n/a	4.078
Jumlah Petugas Patroli Satpol PP	Orang	90	91	87	92	95

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Petugas Perlindungan Masyarakat	Orang	n/a	n/a	24.045	24.045	23.045
Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Politik	Kasus	15	10	8	1	10
Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Ekonomi	Kasus	30	35	38	21	40
Jumlah Kasus Unjuk Rasa Bidang Agama	Kasus	0	0	0	2	0

Sumber : SIPD - Satuan Polisi Pamong Praja Prov. Kalbar dan Polda Kalbar

b. Bencana

Kondisi Penanggulangan Bencana digambarkan melalui Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana yang meliputi informasi ketersediaan sarana dan prasarana berupa kendaraan roda 2, roda 4, roda >4, kapal penyelamat, alat komunikasi, peralatan kesehatan, mobil tangka air, MCK mobile, dan Perlengkapan pendukung hunian sementara. Informasi dimaksud secara terperinci ditampilkan pada tabel 2.45. Sementara untuk Tingkat waktu tanggap bencana pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Barat adalah 11 Jam. Dengan Cakupan pelayanan kebakaran hutan dan lahan dalah 52%.

Tabel 2.45
Jumlah Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana

Prasarana dan Sarana Tanggap Bencana	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kendaraan Roda 2	Unit	4	4	6	6	6
Kendaraan Roda 4	Unit	5	5	5	5	5
Kendaraan Roda > 4	Unit	5	5	5	5	5
Kapal Penyelamat	Unit	4	4	4	4	4
HandyTalky	Unit	14	14	14	14	14
Mobil Ambulance	Unit	1	1	1	1	1
Mobil Tangki Air	Unit	1	1	1	1	1
MCK (Mandi Cuci Kakus) Mobile	Unit	1	1	1	1	1
Tenda Hunian Sementara	Unit	26	26	26	26	26
Dapur Umum	Unit	1	1	1	1	1
Generator	Unit	4	4	4	4	4

Sumber : SIPD – BPBD Prov. Kalbar

2.3.1.7. Tenaga Kerja

Gambaran kondisi urusan tenaga kerja selain telah digambarkan sebelumnya melalui Tingkat pengangguran terbuka juga dapat diamati dari perkembangan jumlah balai latihan kerja, jumlah pelatihan kerja jumlah tenaga kerja di luar negeri serta jumlah perusahaan yang memperkerjakan warga negara asing seperti termuat dalam tabel 2.46 berikut :

Tabel 2.46
Perkembangan Kondisi Urusan Tenaga Kerja di Kalimantan Barat

Variabel	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Jumlah Balai Latihan Kerja	Lembaga	7	7	7	7	7
Jumlah Peserta Balai Latihan Kerja	Orang	1900	1616	2808	3024	888
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Terakreditasi	Lembaga	0	8	6	3	5
Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta Belum Terakreditasi	Lembaga	42	42	42	42	42
Jumlah Tenaga Kerja di Luar Negeri**						
1. Terdidik	Orang	80	221	142	175	177
2. Tidak Terdidik	Orang	576	1114	685	952	857
Jumlah Kasus TKI di Luar Negeri	Kasus	852	911	1023	958	1199
Jumlah Perusahaan yang Memperkerjakan Warga Negara Asing	Perusahaan	41	36	38	50	63

Sumber : Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Prov. Kalbar (Data SIPD)

2.3.1.8. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan ketimpangan gender. IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Pada tahun 2017 IPG Kalimantan Barat sebesar 86,28 mengalami peningkatan 1,89 poin dibandingkan kondisi 2013 sebesar 84,39. Sedangkan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator yang menggambarkan partisipasi aktif perempuan dalam politik, ekonomi, dan pengambilan keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi. Capaian dari

tahun 2013 hingga tahun 2017 mengalami peningkatan dari 58,78 pada tahun 2013 menjadi 64,46 pada tahun 2017. Akan tetapi capaian tersebut masih berada di bawah capaian nasional.

Tabel 2.47
Indeks Pembangunan Gender dan Indeks Pemberdayaan Gender

Tahun	Indeks Pembangunan Gender (IPG)		Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	
	Kalimantan Barat	Indonesia	Kalimantan Barat	Indonesia
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	84,39	90,19	58,78	70,46
2014	84,72	90,34	64,10	70,68
2015	85,61	91,03	64,44	70,83
2016	85,77	90,82	64,37	71,39
2017	86,28	90,96	64,46	71,74

Sumber : SIPD – Dinas PPPA Prov. Kalbar (Data BPS)

2.3.1.9. Pangan

Total konsumsi energi tahun 2017 mengalami penurunan 77,67 kkal/kapita/hari atau menurun 4,06 persen dibandingkan tahun 2016. Sementara untuk konsumsi protein tahun 2017 meningkat 1,8 gram/kapita/hari atau meningkat 3,30 persen dibandingkan tahun 2016. Peningkatan juga terjadi pada Skor Pola Pangan Harapan (PPH) yang meningkat dibandingkan tahun 2016 yakni dari 79,20 meningkat 4,3 poin menjadi 83,5 pada tahun 2017.

Tabel 2.48
Perkembangan Konsumsi Energi dan Protein serta Skor PPH Tahun 2013-2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Rata-Rata Konsumsi Energi	Kal/Kap/Hari	1781,34	1760,62	1893,8	1911	1833,33
Rata-Rata Konsumsi Protein	Gram/Kap/Hari	54,40	54,00	53,70	54,50	56,30
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)		-	82,8	77,8	79,2	83,5

Sumber : SIPD - Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat

Gambar ketersediaan beras sebagai salah satu konsumsi pangan utama masyarakat di Kalimantan Barat digambarkan pada tabel berikut

Tabel 2.49
Ketersediaan Beras (Ton) Per Kab/Kota se-Kalimantan Barat
Tahun 2014-2017

No	Kabupaten	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sambas	171.158	158.482	156.322	157.383
2	Bengkayang	68.679	44.470	48.741	53.902
3	Landak	101.863	113.959	110.696	144.647
4	Mempawah	39.039	40.379	43.967	55.385
5	Sanggau	58.932	74.026	101.139	105.792
6	Ketapang	47.316	45.236	56.843	62.682
7	Sintang	53.948	41.155	45.128	45.301
8	Kapuas Hulu	29.015	21.091	31.179	31.222
9	Sekadau	15.343	14.899	17.803	22.910
10	Melawi	14.625	15.318	15.063	14.632
11	Kayong Utara	39.280	26.881	32.130	30.075
12	Kubu Raya	113.557	99.806	85.397	95.321
13	Kota Pontianak	253	257	411	469
14	Kota Singkawang	6.314	9.715	9.985	9.427

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar

Tabel 2.50
Data Konsumsi Beras Per Kabupaten Se Kalimantan Barat
Tahun 2014-2017

No	KAB/KOTA	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sambas	72.342	65.332	60.322	48.678
2	Bengkayang	32.404	29.800	27.824	22.707
3	Landak	49.106	44.662	41.569	33.800
4	Mempawah	34.721	31.444	29.238	23.730
5	Sanggau	61.086	55.526	51.709	42.063
6	Ketapang	64.597	59.446	55.595	45.498
7	Sintang	54.379	49.505	46.093	37.486
8	Kapuas Hulu	33.453	30.723	28.696	23.408
9	Sekadau	26.689	24.153	22.417	18.167
10	Melawi	26.759	24.478	22.819	18.592
11	Kayong Utara	14.372	13.173	12.293	10.026
12	Kubu Raya	74.976	68.116	63.581	51.732
13	Kota Pontianak	83.225	75.885	70.761	57.623
14	Kota Singkawang	28.136	25.927	24.239	19.786

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar

Tabel 2.51
Rasio Ketersediaan Pangan Dan Konsumsi Per Kabupaten/Kota Se Kalimantan Barat
Tahun 2014-2017

No	KAB/KOTA	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Sambas	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
2	Bengkayang	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
3	Landak	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
4	Mempawah	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
5	Sanggau	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
6	Ketapang	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
7	Sintang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS
8	Kapuas Hulu	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS	SURPLUS
9	Sekadau	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	SURPLUS
10	Melawi	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT
11	Kayong Utara	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
12	Kubu Raya	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS	SURPLUS
13	Kota Pontianak	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT
14	Kota Singkawang	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT	DEFISIT

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Prov. Kalbar

2.3.1.10. Pertanian

Pada tahun 2017 terjadi peningkatan jumlah sertifikat hak atas tanah yang cukup signifikan, hal ini sejalan dengan program pemerintah untuk meningkatkan ertifikat hak atas tanah bidang. Dari 14 Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat, Kabupateb Kubu Raya merupakan Kabupaten dengan Jumlah Bidnag Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah diberikan yakni sebanyak 20.671 bidang.

Tabel 2.52
Perkembangan Redistribusi Tanah dan Sertifikat Hak Atas Tanahdi Kalimantan Barat

No	Wilayah	REDISTRIBUSI TANAH (BIDANG)			SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH (BIDANG)		
		2015	2016	2017	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	KAB. SAMBAS	-	-	-	1.030	1.500	10.011
2	KAB. MEMPAWAH	-	-	-	709	674	12.692
3	KAB. SANGGAU	-	-	-	688	665	9.883
4	KAB. KETAPANG	3.720	-	-	2.200	1.000	14.256
5	KAB. SINTANG	-	-	-	406	1.174	13.799
6	KAB. KAPUAS HULU	-	1.000	-	417	600	3.500
7	KAB. BENGKAYANG	-	-	-	750	898	4.000
8	KAB. LANDAK	-	-	-	1.100	1.995	14.500

9	KAB. SEKADAU	1.000	-	-	950	986	3.902
10	KAB. MELAWI	-	-	-	940	900	5.000
11	KAB. KAYONG UTARA	-	1.500	-	602	746	3.000
12	KAB. KUBU RAYA	-	-	750	1.500	1.050	20.671
13	KOTA PONTIANAK	-	-	-	-	-	2.000
14	KOTA SINGKAWANG	-	-	-	787	750	16.195
KALIMANTAN BARAT		4.720	2.500	750	12.079	12.938	133.409

Sumber : Kementerian Agraria dan Tata Ruang Kanwil Prov Kalbar

2.3.1.11. Lingkungan Hidup

Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebagai ukuran indikator kualitas lingkungan hidup apakah dalam kondisi baik atau buruk. Informasi kualitas lingkungan meliputi kondisi kualitas air, kualitas udara dan kualitas tutupan lahan yang direpresentasikan melalui nilai Indeks Kualitas Udara (IKU), Indeks Kualitas Air (IKA) dan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL).

Indeks Kualitas Air (IKA) diukur berdasarkan kualitas air atas parameter-parameter TSS, DO, BOD, COD, Total Fosfat, Fecal Coli dan Total Coliform, Indeks Kualitas Udara (IKU) diukur berdasarkan Kualitas Udara atas parameter SO₂ dan NO₂ sedangkan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) diukur berdasarkan Kualitas Tutupan Lahan sesuai luas tutupan lahan dan dinamika vegetasi.

Indeks Kualitas Air (IKA) ditentukan berdasarkan nilai dari Indeks Pencemaran. Nilai IKA berkisar antara 0 hingga 100. Nilai ideal adalah 100 merupakan gambaran kualitas air terbaik sedangkan 0 merupakan kondisi kualitas air terburuk. Nilai IKA dipengaruhi oleh : (1) penurunan beban pencemaran, (2) ketersediaan dan fluktuasi debit air yang dipengaruhi oleh perubahan fungsi lahan serta faktor cuaca lokal, iklim regional dan global, (3) penggunaan air, serta (4) tingkat erosi dan sedimentasi.

Indeks Kualitas Udara (IKU) adalah suatu nilai yang menunjukkan mutu atau tingkat kebaikan udara menurut sifat-sifat unsur pembentuknya. IKU merupakan gambaran atau nilai hasil transformasi parameter-parameter (indikator) individual polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Nilai IKU berkisar antara 0 sampai

dengan 100. Nilai ideal adalah 100, yang menggambarkan kualitas terbaik. Sementara nilai 0 menggambarkan kualitas terburuk. Begitu juga dengan Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL), nilai IKTL berkisar antara 100 hingga 0. Nilai 100 menggambarkan kondisi kualitas tutupan lahan terbaik, sedangkan nilai 0 merupakan kondisi tutupan lahan terburuk. Secara lengkap Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.53

Perkembangan Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU),
Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL) dan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No.	Uraian	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Indeks Kualitas Air (IKA)	61,0	64,8	54,3	55,8	n/a
2.	Indeks Kualitas Udara (IKU)	87,7	84,6	91,6	87,9	n/a
3.	Indeks Kualitas Tutupan Lahan (IKTL)	58,73	58,73	58,51	57,33	n/a
4.	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)	68,1	68,3	67,1	66,1	n/a

Sumber : Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Kalimantan, KLHK Tahun 2017

IKLH dapat digunakan sebagai informasi dalam mendukung proses pengambilan kebijakan yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, selain itu IKLH dapat juga menggambarkan kondisi daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Daya dukung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk mendukung peri kehidupan manusia, makhluk hidup lain dan kesimbangan antar keduanya. Daya tampung lingkungan yang selanjutnya disebut daya tampung adalah kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energy, dan/atau komponen lain yang masuk dan dimasukkan ke dalamnya. Daya dukung daya tampung lingkungan hidup Kalimantan Barat dapat dilihat dari Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) sebagaimana tabel dibawah ini :

Tabel 2.54
Indeks Jasa Ekosistem (Prioritas) yang Terkait Langsung Dengan Sumber Daya Lahan di Provinsi Kalimantan Barat

No.	Jasa Ekosistem Prioritas	Indeks (belum termasuk wilayah Laut)
(1)	(2)	(3)
1	Jasa Ekosistem Penyediaan Pangan	0,31
2	Jasa Ekosistem Penyediaan Air Bersih	0,33
3	Jasa Ekosistem Penyediaan Serat	0,69
4	Jasa Ekosistem Penyediaan Sumber Daya Genetik	0,52
5	Jasa Ekosistem Penyediaan Energi/ Bahan Bakar (Kayu dan Fosil)	0,62
6	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemeliharaan Kualitas Udara	0,44
7	Jasa Ekosistem Pengaturan Iklim	0,48
8	Jasa Ekosistem Pengaturan Pencegahan dan Perlidungan dari Bencana	0,56
9	Jasa Ekosistem Pengaturan Tata Aliran Air dan Banjir	0,50
10	Jasa Ekosistem Pengaturan Pengolahan dan Penguraian Limbah	0,61
11	Jasa Ekosistem Pengaturan Pemurnian Air	0,41
12	Jasa Ekosistem Budaya, Tempat Tinggal dan Ruang Hidup	0,39
13	Jasa Ekosistem Budaya Estetika Alam	0,41
14	Jasa Ekosistem Budaya Rekreasi dan Ekoturisme	0,43

Sumber : Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Disamping itu, peningkatan jumlah penduduk juga berbanding lurus dengan peningkatan jumlah sampah yang dihasilkan. Estimasi timbulan sampah berdasarkan teori sebesar 0,7 Kg/hari/orang memprediksi bahwa jumlah sampah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 3.767 m³/hari. Selain itu permasalahan lain yang dihadapi dalam pengelolaan sampah adalah kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) masih menggunakan sistem *Open Dumping* dan belum ada pengolahan lebih lanjut untuk penanganan masalah sampah tersebut. Sistem open dumping masih dapat dilakukan di Provinsi Kalimantan Barat karena masih luasnya lahan di Kalimantan Barat. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.55
Proyeksi Jumlah Timbulan Sampah per Hari di Provinsi Kalimantan Barat

No	Kabupaten/Kota	Jumlah Penduduk (jiwa)	Timbulan Sampah (m ³ /hari)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Pontianak	658.477	460,9339
2	Mempawah	302.262	211,5834
3	Kubu Raya	602.306	421,6142
4	Bengkayang	284.835	199,3845
5	Singkawang	233.501	163,4507
6	Sambas	633.182	443,2274
7	Landak	397.038	277,9266
8	Sanggau	483.981	338,7867
9	Sekadau	209.737	146,8159
10	Sintang	405.211	283,6477
11	Melawi	229.755	160,8285
12	Kapuas Hulu	238.797	167,1579
13	Kayong Utara	123.506	86,4542
14	Ketapang	578.840	405,188
Jumlah		5.381.428	3.766,9996

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2017

Adapun untuk menampung sampah-sampah yang dihasilkan tersebut, telah tersedia tempat pembuangan akhir sampah (TPA) di 14 Kabupaten/kota dengan kondisi seperti tabel dibawah ini :

Tabel 2.56
TPA dan Sistem Operasi di Provinsi Kalimantan Barat

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sukadana (Kab. Kayong Utara)	-	36,00	Open Dumping
2	Melawi	6,50	35,00	Open Dumping
3	Putussibau (Kab. Kapuas Hulu)	0,00	0,00	Open Dumping
4	Sekadau	4,50	34,00	Open Dumping
5	Sintang	6,00	96,25	Controlled Landfill
6	Bengkayang	10,00	20,80	Open Dumping
7	Tebadak (Kab. Landak)	6,60	300,00	Open Dumping
8	Sorat (Kab. Sambas)	13,00	72,00	Open Dumping

No	TPA	Luas (Ha)	Kapasitas TPA (m ³ /hari)	Sistem Operasi TPA
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
9	Bakau Besar (Kab Mempawah)	2,20	160,00	Open Dumping
10	Kubu Raya	4,00		Open Dumping
11	Batulayang (Kota Pontianak)	26,60	1.373,03	Controlled Landfill
12	Sanggau	2,00	60,00	Open Dumping
13	Ketapang	9,00	60,00	Controlled Landfill
14	Wonosari (Kota Singkawang)	8,57	194,60	Controlled Landfill

Sumber : DRKPLH Prov. Kalbar 2017

Pada tahun 2016 besaran emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat untuk sektor energi sebesar 5.888.437,47 Ton CO₂ eq; sektor pertanian sebesar 3.065.096,82 Ton CO₂ eq; sektor kehutanan sebesar 85.782.477,54 Ton CO₂ eq dan limbah sebesar 2.230.633,89 Ton CO₂ eq. Untuk tahun 2017 jumlah emisi gas rumah kaca Provinsi Kalimantan Barat mengalami penurunan untuk sektor energi sebesar 0,00 Ton CO₂ eq; sektor pertanian sebesar 1.190.289,46 Ton CO₂ eq; sektor kehutanan sebesar 451.834.313,06 Ton CO₂ eq dan limbah sebesar 1.444,52 Ton CO₂ eq.

2.3.1.12. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jumlah penduduk Kalimantan Barat pada tahun 2017 yang telah memiliki E-KTP pada tahun 2017 sebesar 2.344.914 mengalami peningkatan dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 2.201.729 jiwa.

Tabel 2.57
Jumlah Penduduk Memiliki E-KTP

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. SAMBAS	Orang	333.795	333.324	168.021	265.902	268.399
KAB. MEMPAWAH	Orang	135.357	136.210	67.392	142.644	143.186
KAB. SANGGAU	Orang	195.156	193.330	93.724	191.271	210.111
KAB. KETAPANG	Orang	181.825	179.204	87.223	161.238	198.136
KAB. SINTANG	Orang	202.947	203.959	99.848	194.036	197.042
KAB. KAPUAS HULU	Orang	130.407	131.016	62.833	135.558	138.910

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. BENGKAYANG	Orang	120.939	117.055	55.944	119.605	124.296
KAB. LANDAK	Orang	177.895	174.791	82.374	170.161	179.870
KAB. SEKADAU	Orang	112.532	112.668	53.849	101.723	105.290
KAB. MELAWI	Orang	91.560	89.016	43.903	88.785	96.451
KAB. KAYONG UTARA	Orang	45.389	43.872	21.795	41.029	46.084
KAB. KUBU RAYA	Orang	229.988	242.710	123.916	268.375	293.316
KOTA PONTIANAK	Orang	350.527	360.045	178.439	247.161	262.176
KOTA SINGKAWANG	Orang	103.634	106.534	53.474	74.241	81.647
KALIMANTAN BARAT	Orang	2.411.951	2.423.734	1.192.735	2.201.729	2.344.914

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar

Sementara itu, untuk penduduk yang telah memiliki akte kelahiran pada tahun 2017 adalah 1.043.886 jiwa. Tertinggi berada di Kota Pontianak yakni sebanyak 247.050 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran dan terendah di Kabupaten Bengkayang sebesar 39.051 jiwa yang telah memiliki akte kelahiran.

Tabel 2.58
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Akte Kelahiran

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
KAB. SAMPAS	Orang	77.888	108.923	130.091	99.889	117.580
KAB. MEMPAWAH	Orang	62.946	38.873	44.612	29.276	56.734
KAB. SANGGAU	Orang	31.108	15.216	25.361	32.978	47.183
KAB. KETAPANG	Orang	107.083	65.811	84.517	55.964	101.625
KAB. SINTANG	Orang	134.083	99.326	107.682	62.349	104.883
KAB. KAPUAS HULU	Orang	33.955	21.445	26.707	22.853	34.529
KAB. BENGKAYANG	Orang	13.613	6.780	14.890	13.170	15.973
KAB. LANDAK	Orang	83.369	89.523	102.703	59.277	60.574
KAB. SEKADAU	Orang	51.175	54.887	59.919	36.111	39.051
KAB. MELAWI	Orang	58.146	34.530	40.438	24.889	27.404
KAB. KAYONG UTARA	Orang	30.252	22.749	28.915	17.439	18.920
KAB. KUBU RAYA	Orang	40.906	84.186	103.986	74.698	119.601
KOTA PONTIANAK	Orang	310.981	184.459	239.697	150.024	247.050
KOTA SINGKAWANG	Orang	64.125	70.851	79.848	46.837	52.779
KALIMANTAN BARAT	Orang	1.099.630	897.559	1.089.366	725.754	1.043.886

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar

Jumlah Kepala Keluarga yang telah memiliki Kartu Keluarga pada tahun 2017 sebanyak 1.535.715 KK meningkat dibandingkan kondisi pada tahun 2013 sebesar 1.450.907 KK.

Tabel 2.59
Jumlah Penduduk Telah Memiliki Kartu Keluarga

Wilayah	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
KAB. SAMBAS	KK	174.272	170.666	181.519	174.857	180.384
KAB. MEMPAWAH	KK	80.472	80.136	83.936	84.173	85.971
KAB. SANGGAU	KK	135.283	136.979	143.738	142.458	147.605
KAB. KETAPANG	KK	165.059	162.557	175.245	168.299	174.931
KAB. SINTANG	KK	92.510	104.956	117.176	110.241	113.973
KAB. KAPUAS HULU	KK	81.139	66.279	68.481	71.250	73.517
KAB. BENGKAYANG	KK	72.873	73.379	76.868	76.607	77.539
KAB. LANDAK	KK	100.785	98.208	104.151	98.917	102.207
KAB. SEKADAU	KK	56.816	54.929	60.105	57.879	59.341
KAB. MELAWI	KK	64.309	66.030	66.884	68.397	69.175
KAB. KAYONG UTARA	KK	34.830	32.833	35.910	34.713	36.183
KAB. KUBU RAYA	KK	160.902	159.128	168.640	165.297	169.631
KOTA PONTIANAK	KK	171.742	172.809	182.403	174.205	181.164
KOTA SINGKAWANG	KK	59.915	58.892	63.639	62.266	64.094
KALIMANTAN BARAT	KK	1.450.907	1.437.781	1.528.695	1.489.559	1.535.715

Sumber : SIPD - Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Prov. Kalbar

2.3.1.13. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Indeks Desa Membangun (IDM) merupakan Indeks Komposit yang dibentuk berdasarkan tiga indeks, yaitu Indeks Ketahanan Sosial, Indeks Ketahanan Ekonomi dan Indeks Ketahanan Ekologi/Lingkungan. Hasil pemutakhiran Indeks Desa Membangun tahun 2018, dari 2.031 desa di Kalimantan Barat baru terdapat 1 desa berstatus desa mandiri, yakni Desa Sutera yang berada di Kecamatan Sukadana, Kabupaten Kayong Utara. Sementara itu, sebesar 45,54 persen atau 925 desa di Kalimantan Barat masih berstatus tertinggal.

Tabel 2.60
Status Desa menurut Indeks Desa Membangun (IDM) 2017 di Kalimantan Barat

NO	STATUS DESA	JUMLAH	%
(1)	(2)	(3)	(4)
1	SANGAT TERTINGGAL	683	33,63%
2	TERTINGGAL	925	45,54%
3	BERKEMBANG	369	18,17%
4	MAJU	53	2,61%
5	MANDIRI	1	0,05%
TOTAL		2031	100,00%

Sumber : Kemendes PDT

2.3.1.14. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Prevalensi pemakaian kontrasepsi (CPR) adalah angka yang menunjukkan banyaknya Pasangan Usia Subur yang sedang memakai kontrasepsi pada saat pencacahan. Pada tahun 2017 CPR Kalimantan Barat sebesar 70,93 persen meningkat dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 70,86 persen. Angka CPR tahun 2017 tertinggi berada di Kabupaten Kayong Utara sebesar 77,39 persen. Sedangkan angka CPR terendah pada tahun 2017 berada di Kota Singkawang sebesar 55,10 persen.

Tabel 2.61
Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi di Kalimantan Barat

No	Wilayah	PREVALENSI PEMAKAIAN KONTRASEPSI (1)		
		2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	MEMPAWAH	69,62%	71,14%	71,51%
2	SAMBAS	69,36%	69,40%	69,62%
3	KETAPANG	70,76%	72,48%	71,71%
4	SANGGAU	82,87%	77,74%	73,52%
5	SINTANG	73,20%	75,63%	76,51%
6	KAPUAS HULU	76,09%	77,94%	79,14%
7	PONTIANAK	69,42%	69,54%	69,94%
8	SINGKAWANG	59,58%	57,26%	55,10%
9	BENGKAYANG	N/A	71,79%	73,95%
10	LANDAK	71,15%	72,36%	74,55%
11	SEKADAU	71,13%	62,98%	67,00%
12	MELAWI	72,31%	72,73%	71,93%
13	KAYONG UTARA	80,21%	78,14%	77,39%
14	KUBU RAYA	63,19%	63,22%	63,67%
KALIMANTAN BARAT		71,02%	70,86%	70,93%

Sumber : BKKBN Perwakilan Kalbar

2.3.1.15. Perhubungan

Persentase ketersediaan sarana perhubungan darat selama periode 2014-2017 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2014 kondisi ketersediaan sarana perhubungan darat sebesar 47,42 persen meningkat menjadi 54,5 persen pada tahun 2017. Sedangkan persentase penurunan

jumlah Laka Lantas pertahun juga semakin membaik yakni pada tahun 2017 terjadi penurunan laka lantas sebesar 118,26 persen. Sementara itu, persentase kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak juga terus mengalami peningkatan menjadi 77,38 persen pada tahun 2017.

Tabel 2.62
Kondisi Capaian Perhubungan Tahun 2014-2017

Indikator	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat	47,42	49,77	52,15	54,5
Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun	75,09	105,28	89,34	118,26
Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak	66,2	69,9	73,6	77,38

Terminal di Kalimantan Barat sebanyak 27 unit, yang tersebar di seluruh kabupaten/kota, baik itu tipe A,B dan C. Untuk tipe A sebanyak 1 (satu) unit yang terletak di Kabupaten Kubu Raya yaitu di Sei Ambawang, sedang tipe B sebanyak 25 (dua puluh lima) unit dan tipe c sebanyak 1 (satu) unit di Sei Pinyuh Kabupaten Mempawah. Sesuai Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa terminal Tipe B merupakan kewenangan dari pada Pemerintah Provinsi, sehingga untuk pembangunan dan pemeliharaannya di tangani oleh Pemerintah Provinsi.

Tabel 2.63
Sebaran Terminal di Provinsi Kalimantan Barat 2017

No.	Kab/Kota	Terminal	Type
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Kota Pontianak	- Batulayang	B
2	Kabupaten Kubu Raya	- ALBN Sei Ambawang	A
		- Sungai Durian	B
3	Kabupaten Mempawah	- Mempawah	B
		- Sei Pinyuh	C
		- Jungkat	B
4	Kota Singkawang	- Pasiran	B
		- Beringin	B
5	Kabupaten Sambas	- Sambas	B
		- Kartiasa	B
		- Aruk	B

No.	Kab/Kota	Terminal	Type
(1)	(2)	(3)	(4)
		- Pemangkat	B
6	Kabupaten Bengkayang	- Bengkayang	B
		- Seluas	B
7	Kabupaten Landak	- Ngabang	B
8	Kabupaten Sanggau	- Sosok	B
		- Sanggau	B
		- Entikong	B
		- Tayan	B
9	Kabupaten Sekadau	- Lawang Kuari	B
		- Sungai Ukoi	B
10	Kabupaten Sintang	- Sungai Durian	B
		- Tanjung Puri	B
11	Kabupaten Melawi	- Sido Mulyo	B
12	Kabupaten Kapuas Hulu	- Badau	B
13	Kabupaten Ketapang	- Ketapang	B
14	Kabupaten Kayong Utara	- Kayong Utara	B

Sumber : Dinas Perhubungan Prov. Kalbar

2.3.1.16. Komunikasi dan Informatika

Dari data yang berhasil dikumpulkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Kalimantan Barat, pada tahun 2017 Jumlah Desa/Kelurahan di Kalimantan Barat yang telah terlayani telepon seluler sebanyak 988 desa/kelurahan. Sedangkan untuk jumlah desa/kelurahan yang terlayani internet dari data yang berhasil dikumpulkan diluar Kabupaten Sintang, Landak dan Sekadau pada tahun 2017 adalah sebanyak 279 desa/kelurahan.

Sementara itu, untuk Jumlah BTS yang ada di Kalimantan Barat diluar Kabupaten Sintang dan Sekadau, adalah sebanyak 1.399 unit, dengan jumlah terbanyak berada di Kota Pontianak sebanyak 216 BTS.

Tabel 2.64
Jumlah Desa Terlayani Telepon Seluler dan Internet serta Jumlah BTS
Tahun 2017

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS
(1)	(2)	(3)	(4)
KAB. SAMPANG	140	1	128
KAB. MEMPAWAH	49	46	90

Kabupaten/Kota	Jumlah Desa/ Kelurahan Terlayani Telepon Seluler	Jumlah Desa/Kelurahan Terlayani Internet	Jumlah BTS
(1)	(2)	(3)	(4)
KAB. SANGGAU	79	89	185
KAB. KETAPANG	95	1	164
KAB. SINTANG	113	n/a	n/a
KAB. KAPUAS HULU	101	20	88
KAB. BENGKAYANG	50	1	103
KAB. LANDAK	50	n/a	105
KAB. SEKADAU	31	n/a	n/a
KAB. MELAWI	59	30	41
KAB. KAYONG UTARA	27	2	42
KAB. KUBU RAYA	63	34	136
KOTA PONTIANAK	29	29	216
KOTA SINGKAWANG	22	26	101
KALIMANTAN BARAT	908	279	1399

Sumber : SIPD - Dinas Komunikasi dan Informastika Prov. Kalbar

2.3.1.17. Koperasi dan Usaha Kecil, Menengah

Pada tahun 2017, capaian indikator prosentase koperasi aktif sebesar 68,54 persen dan prosentase koperasi berkualitas sebesar 17,46 persen. Sedangkan indikator jumlah UKM pelaku usaha tahun 2017 adalah sebesar 119.396 jumlah pelaku UKM. Berdasarkan dari Tabel 2.20 Jumlah Koperasi Aktif yang ada di Provinsi Kalimantan Barat dari tahun 2013 hingga 2016 terus mengalami peningkatan. Akan tetapi pada tahun 2017 jumlah koperasi aktif turun sebesar 16,37 persen dari sebelumnya berjumlah 3.024 unit menjadi 2.529 unit.

Sementara itu, jumlah usaha kecil menengah atau UKM pelaku usaha selama periode 2013-2017 terus mengalami peningkatan dengan rata-rata pertumbuhan per tahunnya sebesar 8,32 persen. Pada tahun 2017 jumlah UKM pelaku usaha meningkat 10,17 persen dari sebelumnya sebanyak 108.374 pelaku usaha menjadi 119.396 pelaku usaha pada tahun 2017. Capaian tersebut, menunjukkan bahwa jumlah masyarakat yang memiliki usaha sendiri terus mengalami peningkatan dan didorong dengan pertumbuhan ekonomi yang baik, diharapkan tingkat ekonomi masyarakat Kalimantan Barat juga meningkat seiring banyaknya lapangan usaha kerja baru dari Usaha Kecil Menengah ini. Jiwa enterpreuner bagi para pemuda dan remaja, sejak dini perlu

ditumbuhkembangkan sehingga ada motivasi untuk membuat usaha atau berusaha sendiri tanpa perlu menunggu menjadi pegawai negeri atau bekerja bersama orang lain.

Tabel 2.65
Capaian Urusan Koperasi dan UKM Tahun 2013 – 2017
Provinsi Kalimantan Barat

NO	URAIAN	REALISASI				
		2013	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Jumlah Koperasi Aktif	2.765	2.872	2.944	3.024	2.578
2	Jumlah Koperasi	4.670	4.782	4.616	4.390	3.761
3	Persentase Koperasi Aktif	59,2	60,05	63,77	68,88	68,55
4	Persentase Koperasi Berkualitas	11,75	12,02	12,97	13,44	17,46
5	Jumlah UKM Pelaku Usaha	87.107	107.515	108.010	108.374	*119.396
6	Pertumbuhan Pelaku Usaha	9,73	20,92	0,46	0,33	10,17

Sumber : Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2018

2.3.1.18. Penanaman Modal

Melalui penerapan otonomi daerah, diharapkan muncul pusat kekuatan baru di daerah dalam bidang ekonomi, sosial, dan politik. Akan tetapi pemerintah memiliki keterbatasan, oleh karena itu dibutuhkan peran swasta dimana salah satu aspeknya adalah dibidang investasi. Pemerintah berusaha mendorong pihak swasta untuk meningkatkan kegiatan penanaman modal.

Pemerintah menetapkan kebijakan dasar penanaman modal baik untuk swasta domestik (PMDN) maupun asing (PMA), tujuannya adalah untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan untuk mendorong pengembangan ekonomi potensial, meningkatkan lapangan kerja dan penguatan daya saing perekonomian.

Pada tahun 2017 PMDN sebesar Rp. 52.764.690,63 Juta terjadi peningkatan investasi PMDN sebesar 30,65 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar Rp. 40.383.786,43 Juta. Namun untuk target capaian belum memberikan peningkatan yang signifikan, ini dilihat dari realisasinya baru mencapai 55,07 persen.

Tabel 2.66
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMDN di Kalimantan Barat Tahun 2013 -2017

THN	P M D N						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (Rp. Juta)	INDONESIA	ASING	TOTAL
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2013	216	65.483.314,63	144	17.266.076,95	150.410	74	150,484
2014	220	65.483.314,63	158	25.233.622,55	158.252	100	158,352
2015	237	67.210.341,03	175	31.368.252,43	166.485	119	166,604
2016	249	68.916.022,81	187	40.383.786,43	170.616	120	170.736
2017	501	95.805.192,01	428	52.764.690,63	203.197	120	203.317
Pertumbuhan %	28,96%	11,05%	39,05%	32,46%	8,00%	13,74%	8,00%

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Keterangan:

- Data Tahun 2013 merupakan data kumulatif dari tahun-tahun sebelumnya.
- Rencana investasi PMDN berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPM-RI, DPMPPTSP Provinsi dan DPMPPTSP kabupaten/kota.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPPTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA di luar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMDN dalam Rp Juta

Dukungan investasi yang bersumber dari PMA tahun 2017 sebesar 6.197.880,30 US \$ ribu, atau meningkat sebesar 10,10 persen dibandingkan dengan tahun 2016 sebesar 5.629.435,10 US\$ ribu. Untuk target capaian pada tahun 2017 baru terealisasi sebesar 57,36 persen.

Tabel 2.67
Rencana dan Realisasi Kumulatif
Perkembangan Investasi PMA di Kalimantan Barat Tahun 2013- 2017

THN	P M A						
	RENCANA		REALISASI		TENAGA KERJA		
	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	JUMLAH PROYEK	INVESTASI (US \$ RIBU)	INDONESIA	ASING	TOTAL
1	2	3	4	5	6	7	8
2013	237	5.980.338,25	91	2.697.816,72	81.946	310	82.256
2014	239	6.246.776,77	98	3.663.023,90	86.015	336	86.351
2015	255	7.476.431,28	110	4.998.722,10	104.197	537	104.734
2016	256	7.818.316,90	121	5.629.435,10	104.886	548	105.434
2017	301	10.804.401,10	432	6.197.880,30	125.956	892	126.848
Pertumbuhan %	6,38%	16,73%	71,74%	23,74%	11,71%	33,26%	11,81%

Sumber : Dinas PMPTSP Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

Keterangan:

- Rencana investasi PMA berdasarkan izin prinsip penanaman modal yang diterbitkan SPIPISE BKPM-RI.
- Realisasi investasi berdasarkan LKPM yang diterima DPMPSTSP Provinsi Kalimantan Barat.
- Investasi PMDN/PMA diluar investasi Migas, Perbankan, Lembaga Keuangan Non Bank, Asuransi, Sewa Guna Usaha Sektoral dan Industri Rumah Tangga.
- Nilai Investasi PMA dalam US \$ Ribu

2.3.1.19. Kepemudaan dan Olahraga

Gambaran urusan Kepemudaan dan Olahraga digambarkan melalui indikator indeks pembangunan pemuda. Indeks Pembangunan Pemuda merupakan instrumen untuk memberikan gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia. Indeks ini memiliki lima fungsi. Pertama, IPP akan memberikan indikasi secara keseluruhan lintas wilayah dan lintas sektor tentang kemajuan pembangunan pemuda. Kedua, IPP juga berfungsi sebagai pengarah dan insentif bagi domain atau indikator tertentu yang memerlukan perhatian khusus para pemangku kepentingan pemerintah pusat dan daerah, organisasi masyarakat, serta kelompok pemuda sendiri. Ketiga, IPP berfungsi sebagai instrumen evaluasi yang menyediakan seperangkat informasi mengenai pembangunan pemuda yang dapat dibandingkan antarwaktu dan antarwilayah serta menunjukkan dampak yang telah disepakati bersama di antara para pemangku kepentingan. Keempat, IPP dapat pula memberikan arah penelitian mengenai berbagai aspek kehidupan dan kesejahteraan pemuda yang dapat dijadikan rujukan untuk merumuskan kebijakan dan program pemuda yang berbasis data. Kelima, IPP dapat mengukur dampak bonus demografi terhadap pertumbuhan ekonomi negara. Pada tahun 2016 IPP Kalimantan Barat berada pada peringkat 28 Nasional dengan skor 47,50.

Tabel 2.68
Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda Kalimantan Barat
Tahun 2017

NO	INDIKATOR	2015	2016
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Indeks Pembangunan Pemuda	45,17	47,50
2	Peringkat Indeks Pembangunan Pemuda	26	28

Sumber : Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas)

Sementara itu untuk sebaran fasilitas olahraga, data yang berhasil dikumpulkan untuk tahun 2017 digambarkan melalui tabel 2.69 berikut :

Tabel 2.69
Sebaran Fasilitas Olahraga di Kalimantan Barat
Tahun 2017

Wilayah	Lapangan Bola Voli	Lapangan Bola Basket	Lapangan Tenis	Lapangan Futsal
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
KAB. SAMBAS	28	2	3	9
KAB. MEMPAWAH	14	14	7	60
KAB. SANGGAU	1	0	0	0
KAB. KETAPANG	163	5	4	0
KAB. SINTANG	1	1	0	0
KAB. KAPUAS HULU	2	2	3	2
KAB. BENGKAYANG	17	3	0	6
KAB. LANDAK	12	0	2	0
KAB. SEKADAU	2	2	1	3
KAB. MELAWI	11	3	3	5
KAB. KAYONG UTARA	30	0	1	4
KAB. KUBU RAYA	18	0	4	6
KOTA PONTIANAK	10	19	12	18
KOTA SINGKAWANG	5	2	8	6

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar, (Data SIPD)

2.3.1.20. Kebudayaan

Gambaran kondisi kebudayaan dapat dijelaskan, jumlah museum sebanyak 2 unit dan jumlah pusat kebudayaan/taman budaya sejumlah 1 unit.

Tabel 2.70
Gambaran Kondisi Urusan Kebudayaan di Kalimantan Barat

Variabel Data	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Sanggar Kesenian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Gedung Kesenian	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a
Jumlah Museum	n/a	2	2	2	2
Jumlah Pusat Kebudayaan/Taman Budaya	n/a	1	1	1	1

Sumber : Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Prov. Kalbar (Data SIPD)

Selain itu, terdapat sejumlah objek yang menjadi cagar budaya dan yang diduga cagar budaya di Kalimantan Barat dengan sebaran seperti berikut ini:

Tabel 2.71
Sebaran Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya

No	Kabupaten/Kota	Cagar Budaya/ yang Diduga Cagar Budaya	Status
(1)	(2)	(3)	(4)
1.	Singkawang	14	14 Laporan Inventarisasi
2.	Sambas	7	2 SK Menteri, 3 Laporan pendokumentasian, dan 1 SK Juru Pelihara dan 1 belum ada penetapan
3.	Bengkayang	7	6 Laporan Inventarisasi dan 1 belum ada penetapan
4.	Sekadau	6	2 SK Juru Pelihara dan 4 belum ada penetapan
5.	Ketapang	108	106 SK Bupati dan 2 Laporan Kajian
6.	Melawi	2	2 SK Juru Pelihara
7.	Landak	7	1 SK Menteri 4 SK Juru Pelihara dan 3 belum ada penetapan
8.	Kapuas Hulu	14	1 SK Menteri dan 13 SK Bupati
9.	Kota Pontianak	12	2 SK Menteri, 9 Laporan inventarisasi, dan 1 SK Juru Pelihara
10.	Sintang	20	1 SK Menteri dan 19 SK Bupati
11.	Kubu Raya	3	1 Laporan Identifikasi, 1 SK Juru Pelihara dan 1 belum ada penetapan

12	Mempawah	9	1 SK Menteri, 3 SK Juru Pelihara, dan 5 belum ada penetapan
13.	Kayong Utara	6	5 Laporan Identifikasi dan 1 belum ada penetapan
14.	Sanggau	25	2 SK Menteri, 19 SK Juru Pelihara, dan 4 belum ada penetapan
Jumlah		240	

Sumber: Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, 2018

Berdasarkan tabel di atas ada 240 Objek Cagar Budaya/Yang Diduga Cagar Budaya. Objek-objek tersebut memiliki status yang berbeda. Dari 240 objek yang ada hanya 10 objek atau 1,17% yang sudah ditetapkan oleh Menteri sebagai cagar budaya, Selebihnya penetapan oleh Bupati melalui SK penunjukkan Juru Pelihara. Ada juga baru berupa hasil kajian, pendokumentasian dan inventarisasi. Bahkan ada sejumlah objek yang belum ditetapkan statusnya.

2.3.1.21. Perpustakaan

Jumlah kunjungan perpustakaan selama periode 2014-2017 menunjukkan peningkatan dari 64.563 kunjungan orang pada tahun 2014 meningkat menjadi 90.981 kunjungan orang pada tahun 2017. Sementara itu jumlah koleksi buku yang terdata dari 7.637 buku pada tahun 2014 meningkat menjadi 87.737 buku pada tahun 2017. Sedangkan koleksi daerah yang dilestarikan pada tahun 2017 adalah sebanyak 338 buah meningkat dibanding tahun sebelumnya yang hanya sebanyak 152 buah.

Tabel 2.72
Gambaran Kondisi Urusan Perpustakaan Tahun 2014-2017

NO	INDIKATOR	Tahun			
		2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Jumlah Kunjungan Perpustakaan	64.563,00	89.938,00	97.632,00	90.981,00
2	Jumlah Koleksi Buku (Buku)	7.637	16.496	37.768	87.737
3	Koleksi Daerah yang dilestarikan (Buah)	309	440	152	338

Sumber : SIPD - Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar

2.3.1.22. Kearsipan

Pada tahun 2017, persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup yakni sebesar 55 persen meningkat jika dibandingkan kondisi tahun 2014 dan 2015 sebesar 46 persen. Sedangkan persentase Lembaga kearsipan daerah kabupaten/kota se Kalimantan Barat dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup adalah sebesar 7 persen. Selain itu, jumlah arsip vital pada tahun 2017 sebanyak 10 dokumen dan jumlah arsip statis pada tahun 2017 sebanyak 26.048 dokumen. Meningkat dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebesar 20.394 dokumen.

Tabel 2.73

Gambaran Kondisi Urusan Kearsipan di Kalimantan Barat

No	Jenis Data	Satuan	2014	2015	2016	2017
1	2	3	4	5	6	7
1	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	Persen	46	46	55	55
2	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	Persen	7	7	7	7
3	Jumlah Arsip Vital	Dokumen	10	10	10	10
4	Jumlah Arsip Statis	Dokumen	19.049	20.204	20.394	26.048

Sumber : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Prov. Kalbar, 2017

2.3.1.23. Statistik

Untuk meningkatkan ketersediaan data dan informasi serta keterpaduan antar sektor, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah memulai membangun kebijakan satu data melalui kegiatan pengumpulan, pengolahan, dan integrasi data statistik sektoral OPD dan Kabupaten Kota dalam aplikasi portal satu data yang mudah diakses oleh masyarakat luas.

Capaian kinerja sejak tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 yaitu tersedianya data statistik umum, dasar dan sektoral skala provinsi melalui penerbitan buku Kalimantan Barat Dalam Angka

2.3.1.24. Persandian

Mengacu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menetapkan bahwa urusan persandian adalah urusan pemerintahan konkuren yang bersifat wajib bagi seluruh pemerintah daerah. Kegiatan lingkup persandian meliputi: pembinaan peralatan sandi, sistem sandi, kelembagaan, pengawasan dan pengendalian; pengkoordinasian penyelenggaraan pengamanan dan materiil persandian; penyiapan, pemanfaatan dan pengembangan sumber daya persandian serta pemeliharaan sarana telekomunikasi di lingkungan SETDA Provinsi Kalimantan Barat.

2.3.2. Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan

2.3.2.1. Kelautan dan Perikanan

Laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Kelautan dan Perikanan menunjukkan *trend* turun naik. Pada tahun 2017 laju pertumbuhan PDRB sub sector perikanan sebesar 3,18 lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun 2016 sebesar 3,02 persen. Sedangkan NTP Perikanan pada tahun 2017 telah mencapai angka di atas 100 persen yang berarti nilai indeks yang dikeluarkan petani perikanan lebih rendah dibandingkan nilai yang diterima oleh petani perikanan. Sementara itu, total produksi perikanan pada tahun 2017 mengalami penurunan 4,21 persen dibandingkan total produksi pada tahun 2016.

Tabel 2.74
Perkembangan Kondisi Indikator Kelautan dan Perikanan

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perikanan	Persen	5,38	4,58	1,92	3,02	3,18
NTP Perikanan		103,14	98,65	100,01	102,59	102,03
Total Produksi Perikanan	Ton	242.689	281.050,14	251.633,37	250.850,49	240.294,37

Sumber : SIPD-Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Kalbar (1&2 Data BPS)

2.3.2.2. Pariwisata

Perkembangan pariwisata Indonesia dari tahun ke tahun tercatat terus tumbuh bahkan daya saing sektor pariwisata Indonesia terus mengalami peningkatan. Pesatnya perkembangan kondisi pariwisata nasional disinyalir sebagai dampak dari pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi yang disertai peningkatan daya beli masyarakat serta didukung dengan kondisi keamanan yang cukup kondusif, maka hal ini akan mendorong meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan, khususnya kunjungan penduduk Indonesia untuk melakukan perjalanan wisata di wilayah teritorial Indonesia atau yang biasa disebut kunjungan wisatawan nusantara (wisnus).

Tabel 2.75
Perkembangan Jumlah Kunjungan Wisman dan Wisnus
Tahun 2013-2017

TAHUN	*WISMAN	**WISNUS	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	30.678	2.459.995	2.490.673
2014	31.021	2.471.403	2.502.424
2015	34.472	2.509.323	2.543.795
2016	32.261	2.935.588	2.967.849
2017	58.492	2.979.621	3.038.113

Sumber: *BPS Prov. Kalbar **Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

Terkait perkembangan pariwisata Kalimantan Barat, statistik menunjukkan kedatangan wisatawan mancanegara (wisman) ke Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 sebesar 30,687 kunjungan meningkat menjadi 31,021 kunjungan di tahun 2014. Pada tahun 2015 kunjungan wisatawan mancanegara kembali mengalami peningkatan 34.472 kunjungan, akan tetapi di tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 32.261 kunjungan. Data kunjungan wisatawan mancanegara Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 menunjukkan

kunjungan wisatawan mancanegara meningkat 81,31 persen dari tahun sebelumnya menjadi 58.492 kunjungan.

Selain jumlah kunjungan wisman, faktor lain yang juga sangat berpengaruh terhadap industri pariwisata Kalimantan Barat adalah pergerakan wisatawan nusantara (wisnus) termasuk juga wisatawan lokal Kalimantan Barat. Peranan wisnus dan wislok merupakan yang terbesar dalam menciptakan dampak ekonomi, maka Kementerian Pariwisata semakin gencar untuk mengajak penduduk Indonesia melakukan perjalanan wisata di dalam negeri. Kunjungan wisatawan nusantara pada tahun 2013 sejumlah 2.459.995 kunjungan, mengalami peningkatan pada tahun 2014 menjadi 2.471.403 kunjungan. Pada tahun 2015 meningkat menjadi 2.509.323 kunjungan dan kembali mengalami peningkatan menjadi 2.935.588 kunjungan. Pada tahun 2017 jumlah kunjungan wisatawan nusantara 2.979.621 kunjungan.

Dengan makin giatnya promosi dari pemerintah daerah dibantu instansi terkait untuk mengenalkan daerah serta tempat-tempat wisata lainnya, serta didukung oleh prasarana dan sarana yang ada, maka diharapkan jumlah pergerakan wisnus semakin meningkat.

Selain jumlah wisatawan, jumlah obyek wisata juga mempengaruhi sektor pariwisata. Pada tahun 2017 jumlah obyek wisata di Kalimantan Barat mengalami perubahan dimana pada tahun 2016 jumlah objek daya tarik wisata sebanyak 462 sedangkan pada tahun 2017 sebanyak 556 dengan penambahan 92 obyek wisata. Adapun Kabupaten yang memiliki obyek wisata terbanyak adalah Kabupaten Landak dengan jumlah 67 obyek wisata.

Tabel 2.76
Perkembangan Jumlah Objek Daya Tarik Wisata

No	Kabupaten/Kota	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kota Pontianak	12	12	17	17	18
2	Kab. Mempawah	23	13	29	29	23
3	Kota Singkawang	20	6	26	26	53
4	Kab. Bengkayang	59	145	62	62	32

5	Kab. Sambas	23	24	28	28	25
6	Kab. Kubu Raya	10	32	14	14	59
7	Kab. Landak	32	29	36	36	67
8	Kab. Sanggau	32	32	36	36	62
9	Kab. Melawi	7	7	12	12	31
10	Kab. Sekadau	26	32	29	29	30
11	Kab. Sintang	31	62	35	35	26
12	Kab. Kapuas Hulu	48	31	48	48	48
13	Kab. Ketapang	55	25	59	59	55
14	Kab. KKU	27	27	31	31	27
15	TOTAL	405	476	462	462	556

Sumber : Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata Prov. Kalbar

2.3.2.3. Pertanian

a. Sub Sektor Tanaman Bahan Makanan

Total Produksi tanaman pangan pada tahun 2013 hingga tahun 2015 terus mengalami penurunan. Dari 1.784.838 ton menjadi 1.572.446, akan tetapi pada tahun 2016 mulai mengalami peningkatan kembali dan pada tahun 2017 kembali meningkat menjadi 1.700.753 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 juga mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 8,19 persen menjadi 8,55 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Tanaman Pangan pada tahun 2017 masih dibawah angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani tanaman pangan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani tanaman pangan.

Tabel 2.77
Realisasi Produksi Tanaman Pangan (Ton)
Tahun 2013 - 2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Tanaman Pangan	Persen	9,71	-3,66	-5,20	8,19	8,55
NTP Sektor Tanaman Pangan		95,28	98,92	98,70	97,34	94,41
Total Produksi Tanaman Pangan	Ton	1.784.838	1.721.852	1.572.446	1.656.009	1.700.753

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Barat 2018, diolah

b. Sub Sektor Hortikultura

Total Produksi Hortikultura pada tahun 2013 hingga tahun 2017 cenderung fluktuatif. Pada tahun 2017 total produksi Hortikultura sebesar 453.642 ton lebih tinggi dibandingkan produksi tahun sebelumnya sebesar 368.767 ton, akan tetapi jika dibandingkan dengan tahun 2013, total produksi hortikultura pada tahun 2017 lebih rendah dibandingkan kondisi tahun 2013 sebesar 4.66.839 ton. Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 6,33 persen menjadi 14,71 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Hortikultura pada tahun 2017 konsisten diatas 100 yang berarti nilai yang diterima petani hortikultura lebih besar dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani hortikultura

Tabel 2.78
Realisasi Produksi Sub Sektor Holtikultura dan Sub Sektor Florikultura
Tahun 2013– 2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Hortikultura	Persen	2,70	7,08	11,64	6,33	14,71
NTP Sektor Hortikultura		103,08	104,64		103,04	101,09
Total Produksi Hortikultura	Ton	466.839	500.867	499.962	368.767	453.642

Sumber : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Holtikultura Provinsi Kalimantan Barat 2017

c. Sub Sektor Perkebunan

1) Produksi Sub Sektor Perkebunan

Usaha perkebunan pada umumnya dikelola oleh masyarakat (kebun rakyat), namun ada beberapa perusahaan swasta dan BUMN yang mengusahakan perkebunan dalam skala besar. Perkembangan produksi jenis perkebunan besar komoditas Kelapa Sawit sebesar 580.343 ton tahun 2013 meningkat menjadi sebesar 1.496.938 ton tahun 2017, dengan produksi rata-rata 1.047.673,60 ton/tahun atau rata-rata pertumbuhan meningkat 13,22 persen setiap tahunnya.

Peningkatan pertumbuhan produksi kelapa sawit didukung oleh meningkatnya investasi di sektor perkebunan, terutama investasi di perkebunan besar kelapa sawit.

Selanjutnya jenis Perkebunan Rakyat dari tahun 2013 sebesar 828.387 ton sampai tahun 2017 sebesar 1.141.583 ton mengalami kenaikan setiap tahunnya dengan rata-rata sebesar 995.861,80 ton/tahun atau dengan pertumbuhan 5,09 persen. Komoditi yang dominan pada perkebunan rakyat adalah kelapa sawit, karet, kelapa, kopi, lada dan kakao.

Tabel 2.79
Realisasi Produksi Sub Sektor Perkebunan (Ton)
Tahun 2013 – 2017

JENIS PERKEBUNAN/ KOMODITI	Realisasi (Ton)				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Perkebunan Besar	581.755	682.962	1.122.026	1.359.019	1.497.955
[01] Karet	1.412	1.456	1.464	1.000	1.017
[05] Kelapa Sawit	580.343	681.506	1.120.562	1.359.019	1.496.938
Perkebunan Rakyat	828.387	843.390	1.056.026	1.109.923	1.141.583
[01] Karet	260.166	258.728	257.896	260.717	269.163
[02] Kelapa	78.897	80.026	82.317	87.664	85.862
[03] Kelapa Sawit	477.530	492.993	703.770	748.850	772.633
[04] Kakao	2.678	2.664	2.685	2.645	2.557
[05] Lada	3.470	3.416	3.621	4.351	5.499
[06] Kopi	3.841	3.720	3.790	3.736	3.688
[07] Cengkeh	230	226	272	275	277
[08] Kemiri	244	193	185	170	173
[09] Pinang	667	702	755	811	936
[10] Tebu	441	415	416	418	410
[11] Sagu	150	231	241	210	308
[12] Kapuk	10	10	10	5	5
[13] Jarak	1	-	-	-	-
[14] Enau/Aren	58	57	52	53	49
[15] Pala	4	10	16	18	23
TOTAL	1.410.142	1.526.352	2.178.052	2.468.942	2.639.538

Sumber : Dinas Perkebunan Provinsi Kalimantan Barat

Sementara itu laju pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan pada tahun 2017 mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan pada tahun 2016 yakni dari 9,21 persen menjadi 13,26 persen pada tahun 2017. Sedangkan NTP Sektor Perkebunan pada tahun 2017 berada dibawah angka 100 yang berarti nilai yang diterima petani perkebunan lebih kecil dibandingkan nilai yang dikeluarkan oleh petani perkebunan.

Tabel 2.80
Perkembangan Capaian Indikator Sub Sektor Perkebunan (Ton)
Tahun 2013 – 2017

Indikator	Satuan	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Laju Pertumbuhan PDRB Sub Sektor Perkebunan	Persen	14,43	5,91	9,36	9,21	13,26
NTP Sektor Perkebunan		104,46	92,83	93,38	91,46	97,88

Sumber : SIPD – Dinas Perkebunan Prov. Kalbar (Data BPS)

d. Sub Sektor Peternakan

Kondisi Umum Peternakan dan Kesehatan Hewan di Kalimantan Barat pada tahun 2013 – 2017 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Populasi ternak pada tahun 2017 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2016 kecuali babi.
- b. Produksi daging di tahun 2017 juga menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016 kecuali babi.
- c. Untuk produksi daging kerbau pada tahun 2016, masih dalam satu pendataan dengan daging sapi, sedangkan di tahun 2017 data produksi daging kerbau telah didata secara terpisah dengan data produksi daging sapi
- d. Produksi telur di tahun 2017 untuk semua jenis telur menunjukkan peningkatan dibandingkan tahun 2016.

- e. Produksi susu di tahun 2017 meningkat dibandingkan tahun 2016 dengan produktivitas yang sama. Peningkatan produksi didorong adanya peningkatan populasi ternak sapi perah laktasi.
- f. Kondisi pengendalian Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) Tahun 2017 meningkat lebih baik dibandingkan tahun 2016, kecuali untuk penyakit rabies yang penyebaran lokasi kejadian meningkat di 9 kabupaten pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016 (8 kabupaten).
- g. Untuk tren peningkatan populasi dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 menunjukkan pertumbuhan rata-rata per tahun yang meningkat dari 2,57% untuk ayam buras dan 55,72% untuk ayam ras pedaging. Sedangkan perlambatan populasi dari tahun 2013-2017 tertinggi pada ternak sapi perah (-15,74%).
- h. Pertumbuhan produksi daging tertinggi berasal dari daging babi (158,50%), sedangkan perlambatan pertumbuhan ada pada produksi daging kambing (-19,99%).
- i. Pertumbuhan produksi telur tertinggi adalah pada telur yang berasal dari ayam ras petelur dengan pertumbuhan rata-rata per tahun 11,53%. Perlambatan produksi telur per tahun ditunjukkan pada produksi telur itik (-4,44%).
- j. Pertumbuhan produksi sapi perah menunjukkan peningkatan rata-rata per tahun 6,86 ton.

Kondisi umum peternakan dan kesehatan hewan ditunjukkan pada tabel 2.81 berikut

Tabel 2.81
Realisasi Populasi dan Produksi Daging Ternak (Ekor, Ton)
Tahun 2013-2017

No.	Jenis Data	Realisasi						Rata2 %	Pertumb %
		Satuan	2013	2014	2015	2016	2017**		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1.	Populasi Ternak								
	1) Sapi Potong	Ekor	140.204	151.376	160.018	164.113	170.174	157.177	4,98
	2) Sapi Perah	Ekor	169	49	43	50	52	73	-15,74
	3) Kambing	Ekor	167.471	148.153	152.368	156.631	182.833	161.491	2,71
	4) Domba	Ekor	227	109	106	121	146	142	-4,98
	5) Babi	Ekor	413.508	533.686	560.566	570.714	540.524	523.800	7,66
	6) Ayam Buras	Ekor	6.778.650	4.064.558	5.916.097	5.852.916	6.194.202	5.761.285	2,57
	7) Ayam Ras Petelur	Ekor	2.475.690	3.383.306	2.525.786	2.349.681	2.526.367	2.652.166	2,97
	8) Ayam ras Pedaging	Ekor	12.545.991	33.542.658	44.500.041	53.309.630	54.939.395	39.767.543	55,72
	9) Total Ayam	Ekor	21.800.331	40.990.522	52.941.924	61.512.227	63.659.964	48.180.994	34,22
	10) Itik (Bebek)	Ekor	617.481	582.396	580.828	545.298	576.960	580.593	-1,57
2.	Hasil Produksi Ternak								
	1) Daging Sapi Potong	Ton	6.680	7.274	5.532	5.306	5.675	6.093	-3,05
	2) Daging Kambing	Ton	43.955	31.690	265	358	401	15.334	-19,99
	3) Daging Babi	Ton	1.653	3.410	22.425	18.058	16.176	12.344	158,51
	4) Daging Ayam Buras	Ton	6.680	8.109	4.891	3.744	3.899	5.465	-9,40
	5) Daging Ayam Ras Pedaging	Ton	43.955	31.690	44.436	40.778	45.034	41.179	3,63
	6) Total Daging Ayam	Ton	50.635	39.799	49.327	44.522	48.933	46.643	0,68
	7) Daging Itik	Ton	509	458	265	221	272	345	-11,42
	8) Ternak Ruminansia Kecil	Ton	25.089	28.153	22.690	18.417	16.577	22.185	-9,00
3.	Produksi Telur								
	1) Telur Ayam Buras	Ton	3.125	2.816	3.577	3.528	3.632	3.336	4,68
	2) Telur Ayam Ras Petelur	Ton	24.527	43.800	31.850	27.776	29.892	31.569	11,53
	3) Telur Itik	Ton	3.245	3.356	2.664	2.578	2.647	2.898	-4,44
4.	Produksi Susu								
	Sapi Perah	Kg	36.000	42.000	34.992	43.200	44.928	40.224	6,86
5.	Produktivitas Susu								
	Sapi Perah	lt/ekor/hari	5.800	5.800	5.800	6.915	6.915	6.246	4,81
6.	Pemotongan								
	1) Sapi Potong	Ekor	53.221	47.919	40.061	37.123	38.583	43.381	-7,44
	2) Kambing	Ekor	36.328	19.521	22.761	31.095	32.173	28.376	2,60
	3) Domba	Ekor	31	-	-	10	15	11	0,00
	4) Babi	Ekor	318.984	337.648	324.647	263.838	233.659	295.755	-
7.	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular								
	1) Penyakit Avian Influenza		-	-	-	-	Bebas		
	2) Penyakit Brucellosis		-	-	-	-	Bebas		
	3) Penyakit Hog Cholera		menurun 2%	Turun 100 %	menurun 5%	Bebas	Bebas		
	4) Penyakit Parasiter		-	Turun 27,73 %	Turun 50,43 %	Turun 100 %	Turun 24,97%	Turun 5%	
	5) Penyakit Rabies		-	Terkendali, kab Ktp, Mlw, Stg, KH, Ldk, Bky Skd, Sgu, Mpw, KKR, KKU					

Sumber : Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Kalimantan Barat 2018

2.3.2.4. Kehutanan

Sektor kehutanan memiliki empat indikator yang mengukur keberhasilan program dibidang kehutanan. Lahan kritis di Kalimantan Barat pada tahun 2017 secara umum capaiannya sama dengan tahun 2016, baik luas potensi lahan kritis, luas lahan kritis, lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan. Potensi lahan kritis tahun 2017 sebesar 859.578,46 ha, luas lahan kritis sebesar 835.635,23 ha, lahan kritis di dalam kawasan hutan sebesar 23.943,23 ha.

Kerusakan hutan tahun 2017 menunjukkan penurunan. Penurunan sekitar 1.160 hektar atau 39,46 persen dari tahun 2016 seluas 2.940 hektar. Penurunan kerusakan hutan disebabkan adanya penurunan jumlah titik api penyebab kebakaran hutan dan luas kebakaran hutan jika dibanding tahun sebelumnya. Titik api penyebab kejadian kebakaran hutan turun sebesar 62,62 persen, dari jumlah titik api 1.022 titik di tahun 2016 menjadi 640 titik tahun 2017. Luas kebakaran hutan juga menunjukkan perkembangan positif, terjadi penurunan luas kebakaran hutan sebesar 24,67 persen, dari luas kebakaran 1.841,85 Ha tahun 2016 menjadi 454,2 Ha tahun 2017.

Tabel 2.82
Kondisi Umum Bidang Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Lahan Kritis					
1. Potensi Lahan Kritis (Ha)	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88	2742035,88
2. Luas Lahan Kritis (Ha)	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46	859.575,46
3. Lahan Kritis di dalam Kawasan Hutan (Ha)	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23	835.632,23
4. Lahan Kritis di luar Kawasan Hutan (Ha)	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23	23.943,23
Kerusakan Hutan					
1. Luas Kerusakan Hutan (Ha)	550	520	580	490	500
2. Titik Api Penyebab Kejadian Kebakaran Hutan (Unit)	3.219	5.277	2.724	1.022	640
3. Luas Kebakaran Hutan (Ha)	178,45	2.948,00	2.894,56	1.841,85	454,2
Rehabilitasi Hutan dan Lahan					
1. Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Ha)	61.928,20	22.124,18	13.221,87	11.382,84	17.351,50
2. Luas Penghijauan (Ha)	557	8.931,43	143	1230	1840
3. Luas Lahan Reboisasi (Ha)	61.371,20	13.192,75	13.078,87	10.152,84	15.547,50
Produksi Kayu Bulat Asal Kayu (M³)					

INDIKATOR	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Hak Pengusaha Hutan (M ³)	241.696,21	219.561,55	333.203,99	128.087,90	137.884,39
Hutan Tanaman Industri (M ³)	207.654,76	117.949,82	196.724,97	784.737,00	1.079.658,34
IPK/Hutan Hak/Hutan Adat (M ³)	817.370,68	338.667,09	218.030,75	34.541,17	35.318,86

Sumber : Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Tabel 2.83
Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Per Kabupaten Se- Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapuas Hulu	2,248.00	260.00	510.00	870.00	-
2	Sintang	2,360.00	235.00	860.00	240.00	260.00
3	Melawi	1,647.00	120.00	400.00	480.00	-
4	Sekadau	8,837.38	100.00	275.00	150.00	-
5	Sanggau	4,000.00	430.00	855.00	-	-
6	Landak	4,000.00	800.00	809.00	-	-
7	Mempawah	400.00	170.00	389.00	90.00	-
8	Kubu Raya	2,640.00	200.00	280.00	525.00	-
9	Sambas	1,620.00	80.00	665.00	50.00	375.00
10	Bengkayang	4,764.00	206.00	212.00	-	-
11	Ketapang	7,630.30	291.00	879.10	685.00	-
12	Kayong Utara	3,840.00	100.00	200.00	-	-
13	Kota Singkawang	175.00	-	37.50	37.50	-
14	Kota Pontianak	-	-	-	-	-

Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

Catatan, Luas Rehabilitasi Hutan dan Lahan Prov. Kalbar termasuk pembangunan HTI dan Hasil kegiatan BPDAS Kapuas

Tabel 2.84
Kerusakan Hutan Per Kabupaten Se- Kalimantan Barat
Tahun 2013-2017

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1	Kapuas Hulu	5,120.00	101.00	66.00	220.00	200.00
2	Sintang	4,980.00	2,620.00	860.00	460.00	320.00
3	Melawi	4,310.00	4,200.00	620.00	320.00	220.00
4	Sekadau	1,120.00	220.00	220.00	120.00	100.00
5	Sanggau	500.00	800.00	300.00	250.00	120.00
6	Landak	2,280.00	900.00	55.00	100.00	100.00
7	Mempawah	142.00	307.00	225.00	120.00	60.00
8	Kubu Raya	2,590.00	100.00	55.00	55.00	20.00
9	Sambas	3,120.00	780.00	500.00	260.00	120.00
10	Bengkayang	2,010.00	2,800.00	7.50	210.00	80.00
11	Ketapang	5,230.00	1,390.50	70.00	220.00	120.00
12	Kayong Utara	774.00	840.00	120.00	125.00	100.00
13	Kota Singkawang	200.00	2,063.11	330.00	480.00	220.00

No	Kabupaten	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
14	Kota Pontianak	-	-	-		

Sumber : Dinas Kehutanan Prov. Kalbar

2.3.2.5. Energi dan Sumber Daya Mineral

Sektor Pertambangan dan Penggalan sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Hal ini dapat dilihat semakin meningkatnya kontribusi PDRB sektor Pertambangan dan Penggalan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Barat.

Tabel 2.85

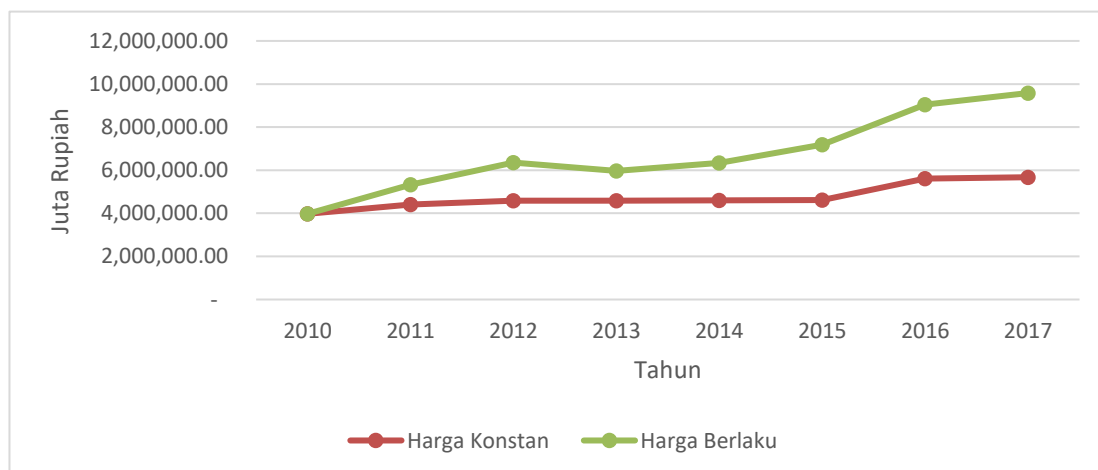
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Sektor Pertambangan dan Penggalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017

PDRB	Tahun (Juta Rupiah)							
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Harga Konstan	3,977,959.46	4,411,733.16	4,590,725.54	4,590,067.65	4,594,850.96	4,622,382.74	5,616,900.98	5,675,012.53
Harga Berlaku	3,977,959.46	5,334,935.74	6,351,206.79	5,966,680.44	6,333,793.51	7,181,002.80	9,046,110.08	9,582,723.22

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Gambar 2.13

Perkembangan PDRB Sektor Pertambangan dan Penggalan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2010-2017



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Kalimantan Barat memiliki potensi sumberdaya mineral yang berlimpah dengan potensi yang tersebar di hampir semua Kabupaten/Kota. Kalimantan Barat, sebagaimana tabel 2.86 di bawah ini.

Tabel. 2.86
Potensi Jenis Bahan Galian sesuai Lokasi di Kalimantan Barat

Komoditas (1)	Lokasi (2)	Sumber Daya/ Potensi (3)	
Radio aktif			
Uranium	Kabupaten Melawi	24.112,00	Ton
Logam			
Emas	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	37.359.135,00	Kg
Timbal/Timah Hitam	Kabupaten Ketapang dan Kota Singkawang	444.393	Ton
Besi	Kab. Ketapang ,Sanggau, Melawi, Kapuas Hulu, Bengkayang & Sambas	102.880.224,00	Ton
Mangan	Kab. Bengkayang dan Sambas	2.409.735,00	Ton
Seng	Kabupaten. Ketapang	35.064	Ton
Bauksit	Kab. Pontianak, Bengkayang, Sanggau, Landak, Ketapang, Sekadau, Kuburaya & Kayong Utara	4.376.036.722,00	Ton
Antimoni	Kabupaten. Kapuas Hulu	149.990,00	Ton
Cinnabar	Kabupaten. Kapuas Hulu	5.306.283,00	Ton
Barit	Kabupaten. Ketapang	1.932,00	Ton
Non Logam			
Mika	Kabupaten. Sanggau dan Sintang	524,00	Ton
Batu Gamping	Kabupaten Kapuas Hulu, Bengkayang, Sambas, Ketapang	30.000.000,00	Ton
Zirkon	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.570.210.100,00	Ton
Feldspar	Kabupaten Sanggau, Sintang dan Sambas	2.333.667,00	Ton
Kaolin	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	316.858.857,00	Ton
Ball Clay	Kabupaten Bengkayang	10.569.307,00	Ton
Pasir Kuarsa	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	629.581.456,75	Ton
Intan	Kabupaten Landak	8.311,25	Karat
Kristal Kuarsa	Kabupaten Ketapang, Landak dan Melawi	810,06	Ton
Batubara			
Batubara	Kabupaten Sintang, Melawi, Kapuas Hulu	186.662.875,00	Ton
Gambut	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	12..577.145.000,00	Ton
Batuan			
Andesit	Kabupaten Pontianak, Sintang, Melawi, Sanggau, Bengkayang & Sambas	1.040.989.262.858,59	Ton
Basal	Kabupaten Sanggau, Sambas & Bengkayang	6.448.838.134,00	Ton
Granit	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	1.565.404.407.811,21	Ton
Pasir Sungai	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	17.681.122.810,96	Ton

Komoditas	Lokasi	Sumber Daya/ Potensi	
(1)	(2)	(3)	
Sirtu	Semua Kabupaten di Provinsi Kalbar	110.851.194.260,90	Ton
Minyak dan Gas Bumi			
Minyak dan Gas Bumi	Cekungasn Ketungau dan Cekungan Melawi	1.073.700.000,00	STBM

Sumber : Dinas ESDM, 2017

Pengelolaan Mineral dan Batubara adalah usaha pertambangan mineral dan batubara yang telah dilakukan di Kalimantan Barat baik berupa kegiatan sebagian atau seluruh tahapan dalam rangka penelitian, pengelolaan, dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi Penyelidikan Umum, Eksplorasi, Studi Kelayakan, Konstruksi, Penambangan, Pengolahan dan Pemurnian, Pengangkutan, dan Penjualan serta Kegiatan Pasca Tambang.

Jumlah Perizinan sektor Pertambangan Mineral & batubara Provinsi Kalbar yang telah dikeluarkan atau diberikan kepada Perusahaan sampai dengan 30 Juni 2018 adalah sebanyak 484 IUP yang terdiri dari 147 IUP Komoditas Mineral Logam dan Batubara, 337 IUP Komoditas Mineral Non Logam dan Batuan, 2 IUP OPK Pengolahan dan Pemurnian Logam, 6 Izin Usaha Jasa Pertambangan (IUJP), dan 9 Izin SKT Pertambangan.

Sedangkan berdasarkan tahap kegiatannya, jumlah IUP di Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari 195 IUP Eksplorasi dan 289 IUP Operasi Produksi. Dari jumlah 147 IUP Komoditas Logam dan Batubara di Kalimantan Barat, berdasarkan status perizinan di Dirjen Minerba KESDM diketahui rincian status IUP kategori CNC sebanyak 143 izin dan IUP kategori Non CNC sebanyak 4 izin (sedang proses rekonsiliasi).

Jumlah IUP yang dikeluarkan oleh Bupati/ Walikota, namun belum disesuaikan menjadi Izin Provinsi Kalimantan Barat sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebanyak 107 IUP. Pemegang IUP Tahap Operasi Produksi Provinsi Kalimantan Barat berdasarkan data terakhir yang belum menempatkan Jaminan Reklamasi dan Pasca Tambang adalah sebanyak 239 IUP.

Dilihat dari penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan tersebut, kontribusi Penerimaan Negara Bukan Pajak (Iuran tambang) Kalimantan Barat (Prov/Kab/Kota) tahun 2017

sebesar Rp. 773.450.203.849,50 terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp.130.543.818.487,50 dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 278.806.069.537,00,-. Sedangkan realisasi penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) untuk Provinsi Kalimantan Barat tahun 2017 sebesar Rp. 123.752.031.016,- terdiri dari Landrent (luran tetap) sebesar Rp.20.887.010.958,- dan Royalti (luran produksi) sebesar Rp. 4.278.617.154,-.

Untuk potensi cekungan air tanah, berdasarkan Permen ESDM Nomor 2 Tahun 2017 dijelaskan bahwa Kalimantan Barat memiliki 7 (tujuh) titik cekungan air tanah yaitu cekungan air tanah Paloh seluas 561 km², cekungan air tanah Sambas (3.178 km²), cekungan air tanah Singkawang (728 km²), cekungan air tanah Pontianak (22.620 km²), cekungan air tanah Sintang (24,74 km²), cekungan air tanah Kapuas Hulu (7.107 km²) dan Palangkaraya-Banjarmasin (95.980 km²).

2.3.2.5.1. Ketenagalistrikan

Pembangkit listrik terdiri pembangkit listrik PLN, pembangkit listrik swasta dan *captive power* serta pembangkit listrik dari energi baru dan terbarukan. Sampai dengan akhir tahun 2017, produksi energi listrik sebesar 2.683.548.654 kWh meningkat 5,34% dibanding tahun sebelumnya.

Tabel 2.87
Persentase Peningkatan Produksi Listrik Per Tahun
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2012-2017

Tahun	Produksi Listrik (kWh)	Persentase Peningkatan (%)
(1)	(2)	(3)
2012	1,835,600,289	10.38
2013	2,105,959,618	14.73
2014	2,225,902,325	5.70
2015	2,340,324,532	5.14
2016	2,552,311,860	9.06
2017	2,683,548,654	5.14

Sumber : BPS Provinsi Kalbar, 2018

Dari jumlah tersebut, produksi energi listrik ini didominasi pembelian dan sewa dari luar PLN sebesar 84,8 %. Untuk Produksi sendiri 9 % oleh pembangkit tenaga diésel (PLTD), Pembangkit Tenaga Uap (PLTU) 5,9 % Pembangkit Tenaga Gas (PLTG) 0,2 %, pembangkit PLTMH sebesar 0,1 % dan PLTS sebesar 0,001 %.

Ratio elektrifikasi pada akhir tahun 2017 sebesar 82,21 % dengan jumlah pelanggan 1.040.948 pelanggan. Sementara Ratio Desa Berlistrik pada tahun 2017 berdasarkan data PLN sebesar 77 %.

Provinsi Kalimantan Barat memiliki potensi Energi yang bersumber dari energi baru dan terbarukan dan berdasarkan inventarisasi potensi tersebut adalah sebagai berikut:

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 MW, suatu potensi yang tidak kecil nilainya sehingga perlu dikaji lebih jauh bagaimana memanfaatkan potensi energi air ini untuk kebutuhan sarana listrik masyarakat secara maksimal.

Sebagai negara tropis, hampir di seluruh wilayah Indonesia mempunyai potensi energi surya dengan radiasi harian matahari rata-rata 4,8 kWh/m². Kalimantan Barat yang dilintasi Garis Khatulistiwa mempunyai nilai intensitas energi surya yang cukup tinggi dengan radiasi energi surya harian rata-rata sebesar 2.768,7 Wh/m² sampai dengan 9.583,9 Wh/m² sehingga dapat dimanfaatkan untuk membangkitkan energi listrik melalui proses fotovoltaic atau dengan menggunakan secara langsung panas energi matahari tersebut. Pada tahun 2017, potensi tenaga surya di Kalimantan Barat telah dimanfaatkan dengan adanya 11 (sebelas) pembangkit listrik tenaga surya (PLTS). Dari 11 unit PLTS tersebut, tiga diantaranya merupakan milik PT. PLN dengan total kapasitas terpasang sebesar 180 kilowatt.

Potensi energi air terinventarisasi dan teridentifikasi cukup besar dan tersebar di beberapa kecamatan dan kabupaten dengan total potensi teoritis sebesar 67,54 megawatt.

Pemanfaatan potensi energi air di Kalimantan Barat telah dilakukan PT. PLN dengan adanya enam pembangkit listrik tenaga air (PLTA) dengan kapasitas total 2.030 kilowatt. Selain itu pemanfaatan energi air juga dimanfaatkan melalui pembangunan satu unit pembangkit listrik tenaga mikro-hidro (PLTMH) berkapasitas total 200 kilowatt.

Potensi energi angin yang cukup banyak untuk dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber energi untuk pembangkitan energi listrik. Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Meteorologi Supadio, secara umum kecepatan angin rata-rata 2-6 knot dan kecepatan maksimum rata-rata per bulan adalah 6-26 knot.

Dengan melihat potensi perkebunan sawit yang ada di Kalimantan Barat yaitu sebesar 921.560 ton per tahunnya, maka dapat diperkirakan besar potensi daya listrik yang mampu dihasilkan. Dari 921.560 ton produksi TBS (Tandan Buah Segar) per tahun akan dihasilkan CPO sebanyak 22% atau sekitar 202.743 ton CPO. Jika kita memperkirakan bahwa 50% dari CPO tersebut dapat digunakan sebagai biodiesel, maka dapat dihasilkan sekitar 101.371 ton biodiesel. Jika kita anggap 1 liter = 1 kg, maka biodiesel yang dihasilkan setara dengan 101.371.000 liter per tahunnya. Potensi daya yang dihasilkan dari biodiesel tersebut adalah 893.907.909,09 kWh per tahunnya.

Dampak lain perkembangan pesat produksi minyak sawit mentah adalah limbah cair kelapa sawit, yang sering disebut sebagai Palm Oil Mill Effluent atau POME. Setiap ton tandan buah segar yang diolah menghasilkan limbah cair sekitar 50% dibandingkan dengan total limbah lainnya, sedangkan tandan kosong sebanyak 23% (Sutarta dalam Wibisono, 2013).

Limbah cair kelapa sawit (Palm Oil Mill Effluent atau POME) adalah limbah cair yang berminyak dan tidak beracun, berasal dari proses pengolahan minyak kelapa sawit, namun limbah cair tersebut dapat menyebabkan bencana lingkungan apabila tidak dimanfaatkan dan dibuang di kolam terbuka karena akan melepaskan sejumlah besar gas metana dan gas berbahaya lainnya

ke udara yang menyebabkan terjadinya emisi gas rumah kaca. Tingginya kandungan Chemical Oxygen Demand (COD) sebesar 50.000-70.000 mg/l dalam limbah cair kelapa sawit memberikan potensi untuk dapat di konversi menjadi listrik dengan menangkap biogas (gas metana) yang dihasilkan melalui serangkaian tahapan proses pemurnian. Jumlah limbah cair yang dihasilkan oleh pabrik kelapa sawit berkisar 600 - 700 liter/ton tandan buah segar (TBS). Limbah cair kelapa sawit ini kemudian dimanfaatkan menjadi tenaga listrik melalui proses anaerob digestion dengan teknologi *covered lagoon* atau *continuous stirred tank reactor* (CSTR). Limbah cair sawit memiliki kandungan organik kemudian difermentasi dengan bakteri untuk menghasilkan biogas yang mengandung gas methane.

Potensi biomassa di Provinsi Kalimantan Barat juga memiliki potensi yang cukup besar jika dimanfaatkan secara semaksimal mungkin. Potensi ini didapat dari hasil pengelolaan limbah pertanian, antara lain : sekam padi yang memiliki potensi setara dengan 73.107.507,20 SLM atau dalam bentuk energi listrik setara dengan 664.613.701,82 kWh setiap tahunnya, karet setara dengan 101.766.582 SLM atau dalam bentuk energi setara dengan 925.150.745,45 kWh per tahun, kelapa setara dengan 1.808.400 SLM atau 16.440.000 kWh per tahun, kopi setara dengan 1.628.676 SLM atau 14.806.145,45 kWh per tahunnya, coklat/kakao setara dengan 974.970 SLM atau 8.863.363,64 kWh per tahunnya.

Potensi energi biogas di Provinsi Kalimantan Barat dapat diperoleh dari limbah ternak yaitu sapi, kerbau, babi, maupun unggas. Dari hasil inventarisasi, pengumpulan data dan analisa yang dilakukan maka potensi energi dari pemanfaatan limbah ternak yang dapat dimanfaatkan untuk biogas ini dapat mencapai 6.084.067,95 SLM yang jika dikonversi menjadi energi listrik setara dengan 55.309.708,64 kWh.

Selain tenaga surya dan tenaga air, sistem kelistrikan di Kalimantan Barat juga mencakup pembangkit listrik tenaga uap berbahan bakar biomassa dengan kapasitas total 7.000 kilowatt.

2.3.2.5.2. Pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN)

Berdasarkan hasil penelitian Badan Tenaga Nuklir Nasional (BATAN) mengklasifikasikan kandungan uranium di Kalimantan Barat (Kecamatan Nanga Ella, Kabupaten Melawi) sebagai cadangan terukur/terbukti sebesar 900 ton, dengan cadangan terindikasi sebesar 6.962 ton, cadangan tereka sebesar 1.737 ton, dan cadangan hipotetik sebesar 14.517 ton. Seiring dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran, Pemerintah Kalbar mendorong Pemerintah Pusat agar pemanfaatan potensi uranium tersebut di atas dapat dioptimalkan sebagai bahan bakar pengembangan energi baru terbarukan untuk pembangkit listrik tenaga nuklir. Salah satu upaya penerapan kebijakan ini adalah adanya perjanjian kerjasama antara Pusat Kajian Sistem Energi Nuklir (PKSEN) BATAN dan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 298.3/SEN/RN01.01/12/2016 dan 01/PK-BAPPEDA/2016 tentang Kajian Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir.

Sebelumnya, sudah pernah dilakukan Kajian Tapak oleh BATAN berupa Penentuan Tapak Potensial PLTN dengan Metode SIG Di Wilayah Pesisir Provinsi Kalimantan Barat (Susiaty, 2014). Dalam kajian tersebut, pemilihan tapak PLTN, IAEA telah mengeluarkan pedoman (IAEA Safety Guide NS-R-3) dan peraturan BAPETEN (Perka BAPETEN No. 5 tahun 2007) tentang evaluasi tapak untuk mendapatkan tapak PLTN yang aman dan menjamin keselamatan. Untuk mempersiapkan program PLTN di Kalimantan Barat, BATAN telah melakukan penelitian di sepanjang pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara, Kalimantan Barat. Tujuan penelitian adalah untuk mendapatkan tapak potensial PLTN di wilayah pesisir Kabupaten Ketapang dan Kayong Utara berdasarkan kriteria pembobotan dan pemodelan spasial dan SIG. Penentuan tapak

potensial didasarkan pada beberapa kriteria, yaitu: kemiringan lereng, litologi, geologi, topografi, curah hujan, kerawanan bencana, jarak ke badan air, posisi daerah pemukiman, tataguna lahan, lahan gambut, hidrogeologi, dll. Berdasar hasil pembobotan dan pemeringkatan diperoleh 4 lokasi yang sesuai untuk dijadikan sebagai tapak potensial PLTN, diantaranya berada di wilayah pesisir yang terdapat di Kecamatan Kendawangan, Sukadana Matan Hilir Utara dan Matan Hilir Selatan.

2.3.2.6. Perdagangan

Sektor perdagangan Kalimantan Barat pada sisi ekspor banyak menghasilkan produk primer yang cukup laku dipasaran sehingga kegiatan ekspor masih tetap berlangsung dari tahun ke tahun. Akan tetapi kinerja nilai ekspor di Kalimantan Barat dari tahun 2014 dan 2015 cenderung mengalami penurunan. Pada tahun 2015, total nilai ekspor sebesar 564.043.454 US\$ mengalami penurunan sebesar 13,49 % dibandingkan tahun 2014 dengan nilai ekspor 651.986.280 US \$, namun di tahun 2016 kinerja dalam ekspor Kalimantan Barat sudah mulai membaik dengan kenaikan nilai ekspor sebesar 623.422.909 US \$, kenaikan nilai ekspor sebesar 10,53 persen dibandingkan tahun 2015, begitu juga volume ekspor meningkat 61,43 persen dibandingkan tahun 2015. Peningkatan nilai ekspor terus mengalami perkembangan positif pada tahun 2017, dimana tercatat terjadi peningkatan 32,70 persen menjadi 827,300 Juta US\$.

Sedangkan nilai dari kegiatan impor dari Tahun 2013 sampai tahun 2017, mengalami perkembangan yang fluktuatif. Tren penurunan terjadi mulai tahun 2015 dan berlanjut hingga tahun 2017.

Tabel 2.88
Perkembangan Ekspor dan Impor di Kalimantan Barat
Tahun 2013 s/d 2017

Tahun	Ekspor		Impor	
	Volume (kg)	Nilai (US \$)	Volume (kg)	Nilai (US \$)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2013	16.775.583.120	1.348.607.972	611.590.475	498.236.319
2014	1.171.286.892	651.986.280	752.952.826	500.262.690
2015	679.809.314	564.043.454	680.401.373	627.817.186
2016	1.097.403.262	623.422.909	475.098.044	351.835.578
2017	3.243.290.000	827.300.000	440.410.000	269.070.000

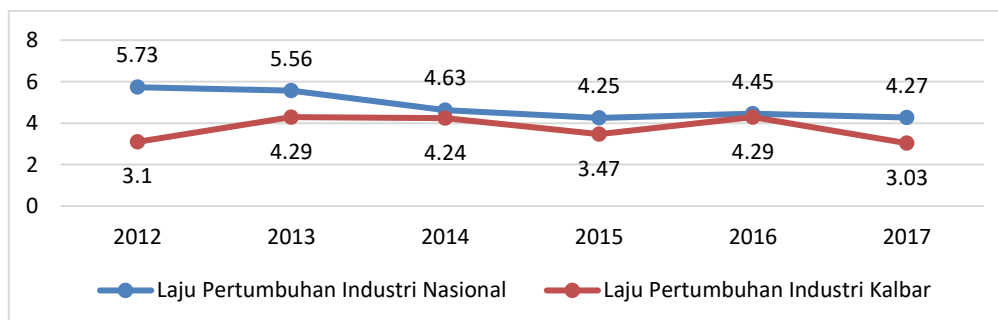
Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, Tahun 2017

2.3.2.7. Perindustrian

Sektor industri sampai dengan tahun 2017 tetap memberi peranan yang cukup besar terhadap perekonomian Kalimantan Barat. Walaupun demikian, dalam satu dasawarsa terakhir peranannya terus mengalami penurunan yang cukup signifikan, yang disebabkan pertumbuhan setiap tahunnya selalu dibawah pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat. Pada tahun 2000 kontribusi sektor industri terhadap perekonomian Kalimantan Barat sebesar 24,15 persen, namun pada tahun 2017 menurun menjadi 16,21 persen. Pencapaian tersebut lebih baik dibandingkan periode yang sama pada tahun 2016 sebesar 16,12 persen.

Gambar 2.14

Perkembangan Laju Pertumbuhan Industri Nasional dan Kalimantan Barat



Sumber : BPS Kalimantan Barat, 2018. (Data Diolah)

Selain berakibat pada lambannya pergerakan perekonomian Kalimantan Barat, kondisi tersebut menyebabkan potensi kehilangan nilai tambah yang sangat besar dari komoditas primer Kalimantan Barat yang cenderung meningkat akhir-akhir ini terutama sektor pertanian (termasuk perkebunan) dan pertambangan. Penurunan peranan sektor industri terutama disebabkan menurunnya kinerja industri kayu dan perkembangan usaha industri pengolahan berbasis sumber daya alam lainnya (perkebunan, hasil pertanian lainnya dan pertambangan) yang masih sangat lamban dan hanya berbentuk industri hulu relatif peningkatan nilai tambahnya sangat kecil. Kondisi tersebut mau tidak mau mengharuskan Kalimantan Barat mencari alternatif bagi pengembangan industri lain yang memberi dayaungkit terhadap perekonomian. Bagaimanapun kedepan daerah Kalimantan Barat harus segera menerapkan strategi percepatan proses transformasi sektor industri pengolahan yang mampu menghasilkan nilai tambah produksi, berdaya saing dan efisien. Percepatan penumbuhan Kawasan Industri untuk lokalisasi pemenuhan infrastruktur dan pengendalian lingkungan serta upaya pengembangan dan penyebaran IKM hingga ke desa dapat menjadi jalan percepatan pengembangan sektor industri daerah.

Sebagai langkah dalam penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat, Pemprov Kalimantan Barat melalui Dinas Perindag Prov. Kalimantan Barat telah menyusun Rencana Induk Pembangunan Industri Provinsi (RPIP) Kalimantan Barat 2017-2037 yang telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017. RPIP tersebut telah mengakomodir 7 (tujuh) komoditi industri unggulan serta sebagai wadah sinergitas antar stakeholder dalam menentukan langkah dan arah kedepannya dalam rangka penumbuhan dan pengembangan industri Kalimantan Barat. Hal tersebut juga merupakan langkah dalam mencapai Visi Pembangunan Industri Nasional Jangka Panjang pada Tahun 2025 yang mencanangkan Indonesia menjadi Negara Industri Tangguh Dunia yang ditandai dengan Kemampuan seimbang antara IKM dan Industri Besar.

Tabel 2.89
Perkembangan Jumlah IKM

TAHUN REALISASI / TARGET	PERKEMBANGAN IKM		
	NILAI INVESTASI IKM	JUMLAH UNIT USAHA IKM	JUMLAH TENAGA TERSERAP IKM
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	812.856.091	6.302	40.664
2014	443.572.885	6.957	43.510
2015	871.754.111	6.811	42.229
2016	909.696.175	8.958	42.270
2017 *)	918.793.170	9.048	42.500

Catatan : *) Angka Agregasi Sementara Tahun 2017.

Sumber : Dinas yang menangani Industri di Kab/Kota.

RPMP Kalimantan Barat 2017-2037 juga diharapkan dapat menjadi wadah sinergitas antar stakeholder dalam pemecahan masalah-masalah lainnya terkait dengandengan kendala yang dihadapi sektor industri seperti : kurang memadainya sarana infrastruktur daerah seperti jalan, pelabuhan, energi, ketersediaan air bersih, pembangunan kawasan industri, kemudahan investasi, dll; dimana dengan diatasinya permasalahan-permasalahan yang ditemui akan dapat menumbuhkembangkan unit usaha industri baik Industri Kecil, Menengah, maupun Besar termasuk hilirisasi komoditas yang ada di Kalimantan Barat.

Sementara itu untuk kondisi Jumlah Perusahaan industry besar dan sedang di Kalimantan Barat pada tahun 2014 tercatat sebanyak 126 Perusahaan. Jumlah ini lebih tinggi dibandingkan kondisi tahun sebelumnya sebanyak 124 Perusahaan/Usaha atau meningkat 1,61 persen.

2.3.2.8. Transmigrasi

Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah. Sejak Pra Pelita s/d tahun 2013 telah datang transmigran sebanyak 127.554 KK / 536.540 jiwa ke Kalimantan Barat. Sepanjang tahun tahun 2008-2013 sebanyak 5.277 KK / 20.380 jiwa

(TPS 3.142 KK / 12.620 jiwa dan TPA 2.135 KK / 5.277 jiwa). Sejak adanya program transmigrasi sampai pada tahun 2013 telah dibangun Unit Pemukiman Transmigrasi sebanyak 344 UPT. Dari jumlah tersebut 216 UPT telah menjadi desa baru dan 11 kecamatan baru.

Tabel 2.90
Penempatan Transmigrasi di Kalimantan Barat
2013-2016

Tahun	Jenis Transmigrasi		Jumlah
	Umum (jiwa)	Swakarsa Mandiri (jiwa)	
(1)	(2)	(3)	(4)
2013	455	133	588
2014	160		160
2015	245		245
2016	371		371

Sumber: olahan dari BPS. statistik-mobilitas-penduduk-dan-tenaga-kerja.

Dalam menyukseskan program transmigrasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat telah Pemerintah provinsi dengan Daerah Asal Transmigrasi. Ada 10 Pemprov. Daerah Asal Transmigrasi: Lampung, Banten, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, DI. Yogyakarta, Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur. Transmigrasi Pembangunan transmigrasi dilaksanakan berbasis kawasan yang memiliki keterkaitan dengan kawasan sekitarnya sehingga membentuk suatu kesatuan sistem pengembangan ekonomi wilayah.

2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

2.4.1.1. Nilai Tukar Petani

Kondisi nilai tukar petani sebagai salah satu indikator untuk mengukur tingkat kesejahteraan petani dengan mengukur kemampuan tukar produk (komoditas) yang dihasilkan/dijual petani (It), dibandingkan dengan produk yang dibutuhkan petani (Ib) dari proses

produksi maupun untuk konsumsi rumah tangga. Secara umum nilai NTP dapat diartikan, jika NTP > 100 maka petani mengalami surplus. Harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Pendapatan petani naik lebih besar dari pengeluarannya, dengan demikian tingkat kesejahteraan petani lebih baik dibanding tingkat kesejahteraan petani sebelumnya. Sebaliknya jika nilai NTP < 100, berarti petani mengalami defisit, dimana kenaikan harga produksinya relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Tingkat kesejahteraan petani pada suatu periode mengalami penurunan dibanding tingkat kesejahteraan petani pada periode sebelumnya. Perkembangan nilai NTP di Kalimantan Barat dapat dilihat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.91
Nilai Tukar Petani (NTP) Kalimantan Barat 2013-2017

Uraian	Indeks				
	2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Nilai Tukar Petani Palawija (NTPP)	95.28	98.92	98.70	97.34	94.40
Nilai Tukar Petani Hortikultura (NTPH)	103.08	104.64	103.31	103.04	101.09
Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (NTPR)	106.58	92.83	93.38	91.46	97.89
Nilai Tukar Petani Peternakan (NTPT)	79.19	95.07	95.49	95.38	93.95
Nilai Tukar Petani Perikanan (NTPN)	103.14	98.65	100.01	102.59	102.03
NTP	98.01	96.63	96.73	95.58	96.67

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Selama kurun 2013 hingga 2017, Nilai tukar Petani Provinsi Kalimantan Barat masih dibawah nilai 100 yang berarti Petani masih mengalami defisit yakni kenaikan harga produksinya lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Jika dilihat dari NTP per sektor, maka NTP sektor Hortikultura dan NTP sektor Perikanan nilainya telah melebihi angka 100 yang berarti petani mengalami surplus yakni harga produksinya naik lebih besar dari kenaikan harga konsumsinya. Sementara untuk NTP sektor Palawija, NTP sektor Perkebunan dan NTP

sektor Peternakan masih dibawah nilai 100, yang berarti petani pada 3 (tiga) sektor tersebut mengalami defisit.

2.4.1.2. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita

Pengeluaran konsumsi rumah tangga per kapita dimaksudkan untuk mengetahui tingkat konsumsi rumah tangga yang menjelaskan seberapa besarnya tingkat pengeluaran rumah tangga. Angka konsumsi rumah tangga per kapita di tahun 2013 sampai dengan 2017 di Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.92
Pengeluaran Rata-Rata per Kapita Sebulan
Di Kalimantan Barat Tahun 2013-2017

URAIAN	Satuan	Tahun				
		2013	2014	2015	2016	2017
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	
Makanan/Food	Rp.	367.018	418.014	472.142	451.223	611.733
Non Makanan/Non Food	Rp.	305.193	430.078	376.247	409.006	576.135
Total Pengeluaran RT	Rp.	672.211	848.092	848.388	860.229	1.186.868

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Secara rata-rata selama periode 2013-2017 total pengeluaran rumah tangga per kapita dalam sebulan, konsumsi makanan lebih mendominasi dibandingkan konsumsi non makanan. Sedangkan perkembangan total rata-rata pengeluaran per kapita dalam sebulan dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 terus menunjukkan peningkatan. Rata-rata peningkatan setiap tahunnya sebesar 128.664 rupiah atau 16 persen per tahunnya.

2.4.2. Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur

2.4.2.1. Jalan Mantap Provinsi

Jalan merupakan salah satu instrumen penunjang dalam proses pembangunan, meningkatkan ekonomi rakyat, dan yang paling utama sebagai Jalur Transportasi bagi masyarakat, dan kondisi jalan yang ada sangat mempengaruhi itu semua.

Kondisi jalan Provinsi dari tahun 2013 hingga tahun 2017 dalam kondisi mantap terus mengalami perbaikan akan tetapi pada tahun 2018 persentase jalan provinsi dalam kondisi mantap mengalami penurunan menjadi sebesar 49,71%.

Tabel 2.93
Perkembangan Kondisi Jalan Provinsi di Kalimantan Barat
Tahun 2013-2018

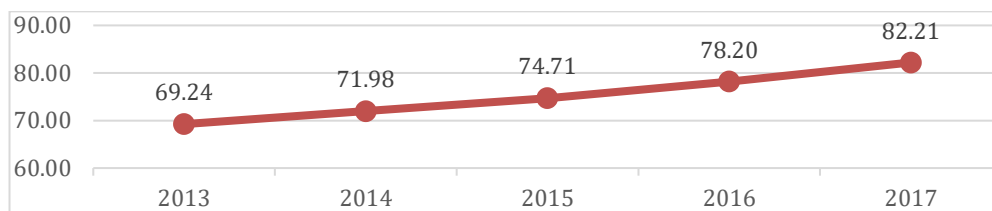
Uraian	2013	2014	2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Panjang jalan Provinsi dalam kondisi mantap	1.239,07	1.260,25	1.266,63	1.255,78	1.282,19	762,98
Panjang Jalan Provinsi	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.562,30	1.534,75	1.534,75
Persentase Jalan Provinsi Dalam Kondisi Mantap (%)	79,31	80,67	81,07	80,38	83,54	49,71

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Kalimantan Barat, 2018

2.4.2.2. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik terus mengalami kenaikan, rata-rata pertumbuhan rumah tangga pengguna listrik dari tahun 2013-2017 adalah sebesar 3,24 poin. Pada tahun 2017 persentase rumah tangga yang menggunakan listrik sebesar 82,21% naik dari tahun 2016 yang hanya sebesar 78,20% rumah tangga telah menggunakan listrik.

Gambar 2.15
Persentase Rumah Tangga Pengguna Listrik Tahun 2013-2017



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2018

Pada Tahun 2017 jumlah desa/kelurahan yang sudah berlistrik PLN di Provinsi Kalimantan Barat sebanyak 1.451 desa/kelurahan atau mencapai 68%. Desa/kelurahan berlistrik Non PLN sebanyak 225 desa/kelurahan atau sebesar 11%. Namun, masih terdapat desa belum berlistrik sebanyak 454 desa

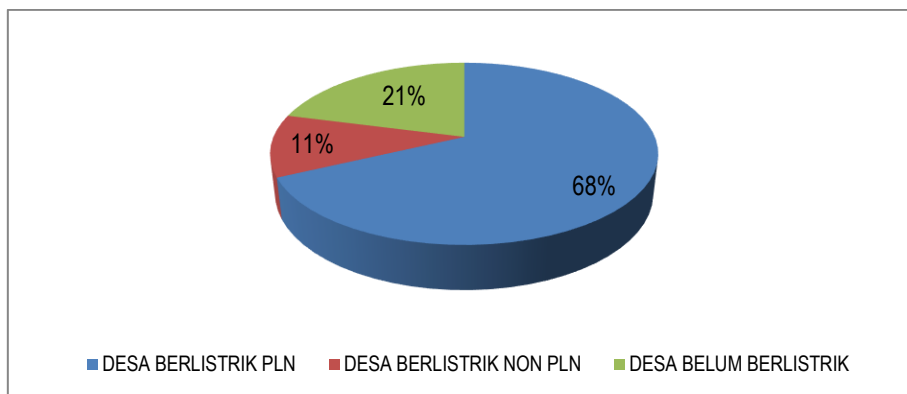
atau sebesar 21% yang banyak tersebar di beberapa kabupaten pedalaman, contohnya di Kabupaten Sintang. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut.

Tabel 2.94
Status Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2017

Kabupaten	Jumlah Desa/Kelurahan	Desa Berlistrik PLN	Desa Berlistrik Non PLN	Desa Belum Berlistrik
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Sambas	193	191	1	1
Bengkayang	124	84	13	27
Landak	156	107	13	36
Mempawah	67	65	0	2
Sanggau	169	124	6	39
Ketapang	262	167	50	45
Sintang	406	188	90	128
Kapuas Hulu	282	187	30	65
Sekadau	87	48	10	29
Melawi	169	91	6	72
Kayong Utara	43	36	2	5
Kubu Raya	117	108	4	5
Pontianak	29	29	0	0
Singkawang	26	26	0	0
TOTAL	2130	1451	225	454
Persentase (%)		68%	11%	21%

Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017

Gambar 2.16
Persentase Desa/Kelurahan yang Berlistrik Provinsi Kalimantan Barat



Sumber: Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Barat, 2017

2.4.2.3. Luas Wilayah Produktif

Luas wilayah Kalimantan Barat adalah seluas 147.307 km² atau 14.730.700 Ha, dengan arahan Kawasan Hutan dan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Barat sebagaimana tabel berikut:

Tabel 2.95
Luas Kawasan Hutan Di Provinsi Kalimantan Barat

Status Lahan	Luas (Ha)
(1)	(2)
Kawasan Lindung	3.931.919
- Hutan Lindung	2.310.873
- Suaka Alam (daratan + perairan)	1.621.046
Kawasan Budidaya	4.457.681
- Hutan Produksi Terbatas (HPT)	2.132.398
- Hutan Produksi Biasa (HPB)	2.127.365
- Hutan Produksi Konversi (HPK)	197.918
Jumlah	8.389.600

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat

Sesuai Surat Keputusan Menteri Kehutanan nomor: SK.936/Menhut-II/2013 dan SK.733/Menhut-II/2014 tanggal 02 September 2014, tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Provinsi Kalimantan Barat ditetapkan, bahwa untuk peruntukan Luas Kawasan Hutan adalah seluas 8.389.600 Ha, yang terbagi atas Kawasan Lindung seluas 3.931.919 Ha (46,87%) dan Kawasan Budidaya seluas 4.457.681 Ha (53,13%).

Tabel 2.96
Arahan Pemanfaatan Kawasan Lindung di Kalimantan Barat (dalam Hektar)

Kabupaten/kota	Pemanfaatan Kawasan Lindung	Luas Wilayah Budidaya
(1)	(2)	(3)
Sambas	25.701	520.142
Kota Singkawang	-	57.264
Bengkayang	34.138	469.966
Landak	54.852	715.442
Mempawah	4.300	199.365
Kubu Raya	143.124	703.660
Kota Pontianak	-	11.149
Sanggau	99.142	1.170.461
Sekadau	52.834	508.369

Kabupaten/kota	Pemanfaatan Kawasan Lindung	Luas Wilayah Budidaya
(1)	(2)	(3)
Sintang	472.057	1.662.850
Melawi	220.945	739.305
Kapuas Hulu	801.270	1.372.897
Ketapang	327.333	2.512.571
Kayong Utara	75.177	234.908
JUMLAH	2.310.873	10.878.349

Sumber: Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat (Catatan: Kawasan lindung hanyalah hutan lindung (tidak termasuk kawasan konservasi berupa Taman Nasional, Suaka Alam dan Taman Wisata Alam). Luas Kawasan Budidaya terdiri dari HPT, HP, HPK dan APL.

Berdasarkan tabel 2.96 diatas sesuai data terakhir tahun 2016 dari 14 kabupaten/kota, diperoleh pemanfaatan untuk Kawasan Lindung terluas terletak di kabupaten Kapuas Hulu (801.270 Ha) atau 34,67 persen, diikuti kab Sintang seluas (472.057 Ha) atau 20,43 persen dan terkecil di kabupaten Mempawah seluas (4.300 Ha) atau 0,19 persen dari total pemanfaatan Kawasan Lindung 2.310.873 Ha.

Berikutnya untuk pemanfaatan Kawasan Budidaya terluas terletak di kabupaten Ketapang (1.662.850 Ha) atau 23,10 persen, diikuti kabupaten Sintang (91.662.850 Ha) atau 15,29 persen dan terkecil di kota Pontianak seluas (11.149 Ha) atau 0,10 persen dari total pemanfaatan Kawasan Budidaya 10.878.349 Ha.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Keuangan daerah merupakan faktor strategis yang turut menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan daerah, mengingat kemampuannya akan mencerminkan daya dukung manajemen pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawabnya. Tingkat kemampuan keuangan daerah, dapat diukur dari kapasitas Pendapatan Asli Daerah, Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap jumlah penduduk dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Untuk memahami tingkat kemampuan keuangan daerah, maka perlu dicermati kondisi kinerja keuangan daerah, baik kinerja keuangan masa lalu maupun kebijakan yang melandasi pengelolaannya.

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Perkembangan kinerja keuangan pemerintah daerah tidak terlepas dari batasan pengelolaan keuangan daerah sebagaimana diatur dalam: (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah; (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; dan (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011.

Berdasarkan ketentuan tersebut, kinerja keuangan pemerintah daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD dan aspek kondisi neraca daerah. Kinerja pelaksanaan APBD tidak terlepas dari struktur dan akurasi belanja (belanja langsung dan belanja tidak langsung) pendapatan daerah yang meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan lain-lain pendapatan yang sah. Sementara itu, neraca daerah akan

mencerminkan perkembangan dari kondisi asset pemerintah daerah, kondisi kewajiban pemerintah daerah serta kondisi ekuitas dana yang tersedia.

Kinerja pelaksanaan APBD Provinsi Kalimantan Barat sejak tahun 2013 hingga tahun 2017, digunakan sebagai dasar dalam penyusunan Rancangan Teknokratik RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

3.1.1 Kinerja Pelaksanaan APBD

Pertumbuhan pendapatan daerah terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata sebesar 13,04% (Tabel 3.1). Dari kurun waktu tersebut, pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat terjadi peningkatan sebesar 8,8%. Kemudian, pertumbuhan Dana Perimbangan terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat dalam pada kurun waktu 2013–2017 sebesar 29,49%. Kenaikan ini ditopang pada komponen Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus yang diberikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah. Selanjutnya, Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah mengalami pertumbuhan -19,12 disebabkan mulai tahun 2017 dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang sebelumnya berada di Penyesuaian dan Otonomi Khusus berpindah ke Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Struktur pendapatan daerah pada kurun waktu 2013–2017 masih didominasi dari Dana Perimbangan rata-rata 45,76% per tahun, yang menunjukkan bahwa Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat harus terus meningkatkan kemandirian fiskal dengan meningkatkan kontribusi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap APBD Provinsi Kalimantan Barat. Namun demikian pada kurun waktu 2013–2017 komponen Pendapatan Asli Daerah (PAD) mengalami kenaikan yang cukup signifikan.

Tabel 3.1
Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2013 - 2017 Provinsi Kalimantan Barat

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA
----	--------	------	------	------	------	------	-----------

		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	PERTUMBUHAN (%)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN	3,262,314,099,069.14	3,719,770,110,973.66	4,073,146,942,812.28	4,494,428,711,520.47	5,389,204,121,647.12	13,04
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	1,347,396,423,743.14	1,621,610,890,848.66	1,702,542,350,065.28	1,664,338,991,973.47	1,945,547,317,495.12	8,88
1.1.1.	Pajak Daerah	1,129,549,657,086.00	1,343,346,493,567.00	1,459,364,274,992.00	1,424,303,270,597.00	1,660,417,092,948.45	9,40
1.1.2.	Retribusi Daerah	108,076,246,959.73	166,639,948,123.23	120,979,150,801.43	33,529,204,985.00	39,223,664,905.00	(12,74)
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	55,010,160,196.63	62,865,345,715.24	66,063,239,683.28	70,822,377,986.00	71,545,341,139.00	6,01
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	54,760,359,500.78	48,759,103,443.19	56,135,684,588.57	135,684,138,405.47	174,461,218,502.67	43,72
1.2.	Dana Perimbangan	1,382,042,462,642.00	1,531,868,902,983.00	1,644,655,327,863.00	1,860,789,737,696.00	3,420,092,372,152.00	29,49
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/bagi hasil bukan pajak	163,157,232,642.00	178,456,566,983.00	153,476,958,863.00	167,535,550,706.00	170,188,840,002.00	0,86
1.2.2.	Dana Alokasi Umum	1,144,712,840,000.00	1,290,222,856,000.00	1,405,594,169,000.00	1,493,486,253,000.00	1,720,698,207,000.00	10,06
1.2.3.	Dana Alokasi Khusus	74,172,390,000.00	63,189,480,000.00	85,584,200,000.00	199,767,933,990.00	1,529,205,235,150.00	392,34
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah	532,875,212,684.00	566,290,317,142.00	725,949,264,884.00	969,299,981,851.00	23,484,432,000.00	(19,12)
1.3.1.	Hibah	6,103,474,170.00	6,055,480,103.00	5,436,451,536.00	4,773,780,219.00	1,330,842,000.00	(15,64)
1.3.2.	Dana Darurat	-	-	-	-	-	-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya	-	-	-	-	-	-
1.3.4.	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus	526,771,738,514.00	560,234,837,039.00	720,512,813,348.00	964,526,201,632.00	7,500,000,000.00	(19,72)
1.3.5.	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya	-	-	-	-	14,533,590,000.00	100
2.	BELANJA	3,296,606,750,102.82	3,652,914,140,724.34	4,123,636,223,079.39	4,320,618,793,066.07	5,259,204,121,647.12	11,91
2.1.	Belanja Tidak Langsung	1,764,246,630,214.10	2,064,408,105,381.16	2,615,246,069,551.18	2,728,184,377,314.62	2,793,332,459,532.00	11,67
2.1.1.	Belanja Pegawai	441,182,327,060.00	546,771,365,043.00	644,818,815,469.00	662,457,323,551.00	1,115,657,849,550.50	30,58
2.1.2.	Belanja Bunga	-	-	-	-	-	-
2.1.3.	Belanja Subsidi	-	-	-	-	-	-
2.1.4.	Belanja Hibah	598,994,336,217.00	666,837,274,315.67	802,457,462,061.00	1,043,728,485,549.62	970,304,104,374.00	12,40
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	948,000,000.00	252,000,000.00	1,895,000,000.00	410,000,000.00	665,000,000.00	(5,97)
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	455,946,490,871.10	435,940,602,883.49	845,411,837,138.18	681,158,345,765.00	702,673,837,109.50	10,82
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	267,175,476,066.00	414,606,863,139.00	320,662,954,883.00	340,430,222,449.00	1,707,224,384.00	(19,87)
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	-	-	-	-	2,324,444,114.00	-
2.2.	Belanja Langsung	1,532,360,119,888.72	1,588,506,035,343.18	1,508,390,153,528.21	1,592,434,415,751.45	2,466,461,151,337.19	12,19
2.2.1.	Belanja Pegawai	143,022,608,689.00	151,348,580,586.66	149,317,200,679.00	109,290,967,366.00	123,470,862,514.00	(2,73)

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa	898,826,048,606.42	946,938,050,513.52	990,530,745,950.21	1,008,338,791,829.12	1,388,072,911,190.69	10,89
2.2.3	Belanja Modal	490,511,462,593.30	490,219,404,243.00	368,542,206,899.00	474,804,656,556.33	954,917,713,695.06	18,94
3	PEMBIAYAAN	162.039.565.546,13	67.744.739.512,45	59.600.709.761,77	(9.011.204.759,34)	82.898.713.695,06	(9,77)
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	222,258,325,546.13	127,744,739,512.45	134,600,709,761.77	9,088,795,240.66	12,309,224,472.99	(4,44)
3.2	Pengeluaran Pembiayaan	60,218,760,000.00	60,000,000,000.00	75,000,000,000.00	10,000,000,000.00	90,000,000,000.00	9,89

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar (2018) yang telah diolah

Rasio efektivitas dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan pencapaian yang cukup baik dengan tetap > 98%. Akan tetapi kinerja dari Rasio Efektivitas ini harus terus ditingkatkan karena masih terus berfluktuasi pada kisaran 89,57% - 110,68%. Untuk mendapatkan rasio efektivitas yang cenderung linier, perlu terus diperbaiki kinerja perolehan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan memberikan titik berat pada upaya peningkatan Pajak Daerah.

Tabel 3.2
Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah (PAD)
Pada APBD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017

TAHUN	TARGET		REALISASI		RASIO EFEKTIVITAS (%)
	PAD (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	PAD (Rp)	PERTUMBUHAN (%)	
1	2	3	4	5	6
2013	1.376.087.889.228,00	17,81	1.347.396.423.743,14	15,71	97,91
2014	1.664.104.567.995,00	20,93	1.621.610.890.848,66	20,35	97,45
2015	1.900.842.600.085,00	14,22	1.702.542.350.065,28	4,99	89,57
2016	1.760.028.743.228,00	-7,41	1.664.338.991.973,47	-2,24	94,56
2017	1.757.921.479.000,00	-0.12%	1.945.647.317.495,12	16,90	110,68
	RATA-RATA	9.09%		11,14%	

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar, 2018 (yang telah diolah)

3.1.2 Neraca Daerah

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 11 tahun 2001, Neraca Daerah adalah neraca yang disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi

masing-masing pemerintah. Neraca Daerah menginformasikan posisi keuangan berupa aset, kewajiban (utang), dan ekuitas dana pada tanggal neraca tersebut dikeluarkan. Aset, kewajiban, dan ekuitas dana merupakan rekening utama yang masih dapat dirinci lagi menjadi sub rekening sampai level rincian obyek.

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah, Neraca Daerah merupakan salah satu laporan keuangan yang harus dibuat oleh Pemerintah Daerah. Laporan ini sangat penting bagi manajemen pemerintah daerah, tidak hanya dalam rangka memenuhi kewajiban peraturan perundang-undangan yang berlaku saja, tetapi juga sebagai dasar untuk pengambilan keputusan yang terarah dalam rangka pengelolaan sumber-sumber daya ekonomi yang dimiliki oleh daerah secara efisien dan efektif. Kinerja Neraca Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 2013-2017 seperti terlihat pada Tabel 3.3.

Aset daerah merupakan aset yang memberikan informasi tentang sumber daya ekonomi yang dimiliki dan dikuasai pemerintah daerah, memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi pemerintah daerah maupun masyarakat di masa mendatang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam uang. Selama kurun waktu 2013-2017, pertumbuhan rata-rata jumlah aset daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat mencapai 14,47% yang berarti bahwa jumlah aset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat meningkat sebesar 14,47% setiap tahun. Aset tersebut berupa tanah, gedung dan bangunan serta sarana mobilitas dan peralatan kantor yang semuanya dipergunakan untuk menunjang kelancaran tugas pemerintahan.

Pertumbuhan aset dalam kurun waktu 2013–2017 rata-rata tumbuh sebesar 14,01%. Komponen aset yaitu aset lancar mengalami penurunan sebesar 4,42%, investasi jangka panjang meningkat rata-rata sebesar 12,63%, aset tetap meningkat rata-rata 14,00%, dan aset lainnya meningkat sebesar 20,07%. Pertumbuhan aset lancar dalam kecenderungan yang positif

ini menunjukkan bahwa kondisi aset pemerintah Provinsi Kalimantan Barat berada pada kondisi sehat.

Kewajiban, baik Jangka Pendek maupun Jangka Panjang, memberikan informasi tentang utang pemerintah daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu yang dalam penyelesaiannya mengakibatkan pengorbanan sumber daya ekonomi di masa yang akan datang. Kewajiban Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam kurun waktu 4 tahun (2013-2017) selalu dapat diselesaikan, dari tahun 2013 kewajiban jangka pendek adalah sebesar Rp.106,726,856,629.30, pada tahun 2017 turun menjadi Rp.2,808,090,522.33. Hal ini menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu tersebut dapat melaksanakan kewajiban finansial jangka pendek secara tepat waktu.

Tabel 3.3.
Rata-rata Pertumbuhan Neraca Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Pertumbuhan 2013 -2014	Pertumbuhan 2014 -2015	Pertumbuhan 2015 -2016	Pertumbuhan 2016 -2017	Rata-rata Pertumbuhan 2013-2017
1	2	3	4	5	6	7
1	ASET					
	ASET LANCAR	12.66%	-7.20%	24.76%	-47.90%	-4.42%
	Kas dan Setara Kas	5.07%	-1358.65%	94.66%	-53.94%	-328.22%
	Investasi Jangka Pendek	0.00%	0.00%	0.00%	100.00%	25.00%
	Piutang Pendapatan	-74.48%	82.63%	-16.80%	-15.05%	-5.93%
	Piutang Lainnya	-62.18%	-15.28%	-9.60%	-5.68%	-23.19%
	Penyisihan Piutang	0.00%	100.00%	-27.98%	31.24%	25.82%
	Beban Dibayar Dimuka	37.48%	-29.84%	29.01%	-5.92%	7.68%
	Persediaan	22.82%	-5.36%	0.44%	-232.67%	-53.69%
	Aset Untuk Dikonsolidasikan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	<i>Jumlah Aset Lancar</i>	<i>12.66%</i>	<i>-7.20%</i>	<i>24.76%</i>	<i>-47.90%</i>	<i>-4.42%</i>
	INVESTASI JANGKA PANJANG	10.79%	10.00%	15.16%	14.57%	12.63%
	Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Investasi Jangka Panjang Permanen	10.79%	10.00%	15.16%	14.57%	12.63%

No	Uraian	Pertumbuhan 2013 -2014	Pertumbuhan 2014 -2015	Pertumbuhan 2015 -2016	Pertumbuhan 2016 -2017	Rata-rata Pertumbuhan 2013-2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jumlah INVESTASI JANGKA PANJANG</i>	10.79%	10.00%	15.16%	14.57%	12.63%
	ASET ETAP	15.50%	15.14%	7.57%	17.80%	14.00%
	Tanah	23.08%	78.52%	0.34%	5.66%	26.90%
	Peralatan dan Mesin	5.50%	6.74%	14.53%	29.43%	14.05%
	Gedung dan Bangunan	22.25%	9.90%	5.73%	37.75%	18.91%
	Jalan, Irigasi dan Jaringan	4.77%	19.88%	-2.55%	12.99%	8.77%
	Aset Tetap Lainnya	83.52%	3.60%	0.98%	-7.49%	20.15%
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-12.95%	-14.03%	61.79%	41.29%	19.03%
	Akumulasi Penyusutan	0.00%	100.00%	2.10%	23.01%	31.28%
	<i>Jumlah ASET TETAP</i>	15.50%	15.14%	7.57%	17.80%	14.00%
	DANA CADANGAN	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Dana Cadangan	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	<i>Jumlah DANA CADANGAN</i>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	ASET LAINNYA	5.68%	55.43%	-0.54%	19.71%	20.07%
	Tagihan Jangka Panjang	-3.85%	-1.55%	-1.03%	-0.38%	-1.70%
	Kemitraan Dengan Pihak Ketiga	0.00%	99.85%	0.00%	1.14%	25.25%
	Aset Tidak Berwujud	22.61%	-437.46%	-37.11%	-3.94%	-113.97%
	Aset Lain-lain	4.56%	-0.72%	-0.95%	36.98%	9.97%
	<i>Jumlah ASET LAINNYA</i>	5.68%	55.43%	-0.54%	19.71%	20.07%
	JUMLAH ASET	13.84%	18.61%	8.95%	14.65%	14.01%
2	KEWAJIBAN					
	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	50.32%	14.87%	-0.04%	-8883.77%	-2204.65%
	Utang Perhitungan Pihak Ketiga	-146.81%	-100.60%	-283.13%	46.57%	-120.99%
	Utang Bunga	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Pendapatan Diterima Dimuka	0.00%	100.00%	-6.47%	33.86%	31.85%
	Utang Belanja	99.17%	6.03%	-0.03%	-8669.25%	-2141.02%
	Utang Jangka Pendek Lainnya	0.00%	100.00%	0.00%	0.00%	25.00%
	<i>Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PENDEK</i>	50.32%	14.87%	-0.04%	-8883.77%	-2204.65%
						0.00%
	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Utang Dalam Negeri	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	Utang Jangka Panjang Lainnya	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

No	Uraian	Pertumbuhan 2013 -2014	Pertumbuhan 2014 -2015	Pertumbuhan 2015 -2016	Pertumbuhan 2016 -2017	Rata-rata Pertumbuhan 2013-2017
1	2	3	4	5	6	7
	<i>Jumlah KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</i>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	<i>JUMLAH KEWAJIBAN</i>	50.32%	14.87%	-0.04%	-8883.77%	-2204.65%
3	EKUITAS DANA					
	<i>EKUITAS</i>	12.39%	18.75%	9.26%	17.46%	14.47%
	<i>RK PPKD</i>	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
	<i>Jumlah EKUITAS</i>	12.39%	18.75%	9.26%	17.46%	14.47%
	Jumlah KEWAJIBAN dan EKUITAS DANA	13.84%	18.61%	8.95%	14.65%	14.01%

Sumber : Hasil pengolahan data dari Neraca Keuangan Daerah – BPKPD (2018)

Ekuitas dana yang meliputi Dana Lancar, Dana Investasi, dan Dana Cadangan, merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat selama kurun waktu 2013–2017 mengalami pertumbuhan sebesar 19,96% yang berarti bahwa ekuitas dananya cukup tinggi.

3.2. Kebijakan Pengelolaan Keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah, secara garis besar akan tercermin pada kebijakan pendapatan, pembelanjaan serta pembiayaan APBD. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber penerimaan daerah Provinsi terdiri dari: (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Perusahaan Milik Daerah dan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah; (2) pendapatan transfer yang meliputi transfer Pemerintah Pusat yang terdiri atas dana perimbangan, dana otonomi khusus, dana keistimewaan dan dana desa serta transfer atar-daerah yang terdiri atas pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan. Sedangkan penerimaan

pembiayaan bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Daerah Tahun Sebelumnya (SiLPA), Penerimaan Pinjaman Daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pengelolaan pendapatan daerah diarahkan pada peningkatan penerimaan daerah melalui: (1) Optimalisasi pendapatan daerah sesuai peraturan yang berlaku dan kondisi daerah; (2) Peningkatan kemampuan dan keterampilan SDM Pengelola Pendapatan Daerah; (3) Peningkatan intensitas hubungan perimbangan keuangan pusat dan daerah secara adil dan proporsional berdasarkan potensi dan pemerataan; dan (4) Peningkatan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajibannya. Untuk itu digariskan sejumlah kebijakan yang terkait dengan pengelolaan pendapatan daerah, yaitu:

1. Memantapkan Kelembagaan dan Sistem Operasional Pemungutan Pendapatan Daerah.
2. Meningkatkan Pendapatan Daerah dengan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan yang memperhatikan aspek legalitas, keadilan, kepentingan umum, karakteristik daerah dan kemampuan masyarakat dengan memegang teguh prinsip-prinsip akuntabilitas dan transparansi.
3. Meningkatkan koordinasi secara sinergis di bidang Pendapatan Daerah dengan Pemerintah Pusat, SKPD Penghasil, Kabupaten dan Kota, serta POLRI, PT. Jasa Raharja dan Bank Kalbar.
4. Meningkatkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah dalam upaya meningkatkan kontribusi secara signifikan terhadap Pendapatan Daerah.
5. Meningkatkan pelayanan dan perlindungan masyarakat sebagai upaya meningkatkan pendapatan retribusi daerah.
6. Meningkatkan peran dan fungsi UPT penghasil dalam peningkatan pelayanan dan pendapatan.
7. Meningkatkan pengelolaan asset dan keuangan daerah.

8. Meningkatkan kinerja pendapatan daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
9. Meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat melalui penataan organisasi dan tata kerja, pengembangan sumber daya pegawai yang profesional dan bermoral, serta pengembangan sarana dan fasilitas pelayanan prima dan melaksanakan terobosan untuk peningkatan pelayanan masyarakat.

Sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, yang merupakan revisi dari UU No. 34 Tahun 2000, jenis pendapatan asli daerah terdapat beberapa perubahan, yaitu: jenis pajak daerah menjadi 5 jenis meliputi Pajak Kendaraan Bermotor, BBNKB, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok. Sedangkan untuk Retribusi Daerah telah ditentukan secara jelas jenis retribusi yang dapat dipungut. Jenis retribusi yang telah dilaksanakan saat ini yaitu Retribusi Jasa Umum, Retribusi Jasa Usaha dan Retribusi Perijinan Tertentu masih tetap berlaku, bahkan memungkinkan untuk lebih dikembangkan sesuai dengan peraturan dan kewenangan. Untuk Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah, sesuai dengan Undang-Undang tersebut mulai Tahun 2011 diserahkan pengelolaannya oleh Kabupaten/Kota.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Selama periode tahun 2013-2017, rata-rata proporsi realisasi Belanja Pegawai dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah yaitu Belanja Daerah dan Pembiayaan Pengeluaran Daerah adalah sebesar 15,88%. Proporsi terbesar terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 20,85%, hal ini terjadi karena perubahan kewenangan daerah sesuai dengan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana salah satunya adalah pengalihan status Guru SMA/SMK menjadi Aparatur Sipil Negara Provinsi.

Tabel 3.4.
Analisis Proporsi Belanja Pegawai
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Jumlah Belanja Pegawai	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	2	3	4	5
1	Tahun 2013	441,182,327,060.00	3,356,825,510,102.82	13.14%
2	Tahun 2014	546,771,365,043.00	3,712,914,140,724.34	14.73%
3	Tahun 2015	644,818,815,469.00	4,198,636,223,079.39	15.36%
4	Tahun 2016	662,457,323,551.00	4,330,618,793,066.07	15.30%
5	Tahun 2017	1,115,657,849,550.50	5,349,793,610,869.19	20.85%
			Rata - Rata	15.88%

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar (2018) yang telah diolah

Selama periode tahun 2013-2017, rata-rata proporsi realisasi Belanja Barang dan Jasa dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 25,02%. Proporsi Belanja Barang dan Jasa cenderung tidak jauh berbeda setiap tahunnya. Antara 23,28 % pada tahun 2016 sampai dengan paling besar 26,78 % pada tahun 2013 dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah. Belanja Barang dan Jasa digunakan untuk pelaksanaan program pembangunan daerah melalui perangkat daerah.

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Barang dan Jasa
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017

No	Uraian	Jumlah Belanja Barang dan Jasa	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	2	3	4	5
1	Tahun 2013	898,826,048,606.42	3,356,825,510,102.82	26.78%
2	Tahun 2014	946,938,050,513.52	3,712,914,140,724.34	25.50%
3	Tahun 2015	990,530,745,950.21	4,198,636,223,079.39	23.59%
4	Tahun 2016	1,008,338,791,829.12	4,330,618,793,066.07	23.28%
5	Tahun 2017	1,388,072,911,190.69	5,349,793,610,869.19	25.95%
			Rata - Rata	25.02%

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar (2018) yang telah diolah

Selama periode tahun 2013-2017, rata-rata proporsi realisasi Belanja Modal dibandingkan dengan Total Pengeluaran Daerah adalah sebesar 13,08%. Mulai dari tahun 2015 sampai dengan 2017, proporsi belanja modal dibandingkan total pengeluaran daerah selalu mengalami kenaikan, dimana pada tahun 2015 hanya 8,78% meningkat menjadi 17,85% pada tahun 2017.

Tabel 3.6.
Analisis Proporsi Belanja Modal
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 – 2017

No	Uraian	Jumlah Belanja Modal	Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran)	Prosentase
1	2	3	4	5
1	Tahun 2013	490,511,462,593.30	3,356,825,510,102.82	14.61%
2	Tahun 2014	490,219,404,243.00	3,712,914,140,724.34	13.20%
3	Tahun 2015	368,542,206,899.00	4,198,636,223,079.39	8.78%
4	Tahun 2016	474,804,656,556.33	4,330,618,793,066.07	10.96%
5	Tahun 2017	954,917,377,632.50	5,349,793,610,869.19	17.85%
			Rata - Rata	13.08%

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar (2018) yang telah diolah

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Realisasi pembiayaan daerah dalam kurun waktu 2013-2017 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.7 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa pertumbuhan realisasi rata-rata Penerimaan Pembiayaan Daerah sebesar 394,52% dengan komponen Penggunaan Sisa Lebih Anggaran (SILPA) memberikan kontribusi terbesar pada Penerimaan Pembiayaan Daerah yang sama dengan Penerimaan Pembiayaan Daerah tersebut.

Tabel 3.7.
Realisasi Pembiayaan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat
Tahun 2013 – 2017

PEMBIAYAAN	2013	2014		2015		2016		2017		Rata-Rata	
	Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%		
1	2	3	6	4	7	5	8	9	10	11	
PENERIMAAN DAERAH											
a.	Penggunaan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA)	222,25	127,74	-42,52	134,60	38,67	9,08	-93,25	172,89	1,691,19	394,52
b.	Penerimaan Piutang Daerah										
c.	Penerimaan Lain-lain										
	JUMLAH PENERIMAAN	222,25	127,74	-42,52	134,60	38,67	9,08	-93,25	172,89	1,691,19	394,52
PENGELUARAN DAERAH											
a.	Pembentukan Dana Cadangan										
b.	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	60,21	60	-0,35	75,00	25,00	10,00	-86,66	90,00	800	184,50

PEMBIAYAAN		2013	2014		2015		2016		2017		Rata-Rata
		Rp. M	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	Rp. M	%	
1		2	3	6	4	7	5	8	9	10	11
c.	Pembiayaan Pokok Hutang										
JUMLAH PENGELUARAN		60,21	60	-0,35	75,00	25,00	10,00	-86,66	90,00	800	184,50

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar (2018) yang telah diolah

Kondisi realisasi pendapatan dan belanja daerah dalam kurun tahun 2013-2017 dapat digambarkan seperti terlihat pada Tabel 3.8 di bawah ini. Dari Tabel tersebut, terlihat bahwa Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA) Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat pada tahun 2013 mencapai Rp.127,46 milyar lebih dan pada tahun 2017 sebesar Rp. 212,30 milyar lebih.

Tabel 3.8
Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2013 - 2017

No	URAIAN	2013	2014	2015	2016	2017
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	2	3	4	5	6	7
1	Realisasi pendapatan daerah dikurangi realisasi :	3.262.314.099.069	3.719.770.110.973	4.073.146.942.812	4.494.428.711.520	5.389.204.121.647
2	Belanja Daerah	3.296.606.750.102	3.652.914.140.724	4.123.636.223.079	4.320.618.793.066	5.259.793.610.869
	Surplus (Defisit)	(34.292.651.033)	66.855.970.249	(50.489.280.267)	173.809.918.454	129.410.510.777
3.	Penerimaan pembiayaan daerah	222.258.325.546	127.744.739.512	134.600.709.761	9.088.795.240	172.898.713.695
4	Pengeluaran pembiayaan daerah	60.218.760.000	60.000.000.000	75.000.000.000	10.000.000.000,00	90.000.000.000
	Pembiayaan Netto	162.039.565.546	67.744.739.512	59.600.709.761	(911.204.759)	82.898.713.695
5	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)	127.746.914.512	134.600.709.761	9.111.429.494	172.898.713.695	212.309.224.472

Sumber : BPKAD Prov. Kalbar (2018) yang diolah

3.3. Kerangka Pendanaan

Setelah menyampaikan kondisi pengelolaan keuangan daerah masa lalu dari periode tahun 2013-2017, sebagai kerangka keuangan yang telah dimasukkan dalam laporan keuangan daerah, selanjutnya akan digambarkan proyeksi keuangan daerah untuk mendanai kebutuhan pembangunan daerah dari tahun 2019–2023 mendatang sebagaimana tabel 3.9 dan tabel 3.10

Tabel 3.9
Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah Tahun 2019 – 2023

Tahun	Proyeksi Total Pendapatan Daerah (Rp)	Proyeksi Total Penerimaan Pembiayaan Daerah (Rp)	Proyeksi Pembiayaan Pembangunan Daerah (Rp)
1	2	3	4
2019	5.804.168.109.758,80	114.608.076.593,25	5.918.776.186.352,05
2020	6.074.677.065.922,75	112.410.498.685,41	6.187.087.564.608,15
2021	6.377.858.388.255,08	110.292.518.954,01	6.488.150.907.209,09
2022	6.722.731.399.890,10	105.348.136.150,54	6.828.079.536.040,63
2023	7.147.753.724.672,86	89.741.403.250,16	7.237.495.127.923,02

Keterangan : Hasil proyeksi, berdasarkan analisis data (2018)

Tabel 3.10
Proyeksi Keuangan Daerah Tahun 2019 – 2023

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	PENDAPATAN	5,743,046,251,092	6,094,595,074,321	6,489,237,441,773	6,933,394,329,076	7,434,731,622,555	25.00
1.1.	Pendapatan Asli Daerah	2,046,976,954,092	2,270,968,408,766	2,523,632,950,855	2,809,523,144,160	3,134,084,905,815	40.41
1.1.1.	Pajak Daerah	1,756,322,680,300	1,931,076,786,989	2,123,218,927,295	2,334,479,210,561	2,566,759,892,012	36.20
1.1.2.	Retribusi Daerah	39,184,694,000	40,462,115,024	41,781,179,974	43,143,246,441	44,549,716,275	12.63
1.2.3.	Hasil Pengelolaan Keuangan Daerah yang dipisahkan	87,295,077,792	93,012,905,387	99,105,250,690	105,596,644,610	112,513,224,832	24.59
1.1.4.	Lain-lain PAD yang sah	164,174,502,000	206,416,601,364	259,527,592,895	326,304,042,547	410,262,072,695	81.86
1.2.	Dana Perimbangan	3,696,069,297,000	3,823,626,665,555	3,965,604,490,918	4,123,871,184,915	4,300,646,716,740	14.86
1.2.1.	Dana Bagi Hasil Pajak/	151,823,821,000	156,560,724,215	161,445,418,810	166,482,515,877	171,676,770,372	12.10
1.2.2	Bagi hasil bukan pajak	75,346,648,000	94,326,468,631	118,087,306,079	147,833,498,480	185,072,756,748	80.49
1.2.3	Dana Alokasi Umum	1,756,069,684,000	1,883,033,522,153	2,019,176,845,804	2,165,163,331,756	2,321,704,640,642	26.97
1.2.4	Dana Alokasi Khusus	1,712,829,144,000	1,689,705,950,556	1,666,894,920,223	1,644,391,838,800	1,622,192,548,976	(5.47)
1.3.	Lain-Lain Pendapatan Daerah yang sah						
1.3.1.	Hibah						-
1.3.2	Dana Darurat						-
1.3.3.	Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemda Lainnya						-
1.3.4	Dana Penyesuaian dan otonomi Khusus						-
1.3.5	Bantuan keuangan dari provinsi atau Pemerintah Daerah						-

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Lainnya						
2.	BELANJA	5,910,665,710,092	6,119,756,618,791	6,575,283,950,789	7,022,620,850,084	7,512,392,043,883	23.23
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3,207,732,083,065	3,409,866,440,984	3,673,746,309,007	3,903,280,938,702	4,142,695,155,544	24.77
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,265,016,263,271	1,355,132,481,899	1,528,455,543,979	1,658,447,840,539	1,788,440,137,099	33.10
2.1.2.	Belanja Bunga						-
2.1.3.	Belanja Subsidi						-
2.1.4.	Belanja Hibah	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14,900,000,000	14,900,000,000	14,900,000,000	14,900,000,000	14,900,000,000	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	818,630,876,210	907,606,089,885	997,912,895,828	,097,205,228,963	1,206,377,149,245	36.95
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	23,666,893,584	46,459,819,200	46,459,819,200	46,459,819,200	46,459,819,200	49.06
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,250,000,000	5,500,000,000	5,750,000,000	6,000,000,000	17.82
2.2.	Belanja Langsung	2,702,933,627,026	2,709,890,177,807	2,901,537,641,782	3,119,339,911,381	3,369,696,888,338	21.27
2.2.1.	Belanja Pegawai						-
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa						-
2.2.3.	Belanja Modal						-
3	PEMBIAYAAN	150,000,000,000	200,000,000,000	227,000,000,000	222,000,000,000	232,000,000,000	38.95
3.1.	Penerimaan Pembiayaan	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	-
3.1.1.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SILPA)	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	150,000,000,000	-
3.2.	Pengeluaran Pembiayaan	-	50,000,000,000	77,000,000,000	72,000,000,000	82,000,000,000	40.32
3.2.1.	Penyertaan Modal (Investasi) Daerah		50,000,000,000	77,000,000,000	72,000,000,000	82,000,000,000	40.32

Keterangan : Hasil proyeksi, berdasarkan analisis data (2018)

Sampai akhir tahun 2023, rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah mencapai 50,03%; dan rasio Belanja Langsung terhadap Belanja Daerah mencapai 50,76%

Berdasarkan proyeksi keuangan daerah sebagaimana tabel di atas, maka perlu disusun kebijakan pengelolaan keuangan daerah pada periode 2018-2023 yang meliputi kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah.

Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah di masa yang akan datang, prioritas kebijakan pendapatan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Menyiapkan revisi Perda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta implementasinya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
2. Melaksanakan kajian penerapan pajak progresif, terutama yang terkait dengan imbasnya terhadap sosial-ekonomi masyarakat Kalimantan Barat;
3. Menerapkan kebijakan pendapatan daerah yang membuka peluang untuk pengembangan sumber penerimaan lain, terutama dari potensi investasi daerah serta pelibatan sektor swasta dalam pembangunan daerah melalui kegiatan skema kerjasama pemerintah (*Public Private Partnership*) dan swasta maupun *corporate social responsibility (CSR)*. Untuk itu sejumlah langkah yang akan dilakukan meliputi:
 - a. Deregulasi peraturan daerah untuk dapat meningkatkan minat berinvestasi di Kalimantan Barat;
 - b. Kerjasama investasi antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan pihak swasta atau dengan pihak pemerintah lainnya dengan perjanjian yang disepakati;
 - c. Mendorong peningkatan investasi langsung oleh masyarakat lokal;
 - d. Penyelenggaraan Perijinan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) yang merupakan wujud pelayanan publik dalam tata pemerintahan;
 - e. Meningkatkan koordinasi program melalui *Corporate Social Responsibility (CSR)*;
 - f. Kegiatan investasi diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang ditujukan pada kegiatan-kegiatan yang dapat melibatkan peran masyarakat luas seperti sektor pertanian, sektor industri berbasis pertanian dan kelautan, industri pengolahan, dan industri manufaktur.

Selanjutnya, dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah disusun melalui pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dan dampak dari input yang direncanakan dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja

perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas, pokok dan fungsinya. Kebijakan ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta menjamin efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran ke dalam program dan kegiatan.

Kebijakan belanja daerah tahun 2018-2023 diarahkan untuk mendukung pencapaian sasaran Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Untuk itu, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pencapaian IPM guna memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan infrastruktur.

Kebijakan belanja daerah tahun anggaran 2018-2023 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, yaitu :

1. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan Provinsi Kalimantan Barat yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan;
2. Efisiensi belanja dilakukan dengan mengoptimalkan belanja untuk kepentingan publik, melaksanakan *proper budgeting* melalui analisis *cost benefit* dan tingkat efektifitas setiap program dan kegiatan serta melaksanakan *prudent spending* melalui pemetaan profil resiko atas setiap belanja kegiatan beserta perencanaan langkah antisipasinya. Untuk itu diperlukan penyusunan pedoman Harga Satuan Umum (HSU) Barang/Jasa dan Harga Satuan Pokok Kegiatan (HSPK) dengan diikuti pelaksanaan Analisa Satuan Biaya (ASB);
3. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat;
4. Belanja dalam rangka peyelenggaraan urusan wajib diarahkan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah

- yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum;
5. Pemenuhan dan pemanfaatan anggaran untuk pendidikan dengan fokus pada penuntasan WAJAR DIKDAS 9 tahun dan perintisan WAJAR 12 tahun serta menciptakan pendidikan yang terjangkau dan berkualitas;
 6. Peningkatan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan dilaksanakan dengan memperbaiki fasilitas dan pengadaan untuk pelayanan dasar kesehatan terutama untuk keluarga miskin serta kesehatan ibu dan anak, memperbanyak penempatan dan peningkatan kompetensi tenaga medis;
 7. Dalam rangka peningkatan daya beli masyarakat, anggaran belanja akan diarahkan pada revitalisasi sektor pertanian, perikanan dan kehutanan penguatan struktur ekonomi pedesaan, pemberdayaan dan peningkatan peran koperasi dalam hal ini termasuk *Credit Union* (CU) dan UMKM, serta dukungan infrastruktur pedesaan;
 8. Penurunan jumlah angkatan kerja yang menganggur diantaranya melalui penyiapan SDM yang siap kerja, peningkatan investasi program multi sektor, peningkatan sarana dan prasarana balai pelatihan ketenagakerjaan;
 9. Dalam mendukung pengembangan aktivitas ekonomi, pemeliharaan dan pembangunan infrastruktur akan diarahkan pada wilayah sentra produksi di pedesaan, aksesibilitas sumber air baku dan listrik;
 10. Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan Pemerintah Daerah akan mengarahkan anggaran pada kegiatan-kegiatan pengurangan pencemaran lingkungan, menjaga kawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumber daya alam;

11. Penggunaan indeks relevansi anggaran dalam penentuan anggaran belanja dengan memperhatikan belanja tidak langsung dan belanja langsung yang direncanakan oleh setiap pengguna anggaran tetap terukur;
12. Kegiatan-kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanja tetap (*fixed cost*), Insentif Berbasis Kinerja, dan komitmen pembiayaan yang berkelanjutan;
13. Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi, dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Mengalokasikan belanja bunga yang digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok hutang (*principal outstanding*) berdasarkan perjanjian pinjaman;
 - c. Mengalokasikan belanja subsidi yang digunakan untuk menganggarkan bantuan biaya produksi kepada masyarakat/kelompok masyarakat/ UMKM/Koperasi tertentu agar harga jual produksi dan jasa yang dihasilkan meningkat daya saingnya. Penentuan kelompok-kelompok tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - d. Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Penjabaran dari alokasi belanja sosial untuk masyarakat tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
 - e. Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pemerintah daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

- Penjabaran dari Alokasi belanja hibah tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
- f. Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup. Penjabaran dari alokasibelanja tidak terduga tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
- g. Mengalokasikan belanja bagi hasil kepada kabupaten dan kota digunakan untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi kepada kabupaten dan kota sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Belanja bagi hasil dilaksanakan secara proporsional, guna memperkuat kapasitas fiskal kabupaten dan kota dalam melaksanakan otonomi daerah; Penjabaran dari alokasi belanja bagi hasil kepada pemerintah kabupaten dan kota tersebut akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis;
- h. Mengalokasikan belanja bantuan keuangan kepada Partai Politik yang duduk di Parlemen, kabupaten dan kota serta Pemerintah Desa yang digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Provinsi kepada kabupaten dan kota, dan pemerintah desa. Belanja bantuan keuangan kepada kabupaten dan kota dan Pemerintah Desa diarahkan dalam rangka mendukung Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Penjabaran dari alokasi belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten, kota dan pemerintah desa tersebut

akan ditentukan lebih lanjut dalam bentuk Peraturan Gubernur Kalimantan Barat yang menyangkut ketentuan umum, khusus, dan teknis.

Untuk kebijakan pembiayaan daerah, dari aspek penerimaannya diarahkan untuk meningkatkan akurasi pembiayaan yang bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran sebelumnya (SiLPA), pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman dan penerimaan piutang daerah. Terkait dengan pinjaman daerah, Pemerintah Pusat telah membuka kesempatan bagi pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan, untuk melakukan pinjaman sebagai salah satu instrumen pendanaan pembangunan daerah. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Namun demikian, mengingat adanya konsekuensi kewajiban yang harus dibayar atas pelaksanaan pinjaman pemerintah daerah dimaksud, seperti angsuran pokok, biaya bunga, denda, dan biaya lainnya, pemerintah daerah akan terus mengedepankan prinsip kehati-hatian (*prudential management*), profesional, dan tepat guna dalam penggunaan potensi pinjaman daerah tersebut agar tidak menimbulkan dampak negatif bagi keuangan daerah.

Selain itu juga dibuka peluang bagi pemerintah daerah untuk menggali dana pinjaman pemerintah daerah yang bersumber dari masyarakat sebagai salah satu sumber pendanaan daerah. Sumber pendanaan tersebut adalah obligasi daerah untuk mendanai investasi sektor publik yang menghasilkan penerimaan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Pada aspek pengeluaran pembiayaan, sebagai pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, akan mencakup: pembentukan dana cadangan; penyertaan modal (investasi) pemerintah

daerah; pembayaran pokok utang; dan pemberian pinjaman daerah. Untuk itu kebijakan pengeluaran pembiayaannya meliputi:

1. Pengeluaran pembiayaan direncanakan untuk pembayaran hutang pokok yang jatuh tempo dan penyertaan modal BUMD;
2. Penyertaan modal dan pemberian pinjaman apabila terjadi surplus anggaran;
3. Penyertaan modal BUMD disertai dengan revitalisasi dan restrukturisasi kinerja BUMD dan pendayagunaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dalam rangka efisiensi pengeluaran pembiayaan termasuk kajian terhadap kelayakan BUMD;
4. Menjamin kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan pinjaman daerah pada saat terjadi defisit anggaran.

Dari uraian mengenai rencana arah kebijakan pengelolaan keuangan daerah di atas, maka secara garis besar pengeluaran daerah periode lima tahun mendatang diarahkan kepada:

- a. Rencana alokasi pengeluaran prioritas I, yakni berkaitan dengan tema atau program pembangunan daerah yang menjadi unggulan (*dedicated*) Kepala daerah sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun rencana, termasuk untuk prioritas bidang pendidikan 20% (duapuluh persen) dan kesehatan sebesar 10% (sepuluh persen). Selain itu program prioritas I berhubungan langsung dengan kepentingan publik, bersifat monumental dan berskala besar (termasuk memenuhi kebutuhan rencana untuk pemindahan pusat perkantoran), dan memiliki kepentingan dan nilai manfaat yang tinggi, memberikan dampak luas pada masyarakat dengan daya ungkit yang tinggi pada capaian visi dan misi daerah. Selain itu, prioritas I juga diperuntukkan bagi prioritas belanja yang wajib sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Rencana alokasi pengeluaran prioritas II, yakni berkaitan dengan program prioritas di tingkat OPD yang merupakan penjabaran dari analisis per urusan serta paling berdampak luas pada

masing-masing segmentasi masyarakat yang dilayani sesuai dengan prioritas dan permasalahan yang dihadapi berhubungan dengan layanan dasar serta tugas dan fungsi OPD termasuk peningkatan kapasitas kelembagaan yang berhubungan dengan itu;

- c. Rencana alokasi peneluran prioritas III, yakni berkaitan dengan alokasi belanja-belanja tidak langsung seperti: tambahan penghasilan PNS, belanja hibah, belanja bantuan sosial organisasi kemasyarakatan, belanja bantuan keuangan kepada provinsi/kabupaten/kota dan pemerintahan desa serta belanja tidak terduga. Pengalokasian dana pada prioritas III baru akan dipenuhi setelah pemenuhan dana pada prioritas I dan II terlebih dahulu.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

4.1. Permasalahan Pembangunan

4.1.1. Permasalahan Bidang Politik, Ketentraman, dan Ketertiban

Upaya meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat menghadapi tantangan yang cukup berat terutama terkait dengan ancaman stabilitas dan tuntutan perubahan serta dinamika perkembangan masyarakat yang begitu cepat seiring dengan perubahan sosial politik yang membawa pengaruh/implikasi pada segala bidang kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat.

a. Kesatuan Bangsa dan Politik

Masih adanya potensi benturan antar kelompok warga masyarakat, antara kelompok warga masyarakat dengan aparat dan antara kelompok warga masyarakat dengan sektor privat karena adanya kepentingan dan pengaruh negatif arus globalisasi yang penuh keterbukaan, juga mempengaruhi wawasan kebangsaan dan kesadaran bela negara.

b. Urusan Ketentraman dan Ketertiban

Gangguan terhadap ketentraman dan ketertiban masyarakat berpotensi untuk muncul di daerah-daerah yang terkait dengan bidang-bidang seperti: perkebunan, pertambangan serta berkembangnya modus-modus kejahatan baru dengan memanfaatkan teknologi canggih dan maraknya kasus-kasus kerusuhan dan berbagai kejahatan yang bersifat konvensional, transnasional, dan kejahatan yang menyebabkan kerugian negara.

4.1.2. Permasalahan Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM

Dalam Bidang Pemerintahan, Hukum dan HAM, masih terdapat permasalahan antara lain:

a. Urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Komitmen pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten/kota untuk mewujudkan Tiga Tertib Administrasi Kependudukan meliputi: Tertib Administrasi Kependudukan, Tertib

Penerbitan NIK dan Tertib Penerbitan Dokumen Kependudukan, masih menghadapi beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Belum tertatanya jumlah penduduk secara maksimal.
- 2) Intensitas sosialisasi tentang berbagai kebijakan administrasi kependudukan belum maksimal.
- 3) Masih terjadi multi tafsir terhadap Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006.
- 4) Terbatasnya Sumber Daya Manusia dan teknologi informasi komunikasi
- 5) Belum adanya regulasi tentang standar kompetensi dan jenjang karier ASN pengelolaan dan perencanaan TIK.
- 6) Terbatasnya sarana dan prasarana kerja serta SDM yang ada untuk mendukung pelaksanaan tugas pengelolaan administrasi kependudukan, baik sarana teknologi maupun informasi.
- 7) Masih adanya penduduk yang sudah menetap di luar daerah domislinya lebih dari 1 tahun, namun yang bersangkutan tidak mau pindah, sehingga secara de facto terdata di domisili yang baru, tetapi secara de yure mereka masih terdata di daerah asalnya.
- 8) Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mendukung terselenggaranya tertib administrasi kependudukan.

b. Urusan Kearsipan

Penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan arsip merupakan rekaman informasi seluruh kegiatan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh para penyelenggara dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang telah dipercayakan oleh masyarakat. Hal ini berarti, melalui urusan kearsipan, masyarakat dapat mengetahui keberhasilan, kegagalan ataupun penyimpangan-penyimpangan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Urusan kearsipan saat ini belum dimanfaatkan secara optimal dalam proses manajemen pemerintahan dan pembangunan, hal ini disebabkan oleh beberapa permasalahan diantaranya:

- 1) Kesadaran dan kepedulian aparat pemerintah masih rendah sehingga menyebabkan arsip tidak dapat dikelola dengan baik;
- 2) Kualitas dan kuantitas SDM penyelenggara kearsipan masih belum memenuhi standar;
- 3) Pembinaan SDM kearsipan belum berkesinambungan.

c. Urusan Perpustakaan

Urusan perpustakaan mengenalkan kepada masyarakat tentang keberadaan perpustakaan daerah serta kekayaan koleksi buku-buku yang dimiliki serta dalam upaya menumbuhkembangkan minat baca bagi masyarakat. Pengembangan perpustakaan meliputi beberapa hal diantaranya upaya peningkatan sumber daya, pelayanan, dan pengelolaan perpustakaan, baik dalam hal kuantitas maupun kualitas.

Secara umum, permasalahan pembangunan urusan kepustakaan adalah bagaimana membudayakan kegemaran membaca pada masyarakat serta penyediaan sarana perpustakaan di tempat-tempat umum yang mudah dijangkau dan bermutu sebagai penunjang peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).

d. Fungsi Pendukung dan Penunjang Urusan Pemerintahan

Adapun permasalahan pembangunan fungsi pendukung dan penunjang urusan pemerintahan, sebagai berikut:

- 1) Masih belum optimalnya pelayanan publik serta rendahnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi;

Selama ini dirasakan pelayanan publik belum maksimal dikarenakan beberapa faktor diantaranya kapasitas SDM belum merata, fasilitas yang terbatas serta prosedur yang belum baku.

- 2) Masih belum optimalnya reformasi birokrasi;

Undang-undang tentang Reformasi Birokrasi yang dikeluarkan Pemerintah belum disikapi secara baik dan benar oleh pihak-pihak terkait sehingga prosesnya berjalan lambat. Adapun tujuan dari Reformasi Birokrasi adalah sebagai arahan dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pelayanan publik.

- 3) Perlunya peningkatan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN yang ditunjukkan dengan meningkatnya capaian indikator kinerja sehingga pembiayaan pembangunan dapat lebih efisien dan efektif;

- 4) Belum optimalnya sistem peningkatan kinerja dan kesejahteraan PNS;

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 65 tahun 2005 tentang Standar Pelayanan Minimal serta Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka diharapkan kinerja birokrasi dapat berjalan sesuai dengan harapan dan diperkuat dengan pengawasan oleh masyarakat serta diikuti dengan peningkatan tunjangan kesejahteraan aparatur (TKD).

- 5) Peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah;

Pengelolaan keuangan daerah baik dari sisi pendapatan maupun belanja seharusnya dapat dilakukan secara transparan dan akuntabel dimulai dari perencanaan anggaran (penyusunan RAPBD) dengan melibatkan stakeholders pembangunan daerah dalam bedah RAPBD sebelum ditetapkan dan evaluasi pelaksanaan APBD setelah selesai dilaksanakan.

- 6) Penegakan hukum dan HAM;

Penegakan hukum dan ketertiban merupakan syarat mutlak dalam upaya menciptakan iklim yang kondusif bagi pelaksanaan pembangunan di daerah. Dengan demikian kepastian hukum, rasa aman dan ketentraman masyarakat dapat kita wujudkan. Pelaksanaan penegakan hukum yang transparan diharapkan dapat menekan dampak negatif, sekaligus membangun citra positif bagi pemerintah. Hukum pada dasarnya memberikan jaminan kepastian, dalam rangka melindungi setiap warga negara dan pemenuhan HAM.

7) Luas wilayah.

Luasnya wilayah menyebabkan panjangnya rentang kendali pelayanan pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik sehingga perlu ditempuh dengan pembentukan daerah otonom baru. Demikian juga pada aspek luasnya wilayah provinsi, diperlukan langkah-langkah nyata untuk mewujudkan terbentuknya provinsi baru di Kalimantan Barat.

4.1.3. Permasalahan Pembangunan Bidang Ekonomi

4.2.2. Sejumlah permasalahan mendasar dan faktor ketidakpastian masih berlanjut dan menjadi kendala bagi proses pemulihan ekonomi secara lebih cepat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, secara makro pembangunan bidang ekonomi lebih mengedepankan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan diharapkan mampu mencapai capaian rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional. Sedangkan secara mikro, lebih diarahkan pada peningkatan perkembangan masing-masing sektor perekonomian, yang mengarah pada peningkatan ekspor maupun hilirisasi industri.

Permasalahan pembangunan bidang ekonomi akan dibahas dalam 9 (sembilan) urusan yaitu: penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah, ketahanan pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, kehutanan, industri, perdagangan, dan pariwisata.

a. Urusan Penanaman Modal

Keberhasilan pengembangan bidang investasi atau penanaman modal akan memberikan kontribusi pada kegiatan ekonomi riil dan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi selama ini sebagian besar ditopang dari sektor konsumsi, bukan dari pertumbuhan investasi maupun ekspor.

Untuk mendorong pembangunan bidang ekonomi dalam lima tahun mendatang, maka fokus masalah yang menjadi perhatian adalah bagaimana upaya meningkatkan kinerja perekonomian daerah melalui peningkatan investasi, mendorong industri pengolahan,

peningkatan perdagangan dan ekspor daerah, serta pengembangan kegiatan UMKM dan koperasi serta lembaga keuangan mikro masyarakat lainnya.

Kalimantan Barat menghadapi permasalahan klasik yang dialami oleh hampir semua provinsi di Indonesia yaitu terbatasnya modal yang dimiliki dengan pencapaian target investasi rata-rata kurang dari lima puluh persen, sehingga pemanfaatan sumber daya alam menjadi tidak maksimal.

Untuk investasi pemerintah, perkembangan alokasi belanja pembangunan/belanja publik menunjukkan komposisi belanja publik terhadap total belanja terus membaik. Investasi pemerintah (belanja pembangunan) cukup tinggi, dimana sebagian besar investasi pemerintah diperuntukkan mengatasi permasalahan struktural seperti persoalan perekonomian, sosial, pembangunan infrastruktur publik dan prasarana pemerintahan.

Berdasarkan kondisi tersebut diatas, maka terdapat berbagai permasalahan dalam pembangunan urusan penanaman modal diantaranya perlunya dorongan peningkatan investasi melalui masuknya arus penanaman modal yang didukung dengan penciptan iklim investasi yang kondusif. Secara umum, realisasi investasi dengan fasilitasi PMDN (Penanaman Modal Dalam Negeri) dan PMA (Penanaman Modal Asing) mulai menampakkan peningkatan namun pencapaiannya belum optimal karena realisasinya belum mampu mencapai lima puluh persen. Seperti realisasi investasi PMDN, pada tahun 2013 baru mencapai 11,93 persen dan mengalami peningkatan di tahun 2017 menjadi 20,68 persen. Demikian pula realisasi investasi PMA, tahun 2013 mencapai 31,55 persen dan meningkat menjadi 36,38 persen di tahun 2017.

Persoalan ketersediaan infrastruktur menjadi salah satu penyebab kurangnya minat investor menanamkan modal. Seperti sektor primer dengan bidang usaha perkebunan masih mendominasi bidang usaha yang paling diminati karena infrastruktur relatif tersedia. Sedangkan untuk sektor sekunder perkembangannya belum signifikan karena diperlukan infrastruktur (jalan, listrik dan pelabuhan) yang memadai. Disamping itu, pengembangan kerjasama antar pemerintah,

swasta dan masyarakat, termasuk dalam pengelolaan promosi investasi perlu mendapat penguatan dalam upaya peningkatan realisasi investasi. Peningkatan investasi memang memerlukan penguatan kerjasama antar pemerintah, swasta dan masyarakat termasuk pengelolaan promosi investasi.

b. Urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUKM)

Pembangunan urusan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (KUMKM) mempunyai peran penting dalam pembangunan ekonomi, karena terkait pada penyerapan tenaga kerja yang relatif tinggi dengan kebutuhan modal investasi yang kecil serta dapat menyesuaikan dan menjawab kondisi pasar yang terus berubah. Hal ini membuat pembangunan urusan KUKM, termasuk lembaga pembiayaan mikro seperti Bank Perkreditan Rakyat, Koperasi Simpan Pinjam maupun *Credit Union* (CU), tidak rentan terhadap berbagai perubahan eksternal, bahkan justru mampu menangkap berbagai peluang. Oleh sebab itu, pengembangan KUKM dapat menunjang diversifikasi ekonomi dan percepatan perubahan struktural, yang merupakan prasyarat bagi pembangunan ekonomi jangka panjang yang stabil dan berkesinambungan.

Perkembangan kemajuan KUKM yang meningkat belum diimbangi dengan perkembangan kualitas yang masih menghadapi permasalahan klasik yaitu rendahnya produktivitas. Hal ini berkaitan dengan: masih rendahnya kualitas sumber daya manusia khususnya dalam manajemen, organisasi, teknologi dan pemasaran; lemahnya kompetensi kewirausahaan; serta terbatasnya kapasitas KUKM untuk mengakses permodalan, informasi teknologi dan pasar, serta faktor produksi lainnya.

Sementara itu, selain permasalahan internal terdapat pula permasalahan eksternal yang dihadapi seperti kurang mendukungnya iklim usaha, masih terdapat beberapa praktik usaha yang tidak sehat dan keterbatasan informasi dan jaringan pendukung usaha. Selain itu, KUMKM juga menghadapi tantangan terutama yang ditimbulkan oleh pesatnya perkembangan globalisasi ekonomi dan liberalisasi perdagangan bersamaan dengan cepatnya perkembangan teknologi.

c. Urusan Pangan

4.2.3. Urusan pangan terkait dengan rumah tangga atau individu yang memiliki akses ketersediaan pangan yang cukup, aman serta bergizi untuk memenuhi kebutuhan dalam menunjang kehidupan yang aktif dan sehat. Namun, pemenuhan kebutuhan pangan penduduk secara merata dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat tidak boleh terlupakan. Hal ini menunjukkan konsepsi ketahanan pangan merupakan konsep sangat luas dan beragam serta merupakan masalah yang kompleks. Walaupun demikian, intinya terletak pada bagaimana mewujudkan terjaminnya ketersediaan pangan bagi masyarakat.

4.2.4. Untuk mencukupi kebutuhan bahan pangan utama daerah serta mengurangi ketergantungan impor atau masuknya bahan pangan antar pulau, maka daerah diharapkan mampu menyediakan pangan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah yang berasal dari sumberdaya lokal /produksi daerah. Ada beberapa aspek yang menjadi hambatan dalam mewujudkan ketahanan pangan daerah adalah: aspek produksi, aspek distribusi, dan konsumsi.

d. Urusan Pertanian

4.2.5. Dalam pembahasan permasalahan urusan pertanian, perlu dilihat pada aspek tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, serta peternakan dan kesehatan hewan.

d.1. Tanaman Pangan dan Hortikultura

Permasalahan yang dihadapi dalam meningkatkan produksi dan produktivitas tanaman pangan adalah masih rendahnya tingkat kualitas dan kuantitas SDM baik dari aspek teknologi, permodalan, serta pengairan sehingga produktivitas pertanian masih rendah jika dilihat dari rasio produksi sektor pertanian terhadap jumlah tenaga kerja disektor pertanian. Serta permasalahan

terkait alih fungsi lahan tanaman pangan ke sektor lain seperti jasa dan perdagangan yang cukup berpengaruh terhadap produksi dan produktivitas.

d.2. Perkebunan

Permasalahan terkait rendahnya Produksi Perkebunan diantaranya disebabkan oleh konflik dan gangguan usaha perkebunan, terutama pada daerah yang bersinggungan dengan kegiatan ekonomi dan sosial masyarakat eksisting, serta area adat dan budaya. Permasalahan status lahan dan hutan yang masih belum jelas juga menyebabkan konflik menjadilebih sering terjadi antara masyarakat lokal dengan perkebunan besar. Permasalahan lain yang juga menyebabkan produksi perkebunan masih rendah disebabkan juga akibat hilirisasi produk perkebunan yang masih belum berkembang, perkebunan besar lamban membangun infrastruktur pengolahan hasil perkebunanlamban membangun kebun plasma serta ditambah dengan permasalahan rendahnya kualitas sumber daya manusia yang bekerja disektor tersebut.

d.3. Peternakan dan Kesehatan Hewan

Salah satu produk peternakan yang mampu memenuhi kebutuhan daerah adalah produksi telur ayam dengan produksi 21.810 ton/tahun, 20% diantaranya dijual antar pulau seperti Natuna, Bangka Belitung, Tambelan, Pangkalanbun, dan Jakarta. Namun untuk daging sapi, untuk memenuhi kebutuhan daging sapi setiap tahun harus mendatangkan dari luar (Jawa Timur, pulau Madura dan NTB). Permasalahan dalam mengembangkan ternak di Kalimantan Barat adalah faktor sumber bibit yang belum mampu disediakan oleh para penangkar bibit ternak di daerah, akibatnya sebagian besar masih mengimpor dari luar Kalimantan Barat. Permasalahan ini disebabkan oleh usaha ternak yan berbasis kerakyatan yang memenuhi standar belum berkembang, serta masih adanya kasus Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS) pada peternakan di Provinsi Kalimantan Barat.

e. Urusan Kelautan dan Perikanan

4.2.6. Provinsi Kalimantan Barat memiliki letak yang sangat strategis, dimana bagian sebelah Barat berbatasan dengan laut Cina Selatan, sedangkan di daerah pedalaman dibelah oleh aliran sungai Kapuas, sehingga Kalbar memiliki sumber daya perikanan tangkap yang cukup melimpah baik di laut maupun di perairan umum, serta memiliki potensi yang cukup besar untuk pengembangan usaha perikanan budidaya di laut, di perairan payau dan di perairan air tawar.

4.2.7. Permasalahan dalam upaya meningkatkan ketersediaan pangan yang bersumber dari ikan bagi masyarakat Kalimantan Barat diantaranya: hilirasasi produk perikanan yang masih belum berkembang, kemampuan SDM dalam memanfaatkan teknologi sarana penangkapan dan adaptasi terhadap anomali iklim yang terjadi masih belum memadai. Hal ini menyebabkan mutu produk yang masih belum memenuhi standar yang juga disebabkan oleh sistem pengawasan dan pengendalian yang belum berjalan secara optimal.

f. Urusan Kehutanan

4.2.8. Luas kawasan hutan di Kalimantan Barat \pm 62 persen dari luas total Provinsi Kalimantan Barat. Namun dari luas tersebut masih terdapat \pm 20 persen merupakan lahan kritis. Selain itu dengan mulai berkurangnya potensi tegakan hutan alam pada hutan produksi, maka menyebabkan kontribusi sektor kehutanan menjadi menurun.

4.2.9. Permasalahan utama pada urusan kehutanan adalah terjadinya degradasi hutan dan lahan. Beberapa permasalahan yang menyebabkan hal tersebut adalah belum mantapnya keberadaan fisik kawasan hutan akibat belum selesainya penataan batas kawasan hutan sehingga menyebabkan konflik kepentingan masyarakat disekitar hutan. Masalah kepastian kawasan hutan juga semakin diperparah dengan rendahnya taraf sosial-ekonomi masyarakat disekitar hutan, sehingga konflik antara

masyarakat hutan dengan petugas kehutanan menjadi tinggi. Di satu sisi masyarakat hutan yang sebagian besar adalah petani ladang berpindah semakin terbatas lahan yang dapat disukseskan pengelolaannya dalam jangka waktu tertentu, tetapi disisi lain berbenturan dengan penetapan kawasan hutan oleh pemerintah pusat beserta penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat terkait. Permasalahan lainnya adalah masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, serta belum optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan kawasan hutan lindung dan konservasi yang merupakan kewenangan pemerintah pusat.

g. Urusan Perindustrian

4.2.10. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan pembangunan sektor industri belum begitu mengembirakan, dengan tingkat pertumbuhan rata-rata dibawah 3%. Pertumbuhan ini jauh dibawah rata-rata pertumbuhan ekonomi dalam kisaran 5-6% per tahun. Sebagai dampak dari kondisi pertumbuhan sektor industri dimaksud, kontribusinya terhadap perekonomian (PDRB total) Kalimantan Barat antara 16-17% dan belum menunjukkan kecenderungan membaik.

4.2.11. Dalam garis besarnya permasalahan pembangunan urusan industri yang menyebabkan kondisi kinerja sektor industri dimaksud disebabkan oleh:

- 1) Belum optimalnya pemberdayaan atau pengembangan pelaku industri kecil menengah di Provinsi Kalimantan Barat, hal ini disebabkan belum optimalnya pembinaan, pendidikan dan pelatihan bagi sumberdaya manusia pada sektor industri. Hal tersebut disebabkan masih lemahnya kerjasama antara pemerintah – swasta – serta asosiasi-asosiasi yang bergerak di sektor industri;
- 2) Belum optimalnya infrastruktur energi dan sistem logistik perindustrian di Provinsi Kalimantan Barat. Hal ini disebabkan dua hal utama. *Pertama*, terbatasnya fasilitas-fasilitas utama dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan industri antara lain belum tersedianya kawasan industri serta sentra industri kecil dan menengah. Permasalahan tersebut sangat

erat kaitannya dengan minimnya investasi pada sektor industri, belum optimalnya pengembangan perwilayahan industri serta terbatasnya konektivitas pelaku usaha industri. *Kedua*, masalahsarana dan prasarana pelabuhan, pasokan air bersih, serta infrastruktur yang masih terbatas serta belum mampu memenuhi standar industri.

h. Urusan Perdagangan

4.2.12. Secara umum pembangunan sektor perdagangan daerah melalui pengembangan pasar yang terintegrasi, penciptaan iklim usaha yang kompetitif, mendorong penumbuhan dan pengembangan sektor produksi perdagangan dalam dan luar negeri guna peningkatan ekspor, penciptaan tertib usaha dan upaya perlindungan konsumen. Namun yang menjadi isu penting adalah yang terkait dengan perdagangan luar negeri.

4.2.13. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir perkembangan sub sektor perdagangan luar negeri mengalami fluktuasi. Pada tahun 2013 nilai ekspor tercatat sebesar US\$.1.348,61 juta, kemudian menurun pada tahun 2014 menjadi US\$.651,99 juta atau 51,65 persen, pada tahun 2015 nilai ekspornurun menjadi US\$.565,96 juta. Kemudian pada tahun 2016 meningkat menjadi US\$.623,420 juta. Peningkatan ekspor Kalbar kembali dilanjutkan pada tahun 2017 sebesar US\$ 203,88 Juta atau sebesar 32,70% dengan nilai ekspor sebesar US\$ 827,30 Juta. Sedangkan pada tahun 2018, ekspor diperkirakan masih akan meningkat dibandingkan tahun 2017. Hal tersebut tergambar dari pencapaian ekspor sampai dengan bulan Agustus 2018 sebesar

US\$ 658,29 Juta yang mengalami peningkatan dibandingkan periode yang sama pada tahun 2017 sebesar US\$ 571,05 Juta atau meningkat sebesar 15,27%.

4.2.14. Selanjutnya kekhawatiran terhadap penurunan kinerja ekspor daerah dalam tahun-tahun mendatang patut menjadi fokus perhatian, terkait dengan:

- 1) Adanya kecenderungan semakin protektifnyaperdagangan negara-negara Eropa dan Amerika Serikat terutama terhadap komoditi yang berasal dari Cina, Korea Selatan dan Jepang yang merupakan pasar tradisional utama ekspor Kalbar;
- 2) Struktur ekspor Kalbar masih didominasi oleh 3 (tiga) komoditi utama yang bersifat primer yaitu karet, hasil tambang dan produk per kayu (diatas 80% nilai ekspor total Kalbar), sehingga perkembangan nilai ekspor Kalbar sangat rentan terhadap fluktuasi harga ketiga komoditi tersebut di pasar dunia;
- 3) Pembatasan ekspor bahan tambang utamanya bauksit sebagai dampak kebijakan/ regulasi nasional.

Dari sisi perdagangan dalam negeri dihadapkan sistem logistik daerah yang tidak efisien yang menyebabkan pada rentannya ketersediaan dan fluktuasi harga bahan pokok dan bahan strategis masyarakat serta permasalahan daya saing produk daerah akibat dari tingginya biaya distribusi. Permasalahan lainnya adalah tuntutan akan perlindungan konsumen bagi masyarakat yang semakin tinggi, dimana saat ini semakin banyak beredarnya barang dan jasa baik dari luar maupun dalam daerah yang dikonsumsi yang perlu diawasi peredarannya sehingga tidak merugikan masyarakat.

i. **Urusan Pariwisata**

4.2.15. Urusan pariwisata di daerah Kalimantan Barat termasuk sektor yang potensial untuk dikembangkan agar lebih maju lagi. Provinsi ini memiliki potensi wisata yang beragam, yakni berupa wisata alam, agrowisata, wisata budaya dan wisata minat khusus. Berdasarkan obyek dan daya tarik wisata yang ada, Kalimantan Barat telah

ditetapkan sebagai 10 (sepuluh) besar daerah tujuan wisata nasional, maka kegiatan pariwisata di daerah ini cukup potensial untuk menunjang pembangunan daerah.

Disisi lain, pengembangan dan pengelolaan urusan pariwisata akan lebih memiliki nilai strategi, apabila dalam kemasannya juga dikaitkan dengan ekonomi kreatif. Pelaku ekonomi kreatif di Kalimantan Barat cukup banyak dan mempunyai keahlian spesifik sesuai keahlian masing-masing, namun karena belum seluruhnya dilakukan pembinaan secara intensif maka pembuatan kerajinannya masih secara tradisional. Oleh karena itu perlu dilakukan peningkatan pembinaan terhadap pelaku ekonomi kreatif yang ada di Kabupaten/Kota se-Kalbar

4.1.4. Permasalahan Bidang Sosial dan Budaya

Berbagai upaya pembangunan selama diarahkan pada peningkatan kualitas SDM, yang secara komposit ditandai oleh makin membaiknya Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, peningkatan IPM menjadi penting dalam pembangunan bidang sosial dan budaya.

Dalam mendukung pembangunan bidang sosial dan budaya ada 10 (sepuluh) urusan pemerintahan yang akan disinergikan yaitu: urusan pendidikan, kesehatan, kepemudaan dan olahraga, tenaga kerja, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pemberdayaan masyarakat dan desa, sosial, kebudayaan, serta transmigrasi.

a. Urusan Pendidikan

Dimensi pendidikan merupakan salah satu indikator dalam pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Oleh karena itu, pembangunan urusan pendidikan menjadi sangat berarti, terlebih terdapat dua aspek yang menjadi indikator pembentukan IPM, yaitu aspek rata-rata lama sekolah dan aspek angka melek huruf.

Dalam upaya mengatasi permasalahan pembangunan urusan pendidikan perlu diidentifikasi berbagai permasalahan sebagai berikut.

1) Perluasan akses dan pemerataan pendidikan masih terbatas;

Peningkatan angka serapan atau angka masukan (*intake rate*) dan angka transisi (*transition rate*) terjadi di semua jenjang pendidikan, namun belum seluruh anak mendapat pelayanan pendidikan sesuai dengan amanah Undang-Undang, hal ini ditunjukkan dengan masih rendahnya Angka Serapan /angka masukan (*intakerate*) yang meliputi: APK, APM, dan APS jenjang pendidikan menengah dan Angka Transisi (*transitionintake*) yang meliputi: salah satunya masih tingginya angka putus sekolah di semua jenjang. Meningkatnya cakupan pelayanan PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) belum diikuti dengan peningkatan kualitas pelayanan seperti yang diharapkan. Disisi lain keberlanjutan penuntasan Wajib Belajar 9 Tahun (Wajar 9 Thn) dan Wajib Belajar 12 Tahun (Wajar 12 Thn) tidak hanya diarahkan pada segi kuantitas tetapi juga kualitas.

2) Mutu dan Relevansi Pendidikan masih rendah

Berbicara masalah mutu dan relevansi pendidikan, maka ada dua hal pokok yang harus mendapat perhatian serius, yaitu mutu SDM PTK dan relevansi pendidikannya serta mutu sarana dan prasarana pendidikannya.

Untuk mutu SDM PTK dan relevansinya, secara proporsional mutu guru sesuai kualifikasi akademik terus mengalami peningkatan namun dari segi profesionalismenya masih rendah, hal ini ditunjukkan dengan masih banyaknya tenaga guru yang belum mendapatkan sertifikasi guru sesuai dengan bidang keilmuan dan mata pelajaran yang diampunya belum lagi ditambah dengan masih sangat minimnya pengembangan keprofesionalisme guru melalui program diklat, bimtek maupun *workshop* .

Untuk mutu sarana dan prasarana Pendidikan terkait terbatasnya ketersediaan sarana dan prasarana pendidikan yang berkualitas;Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) dan rehabilitasi ruang kelas senantiasa dilaksanakan setiap tahunnya, namun rehabilitasi ruang

kelas belum sepenuhnya dapat dituntaskan. Selain itu, penyediaan bahan ajar, laboratorium, dan perpustakaan masih terbatas.

3) Manajemen dan tatakelola pendidikan belum optimal.

Perlunya peningkatan kapasitas aparatur di satuan pendidikan terkait dengan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) guna mewujudkan tatakelola pendidikan yang efektif. Untuk tata kelola yang berkaitan dengan manajemen ketenagaan, kalau dilihat dari kuantitasnya secara proporsional jumlah tenaga guru cukup, namun secara persebarannya belum merata keseluruh daerah karena masih terdapat penumpukan guru di daerah perkotaan sementara di daerah seperti perbatasan, terpencil dan terluar masih terdapat kekurangan guru. Sedangkan tata kelola dari segi keuangan, maka masih perlu pembiayaan pendidikan yang berkeadilan.

Mekanisme alokasi dan penyaluran dana pendidikan perlu disederhanakan dalam rangka mendukung efisiensi alokasi dan akuntabilitas yang lebih baik. Selain itu, penyelenggaraan pendidikan gratis harus tetap mengacu dan memenuhi komponen Standar Nasional Pendidikan (SNP) yang meliputi input, proses, output dan outcome proses pembelajaran. Dari isu-isu strategis tersebut, secara umum dapat dirumuskan bahwa isu strategis pembangunan urusan pendidikan yaitu peningkatan pemerataan layanan akses, mutu dan relevansi serta optimalisasi tata kelola pendidikan yang belum optimal.

b. Urusan Kesehatan

Kualitas Kinerja pelayanan publik, termasuk pembangunan urusan kesehatan, memiliki implikasi yang luas dalam mencapai kesejahteraan masyarakat. Penyelenggaraan urusan kesehatan yang dilaksanakan selama ini, disatu sisi menunjukkan peningkatan, namun di beberapa aspek perlu perbaikan serta kinerjanya masih belum seperti yang diharapkan. Sebagaimana pembangunan urusan pendidikan yang terkait dengan pembentukan

IPM, pembangunan urusan kesehatan pun sangat terkait dengan indikator pembentukan IPM diantaranya dari aspek angka harapan hidup.

Ada beberapa permasalahan pokok urusan kesehatan yang perlu ditangani dan dicarikan pemecahannya, terkait dengan pembangunan urusan kesehatan, yaitu:

1) Status kesehatan ibu dan anak masih rendah;

Kesehatan ibu ditandai dengan indikator AKI (Angka Kematian Ibu), dimana jika dibanding dengan angka nasional, maka kematian ibu di Kalimantan Barat masih relatif tinggi. Kondisi yang sama terjadi pada indikator AKB (Angka Kematian Bayi) masih lebih tinggi sedikit dibanding dengan AKB Nasional. Demikian pula dengan AKABA (Angka Kematian Balita), dimana AKABA Kalimantan Barat lebih tinggi dari AKABA Nasional.

2) Status gizi masyarakat masih rendah;

Kekurangan gizi pada anak balita masih tetap menjadi masalah kesehatan masyarakat yang cukup penting di Kalimantan Barat. Berdasarkan hasil Pemantauan Status Gizi (PSG) menunjukkan prevalensi gizi buruk Kalimantan Barat relatif membaik, namun cenderung meningkat di tahun 2015.

3) Angka kesakitan dan kematian akibat penyakit masih tinggi;

Beberapa penyakit menular yang masih menjadi masalah kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat, diantaranya Demam Berdarah Dengue (DBD), diare, malaria, tuberculosis (TB), dan HIV/AIDS. Sedangkan pada penyakit tidak menular, yang masih menjadi tantangan terutama diabetes mellitus, hipertensi, jantung koroner, dan kanker.

4) Ketersediaan tenaga kesehatan masih terbatas;

Tenaga kesehatan per 100.000 penduduk untuk dokter, dokter spesialis, dokter gigi, perawat dan bidan mengalami peningkatan, namun kesenjangan tenaga kesehatan lebih jelas terlihat antara daerah perkotaan dan pedesaan. Oleh karena itu, penempatan tenaga kesehatan di daerah perbatasan, pesisir dan kepulauan terus ditingkatkan.

- 5) Pembiayaan kesehatan untuk memberikan jaminan perlindungan kesehatan masyarakat masih terbatas;
- 6) Pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kesehatan belum optimal;
- 7) Manajemen pembangunan kesehatan belum efektif;
- 8) Kesenjangan status kesehatan dan gizi masyarakat antar wilayah masih lebar;
- 9) Akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas relatif masih rendah.

c. Urusan Kepemudaan dan Olahraga

Dalam pembaharuan dan pembangunan, pemuda mempunyai fungsi dan peran yang sangat strategis sehingga perlu dikembangkan potensi dan peranannya melalui penyadaran, pemberdayaan, dan pengembangan. Dalam proses pembangunan, pemuda merupakan kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan sebagai perwujudan dari fungsi, peran, karakteristik dan kedudukannya yang strategis dalam pembangunan. Untuk itu, tanggungjawab dan peran strategis pemuda di segala dimensi pembangunan perlu ditingkatkan.

Sedangkan pembangunan keolahragaan merupakan instrumen sebagai upaya mencerdaskan kehidupan bangsa, serta upaya meningkatkan kualitas hidup manusia secara jasmaniah, rohaniyah, dan sosial dalam mewujudkan masyarakat yang maju, makmur dan sejahtera.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan urusan kepemudaan dan olahraga, yaitu: meningkatnya krisis moral atau karakter di kalangan pemuda. Pembentukan karakter pemuda melalui pelatihan kewirausahaan belum optimal, prestasi dan budaya olahraga masih rendah; pembudayaan olahraga rekreasi baru menyentuh masyarakat perkotaan.

d. Urusan Tenaga Kerja dan transmigrasi

Dalam pelaksanaan pembangunan, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan

kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan terhadap tenaga kerja dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha.

Pembangunan ketenagakerjaan mempunyai banyak dimensi dan keterkaitan. Keterkaitan itu tidak hanya dengan kepentingan tenaga kerja selama, sebelum dan sesudah masa kerja tetapi juga keterkaitan dengan kepentingan pengusaha, pemerintah, dan masyarakat. Untuk itu, diperlukan pengaturan yang menyeluruh dan komprehensif, antara lain mencakup pengembangan sumberdaya manusia, peningkatan produktivitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia, upaya perluasan kesempatan kerja, pelayanan penempatan tenaga kerja, dan pembinaan hubungan industrial.

Terdapat beberapa permasalahan terkait pembangunan urusan ketenagakerjaan, diantaranya: masih tingginya tingkat pengangguran terbuka, masih rendahnya kesejahteraan dan perlindungan terhadap tenaga kerja, iklim hubungan industrial yang kurang kondusif, lokasi transmigrasi yang dicadangkan maupun dikembangkan belum *clear* dan *clean*, serta belum optimalnya pengelolaan potensi kawasan transmigrasi.

4.1.5. Permasalahan Pembangunan Bidang Infrastruktur

4.2.16. Permasalahan pembangunan bidang infrastruktur melingkupi 7 (tujuh)

urusan yaitu:

a. Urusan Penataan Ruang

Adapun permasalahan pembangunan urusan penataan ruang adalah sebagai berikut: Belum optimalnya pengaturan dan pembinaan penataan ruang Sesuai UU No. 26 Tahun 2007,

serta masih kurangnya pemahaman mengenai UU No. 26 Tahun 2007 oleh pemangku kepentingan, serta lemahnya koordinasi penyelenggaraan penataan ruang antarsektor dan antarwilayah melalui Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD); Belum optimalnya instrument pengendalian pemanfaatan ruang; masih lemahnya pengawasan penataan ruang. Perda RTRW Prov Kalbar No. 10 Tahun 2014 belum operasional dan belum menjadi acuan bagi perencanaan pembangunan. RTRW Prov Kalbar belum menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD. Perencanaan (Masterplan) kawasan budidaya untuk sector tertentu sebagai turunan Perda RTRW Prov Kalbar belum semuanya disusun (seperti perkebunan, pertambangan, pertanian, kehutanan, dan lain sebagainya). Terdapatnya perbedaan penentuan kawasan hutan dengan Perda RTRW Prov Kalbar No. 10 Tahun 2014 sehingga memerlukan peninjauan kembali (PK) RTRWP. Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) tidak dapat melakukan tugas pengawasan pemanfaatan ruang yang berhubungan dengan program, kegiatan pembangunan, pemberian izin pemanfaatan ruang, dan kebijakan yang berkaitan dengan pemanfaatan ruang karena belum didukung dengan kebijakan daerah. Instrument pengendalian pemanfaatan ruang yang berupa Perda Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Prov Kalbar dan Kab/Kota belum ada yang ditetapkan. *One map policy* RTRW yang berbasis spasial dan terintegrasi belum dilaksanakan dalam penyusunan disemua sektor sesuai Keppres yang telah ditetapkan. Kabupaten/kota belum secara rutin menyampaikan laporan penyelenggaraan penataan ruang daerah. Belum disusunnya rencana tata ruang di pulau-pulau pesisir untuk keperluan wisata. Perlunya perencanaan dalam pembangunan terminal khusus (Tersus) di laut dan disungai dalam RTRW. Perlunya integrasi perencanaan jalan khusus pertambangan, perkebunan, dan kehutanan dalam RTRW.

b. Urusan Lingkungan Hidup, terdiri dari:

1) Kualitas Air

Belum ditetapkannya kelas mutu kualitas air di sungai-sungai yang menjadi kewenangan provinsi (melalui Perda). Belum adanya *database* kualitas air di sungai-sungai yang menjadi

kewenangan provinsi. Belum adanya *database* berbasis spasial perusahaan-perusahaan yang mencemari air di sungai-sungai kewenangan provinsi. Belum adanya *database* berbasis spasial terkait pencemaran air yang menyebabkan sedimentasi. Masih terdapatnya perusahaan penghasil limbah belum melakukan pengelolaan limbah sebelum di buang ke lingkungan. Masih terdapat perusahaan penghasil limbah yang membuang limbahnya dengan belum memenuhi baku mutu lingkungan. Masih terdapat kegiatan usaha/perusahaan yang belum melaksanakan kewajiban pengelolaan lingkungan sesuai dokumen lingkungan. Masih terdapat kegiatan usaha yang berdampak terhadap lingkungan belum memiliki dokumen lingkungan. Limbah rumah tangga (domestik) dibuang langsung ke lingkungan sebelum diolah terlebih dahulu. Masih banyak kegiatan pembukaan lahan yang dilakukan perusahaan yang menyebabkan pencemaran sumber air (erosi). Masih banyak terdapat aktifitas pertambangan ilegal yang merusak dan mencemari lingkungan. Belum adanya *database* status mutu kualitas air/indeks kualitas air di Kalbar.

2) Kualitas Udara

Belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor industry (perusahaan), belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor energi (perusahaan), belum adanya *database* berbasis spasial sumber pencemar udara dari sektor transportasi, belum optimalnya pengawasan sumber pencemaran udara perusahaan oleh pemerintah, masih terjadinya kebakaran hutan dan lahan, belum adanya *database* status mutu kualitas udara/indeks kualitas udara.

3) Bencana dan Kebencanaan

Belum adanya *database* berbasis spasial mengenai daerah banjir dan daerah rawan banjir, intensitas dan luasan daerah/wilayah terjadi bencana banjir semakin meningkat. Belum adanya *database* berbasis spasial untuk lokasi bencana tanah longsor dan daerah rawan tanah longsor, serta lokasi bencana puting beliung dan daerah rawan puting beliung. Intensitas terjadi bencana tanah longsor dan puting beliung cenderung semakin meningkat. Selain itu, bencana

kebakaran hutan dan lahan serta permukiman selalu berulang terjadi. Masih belum adanya *database* indeks resiko bencana daerah.

4) Perubahan Iklim dan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK)

Masih terus terjadinya deforestasi dan degradasi hutan, belum adanya *database* berbasis spasial penyebab emisi disektor lahan (pertanian, perkebunan, dan kehutanan). Masih terdapat areal berhutan di kawasan budidaya (APL), Kalbar masih merupakan provinsi pengemisi Gas Rumah Kaca. Belum adanya *database* berbasis spasial daerah-daerah terdampak perubahan iklim (adaptasi perubahan iklim), Belum adanya *database* berbasis spasial aksi-aksi mitigasi perubahan iklim, Belum adanya *database* berbasis spasial aksi-aksi lokal terkait perubahan iklim (proklam).

5) Permasalahan Lingkungan Hidup Lainnya

Belum adanya *database* berbasis spasial kerusakan lingkungan pesisir dan kerusakan lahan akibat pertambangan *illegal* (kerusakan lahan akses terbuka), daerah resapan air (resapan air cenderung berkurang), belum ada perlindungan gambut pada kawasan APL (budidaya). Belum ada pengendalian pemanfaatan lahan gambut melalui kebijakan fiscal; misalnya melalui PBB kehutanan, perkebunan dan pertambangan.

Belum adanya data sampah untuk kab/kota, data kinerja pengelolaan sampah. Masih ada sampah yang tidak tertangani, belum ada data sarana dan prasarana pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah akhir perkotaan (TPA) masih bersifat *open dumping* dan partisipasi stakeholder dalam pengelolaan sampah masih belum optimal. Masih adanya pengelolaan sampah dengan cara dibakar. Belum adanya data dan informasi penanganan/kinerja pengelolaan sampah di wilayah provinsi. Belum adanya *database* berbasis spasial pengguna B3 dan penghasil limbah B3, masih terdapat limbah B3 yang tidak ditangani dan dibuang langsung kelingkungan, belum adanya data kinerja pengelolaan B3 dan limbah B3, belum terintegrasinya pengelolaan lingkungan hidup dengan NGO/Swasta/masyarakat. Belum terpenuhinya luasan

minimal 30% Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan. Masih terdapatnya konflik kepentingan antara mempertahankan keanekaragaman hayati dengan kegiatan-kegiatan ekonomi sehingga perlindungan biodiversity masih lemah. Mendorong pengelolaan TAHURA, KEE, Kebun Raya, Ekowisata, untuk kepentingan food, water, dan energy. Masih terbatasnya Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup Daerah (PPLHD), belum terdapatnya kearifan-kearifan dan pengetahuan local dalam pengelolaan lingkungan hidup. Masih terdapatnya Rencana Strategis (Renstra) daerah yang belum dilakukan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) terutama pada kawasan-kawasan strategis provinsi.

c. Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral

Permasalahan pembangunan urusan Energi dan Sumberdaya Mineral, yaitu: provinsi Kalimantan Barat belum mempunyai Rencana Umum Energi Daerah (RUED), angka rasio elektrifikasi dan rasio desa berlistrik PLN terus mengalami peningkatan, namun masih berada dibawah rata-rata nasional, pertumbuhan kebutuhan listrik Kalbar lebih pesat dibandingkan pertumbuhan pasokan energinya, proporsi energi baru terbarukan (EBT) dalam bauran energi listrik Kalbar masih rendah, dan pada saat bersamaan ketergantungan pada energy listrik berbahan bakar fosil yang tidak ramah lingkungan masih tinggi, belum optimalnya pemanfaatan potensi energi baru terbarukan, banyaknya desa disekitar perkebunan, kawasan hutan dan pulau-pulau kecil yang belum teraliri listrik, belum terpetakannya lokasi-lokasi kegiatan pertambangan tanpa izin (PETI).

d. Urusan Perhubungan, yang terdiri dari:

1) Jalan

Belum tersedianyadatabase teknis jalan (umur jalan, penanganan dan pembiayaan jalan). Sumberdaya manusia yang relative terbatas terutama untuk tenaga teknis di OPD, konsultan, maupun di pihak kontraktor. Ketersediaan material yang terbatas, hal ini terbentur oleh permasalahan Izin Usaha Pertambangan (IUP), dimana tidak semua kontraktor mempunyai IUP

pertambangan, sehingga ada sebagian yang mendatangkan material dari luar seperti dari Serawak-Malaysia (untuk lokasi proyek yang ada di daerah perbatasan Negara). Hal tersebut tentunya merugikan kontraktor dari segi waktu karena akan membutuhkan waktu yang lebih lama dengan biaya yang besar. Kendaraan yang lewat melebihi daripada kapasitas tonase jalan, sehingga jalan menjadi cepat rusak, tidak sesuai dengan umur rencana jalan yang telah direncanakan. Alih status jalan kabupaten menjadi jalan provinsi sudah ditetapkan gubernur, namun aset jalan kabupaten belum diserahkan ke provinsi. Hal ini tentunya akan menghambat dalam proses penganggaran. Penyiapan lahan untuk pelebaran/pembangunan jalan dan jembatan masih mengalami kendala. Perlunya peningkatan kondisi kemantapan jalan provinsi, karena kondisi kemantapannya masih relative rendah (83,54%) dibawah kondisi mantap jalan nasional (92,87%). Lambatnya progres pembangunan jalan lingkaran luar dan jembatan Kapuas III di Pontianak dan sekitarnya. Hal ini disebabkan oleh belum tuntasnya permasalahan pembebasan lahan. Masih adanya jalan nasional yang belum memenuhi standar teknis (lebar 7 meter), perlunya pelebaran jalan dalam kota (Sanggau, Sekadau, dan Sintang). Masih adanya *missing link* jalan lintas tengah (Nanga Pinoh-Batas Kalteng). Belum semua kawasan strategis/kawasan industri/kawasan ekonomi khusus maupun pusat kegiatan nasional yang dapat didukung dengan akses jalan. Belum tuntasnya pembangunan jalan paralel perbatasan dan akses paralel perbatasan. Belum adanya pembangunan jalan tol/bebas hambatan di Kalbar, Belum terealisasinya pembangunan *fly over* di Kota Pontianak.

2) Perhubungan Darat

Belum adanya database bidang lalu lintas berbasis spasial, jumlah sumber daya manusia bidang perhubungan masih terbatas/kurang (data kebutuhan ASN) Standard pelayanan minimal perlengkapan jalan masih terbatas (faskes: marka jalan, guardrail, strumbel strip, dll) baru tersedia 30%. Serah terima aset dermaga provinsi ke kabupaten belum terlaksana, padahal operasionalnya sudah menjadi kewenangan kab/kota, yang akan mempengaruhi penilaian BPK.

Belum ditetapkannya terminal tipe B di Kalbar, sehingga perlu mendorong terbitnya SK Gubernur tentang hal tersebut.

Angkutan *feeder* antara Negara belum tersedia di Terminal Sei. Ambawang, hal ini disebabkan karena pihak swasta belum ada yang bersedia karena dinilai tidak bernilai ekonomi (belum menguntungkan swasta). Dalam kondisi seperti ini, pemerintah harus dapat menyediakannya. Belum operasionalnya angkutan/trayek antar Negara (orang dan barang) di Badau dan Aruk. Belum dibangunnya terminal barang export-import di Aruk, Badau, Jagoi Babang, dan Jasa. Belum operasionalnya terminal barang export-import di Entikong.

3) Perhubungan Laut

Belum adanya *database* bidang pelayaran berbasis spasial, Jumlah sumberdaya manusia bidang perhubungan masih terbatas/kurang (data kebutuhan ASN), Belum adanya standar minimal pelayanan (SPM) bidang pelayaran, Masalah tata hubungan kerja pemerintah provinsi (Dishub) dengan UPP-KSOP belum optimal, hal ini disebabkan oleh koordinasi yang belum begitu intens sehingga menghambat proses kegiatan rutin. Banyaknya permohonan pembangunan terminal khusus (tarsus) yang belum ada aturan, Belum ditetapkannya kelas alur sungai di Kalbar (perlu survey). Masih banyaknya pelabuhan-pelabuhan Pelindo II yang belum optimal pemanfaatannya.

4) Perhubungan Udara

Kapasitas bandara Rahadi Oesman-Ketapang sudah melebihi kapasitas tampungnya (*overload*), sehingga perlu segera dikembangkan. Hal ini sudah disetujui oleh gubernur dan rekomendasi pengembangannya adalah di daerah Pelang, berjarak 38 km dari Kota Ketapang. Kemudian, pengembangan Bandara Paloh belum optimal padahal bandara ini telah masuk kedalam tataran kebandaraan nasional. Kondisi landasan pacunya mencapai 750 meter x 30 meter dengan dana pembangunannya dari AURI. Bandara ini pula diusulkan menjadi bandara perintis dan sudah ada MoU antara Kabuapten Sambas dengan pihak AURI. Belum optimalnya

pengembangan bandara Sanggau Ledo. Lemahnya proses proses pembangunan rel kereta api, sedangkan FS dan DED nya sudah tersedia.

e. Urusan Sumberdaya Air

Belum adanya database berbasis spasial tentang irigasi, rawa, cakupan sawah, air baku, dan luasan daerah wilayah banjir. Kondisi irigasi yang baik 2.202 Ha, rusak ringan 1.492 Ha, rusak sedang 481 Ha dan rusak berat 2.590 Ha. Kondisi rawa yang baik 24.821 Ha, rusak ringan 6.795 Ha, rusak sedang 6.860 Ha, dan rusak berat 16.044 Ha. Belum dapat diketahui kondisi saah di Kalbar. Selain itu, belum tersedia database air baku berbasis spasial (untuk pemanfaatan dan potensi). Kondisi ketersediaan/kemampuan air baku belum juga diketahui. Kemudian panjang pantai kritis di Kalbar 59.750 m, yang sudah ditangani 25.569 m dan yang belum ditangani 34.181 m.

f. Urusan Perumahan Permukiman

Belum ada SK Penetapan Kawasan Kumuh di Prov. Kalbar. Belum adanya data yang valid tentang jumlah rumah layak huni. Belum optimalnya sosialisasi pemerintah kepada masyarakat tentang lingkungan perumahan sehat, untuk menyampaikan indicator lingkungan perumahan sehat.

g. Urusan Keciptakarya, yang mencakup Komunikasi dan Informatika

Belum optimalnya capaian air bersih dan sanitasi sesuai dengan Program Nawacita yaitu 100 - 0 – 100. Hal ini bermakna bahwa pada Tahun 2019 capaian pengguna air bersih dan sanitasi mencapai 100%. Berdasarkan BPS Nasional bahwa Capaian Rumah Tangga Air Bersih menurut RPJMD Tahun 2017 adalah 54,67%. Sedangkan untuk sanitasi adalah 49,65% dan realisasi RPJMD Tahun 2017 rumah tangga bersanitasi mencapai 47,525. Kemudian, belum adanya database pelayanan rumah tangga air bersih, bersanitasi, dan persampahan berbasis spasial serata belum terbangunnya TPA Regional di Kota Pontianak, Kabupaten Mempawah dan Kabupaten Sanggau.

Permasalahan pembangunan urusan Komunikasi dan Informatika adalah belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana, prasarana serta layanan komunikasi dan informatika. Pada aspek telekomunikasi, cakupan layanan untuk infrastruktur telekomunikasi belum bisa menjangkau setiap pelosok wilayah (masih banyak terdapat blankspot) terutama di kawasan terdepan, terluar, dan terdepan. Hal ini dicirikan dengan adanya beberapa wilayah yang belum terlayani. Pelebaran signal di daerah perbatasan Negara. Kemudian masih kurangnya penanganan berita-berita *hoax*, *cyber security*. Hal ini dapat dilihat dengan banyaknya berita atau informasi *hoax* perlu ditangani dan diklarifikasi secara cepat oleh pemerintah. Masih kurangnya sarana dan prasarana komunikasi dan informasi berkaitan dengan sosialisasi, literasi, dan diseminasi. Contohnya berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Selain itu, masih kurangnya teknologi pengamanan data Prov. Kalbar dan belum adanya database eksisting BTS serta kurangnya koordinasi untuk menangani *databaseblankspot*. Penetrasi internet di Kalbar baru mencapai 17% saja, dan kondisi ini masih tergolong rendah. Hal ini juga di kuatkan dengan kenyataan bahwa belum optimalnya penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana layanan komunikasi dan informatika.

4.1.6. Permasalahan Utama Pembangunan Kalimantan Barat

Berdasarkan permasalahan pembangunan bidang-bidang pembangunan di Kalimantan Barat, perlu dirumuskan permasalahan utama pembangunan. Perumusan permasalahan utama pembangunan ini diarahkan agar implementasi program dan kegiatan dapat lebih terarah, fokus, sinergi dan berkelanjutan. Adapun permasalahan utama pembangunan Kalimantan Barat dirumuskan berdasarkan kriteria: 1). Berpengaruh signifikan terhadap pencapaian sasaran RPJMD, 2). Merupakan tugas dan tanggungjawab OPD Provinsi. 3). Dampak yang ditimbulkan terhadap publik, 4). Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah, 5). Kemungkinan atau kemudahan pelaksanaannya.

Dari rumusan diatas maka permasalahan pembangunan utama Kalimantan Barat sebagai berikut:

1. Kondisi geografis Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan negara tetangga dan pada posisi perairan Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) 1 yang mengakibatkan maraknya praktek-praktek ilegal dan potensi ancaman terhadap wawasan kebangsaan;
2. Wilayah perbatasan, pedalaman, terpencil, pesisir dan kepulauan yang belum berkembang secara optimal;
3. Rentang kendali pemerintahan yang panjang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat serta kuantitas dan kualitas infrastruktur wilayah yang belum memadai;
4. Pemerataan Layanan Akses, Kualitas dan Relevansi serta Tata Kelola Pendidikan dan Tata Kelola Kesehatan yang belum optimal;
5. Rendahnya minat investasi di Kalimantan Barat, baik yang bersumber modal asing maupun penanaman modal dalam negeri;
6. Pemberdayaan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (K-UMKM), termasuk pemberdayaan ekonomi kreatif yang masih rendah;
7. Produksi dan produktivitas sektor pertanian yang masih rendah, belum mendukung peningkatan ketahanan pangan;
8. Nilai dan volume perdagangan Kalimantan Barat keluar negeri maupun dalam negeri masih rendah;
9. Masih belum optimalnya penyelenggaraan reformasi birokrasi, termasuk peningkatan kinerja dan kesejahteraan ASN;
10. Belum optimalnya kapasitas penyelenggaraan pemerintah desa dan peran serta masyarakat desa dalam proses pembangunan;

11. Menurunnya daya tampung dan daya dukung lingkungan;
12. Derajat kesejahteraan masyarakat masih rendah serta ketimpangan pendapatan yang cenderung stagnan;
13. Pengendalian pemanfaatan ruang yang belum optimal.

4.1.7. Permasalahan Dimensi Kewilayahan

Pembahasan dimensi kewilayahan dikelompokkan berdasarkan kawasan yaitu pedalaman, perbatasan antar negara, serta pesisir dan kepulauan.

Secara umum, Kalimantan Barat diklasifikasikan sebagai Daerah Tertinggal, disebabkan dari 14 (empat belas) kab/kota terdapat 8 (delapan) yang masih berstatus Tertinggal. Penyebab ketertinggalan beberapa daerah tersebut antara lain (i) letak geografis yang sulit dijangkau atau terisolir; (ii) kepadatan penduduk relatif rendah; (iii) memiliki potensi sumber daya alam namun tidak dikelola secara optimal; (iv) tingkat pendidikan, pengetahuan, dan keterampilan yang sederhana, (v) minimnya ketersediaan akses prasarana perhubungan, transportasi, komunikasi, listrik, dan air bersih; (vi) karena beberapa faktor pembangunan, seperti keterbatasan kemampuan keuangan pemerintah, termasuk pula prioritas penanganan dan pendekatan yang dilakukan.

a. Wilayah Pedalaman

- 1) Rendahnya Ketersediaan dan Akses terhadap Sarana dan Prasarana;
- 2) Terbatasnya Alternatif Lapangan Kerja;
- 3) Rendahnya Akses terhadap Permodalan;
- 4) Rendahnya Kapasitas Sumber Daya Manusia dan Masyarakat;
- 5) Rendahnya Tingkat Ketahanan Pangan;
- 6) Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 7) Belum Optimalnya Peran Kelembagaan;

- 8) Masih lemahnya kemandirian desa;
- 9) Masih lemahnya perencanaan pembangunan desa;
- 10) Lemahnya kapasitas pemerintah desa, lembaga-lembaga desa dan lembaga lembaga kemasyarakatan;
- 11) Lemahnya komitmen pemerintah daerah.

b. Wilayah Perbatasan antar Negara

Permasalahan dalam pengembangan wilayah perbatasan, antara lain meliputi yaitu:

- 1) Belum tegasnya batas administrasi perbatasan antar negara;
- 2) Penanganan dan pengelolaan keamanan, hukum, dan pertahanan di wilayah perbatasan;
- 3) Rendahnya kesejahteraan masyarakat karena terbatasnya akses transportasi dan kurang optimalnya pelayanan sosial dasar termasuk ketersediaan energi kelistrikan yang menjangkau masyarakat di perbatasan dan terhambatnya kegiatan ekonomi lokal karena terbatasnya sarana dan prasarana;
- 4) Belum optimalnya kebijakan dan program-program dari berbagai sektor yang berpengaruh baik langsung maupun tidak langsung terhadap kehidupan masyarakat perbatasan, belum optimalnya koordinasi antar Kabupaten, Provinsi dan Pusat. Belum jelasnya mekanisme koordinasi dengan berbagai pemangku kepentingan dalam pembangunan kawasan perbatasan serta masih belum optimalnya keberpihakan dari kepemimpinan lokal dan kelembagaan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah.

c. Wilayah Pesisir dan Kepulauan

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan wilayah pesisir dan kepulauan, antara lain:

- 1) Terbatasnya akses transportasi yang menghubungkan wilayah pesisir dan kepulauan dengan wilayah yang relatif lebih maju;
- 2) Kepadatan penduduk relatif rendah dan terpencar di pulau-pulau kecil;

- 3) Kebanyakan wilayah-wilayah ini miskin sumberdaya, khususnya sumberdaya manusia dan sumberdaya alam yang belum dikelola secara optimal untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat luas;
- 4) Masih belum memadainya ketersediaan energi dan kelistrikan. Masih ada wilayah pesisir dan kepulauan yang belum teraliri listrik, sementara pengelolaan energi terbarukan masih belum berkembang;
- 5) Rendahnya Akses terhadap Modal Usaha;
- 6) Rendahnya akses terhadap permodalan, akan menghambat pengembangan usaha masyarakat nelayan dan berpengaruh terhadap produktivitas nelayan;
- 7) Belum optimalnya pembangunan di wilayah pesisir dan kepulauan;
- 8) Belum memadainya fasilitas untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat seperti air bersih termasuk prasarana komunikasi dan informasi yang akan memperlancar dan mempercepat pembangunan kawasan pesisir dan kepulauan;
- 9) Degradasi Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup;
- 10) Belum optimalnya dukungan sektor terkait untuk pengembangan wilayah-wilayah ini.

4.2. Isu-Isu Strategis Daerah

Perumusan isu-isu strategis dilakukan sebagai upaya identifikasi terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat. Dalam mengidentifikasi isu strategis tersebut, terdapat dua garis besar yang perlu mendapat perhatian, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Aspek lingkungan internal mencakup kekuatan dan kelemahan yang merupakan potensi wilayah Kalimantan Barat dan perlu pengembangan. Sedangkan aspek lingkungan eksternal meliputi peluang dan ancaman yang mempengaruhi keberhasilan pembangunan Kalimantan Barat.

4.2.1. Identifikasi Lingkungan Internal dan Lingkungan Eksternal

4.2.1.1 Identifikasi Lingkungan Internal

a. Kekuatan Daerah

- 1) Kalimantan Barat memiliki sumberdaya alam yang melimpah meliputi sub sektor pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan, peternakan, perikanan, dan sektor pertambangan (terutama Uranium, Bauksit, Batu Bara dan Mineral Radioaktif) yang belum termanfaatkan secara optimal;
- 2) Posisi geografis Kalimantan Barat sangat strategis karena terletak pada Alur Laut Kepulauan Indonesia 1 (ALKI-1) dan perairan lautnya berhadapan langsung ke Laut Cina Selatan;
- 3) Mempunyai daerah yang berbatasan langsung (Darat) dengan negara tetangga (Malaysia) yang menjadi beranda terdepan perekonomian wilayah;
- 4) Kalimantan Barat memiliki potensi wisata yang cukup kaya dan beragam, mulai dari wisata alam, wisata sejarah dan budaya serta wisata minat khusus seperti *Eco Tourism* dengan alamnya yang masih potensial;
- 5) Kalimantan Barat mempunyai bentang hutan hujan tropika basah (*tropical rainforest*) yang cukup luas yang memiliki berbagai *biodiversity* endemik bagi pengembangan dunia ilmu pengetahuan dan teknologi serta untuk kepentingan kerjasama dengan pihak luar negeri, serta memiliki peran sebagai paru-paru dunia;

b. Kelemahan Daerah

- 1) Terbatasnya infrastruktur dasar yang menghambat pengembangan usaha dan pelayanan publik;
- 2) Lemahnya daya saing Kalimantan Barat karena belum berkembangnya hilirisasi industri;
- 3) Kondisi infrastruktur di daerah perbatasan negara dan daerah tertinggal masih terbatas;
- 4) Belum optimalnya pengembangan sumber daya manusia yang ditunjukkan oleh Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang masih berada di bawah rata-rata nasional;
- 5) Belum optimalnya kompetensi, sistem kinerja dan kesejahteraan aparat birokrasi dalam memberikan pelayanan publik;

- 6) Prasarana wilayah yang dimiliki belum mendorong peningkatan investasi;
- 7) Investasi belum optimal dalam mendukung perekonomian daerah;
- 8) Penurunan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai akibat dari kegiatan ekstraksi sumber daya alam dan lahan;
- 9) Belum optimalnya pelayanan akses dan pemerataan di bidang pendidikan dan kesehatan, terutama di wilayah perbatasan, pedalaman, pesisir dan kepulauan;
- 10) Belum optimalnya pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam di bidang kehutanan, pertanian, perkebunan, pertambangan dan energi, kelautan dan perikanan;
- 11) Masih sering terjadinya kebakaran hutan dan lahan yang menimbulkan gangguan terhadap lalu lintas darat, laut dan udara serta kesehatan masyarakat;
- 12) Panjangnya rentang kendali pelayanan serta penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang disebabkan belum optimalnya konektivitas dan aksesibilitas antar daerah di wilayah Kalimantan Barat.

4.2.1.2. Identifikasi Lingkungan Eksternal

a. Peluang Daerah

- 1) Pengembangan kerjasama antarkawasan dan antarnegara secara lebih luas dan nyata seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) akan memperluas peluang investasi, produksi, kesempatan kerja dan pendapatan bagi kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah;
- 2) Kalimantan Barat merupakan provinsi yang mempunyai akses hubungan darat secara langsung dengan negara tetangga Malaysia dan Brunei, sehingga memiliki peluang sebagai berikut:
 - a) Interaksi sosial ekonomi yang didukung dengan bis antar kota-antar negara yang semakin meningkat.
 - b) Kerjasama Sosial Ekonomi Malaysia Indonesia (Sosek Malindo) mendorong tumbuh dan berkembangnya perekonomian wilayah kedua Negara.

- c) Terbukanya pintu gerbang internasional yang meliputi: Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Entikong-Tebedu, PLBN Aruk-Biawak, PLBN Badau-Lubuk Antu dan pengembangan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) di Jagoi Babang-Serikin.
- 3) Adanya komitmen global terhadap mitigasi perubahan iklim dan percepatan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB);
 - 4) Perubahan tatanan kehidupan politik, ekonomi, sosial dan budaya semakin meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan kebijakan pembangunan;
 - 5) Dalam RPJMN Tahun 2015 – 2019, tujuan pengembangan Wilayah Pulau adalah mendorong percepatan dan perluasan pembangunan Wilayah Pulau Kalimantan dengan menekankan keunggulan dan potensi daerah, melalui: (a) pengembangan hilirisasi komoditas batu bara, serta pengembangan industri berbasis komoditas kelapa sawit, karet, bauksit, bijih besi, gas alam cair, pasir zirkon dan pasir kuarsa, (b) penyediaan infrastruktur wilayah, (c) peningkatan SDM dan ilmu dan teknologi secara terus menerus.
- b. Ancaman Daerah
 - 1) Globalisasi membawa dampak yang dapat menjadi ancaman bagi Kalimantan Barat, yaitu:
 - a) Perlambatan ekonomi pada negara-negara tujuan ekspor atau menjadi mitra dagang Indonesia belum pulih sepenuhnya sehingga berdampak pada perekonomian daerah;
 - b) Pemberlakuan Zona Perdagangan Bebas (*Free Trade Area*) meningkatkan arus masuk barang dan jasa dari pasar internasional yang berdampak pada determinasi pasar lokal (daerah) dan pasar dalam negeri;
 - c) Arus informasi yang bersifat negatif semakin sulit dibendung akibat pesatnya perkembangan teknologi informasi sehingga dengan mudah dapat diakses oleh masyarakat di daerah;

- 2) Kurangnya koordinasi lintas sektoral antara pusat dan daerah dalam rangka pengawasan perairan teritorial Kalimantan Barat, sehingga masih terjadi *Illegal Fishing, Unreported Fishing and Unregulated Fishing* di wilayah perairan Kalimantan Barat;
- 3) Letak geografis Kalimantan Barat terutama di kawasan perbatasan negara rawan terjadi *illegal trading, trafficking*, dan penyelundupan narkoba serta terorisme;
- 4) Pengelolaan daerah tertinggal dan persoalan perbatasan antar negara belum optimal.

4.2.2. Rumusan Isu-Isu Strategis Daerah

Berdasarkan permasalahan dan permasalahan utama serta identifikasi lingkungan internal maupun eksternal tersebut diatas, maka dapat dirumuskan beberapa isu strategis, sebagai berikut:

- 1) Wilayah Provinsi Kalimantan Barat terlalu luas sehingga menyulitkan dalam pelayanan dan pengalokasian anggaran.
- 2) Kualitas regulasi, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan masih relatif rendah sehingga berdampak terhadap penurunan daya saing daerah.
- 3) Kesejahteraan petani masih sangat rendah ditunjukkan dari penurunan Nilai Tukar Petani (NTP) dan produktivitas pertanian.
- 4) Belum meratanya akses dan kualitas layanan pendidikan dan kesehatan sehingga belum terpenuhinya SPM Pendidikan dan Kesehatan.
- 5) Ketersediaan sarana dan prasarana transportasi serta akses infrastruktur dasar belum memadai sehingga tidak menarik bagi masuknya investasi.
- 6) Peranan perindustrian, perdagangan dan pariwisata terhadap perekonomian Kalbar yang belum optimal.
- 7) Belum adanya keterpaduan rencana sektor dengan rencana tata ruang dan belum tersedianya data dan informasi yang terintegrasi dalam penyelenggaraan penataan ruangan perencanaan pembangunan daerah.

- 8) Menurunnya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.

BAB V

VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

5.1. Visi

Masa jabatan gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 merupakan periode lima tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dalam RPJPD dikemukakan bahwa visi pembangunan jangka panjang Kalimantan Barat sampai dengan tahun 2025 adalah “Kalimantan Barat Bersatu dan Maju”. Gubernur Kalimantan Barat periode 2018-2023 berkomitmen melaksanakan kepemimpinannya mewujudkan visi RPJPD tersebut. Oleh karena itu, kondisi Kalimantan Barat saat ini sebagaimana telah diuraikan pada bab sebelumnya serta visi, misi, dan arah pembangunan yang tertuang dalam dokumen RPJPD 2005-2025 menjadi acuan dalam merumuskan visi pembangunan daerah tahun 2018–2023, yaitu:

TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN MASYARAKAT KALIMANTAN BARAT MELALUI PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN PERBAIKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

Visi tersebut mengandung pengertian bahwa 5 (lima) tahun yang akan datang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat akan fokus pada percepatan pembangunan infrastruktur seperti membuka keterisolasian kawasan dengan menambah panjang jalan (membangun jalan baru), membangun jembatan, meningkatkan kualitas jalan yang sudah ada, mendorong percepatan pembangunan pelabuhan samudera, mendorong peningkatan produksi listrik untuk meningkatkan rasio elektrifikasi serta untuk menopang program hilirisasi (industrialisasi), menambah pasokan air bersih, memperluas ruang terbuka hijau, dan lain-lain. Bersamaan dengan itu, juga akan dilakukan perbaikan tata kelola pemerintahan untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, efektivitas, dan efisiensi birokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik.

Percepatan pembangunan infrastruktur dan perbaikan tata kelola pemerintahan akan menjadi landasan utama bagi keseluruhan pelaksanaan program pembangunan yang hasil akhirnya adalah peningkatan kesejahteraan rakyat, yaitu rakyat yang mampu memenuhi kebutuhan primer dan sekunder, hidup dalam lingkungan masyarakat yang agamis, demokratis, berbudaya, bermoral serta dalam suasana yang aman dan damai. Kesejahteraan rakyat seperti ini akan tercermin dalam seluruh aspek kehidupan, dalam kelembagaan, pranata, dan nilai-nilai yang melandasi kehidupan politik, ekonomi, dan sosial budaya.

5.2. Misi

Untuk mewujudkan visi pembangunan tersebut, maka misi pembangunan Provinsi Kalimantan Barat yang akan dilaksanakan adalah sebagai berikut:

1. **Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur**, yaitu mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.
2. **Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip *Good Governance***, yaitu meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selanjutnya untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan maka akan diwujudkan melalui pemekaran daerah yaitu dalam jangka pendek terbentuknya Provinsi di bagian timur Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Kapuas Raya beserta pemekaran

Kabupaten Sambas, Sanggau, Ketapang, dan Kapuas Hulu dan dalam jangka panjang terbentuknya Provinsi di bagian selatan Kalimantan Barat, yaitu Provinsi Ketapang (Tanjungpura).

3. **Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif**, yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
4. **Mewujudkan masyarakat sejahtera**, yaitu dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.
5. **Mewujudkan masyarakat yang tertib**, yaitu dengan menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.
6. **Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan**, yaitu dengan tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

5.3. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam RPJMD Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Tujuan pembangunan jangka menengah daerah merupakan sesuatu yang akan dicapai dalam jangka waktu satu sampai lima tahun. Tujuan ditetapkan dengan mengacu kepada pernyataan visi dan

misi yang didasarkan pada analisis isu-isu strategis dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran pembangunan daerah merupakan hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu hingga lima tahun ke depan. Berdasarkan rumusan visi dan misi maka ditetapkan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dalam kurun waktu hingga lima tahun ke depan, yakni dijabarkan pada Tabel 5.1 sebagai berikut.

Tabel 5. 1.
Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Barat
Visi: “Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat Kalimantan Barat melalui Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Perbaikan Tata Kelola Pemerintahan”

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan		Indeks Infrastruktur	56,61	59,93	63,00	65,94	68,86	71,84	71,84
			Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat	Rasio Elektrifikasi	83	85	87	89	91	93	93
			Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat	56,85%	59,20%	61,61%	64,20%	66,80%	70%	73,20%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP	27%	32%	37%	42%	47%	52%	57%
				Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun	6,69%	6,50%	6,31%	6,12%	5,93%	5,74%	
				Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum	1.170.312,5 0	936.250	780.208,3 3	668.750	585.156,2 5	520.138,9 0	
				Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun	27%	32%	37%	42%	47%	52%	
				Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	635.788	635.788	569.756	637.967	467.807	432.011	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Pengembangan Sistem Transportasi	10%	33,47%	50,06%	64,65%	74,28%	100%	
				Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak	80%	83,70%	86,70%	90,30%	94%	98%	
			Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	49,71%	56,68%	62,38%	67,44%	72,18%	76,99%	76,99%
			Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46,76%	48,26%	49,83%	51,48%	53,22%	55,04%	55,04%
				Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	46,76%	49,47%	52,46%	55,60%	58,89%	62,35%	62,35%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Jumlah Permukiman Perkotaan yang tertangani Infrastrukturnya	2 Kota	2 Kota	4 Kota	6 Kota	10 Kota	14 Kota	14 Kota
			Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur meningkat	Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun (%)	14,39%	22,10%	21,00%	19,95%	18,95%	18,00%	
				Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67,92%	67,92%	69,29%	70,65%	72,01%	73,37%	73,37%
				Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	21,43%	35,71%	50,00%	64,29%	78,57%	92,86%	92,86%
				Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	66,00%	66,00%	74,00%	78,00%	88,00%	100,00%	100,00%
				Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi	0	52	70	79,11	91,11	100	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50,00%	55,00%	60,00%	65,00%	70,00%	75,00%	75,00%
			Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan	Jumlah Proposan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Jumlah Penyediaan Penataan Kawasan Permukiman	0,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
2	Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah		Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
				Nilai SAKIP Prov. Kalimantan Barat	B	B	B	BB	BB	A	A

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Prosentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran	41%	46%	51%	57%	62%	68%	68%
			Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintah daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	IKM Provinsi Kalimantan Barat	80,33 (Baik)	83 (Baik)	85 (Baik)	87 (Baik)	89 (Baik)	91 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)
			Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	Prosentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	20%	20%	40%	60%	80%	100%	100%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Komponen SAKIP Nilai pelaporan kinerja	10,08	10,5	11	11,5	12	12,5	12,5
			Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33,42%	66,86%	75,08%	70,12%	81,83%	88,77%	88,77%
			Meningkatkan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase Perangkat Daerah Dalam Pengelolaan Arsip Dengan Kategori Cukup	6,67%	13,33%	20%	26,67%	40%	53,33%	53,33%
				Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam Pengelolaan Kearsipan Dengan Kategori Cukup	20%	29%	43%	57%	71%	86%	86%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Terselenggaranya Penataan Daerah dan Pembinaan Wilayah	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	AMPRES	20%	40%	60%	80%	100% (1 Provinsi)	100% (1 Provinsi)
				Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	20%	40%	60%	80%	100% (5 Kabupaten)	100% (5 Kabupaten)
				Segmen Batas Daerah	27	3	3	2	0	0	35

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerja sama dengan daerah lain dan pihak ketiga di dalam negeri dan luar negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya komunikasi kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup kehumasan)	Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang	77,5	85	89,5	95	98	100	100

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	90,47%	90,47%	100%	100%	100%	100%	100%
			Terlaksananya Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	98,63%	98,63%	100%	100%	100%	100%	100%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dilingkungan Pemprov Kalbar	Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat daerah dengan penilaian masuk dalam Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80-100)	Kategori Informatif	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100
			Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri	Indeks SPBE	2,55	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
				Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknolofi Informasi dan Komunikasi	-	79 Desa	159 Desa	239 Desa	319 Desa	425 Desa	425 Desa

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kalbar	Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah Provinsi	15%	30%	50%	70%	80%	90%	90%
			Pengelolaan data statistik sektoral provinsi kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA	Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	15%	70%	80%	90%	100%	100%	100%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkat-nya penataan administrasi kependuduk-an di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan dokumen kependuduk-an, akurasi data kependuduk-an, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependuduk-an di Kalimantan Barat	38,99	48,66	61,32	68,97	75,2	79,29	82,14
			Meningkatnya Profesionalisme SDM Pemerintah Daerah	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	7,36%	24,95%	14,73%	14,73%	15,57%	15,80%	85,78%
			Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21,04	21,07	22	23	24	25	25

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12,61	13	14	15	16	17	17,00
			Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%	95%	95%
				Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%
				Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%
				Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3	Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif	Meningkatnya kualitas SDM		IPM	66,26	67,2	67,87	68,69	69,68	70,78	70,78
			Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,48	7,78	8,2	8,9	9,5	10,4	10,4
				Harapan Lama Sekolah (tahun)	12,5	12,9	13,2	13,7	14,2	14,5	14,5
				Angka Melek Aksara	98,24	98,3	98,34	98,39	98,43	98,45	98,45
				Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	5	5	6	7	7	7
			Cakupan Kunjungan Perpustakaan		96.696 orang	106.365 orang	117.000 orang	128.700 orang	141.570 orang	590.331 orang	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				LOS (hari)	132	100	100	100	100	100	100
				TOI (Hari)	5,2	3	3	3	3	3	3
				BTO (Kali)	2,7	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
				NDR	9,38	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000
				GDR	9,38	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000
				BOR	80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
				LOS (hari)	50	50	50	50	50	50	50
				TOI (Hari)	2	2	2	2	2	2	2
				BTO (Kali)	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
				NDR	0	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000
				GDR	0	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000
			Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks Pembangunan Pemuda	47,5	48,2	48,6	49,2	49,9	50,7	50,7
			Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68,5	68,5	70	70,5	80	80,5	80,5

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64,46	64,46	65,96	66,46	66,96	67,46	67,46
			Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
			Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	79,43	83,62	85,71	87,81	89,9	92	92
			Meningkatkan Fasilitasi program \keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk	3,33	15	30	41,67	46,67	53,,33	60

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4	Mewujudkan masyarakat sejahtera	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata		Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,2	5,35	5,62	5,83	6,15	6,15
				Gini Ratio	0,33	0,33	0,32	0,3	0,28	0,27	0,27
				Desa Mandiri (jumlah)	1	63	159	239	319	425	425
		Mengurangi Kemiskinan dan Pengangguran		Tingkat Pengangguran Terbuka	4,13	3,90	3,63	3,47	3,26	3,07	3,07
				Angka Kemiskinan	7,37	6,92	6,43	5,99	5,38	5,00	5,00
			Terkendalinya Penyakit Menular Strategis (PHMS)/ Zoonosis	Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	5	6	7	7	8	8
		Meningkatnya Produksi Peternakan		Jumlah Produksi Daging Peternakan (Ton)	71.560	76.111	76.873	77.642	78.417	82.785	82.785
				Jumlah Produksi Telur (Ton)	34.689	35.383	36.090	36.812	37.549	38.299	38.299

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)	3,98	4	4,25	4,5	4,75	5,5	5,5
				NTP Peternakan	93,95	95,16	96,37	97,58	98,79	100	100
			Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	240.294	249.614	254.607	259.699	264.893	270.191	270.191
			Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	3,17	3,22	3,27	3,32	3,37	3,42	3,42
			Meningkatnya kesejateraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	NTP Perikanan (%)	103,5	104	104,5	105	105,5	106	106

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (Disbun)	Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%.)	4,00	4,47	4,52	4,57	4,62	4,67	4,67
				Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	2.639.538	3.439.714	3.568.561	3.702.418	3.841.481	3.985.958	3.985.958
				NTP PR	94,44	95,55	96,66	97,78	98,89	100	100
			Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan	94,41	96,06	96,54	97,03	97,51	98	98
			Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.549.989	1.607.700	1.655.920	1.733.635	1.739.657	1.791.780	1.791.780
			Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	3,50	3,64	3,79	3,94	4,09	4,26	4,26
			Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	385.220	396.770	408.670	420.935	433.570	446.575	446.575

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura	NTP Hortikultura	101,02	102,03	102,08	102,13	102,18	102,23	102,23
			Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)	8,40	8,82	9,26	9,72	10,21	10,72	10,72
			Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dari Perizinan Usaha DI Bidang Kehutanan	Produksi Kayu Bulat (M ³)	981.200,00	1.050.000,00	1.100.000,00	1.150.000,00	1.200.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00
			Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan	Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK	1,5	1,55	1,6	1,65	1,7	1,75	1,75
			Meningkatnya nilai Investasi	Jumlah Nilai Investasi	13,18 T	18,75 T	19,41 T	20,09 T	20,79 T	21,52 T	100,56 T
			Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Juta Rupiah)	5.675.013						

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatkan Kualitas Koperasi dan UMKM yang mandiri, Produktif dan berdaya saing	Prosentase Koperasi Berkualitas	21,00%	23,00%	25,00%	27,00%	29,00%	31,00%	31,00%
				Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil Naik Kelas	n/a	0,91%	1,82%	2,73%	3,64%	4,55%	4,55%
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	10,22	10,22	10,53	10,84	11,50	11,85	11,85
			Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif	90.649	90.938	91.938	91.538	91.838	92.138	92.138
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4,45	4,80	5,20	5,50	6,00	6,50	6,50
			Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB		5,25	6,50	7,00	7,50	8,00	8,00

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih		35,37%	35,82%	36,27%	36,53%	37,57%	
			Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif		3,63%	3,96%	4,38%	4,83%	5,31%	
			Ketersediaan Lahan Transmigrasi	Persentase Areal Trans migrasi hasil pengukuran HPL (Ha)		1.175,70	1.199,28	284,66	164,00	845,61	
			Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS, PSKS dan Penyeleggara Kesejahteraan Sosial Lainnya yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan	49,29	50,46	56,62	56,86	57,09	57,35	57,35

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Persentase Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keberintisan dan Kesetiakawanan	0	0	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
			Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa	Persentase Partisipasi Masyarakat	35,74	42,65	48,3	53,95	59,6	65,44	65,44
			Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat	5,28%	5,28%	5,39%	5,40%	5,51%	5,62%	5,62%
				Terkendalinya Inflasi Daerah	3,60%	3,60%	3,52%	3,47%	3,41%	3,36%	3,36%
5	Mewujudkan masyarakat yang tertib	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat		Konflik sosial	0	0	0	0	0	0	0
			Meningkatnya Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	97,15	97,35	97,55	97,75	97,95	98,15	98,15

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal	Jumlah Masyarakat yang memperoleh layanan dalam Penegakan Perda/ Perkada	-	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkanya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
			Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana	9,80%	27,84%	45,88%	63,92%	81,96%	100,00%	100,00%
				Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan	3,01%	22,40%	41,80%	61,20%	80,60%	100,00%	100,00%

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir	
						2019	2020	2021	2022	2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	
				Persentase cakupan pelayanan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	52,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
6	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	66,2	66,4	66,6	66,7	66,8	66,8	
			Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	55,8	56,2	56,6	57	57,4	57,8	57,8	

No	Misi	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/ Sasaran	Kondisi Awal	Target Capaian					Kondisi Akhir
						2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				Indeks Kualitas Udara	87,9	87,914	87,928	87,942	87,956	87,970	87,91
			Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan layanan krisis	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)		47,09	47,15	47,22	47,28	47,34	47,34
			Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50%	55%	60%	65%	70%	75%	75%

BAB VI
STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

6.1. Strategi Pembangunan Daerah

Untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dirumuskan strategi pembangunan yang digunakan. Strategi pembangunan yang dipilih merupakan panduan bagi penyusunan program pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sesuai dengan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

6.1.1. Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur.

Maksud dari misi ini adalah untuk mempercepat penyediaan infrastruktur jalan, jembatan, energi listrik dan air bersih, menambah ruang terbuka hijau, membangun pelabuhan samudra, dan meningkatkan kapasitas pelabuhan udara agar bisa didarati jenis pesawat berbadan besar, yang diorientasikan untuk mendorong peningkatan kegiatan ekonomi dan untuk membantu peningkatan kualitas dan kesejahteraan masyarakat.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya pembangunan infrastruktur di daerah termasuk daerah perbatasan yang ditandai dengan indikator Indeks Infrastruktur Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah.



Gambar 6.1.
Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Percepatan Pembangunan Infrastruktur

6.1.2. Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance.

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas aparatur baik intelektual maupun moral agar lebih transparan, partisipatif, responsif, efisien, dan akuntabel dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik serta mampu mengikuti perubahan lingkungan eksternal dan internal, sekaligus mampu beradaptasi dengan dinamika perubahan tersebut. Selain itu juga untuk mengurangi rentang kendali pemerintahan yang akan diwujudkan melalui pemekaran daerah, sehingga pelayanan pembangunan daerah menjadi lebih dekat dengan masyarakat.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah yang ditandai dengan indikator Indeks Reformasi Birokrasi dan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.

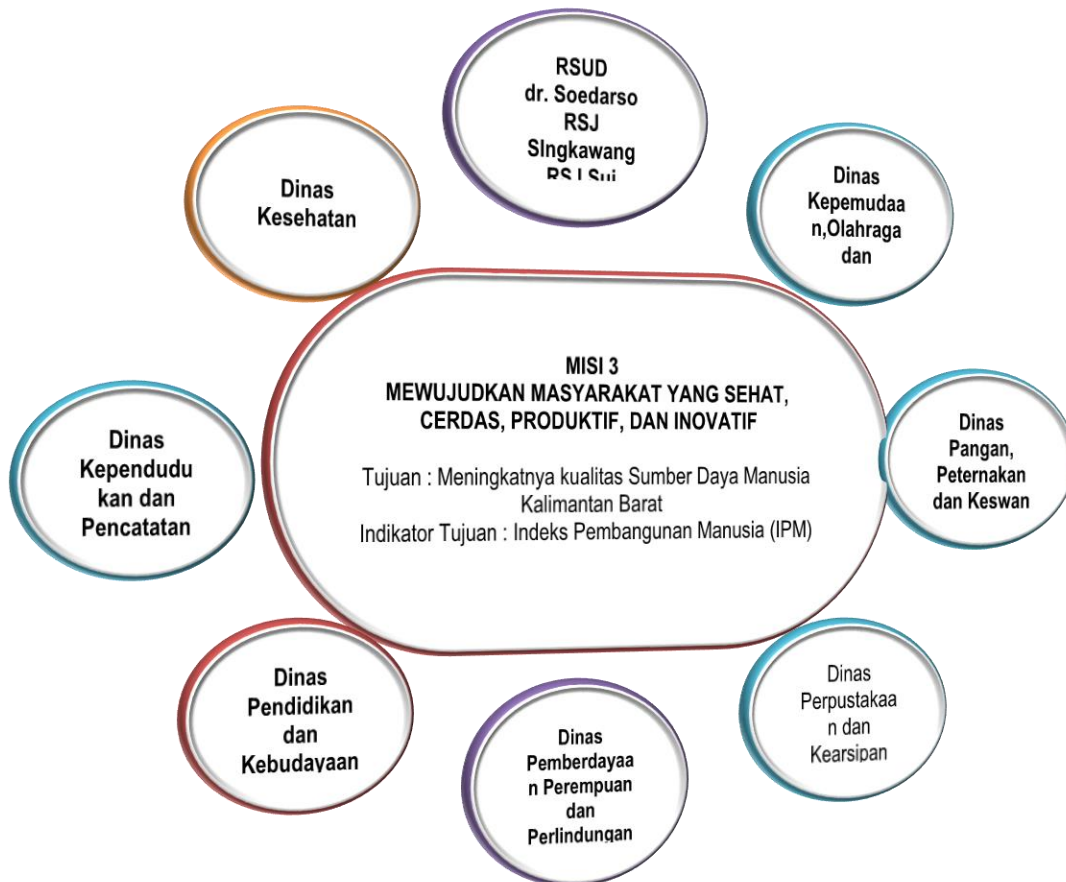


Gambar 6.2.
Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Berkualitas Dengan Prinsip-Prinsip Good Governance

6.1.3. Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif.

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan pendidikan dan derajat kesehatan, dan memperkuat kehadiran nilai-nilai keagamaan dalam proses pendidikan untuk membentuk manusia yang bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya sumber daya manusia yang ditandai dengan indikator Indeks Pembangunan Manusia, dimana indeks tersebut tersusun dari 3 dimensi pembangunan manusia yaitu pembangunan pendidikan, pembangunan kesehatan dan pembangunan kesejahteraan. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 6.3.
Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sehat, Cerdas, Produktif, Dan Inovatif

6.1.4. Mewujudkan masyarakat sejahtera.

Maksud dari misi ini adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat melalui dengan mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran, mempertegas keberpihakan pemerintah terhadap kelompok masyarakat dan wilayah yang kurang beruntung, menghilangkan diskriminasi dalam berbagai aspek pelayanan sosial, dan mempercepat proses hilirisasi dengan memperkuat sinergi antara sektor pertanian dalam arti luas dan sektor pertambangan dengan sektor industri pengolahan.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata yang ditandai dengan indikator Pertumbuhan Ekonomi, Tingkat Pengangguran Terbuka, Angka Kemiskinan, Nilai Tukar Petani (NTP) dan Jumlah Desa Mandiri. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 6.4.
Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan Masyarakat Yang Sejahtera

6.1.5. Mewujudkan masyarakat yang tertib.

Maksud dari misi ini adalah menciptakan kehidupan masyarakat yang harmoni antar kelompok, etnis, agama, dan wilayah.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang ditandai dengan kejadian konflik sosial yang terjadi di Kalimantan Barat. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.

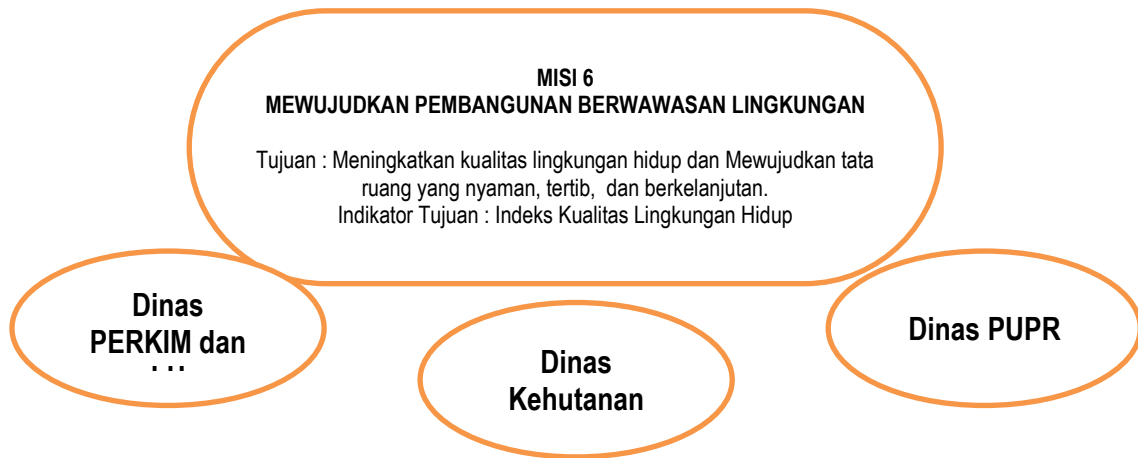


Gambar 6.5.
Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan masyarakat yang tertib

6.1.6. Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan.

Maksud dari misi ini adalah dalam pelaksanaan pembangunan di Kalimantan Barat tetap menjaga fungsi, daya dukung, dan kenyamanan dalam kehidupan pada masa kini dan masa depan, melalui pemanfaatan ruang yang serasi antara penggunaan untuk permukiman, kegiatan sosial ekonomi, dan upaya konservasi.

Tujuan dari misi ini yaitu meningkatnya kualitas lingkungan hidup dan mewujudkan tata ruang yang nyaman, tertib, dan berkelanjutan yang ditandai dengan indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup. Untuk mencapai indikator tujuan tersebut telah ditetapkan beberapa strategi yang akan dilaksanakan oleh beberapa Perangkat Daerah. Hubungan pencapaian tujuan dari misi ini dengan Perangkat Daerah yang akan mencapainya digambarkan pada gambar berikut.



Gambar 6.6.
Hubungan Pencapaian Misi Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan

Dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang telah ditetapkan maka dipilih strategi dan arah kebijakan yang akan digunakan untuk 5 tahun kedepan. Adapun strategi dan arah kebijakan yang dipilih adalah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.1.
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 Misi Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
1	Misi 1: Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur			
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat	Penyediaan tenaga listrik Non PLN; peningkatan pembangunan infrastruktur ketenagalistrikan yang aman, andal dan ramah lingkungan; serta pengembangan penyediaan energy listrik berbasis tenaga surya dan juga berbasis nuklir	Mengoptimalkan penyediaan tenaga listrik Non PLN.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Diversifikasi dan konservasi energi serta pengembangan listrik yang bersumber dari energi baru dan terbarukan (PLTA, PLTS, PLTMH dan PLTN, PLTB)	Pembangunan pembangkit listrik berbasis EBT di wilayah 3T
		Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat		
		Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur yang mendukung sektor agraris	Mengoptimalkan Pengembangan Penyediaan Sarana Air Baku
		meningkatkan kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	pembentukan sekretariat bersama dalam pengelolaan prasarana sarana yang bersinergi antar Provinsi dan Kabupaten infrastruktur jalan dan jembatan	Mengoptimalkan Kinerja Jaringan Irigasi dan Rawa Untuk Mendukung Ketahanan Pangan dan normalisasi saluran sungai serta Saluran Drainase dan Limbah
		Kualitas Infrastruktur meningkat		Pemantapan Kapasitas dan Kualitas Jalan dan Jembatan dan Mengoptimalkan pemeliharaan jalan dan jembatan.
		Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalbar	Peningkatan peran PPID pembantu seluruh OPD dalam Keterbukaan Informasi	
			peningkatan layanan publik untuk menindaklanjuti aduan masyarakat terkait pembangunan dan layanan publik pemerintah	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Penerapan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan menuju Cyber Province	Pengembangan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan layanan publik	
		Dukungan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri	Dukungan Peningkatan Infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di Desa menuju Desa Mandiri	
		Peningkatan persentase tingkat keamanan informasi dilingkungan Pemprov Kalbar	Peningkatan keamanan informasi penyelenggaraan pemerintahan dengan persandian	
		Pengelolaan data statistik sektoral provinsi kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA	Pengintegrasian Data Statistik Sektoral Kalimantan Barat dalam Satu Data	
2	Misi 2: Mewujudkan tata kelola pemerintahan berkualitas dengan prinsip-prinsip Good Governance			
	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Meningkatnya efisiensi dan efektifitas pengendalian administrasi pembangunan	Interaktif, komunikatif dan informatif terhadap pembinaan administrasi pembangunan.	Merumuskan kebijakan mengenai pengendalian administrasi pembangunan terintegrasi.
		Meningkatnya Kualitas Proses pengadaan barang dan jasa	Peningkatan Profesionalitas dan Modernisasi Pengadaan	Menjadikan UKPBJ sebagai Pusat Keunggulan (Center of Excellence) Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Daerah
		Meningkatnya pengelolaan Barang Milik Daerah	Peningkatan perencanaan, pemanfaatan dan inventarisasi aset	Pengelolaan barang milik daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
		Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Peningkatan kualitas Penyusunan, pelaksanaan dan Pertanggungjawaban dokumen penganggaran daerah	Pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku Pembinaan terhadap proses penyusunan dokumen penganggaran kabupaten/kota

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Meningkatkan implementasi Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah (SAPD) berbasis akrual
			Peningkatan sumber-sumber pendapatan daerah	Mengoptimalkan upaya intensifikasi penerimaan pada objek-objek pendapatan daerah
				Mengembangkan pengelolaan pendapatan berbasis teknologi informasi
				Mengoptimalkan sistem pelayanan pendapatan daerah
		Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa		
		Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Peningkatan sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan	Optimalisasi sosialisasi kebijakan dan pembinaan pelaksanaan administrasi kependudukan
		Peningkatan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Pengembangan dan peningkatan kapasitas SDM serta pembinaan aparatur	Meningkatkan pengelolaan rekrutmen dan pengembangan karier aparatur
				Meningkatkan kesejahteraan dan disiplin aparatur
				Optimalisasi sistem dan layanan administrasi kepegawaian
			Peningkatan kompetensi aparatur	Optimalisasi pengembangan kompetensi dan sertifikasi kompetensi aparatur
				Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pengembangan kompetensi
		Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Mewujudkan pengelolaan kearsipan daerah yang mendukung kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatkan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip
				Meningkatkan Pengelolaan Data, Sistem Informasi dan Jaringan Informasi Kearsipan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Menata Sistem Penentuan Pilihan Jenis dan Topik Kelitbangan yang akan dilaksanakan guna memperoleh kegiatan kelitbangan prioritas secara selektif	Optimalisasi Kelitbangan untuk memenuhi kebutuhan daerah
			Memperkuat fasilitasi inovasi daerah yang Terintegrasi dan Sistem Informasi Database Kelitbangan	Optimalisasi Penyelenggara Fasilitasi Inovasi daerah secara Berkesinambungan
		Meningkatnya komunikasi kebijakan Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup Kehumasan)	Peningkatan Peran kehumasan dalam penyampaian Informasi /pemberitaan kegiatan Pembangunan dan Pemerintahan	Meningkatkan Penyebaran Informasi melalui media Cetak, Elektronik, Media Luar Ruang dan Online
		Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan yang handal sesuai standar	Peningkatan Koordinasi , Sinergitas Pelayanan Keprotokolan sesuai dengan standar pelayanannya.	Meningkatkan layanan Tamu, Pimpinan dan pengaturan Acara Meningkatkan Kapasitas Kelembagaan dan Intitusi Pemerintah
		Meningkatkan kualitas peraturan perundang-undangan	Peningkatan penataan peraturan perundang-undangan daerah	meningkatkan kualitas penyusunan peraturan perundang-undangan Provinsi dan Kabupaten/Kota
		Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi kalimantan Barat di Jakarta	1. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Aparatur yang berkaitan dengan hubungan antar lembaga	1. Mengikutsertakan Sumber Daya Aparatur melalui pendidikan dan pelatihan untuk memperoleh keahlian dan keterampilan dibidang hubungan antar lembaga
			2. Penugasan pegawai di luar kantor untuk melakukan koordinasi terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Jakarta.	2. Memfasilitasi pertemuan antara Gubernur dengan pejabat eksekutif dan legislatif lainnya dengan lembaga – lembaga pemerintahan, masyarakat antara swasta di Jakarta dan daerah lainnya.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Terlaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Mendukung sarana transportasi untuk kegiatan keprotokolan dan promosi daerah	Meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya untuk mengikuti diklat keprotokolan dan mengikuti perkembangan promosi daerah
			Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lain	Pembinaan terhadap pengelolaan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya.
			Mengupayakan pengadaan sarana dan prasarana untuk keperluan Mess	Disesuaikan dengan Peraturan Gubernur tentang pengelolaan Mess daerah dan anggaran yang tersedia
		Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Optimalisasi pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai perundang	Peningkatan pengelolaan penyelenggaraan pemerintahan yang tertib dan sesuai perundang
		Terfasilitasinya kegiatan penataan daerah dan pembinaan wilayah	Penataan Daerah	Pemekaran Wilayah dan Penegasan Batas Daerah
		Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Meningkatkan pelaksanaan kerjasama pengembangan potensi daerah	Penyusunan kebijakan yang mendukung kerjasama daerah
		Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Memperkuat pengelolaan wilayah perbatasan melalui pendekatan kesejahteraan	Peningkatan koordinasi pemangku kepentingan pengelola perbatasan
		Meningkatnya jumlah PERDA yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	Peningkatan kualitas penyusunan Perundang-Undangan dan Pelayanan DPRD	Meningkatkan kualitas Penyelenggaraan Pembahasan Raperda/ Keputusan DPRD
				Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Publikasi Kegiatan DPRD
		Meningkatnya pelayanan umum, pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	Meningkatkan pelayanan yang cepat, tepat dan berkualitas untuk kepentingan umum,	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Umum, Pimpinan dan Tamu-Tamu Pimpinan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			pimpinan dan tamu-tamu pimpinan	Meningkatkan Disiplin Aparatur dan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah
		Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal		Meningkatkan Kapasitas Sumber Daya Aparatur, Kualitas Penyusunan Rencana Kerja dan Pengendalian Program dan Pengelolaan Administrasi Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat
		Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan	Memastikan ketersediaan acuan dalam proses perencanaan pembangunan	Pemantapan proses penyusunan dokumen perencanaan
			Meningkatkan ketersediaan data dan informasi pembangunan yang valid	Pengelolaan Data dan Informasi berbasis teknologi informasi
		Meningkatnya capaian hasil pembangunan daerah		
		Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKj) Pemerintah Prov. Kalbar	Peningkatan Akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Meningkatnya perangkat daerah yang menerapkan Akuntabilitas Kinerja di Prov. Kalbar
3	Misi 3: Mewujudkan masyarakat yang sehat, cerdas, produktif, dan inovatif			
	Meningkatnya kualitas SDM	Peningkatan kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	Peningkatan akses layanan pendidikan	Perluasan dan pemerataan akses layanan pendidikan menengah dan vokasi melalui program SMA/SMK Negeri gratis dan Beasiswa Siswa Miskin SMA/SMK Swasta.
				Penyediaan sarana dan prasarana pendidikan SMA/SMK
				Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan
			Peningkatan dan penjaminan mutu serta relevansi layanan pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus	Peningkatkan kompetensi guru dan tenaga kependidikan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Peningkatan profesionalisme, kualitas serta akuntabilitas guru
				Pengawasan dan penjaminan mutu sesuai Standar Nasional Pendidikan (SNP)
			Mendorong pemerintah kabupaten/kota meningkatkan APK pada PAUD dan Dikdas serta bersama-sama meningkatkan APK Perguruan Tinggi	Peningkatan pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, Pendidikan Tinggi Dan Pendidikan Non Formal
			Melestarikan warisan budaya benda dan tak benda	Peningkatan pelestarian cagar budaya, adat istiadat dan budaya
				Pengembangan budaya dan seni daerah
				Peningkatan kapasitas tenaga kebudayaan
			Meningkatkan tata kelola perpustakaan yang mampu mendorong minat dan kemampuan baca masyarakat	Peningkatan peran perpustakaan dan pembudayaan kegemaran membaca
		Peningkatan kualitas kesehatan	Peningkatan layanan kesehatan Ibu dan Anak	Meningkatkan layanan gizi dan kesehatan ibu dan anak
			Peningkatan status kesehatan masyarakat	Meningkatkan Pola Hidup Bersih dan Sehat pada masyarakat
				Penyediaan data dan informasi kesehatan
				Penyediaan obat dan perbekalan kesehatan yang memadai
		Peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan		Meningkatkan pelayanan kesehatan yang berorientasi pada kepuasan masyarakat terhadap layanan kesehatan
				Perluasan kapasitas dan fasilitas kesehatan rumah sakit
			Meningkatkan pembinaan dan pengembangan olahraga	Pengembangan dan pembinaan olahraga

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Peningkatan kualitas pemuda	Meningkatkan peran pemuda dan pramuka	Penyadaran, pemberdayaan dan pengembangan kepemimpinan, kewirausahaan serta kepeloporan pemuda
		Meningkatnya Kesetaraan Gender Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		
		Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Peningkatan peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program KB dan KS, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk	Optimalisasi peran serta OPD dan mitra kerja/swasta dalam program KB dan KS, serta sinkronisasi kebijakan bidang pengendalian penduduk
		Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan.	Menguatkan pengelolaan dan pemanfaatan cadangan pangan, Menjaga stabilitas distribusi dan harga pangan, meningkatkan kecukupan konsumsi energi, protein masyarakat yang memenuhi kaidah keragaman sumber pangan dan keseimbangan gizi berbasis sumberdaya lokal,	Pemantapan ketahanan pangan daerah menuju kemandirian pangan dengan peningkatan produksi pangan pokok, stabilisasi harga bahan pangan, terjaminnya bahan pangan yang aman dan berkualitas dengan nilai gizi yang meningkat serta meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha pangan.
		Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan		
		Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monitoring Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda Olahraga dan Pemberdayaan Perempuan		

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
4	Misi 4: Mewujudkan masyarakat sejahtera			
	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata	Terkendalinya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)	Meningkatkan Status Kesehatan Hewan	Peningkatan Status Kesehatan Hewan
		Meningkatnya Produksi dan populasi Ternak yang Sehat dan Aman Konsumsi	Meningkatkan Populasi dan Produksi Ternak serta skala usaha peternakan	Pengembangan agribisnis peternakan rakyat berbasis kawasan
		Meningkatnya Kesejahteraan Peternak		
		Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Peningkatan produksi dan produktivitas nelayan dan pengembangan sarana dan prasarana pendukung perikanan tangkap	Pengelolaan sumberdaya perikanan secara berkelanjutan dan Perlindungan kepentingan nelayan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan melalui peningkatan Sarana Prasarana , Inovasi Teknologi Tepat Guna, peningkatan Kualitas SDM serta pengembangan kelembagaan bidang perikanan tangkap
		Penggunaan benih dan induk unggul yang didukung penerapan teknologi, produksi pakan dan lingkungan perairan yang kondusif	Peningkatan produksi perikanan budidaya, melalui peningkatan kemampuan teknis pembudidaya ikan, Intensifikasi budidaya ikan air payau dan laut, pengembangan pakan ikan mandiri berbahan baku lokal, peningkatan sarana dan prasarana serta Pengembangan produksi benih unggul tahan penyakit	

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan	Peningkatan mutu produk dan jaminan keamanan pangan usaha pengolahan dan pemasaran tradisional serta mendorong usaha pengolahan dan pemasaran modern untuk berorientasi ekspor	Optimalisasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan melalui pemenuhan kebutuhan bahan baku, peningkatan konsumsi ikan, peningkatan produk yang memenuhi jaminan mutu dan keamanan pangan, teknologi, sanitasi dan higien.
		Meningkatnya kesejateraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	Pengelolaan sumberdaya kelautan dan perikanan berpedoman pada RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi habitat vital di pesisir dan laut	Peningkatan pengetahuan, kesadaran dan peran serta masyarakat tentang RZWP3K dan peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi ekosistem vital di laut dan pesisir
			Peningkatan peran serta masyarakat dalam pengawasan dan Pengendalian sumberdaya kelautan dan perikanan, peningkatan kesadaran dalam mengurus izin dan pencegahan konflik.	Peningkatan pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS), Pengawasan dan penegakan hukum untuk pengendalian eksploitasi sumberdaya kelautan dan perikanan
		Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat (Disbun)	Memfasilitasi Usaha Perkebunan Rakyat yang berwawasan agribisnis serta mendorong peningkatan kinerja Perkebunan Besar.	Mensinergikan sumberdaya perkebunan untuk pengembangan komoditi unggulan perkebunan yang produktif melalui pemanfaatan teknologi budidaya dan pengolahan yang baik (GAP & GHP) didukung pengembangan kemitraan usaha serta penanganan Gangguan Usaha dan Dampak Perubahan Iklim.

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Peningkatan Mutu dan Nilai Tambah Hasil Perkebunan.	Mensinergikan Sumberdaya Perkebunan melalui pengembangan SDM & kelembagaan pekebun, diversifikasi, teknologi pasca panen (GMP) dan promosi produk.
		Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Meningkatkan intensifikasi guna peningkatan produksi Pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan teknologi pertanian
		Meningkatnya Produksi Tanaman Pangan		
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan		
			Mengembangkan Usaha Agribisnis Pertanian melalui Peningkatan kualitas SDM dan kelembagaan pertanian	Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian guna mendorong peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian
		Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Meningkatkan intensifikasi guna peningkatan produksi Pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana, sarana dan teknologi pertanian
		Meningkatnya Kesejahteraan Petani Hortikultura		
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura		
		Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan	Pemantapan kawasan hutan dan peningkatan pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung;	Optimalisasi pemanfaatan kawasan hutan produksi dan hutan lindung secara lestari
			Peningkatan kualitas penyelenggaraan penyuluhan kehutanan dan pemberdayaan masyarakat sekitar hutan	Pemberian akses pengelolaan sumber daya hutan yang berkeadilan dan berkeadilan melalui pengembangan perhutanan sosial (hutan desa, hutan kemasyarakatan, hutan tanaman rakyat, hutan

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				rakyat, hutan adat, kemitraan kehutanan)
			Pengembangan informasi publik dibidang kehutanan dan peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan	Optimalisasi sistem informasi publik dibidang kehutanan dan penyelenggaraan pembangunan kehutanan
		meningkatnya nilai investasi	Pengembangan iklim penanaman modal dan peningkatan kualitas penyelenggaraan promosi serta pengendalian pelaksanaan penanaman modal.	Deregulasi kebijakan daerah, penguatan perencanaan penanaman modal dan pemberdayaan usaha daerah
			Meningkatkan kemudahan akses data informasi penanaman modal serta Peningkatan Kualitas Pelayanan	2. Integrasi sistem informasi penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu serta penyederhanaan prosedur pelayanan perizinan
			Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Peningkatan Penanaman Modal, Pengembangan Industri dan Dunia Usaha	Mendorong tumbuh dan berkembangnya Investasi, Penanaman Modal, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD
		Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	Peningkatan inventarisasi dan pemetaan geologi dan air tanah	Meningkatkan produksi dan pengusahaan sumber daya mineral yang ramah lingkungan dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan sumber air baku
			Peningkatan pendapatan di sector air tanah dengan bertambahnya jumlah perizinan	Peningkatan pemanfaatan, pengelolaan dan konservasi air tanah
			Peningkatan produksi dan pengusahaan sumber daya mineral melalui pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan dan pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	Mendayagunakan dan meningkatkan penyelenggaraan pengelolaan usaha pertambangan mineral dan batubara

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Melakukan reklamasi terhadap lahan yang terganggu serta melakukan evaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan.	Mengoptimalkan pengawasan dan pembinaan perusahaan mineral dan batubara pada Perlindungan lingkungan dan konservasi terhadap izin usaha pertambangan.
		Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Mandiri , produktif dan Berdaya Saing	Peningkatan Kualitas koperasi	Pembinaan Koperasi
			Pemberdayaan dan Pengembangan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil	Pembinaan Pelaku Usaha Mikro dan Kecil
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Peningkatan Pertumbuhan Produk dan Usaha Pariwisata	Meningkatkan jumlah produk dan usaha pariwisata
			Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Meningkatkan kualitas atraksi dan promosi pariwisata
		Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Pemberdayaan Pelaku Ekonomi Kreatif	Pembinaan terhadap Para Pelaku Ekonomi Kreatif
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Meningkatkan Volume Ekspor dan Mengendalikan Impor
			Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri dan Perlindungan Konsumen	Meningkatkan Perdagangan Antar Pulau dan Stabilisasi Harga dan Ketersediaan Bapokting
		Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Penumbuhan dan Pengembangan Industri	Meningkatkan Pertumbuhan Industri sesuai kebijakan RPIP
			Penguatan TPID, TPAKD dan Tim Percepatan Pelaksanaan Berusaha se-Kalimantan Barat	Pengembangan Sistem Pengendalian Inflasi Daerah , Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha Berbasis Teknologi Informasi

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Meningkatkan Efisiensi Proses Produksi Industri (Meningkat Nilai Tambah) Dalam rangka Meningkatkan Daya Saing Produksi Industri Serta Meningkatkan Sarana Perekonomian Yang Mendukung Mobilitas dan Produktivitas	Menumbuhkan Industri Kecil Menengah dan Industri Pengolahan serta Manufaktur Berbasis Sumber Daya Lokal, Kompetensi Daya Saing Daerah, Kreatifitas Intelektual serta Penguatan Kebijakan Sarana Perekonomian Daerah Yang Andal dan Berdaya Saing
		Produktivitas tenaga kerja		
		Ketersediaan lahan transmigrasi		
		Meningkatnya Kesejahteraan Sosial		
		Meningkatnya pemberdayaan masyarakat desa		
		Meningkatnya Fasilitasi, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi		
5	Misi 5: Mewujudkan masyarakat yang tertib			
	Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat	Meningkatnya Indeks kebebasan sipil	Peningkatan wawasan kebangsaan	Meningkatkan edukasi pancasila dan cinta tanah air bagi pelajar dan masyarakat dan Meningkatkan koordinasi tim terpadu penanganan konflik sosial
				Meningkatkan peran pemuda dalam upaya peningkatan wawasan kebangsaan
				Meningkatkan pendidikan politik dan fasilitasi politik bagi masyarakat ORMAS, OKP, dan partai politik
		Penyelenggaraan Pelayanan Trantibumlinmas di Kalimantan Barat secara optimal	Penyelenggaraan Trantibumlinmas yang sinergi dan inklusif di Kalbar	Meningkatkan pelaksanaan koordinasi instansi terkait dalam upaya penciptaan kondisi trantibum yang kondusif di Kalimantan Barat

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
				Otimalisasi Peran PPNS Daerah dalam Penegakkan Perda/Perkada di Kalimantan Barat Meningkatkan Pengetahuan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat terhadap buidaya tertib dan Peran Aktif Masyarakat dalam penyelenggaraan Linmas Meningkatkan Kapasitas Satpol PP dalam Pelaksanaan Tugas dan Revitalisasi regulasi teknis dan operasional penyelenggaraan trantibum di Kalimantan Barat
		meningkanya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	peningkatan jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	
		Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Membentuk Destana/Pokmas Peduli Bencana Banjir dan Karhutla Pelaksanaan Geladi/simulasi penanggulangan bencana asap, pelaksanaan rapat koordinasi pencegahan dan kesiapsiagaan dan penyuluhan kebencanaan	Mendorong pembentukan Pokmas/Destana Peduli Banjir dan Karhutla dengan sumber dana APBD Provinsi (BPBD Provinsi), APBD Kab/Kota (BPBD Kab/Kota) bahkan APBN(BNPB) Mendorong pelaksanaan kegiatan dengan sumber dana APBD Provinsi (BPBD Provinsi), APBD Kab/Kota (BPBD Kab/Kota) bahkan APBN(BNPB)

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
		Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Melakukan evakuasi dan penyelamatan serta pemberian bantuan darurat kemanusiaan terhadap korban bencana	Pelaksanaan evakuasi dan penyelamatan serta pemberian bantuan darurat kemanusiaan terhadap korban bencana berkoordinasi dengan pihak terkait seperti BPBD Kab/Kota, TNI, POLRI, BMKG, Dinas Sosial, Dinas Kehutanan, Manggala Agni dan SAR
			Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin	Melakukan pemadaman kebakaran hutan dan lahan sedini mungkin di daerah gambut yang lebih rentan dan sulit dipadamkan
		Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	Mengajukan usulan pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi kepada BNPB (APBN)
6	Misi 6: Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan			
	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Kualitas Air dan Udara Meningkat	Meningkatkan pelayanan penyelesaian kasus dan sengketa lingkungan	meningkatkan kepastian hukum lingkungan
			mengharus utamakan prinsip-prinsip berkelanjutan di dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program serta dalam pengkajian dampak lingkungan rencana usaha dan atau kegiatan	meningkatkan proses perencanaan pembangunan yang berpihak pada keberlanjutan lingkungan hidup
			Meningkatkan pembinaan kepada pemerintah kabupaten/ kota dan masyarakat serta dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah B3	Mendorong peran serta dan kesadaran masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan sampah dan limbah B3

No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1	2	3	4	5
			Meningkatkan peran serta sekolah dan generasi muda serta stakeholder terkait untuk menjaga kualitas lingkungan hidup yang lebih baik	Mendorong peningkatan peran serta sekolah-sekolah dan generasi muda serta stakeholder terkait dalam pengelolaan lingkungan hidup.
			Meningkatkan kualitas air, udara dan menurunkan emisi gas rumah kaca	mendorong peningkatan kualitas lingkungan melalui kerjasama stakeholder terkait untuk kualitas lingkungan hidup yang lebih baik
		Menurunnya luas Kerusakan Kawasan Hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Peningkatan perlindungan hutan dan penegakan hukum di bidang kehutanan serta pengelolaan kawasan ekosistem esensial	Optimalisasi perlindungan hutan dan pengelolaan kawasan ekosistem esensial
			Peningkatan pengelolaan daerah aliran sungai dan produktivitas lahan kritis yang berada didalam dan diluar kawasan hutan;	Peningkatan daya dukung Daerah Aliran Sungai (DAS) serta rehabilitasi hutan dan lahan

6.2. Arah Kebijakan Pembangunan Daerah

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 – 2023 merupakan tahapan keempat dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat 2005 – 2025.

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan diperlukan arah kebijakan untuk efektifitas dan efisiensi pencapaian pembangunan selama 5 tahun. Oleh karena itu, rumusan tahapan-tahapan pembangunan sebagai pijakan rencana pembangunan tahunan menjadi pedoman dan arahan yang tegas dan jelas guna menentukan prioritas pembangunan daerah dalam Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat. Adapun tahapan-tahapan pembangunan tahunan dalam RPJMD 2018 – 2023 diarahkan pada:

1. Tahun Pertama (2019) : Tahap Konsolidasi (Penguatan Tata Kelola Pemerintahan yang Berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah)
 Tahap konsolidasi merupakan upaya memperkuat, memperteguh, mempersatukan dan menghubungkan berbagai elemen atau anggota masyarakat agar semakin erat dan solid. Unsur

penting dalam tahap ini adanya kesepakatan bersama atau komitmen bersama menyangkut sebuah “nilai” yang bisa mendekatkan dan mempertemukan berbagai elemen atau anggota masyarakat tersebut menjadi suatu kekuatan yang realtif padu. Sehingga semua actor yang signifikan, baik pada level massa maupun elite memiliki derap langkah yang sama menuju “nilai” yang telah ditetapkan.

Untuk menuju “nilai” yang telah disepakati bersama tersebut, diperlukan penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas. Hal ini didasari karena tatakelola pemerintahan yang buruk memiliki dampak pada inefisiensi dalam kelembagaan untuk mencapai kesejahteraan publik, serta efisiensi dalam menciptakan pasar sangat sulit terwujud. Maka, pada tahap konsolidasi ini, penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas menjadi sebuah keniscayaan. Apalagi bila dikaitkan dalam upaya mengejar ketertinggalan pembangunan guna meningkatkan daya saing daerah.

Arah pengembangan dalam penguatan tatakelola pemerintahan yang berkualitas diantaranya pembenahan birokrasi, penataan kelembagaan, tatakelola anggaran, peningkatan sumberdaya aparatur termasuk mencegah budaya koruptif. Melalui tata kelola pemerintah yang berkualitas diharapkan mampu memberi kontribusi positif bagi peningkatan daya saing daerah. Penguatan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dalam meningkatkan daya saing daerah dengan sendirinya menjadi titik tolak peletakan landasan bagi pelaksanaan pembangunan dalam tahap-tahap selanjutnya.

2. Tahun Kedua (2020) : Tahap Percepatan (Pemerataan infrastruktur dasar dan aksesibilitas antar wilayah dalam rangka percepatan mewujudkan desa mandiri)

Tahap ini menghendaki adanya suatu tindakan affirmative untuk mengejar kondisi ketertinggalan pembangunan karena jika dijalankan secara normal saja niscaya tidak akan dapat mengejar ketertinggalan.

Percepatan pembangunan infrastruktur, memiliki peran strategis sebagai prasyarat, menjaga keberlanjutan pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat agar mampu mencapai 6% – 6,15% sampai dengan 2023. infrastruktur sangat berperan penting dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi, di mana pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi dijumpai pada wilayah dengan tingkat ketersediaan infrastruktur yang mencukupi. Memacu akselerasi pembangunan infrastruktur bukanlah tanpa alasan, ahli ekonomi pembangunan, sejak lama telah mengampanyekan

pentingnya pembangunan infrastruktur secara besar-besaran, sebagai pilar pembangunan ekonomi yang dikenal kemudian dengan nama big-push theory.

Berkenaan dengan peningkatan status desa mandiri di Kalimantan Barat, yang saat ini baru terdapat 1 (satu) desa mandiri. Maka pembangunan dalam tahap kedua lebih diarahkan pada upaya peningkatan status desa menuju desa mandiri. Apalagi bila dikaitkan dengan target RPJMD, yang menetapkan sasaran pada pencapaian desa mandiri tahun 2023 kurang lebih 400 desa mandiri.

Oleh karena itu, salah satu pilihan strategi yang memiliki dampak bagi peningkatan status desa mandiri diantaranya melalui Pemerataan infrastruktur dasar serta Pemerataan aksesibilitas antar wilayah.

3. Tahun Ketiga (2021): Tahap Pengembangan (Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan pelayanan publik dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera)

Tahap ini lebih mengharapkan suatu kondisi kemampuan daerah agar mampu untuk menumbuhkan dirinya sendiri, baik karena pengaruh dari dalam maupun pengaruh dari luar. Adapun ukuran pengembangan tentu dilihat dari berbagai aspek atau indikator apakah mengalami peningkatan atau perkembangan. Dan, melalui tahap ketiga ini sasaran utama mengarah pada upaya mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat.

Seiring dengan penguatan tata kelola pemerintahan dalam tahap pertama, kemudian dilanjutkan dengan percepatan pembangunan infrastruktur pada tahap kedua, maka pada tahap ketiga lebih diarahkan pada pengembangan kedua aspek tersebut. Sehingga pada tahap ketiga yang merupakan tahap pengembangan lebih memfokuskan pada optimalisasi infrastruktur daerah yang telah dibangun (tahap kedua) yang didukung peningkatan pelayanan public (tahap pertama) dengan harapan mampu mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera. Masyarakat sejahtera pada tahap ini merupakan suatu tata kehidupan dan penghidupan masyarakat baik material maupun spiritual yang diliputi rasa keselamatan kesusilaan dan ketentraman lahir dan bathin yang memungkinkan bagi setiap masyarakat untuk mengadakan usaha penemuan kebutuhan –kebutuhan jasmani dan sosial yang sebaik-baiknya. Terwujudnya kesejahteraan masyarakat dapat menciptakan struktur masyarakat yang seimbang dan teratur dengan memberi kesempatan kepada semua untuk membangun suatu kehidupan yang layak.

Maka, pada tahun ketiga ini melalui tahap pengembangan yaitu upaya Optimalisasi Infrastruktur Daerah dan pelayanan public dalam mewujudkan masyarakat Kalimantan Barat yang sejahtera menjadi langkah taktis dalam mencapai visi dan misi pembangunan Kalimantan Barat.

4. Tahun Keempat (2022) : Tahap Penguatan ----(Meningkatkan Pembangunan ekonomi yang inklusif, mandiri dan berdaya saing untuk mengurangi kemiskinan dan perluasan lapangan kerja)

Tahap penguatan merupakan tahap peningkatan terhadap berbagai hasil capaian sasaran pembangunan agar memberikan kontribusi yang luas dan nyata. Pada tahap ini menjadi sebuah bentuk respon dari berbagai modifikasi pelaksanaan pembangunan, yang bertujuan untuk memberikan informasi atau umpan balik sebagai suatu dorongan atau koreksi guna menuju tahap berikutnya. Melalui tahap penguatan ini mampu memberikan peningkatan partisipasi dalam aktivitas pembangunan daerah.

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum cukup dalam menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran. Hal ini disebabkan karena pertumbuhan ekonomi biasanya hanya mementingkan pertumbuhan PDRB tetapi kurang memperhatikan masalah pengurangan kemiskinan, penyerapan tenaga kerja termasuk pemerataan pendapatan. Banyak wilayah yang terjebak dalam ekonomi eksklusif yaitu keinginan untuk mengejar taraf perekonomian yang tinggi dengan mendorong kepada pertumbuhan sector-sektor yang kurang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi lebih kepada sector yang padat modal.

Pada tahap ini pembangunan ekonomi diarahkan tidak hanya tumbuh dari sisi kuantitas, namun juga dari sisi kualitas. Pertumbuhan ekonomi yang ekspansif diharapkan menjadi pendorong inklusif yaitu pembangunan ekonomi yang mampu menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi kemiskinan serta kesenjangan. Maka, menjadi strategis bila pembangunan tahap penguatan difokuskan pada pembangunan inklusif, mandiri dan berdaya saing yang merupakan pembangunan yang berkualitas yaitu pembangunan yang memperhitungkan pertumbuhan, penyerapan tenaga kerja, mengurangi kemiskinan dan memperhatikan lingkungan.

5. Tahun Kelima (2023): Tahap Pemantapan (Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah)

Tahap pemantapan sebagai upaya mempertajam arah pembangunan khususnya arah kebijakan dan strategi pembangunan dalam ketercapaian visi dan misi pembangunan

Kalimantan Barat. Tahap pematangan ini tidak terlepas dari proses identifikasi dan inventarisasi berbagai masalah – masalah pembangunan yang dihadapi pada tahap-tahap sebelumnya sehingga mampu mendeteksi secara dini adanya persoalan disekitarnya serta dapat merespon dengan cepat dan efektif. Penangan yang cepat dan tepat sangat diperlukan untuk meminimalisir permasalahan yang lebih parah dengan segala dampak yang mengikutinya.

Maka, pada tahap terakhir ini upaya pencapaian visi terwujudnya kesejahteraan masyarakat Kalimantan Barat menjadi prioritas pembangunan. Hal ini ditandai dengan meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat serta daya saing daerah. Momentum pertumbuhan ekonomi perlu tetap dijaga agar peningkatan kesejahteraan rakyat dan terutama meningkatnya kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah dapat dipercepat. Tentunya upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat pun perlu dilakukan tanpa mengesampingkan persoalan lingkungan.

Untuk mencapai kondisi tahap pematangan ini, sudah menjadi keharusan bagi Kalimantan Barat menjalin sinergitas antar pemerintah daerah, antar pemangku kepentingan. Langkah ini dapat dilakukan dengan Meningkatkan kualitas hidup manusia, produktivitas masyarakat dan daya saing daerah. Dengan demikian rumusan terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang berkeadilan sebagaimana yang diharapkan dari visi pembangunan Kalimantan Barat 2018-2023.

6.3. Program Pembangunan Daerah

Dalam mencapai tujuan dan sasaran tersebut, berdasarkan arah kebijakan program yang telah ditetapkan, maka disusun program pembangunan daerah sebagaimana tabel berikut.

Tabel 6.2
PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH YANG DISERTAI PAGU INDIKATIF
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD			
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1	MEWUJUDKAN PERCEPATAN PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR																
1.1	Meningkatnya kualitas dan kuantitas infrastruktur daerah serta Perbatasan	Indeks Infrastruktur	56.61	59.93	63	65.94	68.86	71.84	71.84					71.84			
1.1.1	Ketersediaan infrastruktur serta Pasokan Tenaga Listrik Wilayah Kalbar Meningkat	Rasio Elektrifikasi (%)	83	85	87	89	91	93	93					93			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW)		670	915	1093	1193	1296	1296					1296			Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.1.1.1	Program Pengembangan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan	Persentase Badan Usaha penyedia dan pemfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan	23.7	32	142.82	41.2	682.71	50.5	785.11	59.8	902.88	69.1	1.038.31	69.1	3551.84		Dinas ESDM
		Persentase Desa Berlistrik	79	81	139.83	83	760.80	85	799.93	87	844.91	89	896.65	89	3442.12		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.1.1.2	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi	Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT	0.71	0.71	762.95	0.71	11,127.39	0.71	15,040.00	0.71	16,902.00	0.71	19,424.80	0.71	63257.10		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
1.1.2	Meningkatnya kapasitas dan kualitas jalan dan jembatan sesuai standar	Meningkatkan persentase kemptapan jalan provinsi	49.71%	56.68%	62.38%	67.44%	72.18%	76.99%	76.99%					76.99%			Dinas PUPR
1.1.2.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	762.92	8.70	354,334.04	9.57	783,899.54	10.35	766,790.03	11.08	665,950.04	11.82	724,700.00	11.82	3,295,673.65		Dinas PUPR
		Panjang Jalan yang dibangun	0.00	10.00	9,000.00	32.00	49,500.00	28.00	63,200.00	12.00	32,400.00	12.00	34,200.00	94.00	188,300.00		Dinas PUPR
		Jumlah Jembatan Kewenangan Provinsi yang dibangun	8944.00	110.00	16,900.00	300.00	68,300.00	300.00	72,800.00	300.00	75,850.00	300.00	78,900.00	1,310.00	312,750.00		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL I	270.14	135.21	10,513.70	212.90	10,489.40	149.47	9,347.70	148.73	8,522.30	147.10	10,770.10	49,643.20	49,643.20		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL II	257.61	176.59	11,000.00	89.24	4,655.70	87.52	4,874.30	87.52	6,497.00	77.38	5,281.80	32,308.80	32,308.80		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL III	273.26	126.63	11,000.00	38.60	2,316.00	17.79	1,156.30	38.60	2,686.90	38.60	2,702.00	19,861.20	19,861.20		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL IV	321.33	189.41	11,000.00	94.54	5,672.40	90.92	5,185.00	90.92	5,217.20	102.51	7,746.10	34,820.70	34,820.70		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ WIL V	439.11	371.57	11,000.00	177.52	8,322.40	87.67	3,995.80	87.67	4,644.50	87.67	4,682.30	32,645.00	32,645.00		Dinas PUPR
		Persentase Peningkatan Kondisi jalan mantap	0.03	0.07	354,334.04	0.06	783,899.50	0.05	766,790.00	0.05	665,950.00	0.05	724,700.00	0.05	3,295,673.54		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ WIL I	0.18	0.09	0.21	0.14	0.21	0.10	0.19	0.10	0.17	0.10	0.22	0.18	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ WIL II	0.17	0.12	0.34	0.06	0.14	0.06	0.15	0.06	0.20	0.05	0.16	0.17	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ WIL III	0.18	0.08	0.55	0.03	0.12	0.01	0.06	0.03	0.14	0.03	0.14	0.18	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ WIL IV	0.21	0.12	0.32	0.06	0.16	0.06	0.15	0.06	0.15	0.07	0.22	0.21	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ WIL V	0.29	0.24	0.34	0.12	0.25	0.06	0.12	0.06	0.14	0.06	0.14	0.29	1.00		Dinas PUPR
1.1.3	Meningkatnya Pengelolaan Sumber Daya Air	Persentase Irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46.76%	48.26%	49.83%	51.48%	53.22%	55.04%	55.04%					55.04%			Dinas PUPR
		Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	46.76%	49.47%	52.46%	55.60%	58.89%	62.35%	62.35%					62.35%			Dinas PUPR
		Persentase Berkurangnya pantai kritis.	56.85%	56.52%	56.14%	55.76%	52.35%	54.92%	54.92%					54.92%			Dinas PUPR
1.1.3.1	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik (Ha)	29288.5936	30227.10534	119.540	31212.54267	125.517	32247.25187	131.793	33333.69653	138.383	34474.46342	145.302	34474.46342	660.535.72		Dinas PUPR
		Luas peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir (Ha)	6868123.491	7266767.799	2293256.909	2732762.259	3194242.876	3678797.524	3678797.524					3678797.524			Dinas PUPR
		Luas wilayah terdampak penanganan pantai kritis (Ha)	7705.977	7765.977	7831.977	7904.577	7984.437	8072.283	8072.283					8072.283			Dinas PUPR
		kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	2 Ltr/detik	6 Ltr/detik	10 Ltr/detik	14 Ltr/detik	18 Ltr/detik	22 Ltr/detik	22 Ltr/detik					22 Ltr/detik			Dinas PUPR
1.1.3.2	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penduduk berakses air minum	55.2	58.3	8.108	61.4	8.513	64.4	8.939	67.4	9.386	70.09	9.855	70.09	44.800.78		Dinas PUPR
1.1.4	Meningkatnya kualitas infrastruktur permukiman pedesaan sesuai dengan indeks desa membangun dan permukiman perkotaan	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	48.38%	51.02%	54.63%	58.13%	61.61%	65.03%	65.03%					65.03%			Dinas PUPR
		Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten					12 Kabupaten			Dinas PUPR
		Jumlah Permukiman Perkotaan yang tertangani Infrastrukturnya	2 Kota	2 Kota	4 Kota	6 Kota	10 Kota	14 Kota	14 Kota					14 Kota			Dinas PUPR
1.1.4.1	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan	Penduduk rumah tinggal berakses sanitasi	48.38%	51.02%	14,695.52	54.63%	18,430.30	58.13%	23,201.81	61.61%	28,011.90	65.03%	33,862.50	65.03%	118,202.03		Dinas PUPR
1.1.4.2	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan	251.977 Meter	255.123 Meter	196.50	301.879 Meter	217.65	377.176 Meter	271.94	471.665 Meter	340.07	557.779 Meter	402.16	1,428.33			Dinas PUPR
1.1.5	Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur meningkat	Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun (%)	14.39%	22.10%	21.00%	19.95%	18.95%	18.00%	18.00%					18.00%			Dinas PUPR
		Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67.92%	67.92%	69.29%	70.65%	72.01%	73.37%	73.37%					73.37%			Dinas PUPR

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Persentase data yang tersedia di SIPJAKI	21.43%	35.71%	50.00%	64.29%	78.57%	93%	93%							Dinas PUPR
		Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	66%	66%	74%	78%	88%	100%	100%							Dinas PUPR
1.1.5.1	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	M2 Luasan Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun	0.14	36392.00	254018.66	34572.00	241317.00	32844.00	229251.00	31202.00	217789.00	29642.00	206889.00	164652.00	1,149,264.66	Dinas PUPR
1.1.5.2	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan Persentase kualitas Sumber Daya manusia dan Badan Usaha Jasa Konstruksi	67.92%	67.92%		69.29%		70.65%		72.01%		73.37%		73.37%		Dinas PUPR
1.1.5.3	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	Jumlah Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang Lulus Pelatihan	30.00			60.00	192.00	90.00	201.60	120.00	211.68	150.00	222.26	150.00	827.54	Dinas PUPR
1.1.6	Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi	Peningkatan persentase kontribusi PAD Sektor jasa pengujian	152 %	100 %	658.22	100 %	691.13	100 %	725.69	100 %	761.97	100 %	800.07	100 %	3,637.10	Dinas PUPR
1.1.6.1	Program Pelayanan Produksi Konstruksi	Tersedianya Sarana dan Pelayanan Produksi Konstruksi	0	52	70	79.11	91.11	100	100					100		Dinas PUPR
1.1.6.1	Program Pelayanan Produksi Konstruksi	Persentase Produksi Konstruksi	0.00	52 %	231.29	70 %	242.85	79.11 %	254.99	91.11 %	267.74	100 %	281.13	100 %	1,278.00	Dinas PUPR
1.1.7	Meningkatnya Pelayanan, Konektivitas dan keselamatan Jaringan Transportasi di Wilayah Provinsi Kalimantan Barat	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat	56.85%	59.20%		61.61%		64.20%		66.80%		70%		73.20%		Dinas Perhubungan
		Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP	27%	32%		37%		42%		47%		52%		57%		Dinas Perhubungan
		Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun	6.69%	6.50%		6.31%		6.12%		5.93%		5.74%				Dinas Perhubungan
		Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum	1,170,312.50	936,250		780,208.33		668,750		585,156.25		520,138.90				Dinas Perhubungan
		Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun	27%	32%		37%		42%		47%		52%				Dinas Perhubungan
		Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	635,788	635,788		569,756		637,967		467,807		432,011				Dinas Perhubungan
		Persentase Pengembangan Sistem Transportasi	10%	33.47%		50.06%		64.65%		74.28%		100%				Dinas Perhubungan
		Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak	80%	83.70%		86.70%		90.30%		94%		98%				Dinas Perhubungan
1.1.7.1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Load Faktor (Lf)	56.85%	59.20%	267.5	61.61%	290	64.20%	315	66.80%	340	70	365	73.2	1,577.50	Dinas Perhubungan
1.1.7.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dan SDP	Ketersediaan Armada (N)	78.46%	80.42%	53	82.43%	2060	84.49%	2065	86.61%	2070	88.77%	2075	90.98%	8,323.00	Dinas Perhubungan
1.1.7.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dan SDP	Load Faktor (Lf)	70%	41	4458	46	6519	51	6530	56	6542	61	6556	66	30,605.00	Dinas Perhubungan
1.1.7.3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Ketersediaan Armada (N)	30%	60	39	66	907	72	2758	78	57	84	62	90	3,823.00	Dinas Perhubungan
1.1.7.3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan Jalan	99.46%	48%	2100	50%	10200	55%	9200	60%	10700	65%	12200	70%	44,400.00	Dinas Perhubungan
1.1.7.4	Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Ketersediaan Terminal Tipe B	28.57%	30%	550	31.50%	4200	33.08%	5800	34.73%	5800	36.47%	2000	38.29%	18,350.00	Dinas Perhubungan
1.1.7.4	Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan SDP	64%	9	302041.5	10	426199.5	11	177450	12	572100	13	319400	14	1,797,191.00	Dinas Perhubungan
1.1.7.4	Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Ketersediaan Prasarana SDP	64%	9	68286.5	10	23577.55	11	6159	12	880.6	13	307.5	14	99,211.15	Dinas Perhubungan
1.1.7.5	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi	97.63%	0.56	3691.5	0.61	3235	0.56	3341.5	0.35	1441.5	0.3	1133.2	0.3	12,842.70	Dinas Perhubungan
1.1.7.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan	86.89%	88.88	5413.69	94.44	6258.76	97.22	7275.2	91.66	5789.3	91.66	7554.45	88.88	32,291.41	Dinas Perhubungan
1.1.8	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan	Jumlah Proponan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.1.8	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Infrastruktur Daerah serta Perbatasan	Jumlah Penyediaan Penataan Kawasan Permukiman	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.1.8.1	Program Peningkatan dan Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman	Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU	0.00	1.00	332.00	1.00	365.20	1.00	401.72	1.00	441.89	1.00	486.08	5.00	2,026.89	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.1.8.2	Program Penyediaan dan Fasilitas Rumah Layak Huni dan Relokasi	Jumlah Proposal Pengajuan Unit Rumah yang dibangun dalam Penanganan Pasca Bencana Tingkat Provinsi	0.00	1.00	180.00	1.00	198.00	1.00	217.80	1.00	239.58	1.00	263.54	1.00	1,098.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.1.8.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang tertangani	0	0	0	1	411.779	1	452.96	1	498.253	1	547.88	1	1,910.87	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
1.1.8.4	Program Perencanaan dan Pembinaan Bidang Perumahan	Persentase Perencanaan Pembinaan Bidang Perumahan dan Pemukiman	0.00	14.29	229.00	21.41	251.90	21.41	277.09	21.41	304.80	21.41	335.28	100.00	1,398.07	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup
2	MEWUJUDKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN BERKUALITAS DENGAN PRINSIP-PRINSIP GOOD GOVERNANCE															
2.1	Meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan daerah	Indeks Reformasi Birokrasi		B		B		BB		BB		A		A		
2.1.1	Terwujudnya Pengendalian administrasi pembangunan yang efisien dan efektif	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah		B		B		BB		BB		A		A		
2.1.1.1	Program Bina Administrasi Pembangunan	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik		Baik		Baik		Baik Sekali		Baik Sekali		Baik Sekali	Biro Adm PBJ	Biro Adm PBJ
2.1.1.1	Program Bina Administrasi Pembangunan	Persentase OPD dalam keepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan	n/a	100% OPD Tepat Waktu	1,500.00	100% OPD Tepat Waktu	1,575.00	100% OPD Tepat Waktu	1,653.75	100% OPD Tepat Waktu	1,736.44	100% OPD Tepat Waktu	1,823.26	100% OPD Tepat Waktu	8,288.45	Biro Adm PBJ
2.1.1.1	Program Bina Administrasi Pembangunan	Persentase OPD dalam keepatan sasaran antara realisasi dan target pelaksanaan pembangunan		100% OPD Tepat Sasaran	1,100.00	100% OPD Tepat Sasaran	1,155.00	100% OPD Tepat Sasaran	1,212.75	100% OPD Tepat Sasaran	1,273.39	100% OPD Tepat Sasaran	1,337.06	100% OPD Tepat Sasaran	6,078.20	Biro Adm PBJ

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target
2.1.2	Terwujudnya tatakelola Pengadaan Barang/Jasa yang berkualitas	Proses Pengadaan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Adm PBJ	
2.1.2.1	Program Pengembangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	n/a	100%	2.501.00	100%	1.900.00	100%	1.995.00	100%	2.094.75	100%	2.199.49	100%	10.690.24	Biro Adm PBJ
		Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	n/a	100%	523.59	100%	2.060.00	100%	2.163.00	100%	2.271.15	100%	2.384.71	100%	9.402.45	Biro Adm PBJ
		Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	n/a	100%	527.93	100%	3.880.00	100%	4.074.00	100%	4.277.70	100%	4.491.59	100%	17.251.22	Biro Adm PBJ
2.1.3	Meningkatnya Kinerja pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Biro Pengelolaan Aset	
2.1.3.1	Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan	59.69%	67.00%	1.764.29	74.00%	1.874.20	81.00%	1.965.46	88.00%	2.061.75	95.00%	2.164.09	95.00%	9.829.70	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan	97.00%	98%	1.058.50	99%	1.111.42	100%	1.166.99	100%	1.193.74	100%	1.286.61	100%	5.817.26	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan	70.98%	76.15%	1.380.66	80.15%	1.384.97	90.42%	1.473.40	95.91%	1.570.67	100%	1.677.68	100%	7.487.38	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan	100%	100%	424.56	100%	350.00	100%	367.50	100%	385.88	100%	405.17	100%	1.933.11	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan	61.95%	72%	537.10	77%	569.33	83%	603.49	89%	639.70	96%	678.08	96%	3.027.70	Biro Pengelolaan Aset
2.1.3.2	Program Pelayanan Kelistrikan, Sound System dan Telekomunikasi	Persentase penanganan gangguan kelistrikan, sound system dan telekomunikasi lingkup kompleks Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan	95.34%	100%	1.626.83	100%	1.545.12	100%	1.699.63	100%	1.869.60	100%	2.056.56	100%	8.797.74	Biro Pengelolaan Aset
2.1.4	Meningkatnya kualitas tata kelola keuangan daerah	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP		WTP		WTP		WTP		WTP		WTP	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
		Persentase Pencapaian target pendapatan daerah	100.00	100		100		100		100		100		100	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah	
2.1.4.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,379.77	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,522.07	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,742.95	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,972.67	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6,211.58	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	28,829.04	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6.58									1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6.58	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD		1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5.96		6.56		6.82		7.09		26.43	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.4.2	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	100%	100%	4,313	100%	5,051	100%	4,485	100%	4,664	100%	4,851	100%	23,363.77	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.4.3	Program Pembinaan dan Fasilitas Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan kota	Persentase Raperda / Raperdaka Kab / Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran	95%	95%	3,166.14	95%	3,266.14	95%	3,396.78	95%	3,532.65	95%	3,673.96	95%	17,035.67	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.4.4	Program Pembinaan Fasilitas Bansos dan Hibah	Persentase tersalurinya dana Hibah dan Bansos	95%	95%	602.01	95%	602.01	95%	626.09	95%	651.13	95%	677.18	95%	3,158.42	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.4.5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	80%	80%	951.72	80%	984.88	80%	1,024.28	80%	1,065.25	80%	1,107.86	80%	5,133.99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.4.6	Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	Persentase tercapainya pajak daerah	90	90%	801.04	90%	1,732.01	90%	1,801.29	90%	1,873.35	90%	1,948.28	90%	8,155.99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	51.93	100%	25.00	100%	62.15	100%	64.64	100%	67.22	100%	270.90	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	549.90		695.90	100%	723.74	100%	752.69	100%	782.80	100%	3,505.03	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	500.00	100%	767.20	100%	805.56	100%	837.78	100%	871.30	100%	3,781.80	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	362.25	100%	46.80	100%	58.08	100%	60.40	100%	62.82	100%	590.30	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	350.00	100%	350.00	100%	385.00	100%	400.40	100%	416.42	100%	1,901.82	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	502.27	100%	531.61	100%	662.49	100%	688.99	100%	716.55	100%	3,101.91	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	345.85	100%	395.00	100%	395.00	100%	410.80	100%	427.23	100%	1,973.80	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	307.10	100%	320.00	100%	337.81	100%	351.32	100%	365.38	100%	1,681.61	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	438.65	100%	480.00	100%	499.20	100%	519.17	100%	539.94	100%	2,476.99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	462.01	100%	500.00	100%	520.00	100%	540.80	100%	562.43	100%	2,585.20	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	404.45	100%	332.15	100%	345.44	100%	359.25	100%	373.62	100%	1,814.91	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	734.22	100%	630.11	100%	655.31	100%	681.52	100%	708.79	100%	3,409.90	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100%	501.01	100%	530.29	100%	551.50	100%	573.60	100%	596.50	100%	2,752.90	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.4.7	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah	100	100%	2,841.16	100%	4,395.93	100%	4,571.77	100%	4,754.64	100%	4,944.83	100%	21,508.30	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
				100	100%	1,290.36	100%	1,396.25	100%	1,743.06	100%	1,812.78	100%	1,885.29	100%	8,127.71	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				100	100%		100%	416.85	100%	458.54	100%	476.88	100%	495.95	100%	1,848.22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				100	100%	51.35	100%	55.00	100%	57.20	100%	59.49	100%	61.87	100%	284.91	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				100	100%	325.48	100%	420.98	100%	437.82	100%	455.33	100%	473.55	100%	2,113.16	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
				100	100%	239.33	100%	218.53	100%	227.27	100%	236.36	100%	245.82	100%	1,167.31	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.5	Meningkatnya Kualitas tata kelola pemerintahan desa	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33.42%	66.86%		75.08%		70.12%		81.83%		88.77%		88.77%			Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
2.1.5.1	Program Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34	100	1,118.25	175	2,555.39	250	2,565.39	325	2,475.39	426	2,475.39	426	11,189.81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
2.1.6	Meningkatnya penataan administrasi kependudukan di Kalimantan Barat	Persentase kepemilikan dokumen kependudukan, akurasi data kependudukan-an, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen kependudukan-an di Kalimantan Barat	38.99	48.66	3440.88	61.32	5901.55	68.97	6491.71	75.2	7140.88	79.29	7854.96	82.14	30,829.97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1.6.1	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	69.80%	84%	150.66	100%	845.04	100%	929.54	100%	1022.50	100%	1124.75	100%	4,072.40	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	2%	18%		50%	462.35	60%	508.59	75%	559.44	80%	615.39	85%	2,145.71	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun	82.02%	85.62%	130.99	89.21%	0	92.81%	269.49	96.40%	296.44	100%	326.09	100%	1,023.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	20%	25%	70.92	30%	652.8	35%	518.06	40%	569.89	45%	626.88	50%	2,438.52	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Penetapan Anak	10%	15%	225.63	20%	220.96	25%	243.06	30%	267.36	35%	294.10	40%	1,251.11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	80%	83%	545.28	90%	1017.17	100%	1118.89	100%	1230.78	100%	1353.85	100%	5,265.91	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan-an Provinsi Kalimantan Barat	9.09%	30%	576.92	50%	782.8	70%	861.08	85%	947.19	95%	1041.91	100%	4,209.89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
		Persentase penyelenggaraan penataan administrasi kependudukan melalui DAK Non Fisik		100%	1740.48	100%	1920.43	100%	2042.98	100%	2247.28	100%	2472.01	100%	10,423.11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
2.1.7	Peningkatan profesionalisme SDM Pemerintahan Daerah	Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier	54.0%	59.0%		76.0%		86.0%		92.0%		100.0%		100			Badan Kepegawaian Daerah
		Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	7.36%	24.95%		14.73%		14.73%		15.57%		15.80%		85.78%			Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
2.1.7.1	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	54%	75%	3517.34	85%	3517.34	95%	3517.34	100%	3517.34	100%	3517.34	100%	17,586.71	Badan Kepegawaian Daerah	
2.1.7.2	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara	95%	100%	782.24	100%	782.24	100%	782.24	100%	782.24	100%	782.24	100%	3,911.20	Badan Kepegawaian Daerah	
2.1.7.3	Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara	Persentase Layanan Administrasi dan Informasi yang diberikan	100%	100%	1516.04	100%	1516.04	100%	1516.04	100%	1516.04	100%	1516.04	100%	7,580.20	Badan Kepegawaian Daerah	
2.1.7.4	Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	796	2,699	18,554.06	1,594	13,187.04	1,594	13,088.54	1,684	15,231.98	1,709	15,421.45	9,280	75,483.07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.7.5	Program Sertifikasi Kompetensi ASN	Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi	88	100	261.71	120	320.00	120	350.00	120	380.00	120	400.00	580	1,711.71	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.7.6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	4 Sertifikasi	6 Dokumen	2,378.48	6 Dokumen	2,701.54	6 Dokumen	3,069.44	6 Dokumen	3,356.09	6 Dokumen	2,759.16	7 Dokumen	14,264.71	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	
2.1.8	Peningkatan Pengelolaan Arsip Daerah	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	6.67%	13.33%		20.00%		26.67%		40.00%		53.33%		53.33%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
		Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	20%	29%		43%		57%		71%		86%		86%			Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah
2.1.8.1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	28.176 Item	28.376 Item	269.87	28.576 Item	1,265.00	28.776 Item	1,265.00	28.976 Item	1,265.00	29.176 Item	1,265.00	29.176 Item	5,329.81	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.1.8.2	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Kearsipan	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	6 Orang	6 Orang	200.93	6 Orang	808.23	6 Orang	470.68	6 Orang	590.38	6 Orang	625.42	30 Orang	2,695.61	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	3 LKD	1 LKD	445.01	2 LKD	467.26	2 LKD	490.62	2 LKD	515.16	2 LKD	540.91	12 LKD	2,458.96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
		Jumlah Pengguna Layanan Jasa Kearsipan	600 orang	650 orang	79.66	700 orang	300.00	700 orang	300.00	700 orang	305.00	700 orang	310.00	3,450 orang	1,294.60	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	
2.1.9	Meningkatnya Kualitas Kelitbangan untuk mendukung kebijakan daerah	Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah	-	14 Rekomendasi		19 Rekomendasi		19 Rekomendasi		22 Rekomendasi		20 Rekomendasi		94 Rekomendasi			Badan Penelitian dan Pengembangan
2.1.9.1	Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	8 Rekomendasi	1,135	6 Rekomendasi	1,074	7 Rekomendasi	1,323	11 Rekomendasi	1,734	7 Rekomendasi	1,689	39 Rekomendasi	6,955.00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
2.1.9.2	Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5 Rekomendasi	866	9 Rekomendasi	1,088	7 Rekomendasi	1,126	7 Rekomendasi	1,284	9 Rekomendasi	1,583	37 Rekomendasi	5,947.00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
2.1.9.3	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Kelitbangan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	-	-	0	1 Rekomendasi	250	2 Rekomendasi	335	1 Rekomendasi	325	1 Rekomendasi	370	5 Rekomendasi	1,280.00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
		Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	-	1 Rekomendasi	817	3 Rekomendasi	970	3 Rekomendasi	1,118	3 Rekomendasi	1,100	3 Rekomendasi	1,266	13 Rekomendasi	5,271.00	Badan Penelitian dan Pengembangan	
2.1.9.4	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Jumlah Kerjasama Kelitbangan	-	2 Perjanjian	419	2 Perjanjian	1,301	2 Perjanjian	1,476	2 Perjanjian	1,675	2 Perjanjian	1,903	10 Perjanjian	6,774.00	Badan Penelitian dan Pengembangan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		Jumlah Publikasi Penelitian, Perencanaan dan Inovasi Daerah		2 Terbitan	103	9 Buku, 2 Terbitan	318	9 Buku, 2 Terbitan	362	9 Buku, 2 Terbitan	413	9 Buku, 2 Terbitan	471	36 Buku, 10 Terbitan	1.667,00	Badan Penelitian dan Pengembangan
2.1.10	Meningkatnya Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD		81		82		83		84		85		85		Sekretariat DPRD
2.1.10.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	12 Raperda	12 Raperda	8.397,67	12 Raperda	8.817,55	12 Raperda	9.258,43	13 Raperda	9.721,35	13 Raperda	10.207,42	13 Raperda	46.402,42	Sekretariat DPRD
2.1.10.2	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD	Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD	82%	85%	56.129,24	85%	58.935,70	85%	61.882,48	85%	64.976,61	85%	75.275,35	85%	317.199,35	Sekretariat DPRD
2.1.11	Meningkatnya komunikasi kebijakan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Barat (lingkup kehumasan)	Prosentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang	77,5	85		89,5		95		98		100		100		Biro Humas dan Protokol
2.1.11.1	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik	Prosentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media online, media luar ruang	80%	90%	2706,62	93%	3184,77	95%	3557,87	98%	3993,25	100%	4520,98	100%	17.963,49	Biro Humas dan Protokol
		Prosentase Peningkatan Jumlah Media Publikasi	75%	80%		86%		95%		98%		100%		100%		Biro Humas dan Protokol
2.1.12	Meningkatnya Pelayanan Keprotokolan yang handal sesuai standar	prosentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standar Pelayanan	82,5%	90,0%		93,5%		95,5%		98,0%		100,0%		100,0%		Biro Humas dan Protokol
2.1.12.1	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolan	prosentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP	80%	90%	1366,34	93%	1484,78	95%	1634,36	98%	1953,31	100%	2148,65	100%	8.587,44	Biro Humas dan Protokol
2.1.12.2	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	85%	90%	492,13	94%	533,94	96%	588,33	98%	647,17	100%	710,88	100%	2.972,45	Biro Humas dan Protokol
2.1.13	Meningkatnya kualitas peraturan perundang-undangan	Penataan perundang-undangan	100,0%	100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		100,0%		Biro Hukum
2.1.13.1	Program penataan kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum	100%	100%	450	100%	460	100%	490	100%	490	100%	520	100%	2.410,00	Biro Hukum
2.1.13.2	Program peningkatan kualitas produk hukum	persentase produk hukum daerah yang harmonis	100%	100%	1183,35	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%	1200	100%	5.983,35	Biro Hukum
2.1.13.3	Program peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota Se-Kalbar	Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	100%	100%	1120,5	100%	1135	100%	1135	100%	1135	100%	1135	100%	5.660,5	Biro Hukum
2.1.14	Terlaksananya sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota di lingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	90,47%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Penghubung
2.1.14.1	Program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pmda	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pmda	90,47%	100%	250,99	100%	289,29	100%	300,11	100%	320,16	100%	348,00	100%	1.508,55	Badan Penghubung
2.1.15	Terlaksananya kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	98,63%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Penghubung
2.1.15.1	Program Peningkatan Layanan Penghubung	Persentase penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standar	98,63%	100%	1054,82	100%	1160,30	100%	1276,33	100%	1403,96	100%	1544,35	100%	6.439,76	Badan Penghubung
2.1.16	Terselenggaranya pembinaan dan evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Pemerintahan
2.1.16.1	Program Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD	100%	100%	794,76	100%	795,00	100%	796,00	100%	797,00	100%	798,00	100%	3.980,76	Biro Pemerintahan
		Persentase penataan dan pelaporan kinerja kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	100%	100%	1.892,10	100%	1.893,00	100%	1.894,00	100%	1.895,00	100%	1.896,00	100%	9.470,10	Biro Pemerintahan
2.1.17	Terselenggaranya Penataan Daerah dan Pembinaan Wilayah	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	AMPRES	20%		40%		60%		80%		100% (1 Provinsi)		100% (1 Provinsi)		Biro Pemerintahan
		Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	20%		40%		60%		80%		100% (5 Kabupaten)		100% (5 Kabupaten)		Biro Pemerintahan
		Segmen Batas Daerah	27	3		3		2		0		0		35		Biro Pemerintahan
2.1.17.1	Program Penataan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/aturan		20%	200,00	40%	250,00	60%	300,00	80%	350,00	100%	400,00	100%	1.500,00	Biro Pemerintahan
		Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Kabupaten baru sesuai kewenangan/aturan		20%	250,00	40%	250,00	60%	250,00	80%	250,00	100%	250,00	100%	1.250,00	Biro Pemerintahan
		Jumlah Permendagri Batas antar Daerah	27,00	3,00	330,00	3,00	330,00	2,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	35 (14 Permendagri, 13 Draft Permendagri dan Fasilitasi Pusat, 8 Fasilitasi Provinsi)	1.260,00	Biro Pemerintahan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Persentase pembinaan penyelenggaraan urusan konkuren															Biro Pemerintahan
2.1.18	Terkoordinirnya dan tertatanya kegiatan kerjasama dalam negeri dan luar negeri dalam menunjang pembangunan di Provinsi Kalimantan Barat	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Biro Pemerintahan
2.1.18.1	Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	513.54	100%	564.89	100%	621.38	100%	683.52	100%	751.87	100%	3.135.20		Biro Pemerintahan
2.1.19	Meningkatnya pengelolaan wilayah perbatasan	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Biro Pemerintahan
2.1.19.1	Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan wilayah perbatasan	100%	2 Dok Rekomendasi	182.23	3 Dok Rekomendasi	200.45	3 Dok Rekomendasi	220.50	3 Dok Rekomendasi	242.55	3 Dok Rekomendasi	266.80	14 Dok Rekomendasi	1.112.55		Biro Pemerintahan
2.1.20	Meningkatnya Pelayanan Umum dan Pimpinan	Persentase pelayanan pelayaman umum dan pimpinan	87.81%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Biro Umum
2.1.20.1	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	83.33%	100%	5.601.02	100%	6.242.91	100%	6.674.01	100%	7.624.11	100%	8.602.70	100%	34.744.75		Biro Umum
2.1.20.2	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintahan	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintahan	92.30%	100%	2.870.07	100%	2.855.68	100%	3.032.91	100%	3.359.37	100%	3.558.70	100%	15.676.73		Biro Umum
2.1.21	Meningkatnya pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Biro Umum
2.1.21.1	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	100%	100%	296.22	100%	311.10	100%	326.75	100%	343.09	100%	360.28	100%	1.637.44		Biro Umum
2.1.21.2	Program Penerbitan Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Persentase Penerbitan Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100%	100%	30.777	100%	33.854.70	100%	37.240.20	100%	40.964.30	100%	45.060.70	100%	187.896.90		Biro Umum
2.1.22	Meningkatnya kualitas pembinaan dan pengawasan internal	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	88%	89%	90%	91%	92%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		Inspektorat
		Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		Inspektorat
		Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	85%	87%	89%	91%	93%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%	95%		Inspektorat
		Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP	85%	86%	87%	88%	89%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%	90%		Inspektorat
		Level maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Inspektorat
		Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6		Inspektorat
		Level Kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3		Inspektorat
		Jumlah pedoman/standar pengawasan internal	10	11	12	13	14	15	15	15	15	15	15	15	15		Inspektorat
		Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)	-	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik		Inspektorat
2.1.22.1	Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan	Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti	53%	62%	71%	80%	89%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%		Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	Rp 12.834.3	100%	Rp 14.117.7	100%	Rp 15.529.5	100%	Rp 17.082.4	100%	Rp 18.790.6	100%	78.354.44		Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
		Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
		Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (EKPPD) Kab/Kota	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	5%	25%		Inspektorat	
		Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
		Persentase peningkatan maturitas SPIP	0	3.80%	7.60%	11.40%	15.20%	19.00%	19.00%	19.00%	19.00%	19.00%	19.00%	19.00%	19.00%		Inspektorat
		Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP	0	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		Inspektorat
2.1.22.2	Program Pengawasan Prioritas Nasional	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	Rp 1.600.2	100%	Rp 1.760.2	100%	Rp 1.936.3	100%	Rp 2.129.9	100%	Rp 2.342.9	100%	9.769.46		Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat
		Persentase tingkat partisipasi aktif inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		Inspektorat

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		target				Rp		
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp	
2.1.22.3	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	0	9,85%	Rp 756.6	19,70%	Rp 832.3	29,55%	Rp 915.5	39,40%	Rp 1.007.0	49,25%	Rp 1.107.7	49,25%	Rp 1.107.7	49,25%	Rp 1.107.7	4,619.12	Inspektorat	
2.1.22.4	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	0	3,52%	Rp 1.132.6	7,05%	Rp 1.245.8	10,58%	Rp 1.370.4	14,11%	Rp 1.507.5	17,64%	Rp 1.658.2	17,64%	Rp 1.658.2	17,64%	Rp 1.658.2	6,914.51	Inspektorat	
		Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	0	5%		10%		15%		20%		25%		25%		25%		25%	Inspektorat	
2.1.22.5	Program Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	Rp 538.5	5 Kegiatan	Rp 592.4	5 Kegiatan	Rp 651.6	5 Kegiatan	Rp 716.8	5 Kegiatan	Rp 788.5	5 Kegiatan	Rp 788.5	5 Kegiatan	Rp 788.5	3,287.80	Inspektorat	
2.1.23	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.04	21.07		22		23		24		25		25		25		25	Bappeda	
2.1.23.1	Program Penyusunan Rencana Pembangunan	Persentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang wajib disusun	100.00	100.00	2,186	100.00	2,290.00	100.00	1,670.00	100.00	1,730.00	100.00	2,725.00	100.00	2,725.00	100.00	2,725.00	500.00	10,601.00	Bappeda
2.1.23.2	Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan	Persentase Data yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan Pembangunan	n/a	40.00	864	45.00	1,252.63	50.00	1,229.00	55.00	1,286.20	60.00	1,546.01	60.00	1,546.01	60.00	1,546.01	60.00	6,177.58	Bappeda
2.1.23.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	94.96 %	95%	1,406.47	96%	2,595.44	97%	2,951.27	98%	3,111.77	99%	3,840.32	99%	3,840.32	99%	3,840.32	485%	13,905.27	Bappeda
2.1.23.4	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi	90%	100%	1,793.02	100%	2,557.01	100%	2,591.91	100%	2,819.11	100%	3,056.51	100%	3,056.51	100%	3,056.51	500%	12,817.56	Bappeda
2.1.23.5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	100%	100%	1,480.17	100%	2,333.00	100%	2,567.95	100%	3,953.14	100%	3,396.11	100%	3,396.11	100%	3,396.11	500%	13,730.38	Bappeda
2.1.23.6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja fungsional rencana Bappeda Prov. Kalbar	n/a	82.00	248.93	84.00	727.62	86.00	853.00	88.00	887.00	90.00	923.00	90.00	923.00	90.00	923.00	90.00	3,639.55	Bappeda
2.1.23.7	Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se Kalimantan	Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan	20%	25%	346.45	30%	457.81	35%	285.00	40%	287.00	50%	300.00	50%	300.00	50%	300.00	50%	1,676.25	Bappeda
2.1.24	Meningkatnya akuntabilitas capaian kinerja pembangunan daerah	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12.61	13		14		15		16		17		17		17		17,00	Bappeda	
2.1.24.1	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah	75%	80%	750.91	85%	1,147.47	90%	977.28	95%	1,002.13	100%	1,126.97	100%	1,126.97	100%	1,126.97	100%	5,004.75	Bappeda
2.1.24.2	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	47,37 %	57%	392.96	67%	318.74	77%	310.00	87%	321.00	97%	333.10	97%	333.10	97%	333.10	97%	1,675.80	Bappeda
2.1.24.3	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Ekonomi			-		299.99	90%	329.99	90%	362.99	90%	399.29	90%	399.29	90%	399.29	90%	1,392.25	Bappeda
2.1.24.4	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah			-	100%	300.00	100%	300.00	100%	300.00	100%	300.00	100%	300.00	100%	300.00	400%	1,200.00	Bappeda
2.1.25	Meningkatnya kelembagaan perangkat daerah yang tepat fungsi dan tepat ukuran	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran	41%	46%		51%		57%		62%		68%		68%		68%		68%	Biro Organisasi	
2.1.25.1	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata	15 PD	17 PD	284.32	19 PD	219.00	21 PD	245.00	25 PD	270.00	25 PD	270.00	25 PD	270.00	25 PD	270.00	270.00	1,288.32	Biro Organisasi
2.1.26	Meningkatnya penyelenggaraan ketatalaksanaan pemerintahan daerah untuk meningkatkan penyelenggaraan pelayanan publik	IKM Provinsi Kalimantan Barat	80,33 (Baik)	83 (Baik)		85 (Baik)		87 (Baik)		89 (Baik)		91 (Sangat Baik)		91 (Sangat Baik)		91 (Sangat Baik)		91 (Sangat Baik)	Biro Organisasi	
2.1.26.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	82,49 (Baik)	85 (Baik)		87 (Baik)		88 (Sangat Baik)		91 (Sangat Baik)		93 (Sangat Baik)		93 (Sangat Baik)		93 (Sangat Baik)		93 (Sangat Baik)	Biro Organisasi	
2.1.26.2	Program Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur	2 Kebijakan	3 Kebijakan		4 Kebijakan		5 Kebijakan		6 Kebijakan		7 Kebijakan		7 Kebijakan		7 Kebijakan		7 Kebijakan	Biro Organisasi	
2.1.27	Meningkatnya penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	20%	20%		40%		60%		80%		100%		100%		100%		100%	Biro Organisasi	
2.1.27.1	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	20%	20%		40%		60%		80%		100%		100%		100%		100%	Biro Organisasi	
2.1.27.2	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Persentase PNS Setda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10%	16%		32%		48%		64%		80%		80%		80%		80%	Biro Organisasi	
2.1.27.3	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Persentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Biro Organisasi	
2.1.28	Meningkatnya penyajian pelaporan kinerja (LKJ) Pemerintah Prov. Kalbar	Komponen SAKIP Nilai pelaporan kinerja		10.5		11		11.5		12		12.5		12.5		12.5		12.5	Biro Organisasi	
2.1.28.1	Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Persentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direvisi	100%	100%	405.74	100%	516.21	100%	595.03	100%	674.25	100%	765.16	100%	765.16	100%	765.16	2,956.30	Biro Organisasi	
2.1.29	Meningkatkan keterbukaan informasi kepada masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemprov Kalbar	Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat daerah dengan penilaian masuk dalam Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80-100)	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100		Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.1.29.1	Program Layanan Informasi Publik	Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100	22%	60%	337	70%	180	80%	449	90%	698	100%	578	100%	578	100%	578	100%	2,441.99	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat	1 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	756.79	4 rekomendasi kebijakan	750	6 rekomendasi kebijakan	902	8 rekomendasi kebijakan	1005	10 rekomendasi kebijakan	1017	31 rekomendasi kebijakan	1017	31 rekomendasi kebijakan	1017	31 rekomendasi kebijakan	4,430.79	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	-	30%		50%	70	60%	77	75%	85	90%	94	90%	94	90%	94	90%	326.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.29.2	Program Layanan Komunikasi Publik	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	21 KIM	456.77	38 KIM	580	38 KIM	690	38 KIM	760	39 KIM	830	174 KIM Iap Kecamatan	830	174 KIM Iap Kecamatan	830	174 KIM Iap Kecamatan	3,316.77	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah lembaga media lokal yang dibina	7 Media Lokal	5 Media Lokal	232.69	5 Media Lokal	420	5 Media Lokal	450	5 Media Lokal	480	10 Media Lokal	520	30 Media Lokal	520	30 Media Lokal	520	30 Media Lokal	2,102.69	Dinas Komunikasi dan Informatika

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
2.1.30	Menerapkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta mendukung fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi di desa untuk meningkatkan nilai Indeks Desa Membangun menuju Desa Mandiri	Indeks SPBE	2.55	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	2.60	Dinas Komunikasi dan Informatika	
		Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	79 Desa	159 Desa	239 Desa	319 Desa	425 Desa	425 Desa	425 Desa	425 Desa	425 Desa	425 Desa	425 Desa	Dinas Komunikasi dan Informatika		
2.1.30.1	Program Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase sistem informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)	-	60%	3,767.18	70%	7,920.00	80%	6,905.00	90%	7,070.00	100%	7,076.00	100%	32,738.16	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas sinyal telepon selular, internet kantor desa dan akses internet warga desa menuju desa mandiri	-	79 Desa	1,162.08	87 Desa	2,790.00	87 Desa	3,540.00	86 Desa	3,679.00	86 Desa	3,865.00	425 Desa	15,036.08	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.31	Peningkatan persentase tingkat keamanan informasi di lingkungan Pemprov Kalbar	Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi	15%	30%		50%		70%		80%		90%		90%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.1.31.1	Program Peningkatan Layanan Persandian	Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian	15%	30%	993.19	50%	470	70%	691	80%	658	90%	725	90%	3,537.19	Dinas Komunikasi dan Informatika
2.1.32	Pengelolaan data statistik sektoral provinsi Kalimantan barat dalam KALBAR SATU DATA	Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	15%	70%		80%		90%		100%		100%		100%	Dinas Komunikasi dan Informatika	
2.1.32.1	Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat	Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA	-	70%	887.13	80%	730	90%	760	100%	808	100%	825.70	100%	4,010.82	Dinas Komunikasi dan Informatika
3	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG SEHAT, CERDAS, PRODUKTIF, DAN INOVATIF															
3.1	Meningkatnya kualitas SDM	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	66.26	67.20	67.87	68.69	69.68	70.78	70.78	70.78	70.78	70.78	70.78	70.78		
3.1.1	Meningkatnya kualitas pendidikan, kebudayaan dan literasi	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.48	7.78	8.2	8.9	9.5	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	10.4	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.5	12.9	13.2	13.7	14.2	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	14.5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Melek Aksara	98.24	98.3	98.34	98.39	98.43	98.45	98.45	98.45	98.45	98.45	98.45	98.45	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	5	5	6	7	7	7	7	7	7	7	7	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Cakupan Kunjungan Perpustakaan	96.696 orang	106.365 orang	117.000 orang	128.700 orang	141.570 orang	590.331 orang	590.331 orang	590.331 orang	590.331 orang	590.331 orang	590.331 orang	590.331 orang	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
		Koleksi Daerah yang dilestarikan	5.492 Judul	5.792 Judul	6.092 Judul	6.392 Judul	6.692 Judul	30.460 Judul	30.460 Judul	30.460 Judul	30.460 Judul	30.460 Judul	30.460 Judul	30.460 Judul	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
3.1.1.1	Program Pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C	81.9	81.92	602,049.46	81.94	860,923.41	81.96	930,502.79	81.98	1,006,998.14	82	1,090,781.74	82	4,491,255.52	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C	57.7	58.44		60.08		60.2		60.58		62.78		62.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	57.7	58.44		60.08		60.2		60.58		62.78		62.78	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	1.05	0.5		0.45		0.42		0.4		0.38		0.38	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional	21	10		10		10		10		10		10	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus	100	100		100		100		100		100		100	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	91.42	93.67		93.87		94.08		94.38		94.58		94.58	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	55.4	56	27,594.83	56.05	51,217.41	56.1	51,364.17	56.15	60,316.84	56.2	65,327.75	56.2	255,821.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	53.8	54.03		54.11		54.25		54.35		54.55		54.55	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi	32.5	32.7		32.9		33.1		33.3		33.5		33.5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian	97.5	97.7		97.9		98.1		98.3		98.5		98.5	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah	55.55	55.6		55.85		56.05		56.25		56.35		56.35	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Guru bersertifikat pendidik	66.7	66.8		66.9		67		67.1		67.2		67.2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.3	Program Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah	Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK	44.86	45.05	2,912.46	45.15	6,641.59	45.25	7,002.25	45.35	7,408.48	45.45	7,853.83	45.45	31,818.62	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Persentase Kelulusan SMA/SMK	84.86	95.71		95.73		95.75		95.76		95.82		95.82	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.4	Program Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61	61.05	6,074.10	61.07	6,253.48	61.08	6,878.83	61.09	7,566.71	61.11	8,323.39	61.11	35,096.51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	110.2	109.55		108.85		108.25		108.05		107.85		107.85	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104.8	104.5		104.2		103.8		103.4		103.1		103.1	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	21	21.35		21.45		21.55		21.65		21.75		21.75	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional	3	3		3		3		3		3		3	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target			
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
		Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup	193	193	195	195	195	197	197	197	197	197	197	197		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.5	Program Pelestarian kebudayaan, adat istiadat dan cagar budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	7	2	1,439.28	2	2,873.21	2	2,981.53	2	3,155.69	2	3,397.25	17	13,846.99	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Cagar Budaya yang direvitalisasi	1	0		1		1		1		1		5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Dokumentasi Budaya	3	2		2		2		2		2		13		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
																	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
3.1.1.6	Program Pengembangan budaya dan seni daerah	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	3	3	1,539.15	3	8,543.07	3	8,662.37	3	8,848.61	3	9,103.47	18	36,696.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Karya Seni baru yang diinventarisir	10	10		10		10		10		10		60		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional	2	2		2		2		2		2		12		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional	0	1		1		1		1		1		5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.7	Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan	Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat	32	3	201.57	3	451.73	3	473.9	3	498.29	3	525.12	47	2,150.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
3.1.1.8	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang dibina	65 Orang	65 Orang	144.10	65 Orang	472.87	65 Orang	462.00	65 Orang	592.70	65 Orang	454.27	325 Orang	2,125.94	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan	87.906 Orang	96.696 Orang	524.20	106.365 Orang	769.81	117.000 Orang	1092.37	128.700 Orang	753.69	141.570 Orang	1084.40	141.570 Orang	4,224.47	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca	15 Kali	15 Kali	376.97	15 Kali	293.30	15 Kali	691.37	15 Kali	523.50	15 Kali	848.50	15 Kali	2,733.67	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	37.098 Judul	500 Judul	451.95	500 Judul	474.55	500 Judul	498.28	500 Judul	523.19	500 Judul	549.35	2500 Judul	2,497.37	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
3.1.1.9	Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	5.192 Judul	300 Judul	207.23	300 Judul	216.50	300 Judul	200.00	300 Judul	200.00	300 Judul	300.00	1500 Judul	1,123.77	Dinas Perpustakaan dan Kearsifan	
3.1.2	Peningkatan kualitas kesehatan	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	95	95		94		93		92		91		91		Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7		7		7		7		6		6		Dinas Kesehatan	
		Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	8	8		8		8		8		7		7		Dinas Kesehatan	
		Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.92	69.95		69.97		69.9		70		70		70		70	Dinas Kesehatan & Dinas Porapar
		BOR	60-80%	60-80%		60-80%		60-80%		60-80%		60-80%		60-80%		60-80%	RSUD Dr. Soedarso
		LOS (hari)	6-9 hari	6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari		6-9 hari	RSUD Dr. Soedarso
		TOI (Hari)	1-3 hari	1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari		1-3 hari	RSUD Dr. Soedarso
		BTO (Kali)	40-50	40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50	RSUD Dr. Soedarso
		NDR	<50/1000	<50/1000		<50/1000		<50/1000		<50/1000		<50/1000		<50/1000		<50/1000	RSUD Dr. Soedarso
		GDR	<75/1000	<75/1000		<75/1000		<75/1000		<75/1000		<75/1000		<75/1000		<75/1000	RSUD Dr. Soedarso
		BOR	60-85%	60-85%		60-85%		60-85%		60-85%		60-85%		60-85%		60-85%	RSJ Provinsi
		LOS (hari)	132	100		100		100		100		100		100		100	RSJ Provinsi
		TOI (Hari)	5.2	3		3		3		3		3		3		3	RSJ Provinsi
		BTO (Kali)	2.7	40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50	RSJ Provinsi
		NDR	9.38	< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000	RSJ Provinsi
		GDR	9.38	< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000	RSJ Provinsi
		BOR	80	60-80		60-80		60-80		60-80		60-80		60-80		60-80	RSJID Sungai Bangkong
		LOS (hari)	50	50		50		50		50		50		50		50	RSJID Sungai Bangkong
		TOI (Hari)	2	2		2		2		2		2		2		2	RSJID Sungai Bangkong
		BTO (Kali)	40-50	40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50		40-50	RSJID Sungai Bangkong
NDR	0	< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000		< 3/1000	RSJID Sungai Bangkong		
GDR	0	< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000		< 10/1000	RSJID Sungai Bangkong		
3.1.2.1	Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	85.94%	87.00%	2,823	87.50%	1,477	88.00%	5,301	88.50%	4,702	89.00%	5,636	89.00%	19,939.00	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pertolongan (PF) persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	66.00%	80.00%		81.00%		82.00%		83.00%		84.00%		84.00%		84.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	80.00%	88.00%		88.50%		89.00%		89.50%		90.00%		90.00%		90.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7 dan 10	59.00%	86.00%		87.00%		88.00%		89.00%		90.00%		90.00%		90.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas I, 7 dan 10	60.00%	65.00%		65.50%		66.00%		66.50%		67.00%		67.00%		67.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	57.00%	62.00%		62.50%		63.00%		63.50%		64.00%		64.00%		64.50%	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	10.00%	10.00%		9.00%		8.00%		7.00%		6.00%		6.00%		6.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	87.00%	80.00%		85.00%		90.00%		91.00%		92.00%		92.00%		92.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia < 6 bln mndpt ASI eksklusif	61.00%	63.00%		65.00%		67.00%		69.00%		71.00%		71.00%		71.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	32.00%	34.00%		36.00%		38.00%		40.00%		42.00%		42.00%		42.00%	Dinas Kesehatan
		Persentase balita kurus	11.00%	11.00%		10.00%		9.00%		8.00%		7.00%		7.00%		7.00%	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting pada Balita	33.00%	32.00%		32.00%		30.00%		28.00%		26.00%		26.00%		26.00%	Dinas Kesehatan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD				
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
3.1.2.2	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	32.00%	32.00%	1,897	35.00%	1,967	37.00%	3,567	39.00%	3,822	40.00%	4,582	40.00%	15,835.00	Dinas Kesehatan		
		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PAHS	78.00%	85.00%		90.00%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Pesan/tema melalui media dalam komunikasi Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema)	25	10		10		10		10		10		10		75	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga	77.00%	78.00%		80.00%		82.00%		84.00%		85.00%		85.00%		85.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM	33.80%	54.80%		60.50%		65.5%		70.00%		75.00%		75.00%		75.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa/Kelurahan ODF	4.50%	6.40%		7.30%		8.20%		9.10%		10.00%		10.00%		10.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase sarana air minum yg dilakukan pengawasan	41.00%	50.00%		55.00%		59.00%		64.00%		69.00%		69.00%		69.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase TTU yg memenuhi syarat kesehatan	54.00%	58.00%		62.00%		64.00%		68.00%		72.00%		72.00%		72.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	26.00%	36.00%		40.00%		45.00%		49.00%		54.00%		54.00%		54.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase TPM yg memenuhi syarat kesehatan	17.98%	26.00%		30.00%		35.00%		39.00%		44.00%		44.00%		44.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	40.00%	60.00%		65.00%		70.00%		75.00%		80.00%		80.00%		80.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan kerja dasar	35.00%	50.00%		60.00%		70.00%		80.00%		90.00%		90.00%		90.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	40.00%	60.00%		65.00%	837.30	70.00%	921.03	75.00%	1,013.14	80.00%	1,114.45	80.00%	1,114.45	80.00%	3,885.93	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja	40.00%	60.00%		65.00%	456.35	70.00%	501.98	75.00%	552.18	80.00%	607.40	80.00%	607.40	80.00%	2,117.91	Dinas Kesehatan
Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM	33.80%	54.80%		60.50%	36	65.5%	36	70.00%	38	75.00%	38	75.00%	38	75.00%	148.00	Dinas Kesehatan		
3.1.2.3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi TB per 100.000	121	152	2,614	172	3,554	192	5,070	212	5,816	232	5,320	232	22,374.00	Dinas Kesehatan		
		Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun	0.12%	0.45%		0.40%		0.35%		0.30%		0.25%		0.25%		0.25%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	3	4		5		6		7		8		8		8	Dinas Kesehatan	
		Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%	0.00%	11.00%		11.00%		33.00%		50.00%		100.0%		100.0%		100.0%	Dinas Kesehatan	
		Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 Per 100.000 Penduduk	58.00%	38.00%		44.00%		50.00%		58.00%		65.00%		65.00%		65.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase kab/kota yang eliminasi Rabies	8.00%	0.00%		8.00%		15.00%		23.00%		29.00%		29.00%		29.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	29.00%	29.00%		36.00%		43.00%		50.00%		58.00%		65.00%		65.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	16.31%	20.00%		23.00%		26.00%		28.00%		30.00%		30.00%		30.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella	57.30%	70.00%		72.00%		74.00%		76.00%		78.00%		78.00%		78.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh kab/kota	85.0%	85.0%		85.0%		85.0%		85.0%		85.0%		85.0%		85.0%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan	100.0%	100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan penendalian PTM terpadu	70.0%	70.0%		70.0%		85.0%		85.0%		85.0%		85.0%		85.0%	Dinas Kesehatan	
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	31.29%	40.00%		45.00%		50.00%		55.00%		60.00%		60.00%		60.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah	50.00%	57.00%		64.00%		71.00%		85.70%		100.0%		100.0%		100.0%	Dinas Kesehatan	
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	6.21%	10.00%		13.00%		16.00%		19.00%		22.00%		22.00%		22.00%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Kab/kota yang 5% puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional (kab/kota)	1	4		7		9		12		14		14		14	Dinas Kesehatan	
		% puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus Katarak	10.00%	10.00%		20.00%		30.00%		40.00%		50.00%		50.00%		50.00%	Dinas Kesehatan	
		Persentase kab/kota yg melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal utama	14.00%	21.00%		28.00%		35.70%		42.00%		50.00%		50.00%		50.00%	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA (kab/kota)	5	5		7		9		11		14		14		14	Dinas Kesehatan	
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai Institusi Penerima Wajib Laport (IPWL) pecandu Narkotika yg aktif	30.00%	27.30%		36.00%		45.50%		63.60%		63.60%		63.60%		63.60%	Dinas Kesehatan	
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		100%	Dinas Kesehatan	
		Prevalensi TB per 100.000	121	152		172		192		212		232		232		232	Dinas Kesehatan	
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspon oleh kab/kota	83.0%	100.0%	48	100.0%	48	100.0%	58	100.0%	65	100.0%	75	100.0%	100.0%	294.00	Dinas Kesehatan	
Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan	83.0%	100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%		100.0%	Dinas Kesehatan			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target			Rp
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp				
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	70.0%	70.0%	146.19	70.0%	156.92	85.0%	172.61	85.0%	189.87	85.0%	208.86	85.0%	874.46	Dinas Kesehatan	
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah	50.0%	57.0%		64.0%		71.0%		85.7%		100.0%		100.0%		Dinas Kesehatan	
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	6.21%	10.0%	74.98	13.0%	71.24	16.0%		19.0%		22.0%		22.0%	405.60	Dinas Kesehatan	
3.1.2.4	Program Data dan Informasi Kesehatan	Persentase tersusunnya DHA dan PHA	0.00%	21.00%	1.488	36.00%	1.365	50.0%	1.475	71.0%	1.605	85.0%	1.686	85.0%	7.619.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase RSUD dan Puskesmas di kabupaten/	25.30%	30.00%		35.00%		40.00%		45.00%		50.00%		50.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%		70.00%		80.00%		85.00%		90.0%		90.0%		Dinas Kesehatan	
		Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online	21.00%	50.00%		60.00%		70.00%		75.00%		80.0%		80.0%		Dinas Kesehatan	
		Persentase tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan	50.00%	60.00%		70.00%		75.00%		80.00%		85.00%		85.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%	-	70.00%	29	80.00%	15	85.00%	16	18.00%	18	90.00%	78.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%		70.00%		80.00%		85.00%		90.00%		90.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%	17	70.00%	49	80.00%	52	85.00%	54	90.00%	57	90.00%	229.00	Dinas Kesehatan	
3.1.2.5	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	1.827	88.00%	2.000	90.00%	2.304	92.00%	2.416	94.00%	2.532	94.00%	11,079.35	Dinas Kesehatan	
		Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	88.73%	90.00%		92.00%		94.00%		95.00%		96.00%		96.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	44.69%	50.00%		55.00%		60.00%		65.00%		70.00%		70.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase Penggunaan obat rasional di puskesmas	49.60%	60.00%		62.00%		64.00%		66.00%		68.00%		68.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	2.021	88.00%	1505	90.00%	2200	92.00%	2500	94.00%	2800	94.00%	11,026.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	1.827	88.00%	2000	90.00%	2304	92.00%	2416	94.00%	2532	94.00%	11,079.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	621	88.00%	640	90.00%	672	92.00%	705	94.00%	741	94.00%	3,379.00	Dinas Kesehatan	
3.1.2.6	Program Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan	79.92%	80.00%		82.00%		84.00%	180.0	86.00%	194.0	88.00%	208.0	88.00%	582.00	Dinas Kesehatan	
3.1.2.7	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki kesehatan sesuai standar	75.00%	80.00%	1.954	100%	3.105	100%	4.236	100%	4.838	100%	5.506	100%	19,639.00	Dinas Kesehatan	
		Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	7.00%	11.00%		15.00%		19.00%		23.00%		27.00%		27.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase FKTP yang terakreditasi	56.00%	72.00%		75.00%		78.00%		82.00%		85.00%		85.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	65.00%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	
		Persentase Labkesda yang terakreditasi	17.00%	83.00%		100.00%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	
		Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar	31.00%	42.00%		52.00%		63.00%		73.00%		88.00%		88.00%		Dinas Kesehatan	
		Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	
		Jumlah Layanan Kesehatan Massal (kegiatan)	10	11		11		12		12		12		12		Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	
		Persentase Labkesda yang terakreditasi	0%	100%	516	100%	345	100%	569	100%	615	100%	516	100%	2.561.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase FKTP yang terakreditasi	56%	72%	-	75%	126	78%	126	82%	130	85%	130	85%	512.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase FKTP yang terakreditasi	56%	72%		75%	79	78%	150	82%		85%		85%	229.00	Dinas Kesehatan	
3.1.2.8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	75.00	77.00		80.00		82.00		85.00		88.00		88.00		Dinas Kesehatan	
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	100.00%	100.00%	3099.00	100.00%	671.00	100%	3167.00	100%	2432.00	100%	246.00	100%	9.615.00	Dinas Kesehatan	
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	75.00	77.00	172	20.00	299.03	21.00	329	22.00	362	23.00	468	23.00	1.629.34	Dinas Kesehatan	
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	75.00	77.00	410.00	80.00	139.00	82.00	147.00	85.00	155.00	88.00	163.00	88.00	1.014.00	Dinas Kesehatan	
3.1.2.9	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	35.00%	45.00%	732.0	55.00%	744.0	65.00%	1.284.0	75.00%	1.398.0	100%	1.527.0	100%	5.685.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	67%	80.00%		100%		100%		100%		100%		100%		Dinas Kesehatan	
		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan	216	230		250		270		300		320		320		Dinas Kesehatan	
		Jumlah Riset Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan (riset)	1	1		1		1		1		1		1		Dinas Kesehatan	
		Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (sertifikasi)	13	18		22		26		30		34		34		Dinas Kesehatan	
		Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (sertifikasi)	268	568		688		808		928		1048		1048		Dinas Kesehatan	
		Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (sertifikasi)	12	6	498.06	12	547.87	13.20	602.66	14.52	662.92	15.97	729.22	54	3,040.73	Dinas Kesehatan	
		Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (orang)	60	300	1,620.9	210	1,300	210	1,430	210	1,573	210	1,730	1200	7,653.90	Dinas Kesehatan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan											Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab			
				2019		2020		2021		2022		2023		target			Rp		
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp	target	Rp
3.1.2.10	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional	71.4%	78.57%	470.96	85.71%	518.05	85.71%	569.86	92.85%	626.84	92.85%	689.53	100.0%	2,875.24	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
		Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh (medali)	11	11	2105.44	12	2496.99	11	2840.98	13	2930.53	11	3318.74	(11 POPNAS)/13 (POPWIL)	13,692.66	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	0.00%	2.00%	5691.69	2.00%	1435.48	2.00%	1481.02	2.00%	1528.06	2.00%	1433	10.00%	11,469.25	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
3.1.2.11	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	80.00%	35.200	85.00%	38.720	90.00%	42.000	95.00%	44.600	>95%	46.260	>95%	206,780.00	RSUD Dr. Soedarso			
3.1.2.12	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	85.00%	85.00%	2.516	85.00%	2.747	90.00%	2.628	95.00%	2.657	>95%	2.712	>95%	13,260.02	RSUD Dr. Soedarso			
3.1.2.13	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	70.0%	70.0%	772.88	73.0%	994.18	76.0%	944.45	80.0%	920.12	85.0%	961.85	85.0%	4,593.48	RSUD Dr. Soedarso			
3.1.2.14	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	121.40	Paripurna	127.03	Paripurna	132.53	Paripurna	138.03	Paripurna	143.53	Paripurna	662.52	RSUD Dr. Soedarso			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79	80	85	90	95	95	95	95	95	95	95	95	RSUD Dr. Soedarso			
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	70.0%	70.0%	74.0%	78.0%	82.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	85.0%	RSUD Dr. Soedarso			
3.1.2.15	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	70.0%	70.0%	45,847.24	75.0%	126,636.40	80.0%	76,391.12	83.0%	51,308.90	>85%	61,541	>85%	361,724.66	RSUD Dr. Soedarso			
3.1.2.16	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60.0%	60.0%	4,812.20	65.0%	4,023.58	70.0%	4,035.58	75.0%	4,049.98	>80%	4,067.26	>80%	20,988.65	RSUD Dr. Soedarso			
3.1.2.17	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	80.00%	2307.75	85.00%	2423.14	90.00%	2544.29	95.00%	2671.51	95.00%	2805.09	95.00%	12,751.78	RSJ Provinsi			
3.1.2.18	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	80.00%	80.00%	14714.54	80.00%	16910.26	85.00%	17755.78	90.00%	18643.56	95.00%	19575.74	95.00%	87,599.88	RSJ Provinsi			
3.1.2.19	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	70.0%	70.0%	2150	73.0%	2150	76.0%	1800	80.0%	1800	85.0%	1800	85.0%	7,550.00	RSJ Provinsi			
3.1.2.20	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	n/a	Utama	389.54	Paripurna	409.01	Paripurna	429.47	Paripurna	450.94	Paripurna	473.49	Paripurna	2,152.45	RSJ Provinsi			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	80	100	85	100	90	100	95	100	95	100	95	400.00	RSJ Provinsi		
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	70.0%	70.0%	116.08	74.0%	121.88	78.0%	127.98	82.0%	134.38	85.0%	141.1	85.0%	641.42	RSJ Provinsi			
3.1.2.21	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	70.0%	70.0%	9611.81	73.0%	24685.78	76.0%	21147.57	79.0%	15776.2	80.0%	15982.51	80.0%	87,203.87	RSJ Provinsi			
3.1.2.22	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60.0%	60.0%	800	65.0%	800	70.0%	660	75.0%	693	80.0%	727.65	80.0%	2,880.65	RSJ Provinsi			
3.1.2.23	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	70.00%	1576.4	80.00%	1650	80.00%	2005	85.00%	2256	85.00%	2607	85.00%	10,094.40	RSJID			
3.1.2.24	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	70.00%	70.00%	4882.77	70.00%	5760	80.00%	6585	80.00%	7450	80.00%	8325	80.00%	33,002.77	RSJID Sungai Bangkong			
3.1.2.25	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	50.0%	70.0%	48.51	80.0%	317.21	80.0%	208.94	85.0%	131.35	85.0%	329.46	85.0%	1,035.47	RSJID Sungai Bangkong			
3.1.2.26	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	n/a	Paripurna	331.28	Paripurna	885	Paripurna	820	Paripurna	935	Paripurna	1060	Paripurna	4,031.28	RSJID Sungai Bangkong			
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75.5 Nilai Interval Konversi	78	12.96	78	15	78	15	78	20	78	20	78	82.96	RSJID Sungai Bangkong			
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	0.0%	0.0%	25.0%	700	50.0%	700	60.0%	600	80.0%	700	80.0%	2,700.00	RSJID Sungai Bangkong				
3.1.2.27	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	50.0%	70.0%	1199	70.0%	3643	75.0%	3304	75.0%	3465	80.0%	2626	80.0%	14,237.00	RSJID Sungai Bangkong			
3.1.2.28	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	0.0%	40.0%	200	60.0%	330	70.0%	140	80.0%	200	85.0%	310	85.0%	1,180.00	RSJID Sungai Bangkong			
3.1.3	Meningkatkan Kualitas Pemuda	Indeks pembangunan pemuda	47.5	48.2	48.6	49.2	49.2	49.9	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	50.7	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
3.1.3.1	Program Kepemudaan dan Pramuka	Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina	284,748	285,745	3859.61	286,745	6192.58	287,748	6602.74	288,755	7047.66	289,755	7530.17	289,755	31,232.76	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata			
3.1.4	Meningkatnya Capaian Indeks Pembangunan Gender	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68.5	68.5	70	70.5	80	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	80.5	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
3.1.4.1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	65	65	60	75	475	85	505	90	535	100	595	100	2,170.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Persentase Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	10	10	285	20	1,058	25	955	30	1,220	35	1,075	35	4,593.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			
		Persentase jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan pembangunan ketahanan keluarga	45.00	45.00	262.00	65.00	365.00	75.00	220.00	85.00	130.00	100.00	140.00	100.00	1,107.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
3.1.4.2	Program Data dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender	65.00	65.00	270.00	75.00	565.00	85.00	665.00	95.00	785.00	100.00	855.00	100.00	3,140.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.5	Meningkatnya Capaian Indeks Pemberdayaan Gender	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.46	64.46		65.96		66.46		66.96		67.46		67.46		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.5.1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, ekonomi dan hukum	-	-	-	20.00	200.00	25.00	-	30.00	200.00	35.00	-	35.00	400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	10.00	10.00	265.00	20.00	310.00	25.00	456.00	30.00	388.00	35.00	428.00	35.00	1,847.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.6	Meningkatnya upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.6.1	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki kapasitas SDM dan Sarana Prasarana pendukung sesuai dengan standar, termasuk KIE	100.00	100.00	1258.00	100.00	1695.00	100.00	2170.00	100.00	2593.00	100.00	2487.00	100.00	10,203.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.6.2	Program Data dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data anak	65.00	65.00	316.00	75.00	565.00	85.00	665.00	95.00	785.00	100.00	855.00	100.00	3,186.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	25.00	25.00	430.00	33.33	600.00	41.67	640.00	50.00	675.00	58.33	710.00	58.33	3,055.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.6.3	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kab/Kota)	100.00	100.00	75.00	100.00	85.00	100.00	95.00	100.00	105.00	100.00	115.00	100.00	475.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan pemenuhan hak anak	15.00	15.00	250.00	25.00	260.00	35.00	270.00	45.00	280.00	55.00	290.00	55.00	1,350.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsif anak	11.80	11.80	510.00	17.65	538.00	23.53	566.00	23.53	594.00	29.41	622.00	29.41	2,830.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	78.00	78.00	660.00	78.00	720.00	78.00	790.00	78.00	862.00	78.00	936.00	78.00	3,967.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	75.00	75.00	120.00	80.00	126.00	80.00	132.00	85.00	138.00	85.00	144.00	85.00	660.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar	50.00	50.00	1651.00	55.00	1877.00	55.00	1986.00	60.00	1967.00	60.00	2227.00	60.00	9,708.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3.1.7	Meningkatnya fasilitasi penyelenggaraan program keluarga berencana, keluarga sejahtera dan pengendalian penduduk	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk	3.33	15	192.90	30	282.80	41.67	311.08	46.67	342.19	53,33	376.41	60	1,505.37	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
3.1.7.1	Program Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah dan mitra kerja/swasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	10%	15%	42.75	20%	118.27	25%	130.10	30%	143.11	35%	157.42	45%	591.64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab		
				2019		2020		2021		2022		2023		target				Rp	
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			target	Rp
		Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0	15%	43.00	20.00%	43.00	25.00%	47.30	30.00%	52.03	35.00%	57.23	45.00%	242.56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
		Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab/kota dengan pemerintah pusat dibidang penendalian penduduk	0.00	15.00%	107.15	50.00%	121.53	75.00%	133.68	80.00%	147.05	90.00%	161.76	90.00%	671.17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil			
3.1.8	Meningkatnya ketersediaan pangan, keterjangkauan dan pemanfaatan pangan	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	79.43	83.62		85.71		87.81		89.90		92.00		92.00		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3.1.8.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari	1,833	1,857	5,709	1,896	5,498	1,917	5,533	1,938	5,573	1,958	5,590	1,958	27,902	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Konsumsi Protein prot/kap/hari	55.6	56.1		56.3		56.5		56.8		57.0		57.0		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Jumlah Konsumsi beras penduduk	84.1	83.1		82.2		81.5		80.9		78		78		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Persen tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	78.70	80		82		84		88		90		90		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Persen Tingkat Keamanan Produk Asal Hewan (PAH)	70.80	70		75		80		85		90		90		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Jumlah Ketersediaan Energi (KKAL/Kap/Hari)	2,975	3,054		3,085		3,131		3,178		3,226		3,226		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Jumlah Ketersediaan Protein (Gram/Kap/Hari)	77.3	78.70		79.20		79.60		80.10		80.50		80.50		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Persentase Penduduk Rawan Pangan	16.96	16		15		14		13		12		12		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Coefisient Varian (CV) harga beras di tingkat konsumen	1.67	5		5		5		5		5		5		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
3.1.9	Meningkatnya Kualitas Kebijakan di Bidang Agama	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Agama	93.61%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Kesejahteraan Rakyat			
3.1.9.1	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	93.61%	100%	3,842.07	100%	3,342.17	100%	3,423.39	100%	3,501.89	100%	3,555.89	100%	17,665.4	Biro Kesejahteraan Rakyat			
		Jumlah Peningkatan Kualitas Keagamaan Tokoh Agama dan Masyarakat	394 Orang	409 Orang	456.32	409 Orang	1,234.63	409 Orang	1,295.00	409 Orang	1,375.00	409 Orang	1,430.00	409 Orang	5,790.91	Biro Kesejahteraan Rakyat			
3.1.10	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	99.60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Kesejahteraan Rakyat			
3.1.10.1	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Movev Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kalbar	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Movev Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	99.60%	100%	388.90	100%	354.00	100%	659.54	100%	465.00	100%	719.54	100%	2,586.99	Biro Kesejahteraan Rakyat			
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Movev Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	99.60%	100%	84.49	100%	187.00	100%	220.00	100%	235.00	100%	250.00	100%	976.49	Biro Kesejahteraan Rakyat			
3.1.11	Meningkatnya Kualitas Perumusan Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	99.60%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Kesejahteraan Rakyat			
3.1.11.1	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Movev Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Movev Kebijakan Bidang Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	99.60%	100%	148.06	100%	244.91	100%	253.10	100%	255.00	100%	262.00	100%	1,163.08	Biro Kesejahteraan Rakyat			
4	MEWUJUDKAN MASYARAKAT SEJAHTERA																		
4.1	Meningkatnya perekonomian masyarakat yang merata melalui Pengurangan Kemiskinan dan Pengangguran	Pertumbuhan Ekonomi	5.06	5.20		5.35		5.62		5.83		6.15		6.15					
		Indeks Gini	0.33	0.33		0.32		0.30		0.28		0.27		0.27					
		Desa Mandiri	1	63.00		159.00		239.00		319.00		425.00		425.00					
		Tingkat Pengangguran Terbuka	4.13	3.90		3.63		3.47		3.26		3.07		3.07					
		Angka Kemiskinan	7.37	6.92		6.43		5.99		5.00		5.00		5.00					
4.1.1	Terkendalnya Penyakit Hewan Menular Strategis (PHMS)/Zoonosis	Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	5		6		7		7		8.00		8.00		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
4.1.1.1	Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit ternak/Hewan	Persentase cakupan vaksinasi rabies	29	25	2,665	30	3,037	35	3,125	40	3,295	50	3,470	50	15,591.88	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Persentase hewan/ternak yang terbebas hogcholer	90	90		90		90		90		90		90		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Persentase penanganan parasiter pada ternak	0.27	2		2		2		2		2		2		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Persentase Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak	1.6	5		5		5		5		5		5		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Jumlah Farm Pengunggasan Kompartemen Avian Influenza	2	2		2		3		3		4		4		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Jumlah ternak yang dilayani pada Klinik Hewan	1,000	1,200		1,200		1,300		1,350		1,400		6,250		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			
		Jumlah sampel produk ternak yang diujikan pada Lab. Keswan dan Kesmet	2,150	2,350		2,350		2,450		2,550		2,650		2,650		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.1.2	Meningkatnya Produksi Populasi Ternak yang sehat dan Aman Konsumsi dan Meningkatnya Kesejahteraan Peternak	Jumlah Produksi Daging Peternakan (Ton)	71,560	76,111	76,873	77,642	78,417	82,785	82,785	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan						
		Jumlah Produksi Telur (Ton)	34,689	35,383	36,090	36,812	37,549	38,299	38,299	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan						
		Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)	3.98	4.00	4.25	4.50	4.75	5.50	5.50	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan						
		NTP Peternakan	93.95	95.16	96.37	97.58	98.79	100.00	100.00	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan						
4.1.2.1	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)	112,654	142,768	7,280	148,050	10,003	153,528	10,936	159,209	12,158	165,100	13,514	196,796	53,891.70	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)	161,514	163,950	165,590	167,246	168,918	170,607	170,607	172,266	173,922	175,580	177,236	178,892	180,548	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Babi(Ekor)	544,058	550,208	555,710	561,267	566,879	572,548	578,217	583,886	589,555	595,224	600,893	606,562	612,231	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras(Ekor)	6,139,850	6,210,821	6,272,929	6,335,659	6,398,389	6,461,119	6,523,849	6,586,579	6,649,309	6,712,039	6,774,769	6,837,499	6,900,229	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Petelur (Ekor)	2,376,995	2,389,691	2,413,588	2,437,724	2,461,860	2,486,000	2,510,140	2,534,280	2,558,420	2,582,560	2,606,700	2,630,840	2,654,980	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging (Ekor)	56,570,468	57,193,051	57,764,981	58,342,631	58,920,657	59,515,318	60,109,979	60,704,639	61,309,299	61,903,959	62,508,619	63,103,279	63,707,939	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Itik (Ekor)	605,571	586,863	592,748	598,676	604,663	610,709	616,755	622,801	628,847	634,893	640,939	646,985	653,031	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Bibit kambing yang diproduksi (ekor)	25	35	65	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Bibit itik yang diproduksi (ekor)	17,333	12,615	22,000	24,000	25,000	26,000	27,000	28,000	29,000	30,000	31,000	32,000	33,000	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Bibit Babi yang diproduksi (ekor)	320	350	400	500	600	700	800	900	1,000	1,100	1,200	1,300	1,400	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diproduksi	20,000	71,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	73,000	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah sampel pakan yang diuji	131	50	70	100	125	150	175	200	225	250	275	300	325	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
4.1.3	Terwujudnya kedaulatan pangan sektor kelautan dan perikanan	Produksi Perikanan (Ton)	240,294.00	249,614.34	254,606.63	259,698.76	264,892.73	270,190.59	270,190.59	Dinas Kelautan dan Perikanan						
4.1.3.1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165,445	165,614	1,838	168,927	3,896	172,305	4,091	175,751	4,295	179,266	4,510	179,266	18,630.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4,705	4,750	4,800	4,850	4,900	4,950	5,000	5,050	5,100	5,150	5,200	5,250	Dinas Kelautan dan Perikanan	
4.1.3.2	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	83,227	84,000	85,680	87,394	89,141	90,924	92,741	94,594	96,483	98,407	100,367	102,367	23,931.00	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Payau dan Laut (ekor)	2,662,900	12,200,000	3,070	12,444,000	4,840	12,693,000	5,082	12,947,000	5,336	13,205,600	5,603	13,464,200	13,205,600	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.4	Meningkatnya Nilai Tambah dan Daya Saing Produksi Perikanan	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	3.17	3.22	3.27	3.32	3.37	3.42	3.42	Dinas Kelautan dan Perikanan						
4.1.4.1	Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)	38.91	39.05	2,739	39.10	3,590	39.15	3,770	39.20	3,958	39.25	4,156	39.25	18,212.18	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan ikan dan Masyarakat (Rali)	315	325	335	345	355	365	365	365	365	365	365	365	365	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.5	Meningkatnya kesejahteraan pelaku usaha perikanan dan Terwujudnya pengelolaan sumberdaya kelautan perikanan yang bertanggungjawab dan berkelanjutan	NTP Perikanan (%)	103.5	104	104.5	105	105.50	106.00	106.00	Dinas Kelautan dan Perikanan						
4.1.5.1	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	0	1	1,796	2	2,060	3	2,163	4	2,271	5	2,385	5	10,675.20	Dinas Kelautan dan Perikanan
4.1.5.2	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Laut Sampal dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	42.85	44.00	724	48.00	1,730	52.00	1,817	56.00	1,907	60.00	2,003	64.42	8,180.36	Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan													Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		target		Rp			
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target			Rp
																			target
4.1.6	Meningkatnya Produksi Komoditas Perkebunan dan Nilai Tukar Petani Perkebunan Rakyat	Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%)	4.00	4.47		4.52		4.57		4.62		4.67		4.67		Dinas Perkebunan			
		Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	3.315,686	3.439,714		3.568,561		3.702,418		3.841,481		3.985,958		3.985,958		Dinas Perkebunan			
		NTP PR	94.44	95.55		96.66		97.78		98.89		100.00		100.00		Dinas Perkebunan			
4.1.6.1	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1.272,006	1.314,303	15,821	1.359,151	17,330	1.403,608	18,990	1.450,136	20,816	1.499,600	22,824	1.499,600	95,781.09	Dinas Perkebunan			
		Jumlah Produksi Perkebunan Besar	2.043,680	2.125,411		2.210,411		2.298,810		2.390,745		2.486,357		2.486,357		Dinas Perkebunan			
		Jumlah Luas Areal Perkebunan Rakyat	1.273,359	1.307,924		1.343,589		1.380,391		1.418,371		1.457,572		1.457,572		Dinas Perkebunan			
		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi dan tersertifikasi	800,000	850,000		900,000		950,000		1.000,000		1.050,000		1.050,000		Dinas Perkebunan			
		Indeks harga yang diterima petani	123.13	123.15	2,245	123.17	2,469	123.19	2,716	123.21	2,988	123.21	3,286	123.23	13,703.41	Dinas Perkebunan			
4.1.7	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	NTP Tanaman Pangan	94.41	96.06		96.54		97.03		97.51		98.00		98.00		Dinas Pertanian, TPH			
		Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1.549,989	1.607,700		1.655,920		1.733,635		1.739,657		1.791,780		1.791,780		Dinas Pertanian, TPH			
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Pangan														Dinas Pertanian, TPH			
4.1.7.1	Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	3.5	3.64		3.7856		3.937024		4.09		4.26		4.26		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase kenaikan produktivitas padi sawah	(-5.74)	0.13	7,677	0.13	7,831	0.13	7,987	8,147	0.13	8,310	0.65	39,952.90	Dinas Pertanian, TPH				
		Persentase kenaikan produktivitas jagung	(-5.42)	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		2.53		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase kenaikan Produktivitas kedelai	(-1.99)	0.50		0.50		0.50		0.50		0.50		2.53		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase Kenaikan produksi tanaman palawija lainnya	(-0.48)	2.00		2.00		2.00		2.00		2.00		10.41		Dinas Pertanian, TPH			
		Luas Lahan Sawah Ditanami 2 kali Setahun (Ha)	136,472	138,472		140,472		142,472		144,472		146,472		146,472		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi	-	6.50		6.50		6.50		6.50		6.50		6.50	57.42	Dinas Pertanian, TPH			
		Produktivitas Benih Sumber Tanaman Pangan (Kg/Ha)	20	21		21		21.90		22.40		22.90		22.90		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase Serangan OPT Tanaman Pangan	3.32	3.27		3.22		3.17		3.12		3.07		3.07		Dinas Pertanian, TPH			
		4.1.7.2	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	145	155	4,023	165	4,103	175	4,185	185	4,269	195	4,354	195		Dinas Pertanian, TPH	
				Persentase penambahan kelompok tani dari kelas semula ke kelas lanjut	9.80	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		61.05	20,935.07	Dinas Pertanian, TPH	
Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik	40			47		55		60		65		70		70		Dinas Pertanian, TPH			
4.1.8	Meningkatnya Produksi Tanaman Hortikultura	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	385,220	396,770		408,670		420,935		433,570		446,575		446,575		Dinas Pertanian, TPH			
		NTP Hortikultura	101.02	102.03		102.08		102.13		102.18		102.23		102.23		Dinas Pertanian, TPH			
		Meningkatnya Nilai Tambah Produksi Tanaman Hortikultura	8.4	8.82		9.26		9.72		10.21		10.72		10.72		Dinas Pertanian, TPH			
4.1.8.1	Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Hortikultura	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)	-	2.00	3,635	2.00	3,708	2.00	3,782	3,857	2.00	3,934	10.41	18,915.79	Dinas Pertanian, TPH				
		Persentase peningkatan luas panen hortikultura	-	0.02		0.02		0.02		0.02		0.02		0.10		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase Penambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina	-	10.00		10.00		10.00		10.00		10.00		61.05		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase penambahan benih tanaman hortikultura bermutu	-	3.64		3.64		3.64		3.64		3.64		19.57		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase Pertambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	-	9.50		9.50		9.50		9.50		9.50		57.42		Dinas Pertanian, TPH			
		Persentase serangan OPT Tanaman Hortikultura	-	1.40		1.36		1.32		1.28		1.24		1.24		Dinas Pertanian, TPH			
		4.1.9	Meningkatnya Produksi Hasil Hutan dari Perizinan Usaha Di Bidang Kehutanan	Produksi Kayu Bulat (M ³)	981,200	1,050,000		1,100,000		1,150,000		1,200,000		1,250,000		1,250,000		Dinas Kehutanan	
Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK	1.50			1.55		1.60		1.65		1.70		1.75		1.75		Dinas Kehutanan			
Peningkatan Nilai Tambah dan Daya Saing Produk Kehutanan																Dinas Kehutanan			
4.1.9.1	Penetapan dan Pengelolaan Hutan	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	1,559,700	1,660,000	11,274	1,760,000	12,402	1,860,000	13,642	1,960,000	15,006	2,060,000	16,507	2,060,000	68,831	Dinas Kehutanan			
		Luas efektif peningkatan areal kelola 17 Unit Manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH (Ha)	-	1,700		3,400		5,100		6,800		8,500		8,500		Dinas Kehutanan			
4.1.9.2	Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)	78	88	4,704	98	5,175	108	5,692	118	6,261	128	6,887	128	28,719.61	Dinas Kehutanan			
4.1.9.3	Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	Persentase peningkatan publikasi Informasi Bidang Kehutanan (%)	70 %	75 %	1,177	80 %	1,234	85 %	1,424	90 %	1,566	95 %	1,723	95 %	7,183	Dinas Kehutanan			
		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan (%)	85 %	87 %		89 %		91 %		93 %		95 %		95 %		Dinas Kehutanan			
4.1.10	Meningkatnya nilai investasi	Jumlah Nilai Investasi	13,18 T	18,75 T		19,41 T		20,09 T		20,79 T		21,52 T		100,56 T		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
4.1.10.1	Program Pengelolaan Investasi	Data Potensi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1,544.45	1 Dokumen	1,777.80	1 Dokumen	1,862.75	1 Dokumen	2,016.40	1 Dokumen	2,448.43	5 Dokumen	9,649.83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
		Jumlah Kebijakan yang mendukung investasi	2 Kebijakan	3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		3 Kebijakan		15 Kebijakan		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
		Promosi Investasi yang dilaksanakan	5 Kali	4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		4 Kali		20 Kali		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
		Jumlah Fasilitas kerjasama	1 kali	1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		1 kali		5 Kali		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
		Jumlah perusahaan yang dipantau dan dibina		13 Perusahaan		13 Perusahaan		13 Perusahaan		14 Perusahaan		14 Perusahaan		67 Perusahaan		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
4.1.10.2	Program Pelayanan Perizinan	Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	A	B	1,084.77	B	1,288	A	1,353	A	1,423	A	1,608	A	6,756.71	Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
		Jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan	1.424 Izin dan Non Izin	1.000 Izin dan Non Izin		1.350 Izin dan Non Izin		1.350 Izin dan Non Izin		1.350 Izin dan Non Izin		1.350 Izin dan Non Izin		6.400 Izin dan Non Izin		Dinas Penanaman Modal dan PTSP			
4.1.11	Meningkatnya Nilai tambah dan Kontribusi Penerimaan daerah dari pelaksanaan usaha pertambangan mineral dan batubara	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen)	7.45	7.47		7.49		7.51		7.53		7.55		7.55		Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral			

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023				
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.1.11.1	Program Penelitian, Pengembangan Geologi Air Tanah	Proporsitas cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas Zona konservasi air tanah yang ditetapkan	0	200%	595.48	200%	2,542.30	200%	3,601.15	200%	3,428.82	200%	4,035.65	1000%	14,203.43	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.1.11.2	Program Pembinaan, Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah)	200	250	398.59	300	2,158.38	350	3,159.64	400	2,921.08	450	3,451.74	450	100.00	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.1.11.3	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batubara	100	105	319.86	110	1,867.84	115	2,625.51	120	2,536.84	125	3,009.87	125	10,359.92	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.1.11.4	Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi		0.12	409.18	0.12	3,054.02	0.12	3,644.88	0.12	4,020.36	0.12	4,475.66	0.6	15,604.10	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.1.12	Meningkatnya Kualitas Koperasi dan UMKM yang Mandiri, produktif dan Berdaya Saing	Proporsitas Koperasi Berkualitas	21%	23%		25%		27%		29%		31%		31%		Dinas Koperasi dan UKM
		Proporsitas Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas		0.91%		1.82%		2.73%		3.64%		4.55%		4.55%		Dinas Koperasi dan UKM
4.1.12.1	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Proporsitas Partisipasi Koperasi Aktif Proporsitas Kepatuhan Koperasi Proporsitas Kualitas Usaha Koperasi Proporsitas Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	60.17% 21.00% 7.6 T 885 Peserta	62.00% 23.00% 1.00% 89.39%	653.52 730.94 792.65 56.76	64.00% 25.00% 2.00% 92.96%	1.000 1,019.03 1.000 688.70	66.00% 27.00% 3.00% 94.81%	1,810.70 1,098.73 1,386.33 727.97	68.00% 29.00% 4.00% 96.71%	1,993.05 1,182.01 1,537.26 742.53	70.00% 31.00% 5.00% 98.64%	2,193.40 1,263.31 1,682.48 757.38	70.00% 31.00% 5.00% 98.64%	7,650.67 5,294.02 6,398.72 2,973.34	Dinas Koperasi dan UKM
4.1.12.2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Proporsitas pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina Proporsitas Peserta Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil yang Meningkatkan Pemahamannya	60.17% 705 Peserta	62.00% 88.88%	825.78 336.51	64.00% 90.65%	1,300.00 945.90	66.00% 92.46%	1,427.05 1,008.68	68.00% 94.30%	1,567.65 1,028.85	70.00% 96.20%	1,706.62 1,156.20	70.00% 96.20%	6,827.10 4,476.14	Dinas Koperasi dan UKM
4.1.13	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	10.22	10.53		10.84		11.17		11.50		11.85		11.85		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.1.13.1	Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Persentase Jumlah Usaha yang dibina Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina Persentase Saka Pariwisata yang dibina	86.49 65.85% 21.42%	89.19 72.68% 35.71%	1,171.76 50.00%	91.89 79.50%	2,549.21	94.59 86.34%	3,157.52	97.3 93.17%	3,748.72	100 100%	1,791.74 100%	100	12,418.95	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.1.32	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	3,160,895 12.59	3,573,000.00 13.49	1703.79 955.43	4,078,000 14.39	2,111.62 844.84	4,583,000 15.29	2,144.62 383.89	5,008,800 16.19	2,801.62 885.20	5,593,000 17.09	2,806.62 1,371.36	5,593,000 17.09	11,565.21 4,440.70	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.1.14	Meningkatnya Pelaku Ekonomi Kreatif	Pertumbuhan jumlah pelaku ekonomi kreatif	90,649	90,938		91,938		91,538		91,838		92,138		92,138		Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.1.14.1	Program Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	0	74	760.65	102	865.08	130	997.29	158	1,168.62	186	1,366.35	186	5,157.90	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
4.1.15	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Perdagangan di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4.45	4.8		5.2		5.5		6		6.5		6.5		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.15.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta) Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta) Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan (Sertifikat)		1,150 850 1454	1,398 900 800	1,200 900 900	4,240 950 1,000	1,400 950 1,000	2,875 1,100 1,100	1,500 1,200 1,100	2,995 1,200 1,100	1,550 1,200 1,100	2,843 1,200 4,900	1,550	14,350.53	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.15.2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Inflasi Bahan Makanan (%)		3.8	1,070	3.7	1,926	3.6	2,111	3.5	2,453	3.4	2,927	3.4	10,486.52	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.16	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB		5.25		6.5		7		7.5		8		8		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
4.1.16.1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU) Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri (Perusahaan) Nilai investasi PMA Bidang industri (US\$ Juta) Nilai Investasi PMDN Bidang Industri (Rp. Miliar) Pengembangan SDM Industri (Tenaga Kerja/Konsultans Industri) Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Sebagai Bahan Baku Industri (Komoditi) Pengembangan, Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi Industri Unggulan Provinsi (Komoditi) Pembangunan dan Pemberdayaan IKM Unggulan Provinsi (Unit Usaha IKM) Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KI, SIKIM) Standarisasi dan Fasilitasi Penerapan Industri Hijau (Perusahaan) Pengelolaan data dan Sistem Informasi Industri (Sistem Informasi) Fasilitasi Kemasan Produk Industri (Produk) Peningkatan Kapasitas IKM (Orang)		1 30 199.68 1803.1 40 2 1 25 6 12 1 24 174	3,372 50 205.67 1857.2 40 2 2 50 6 14 1 24 174	1 50 205.67 1857.2 40 2 2 50 6 14 1 24 174	6,104 50 212.86 1922.2 60 3 2 75 7 16 1 24 174	3 50 212.86 1922.2 60 3 2 75 7 16 1 24 174	6,422 75 222.66 1922.2 60 3 2 75 7 16 1 24 174	3 75 222.66 2010.6 60 3 3 100 8 18 1 24 174	6,705 75 234.46 2010.6 80 4 3 125 9 20 1 24 174	5 75 234.46 2117.2 80 4 3 125 9 20 1 24 174	7,017 75 234.46 2117.2 80 4 3 125 9 20 1 24 174	5 75 234.46 2117.2 80 4 3 125 9 20 1 24 174	29,619.30 75 234.46 2117.2 280 4 3 375 9 20 1 120 174	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		target	Rp	
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp			
4.1.17	Terwujudnya Kebijakan Pemerataan Ekonomi di Kalimantan Barat	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat	5.28%	5.28%	5.39%	5.40%	5.51%	5.62%	5.62%	5.62%	5.62%			5.62%		Biro Perekonomian
		Terkenalnya Inflasi Daerah	3.60%	3.60%	3.52%	3.47%	3.41%	3.36%	3.36%	3.36%			3.36%		Biro Perekonomian	
4.1.17.1	Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral, Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan		75%	1,061.86											Biro Perekonomian
4.1.17.2	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat		60%	781.49											Biro Perekonomian
4.1.17.3	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal				79.00%	222.00	83.00%	200.00	87.00%	200.00	93.00%	200.00	93.00%	822.00	Biro Perekonomian
		% Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD				79.00%		83.00%		87.00%		93.00%		93.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD				82.50%		90.00%		95.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
4.1.17.4	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan	% Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Di tindaklanjuti				75.00%	1,285	83.00%	1,431	91.00%	1,431	100.00%	1,431	100.00%	5,578.00	Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan Energi yang Ditindaklanjuti				75.00%		83.00%		91.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti				75.00%		83.00%		91.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kehutanan yang Ditindaklanjuti				75.00%		83.00%		91.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Lingkungan Hidup yang Ditindaklanjuti				77.00%		85.00%		94.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Pangan Yang Ditindaklanjuti				77.00%		85.00%		95.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
4.1.17.5	Program Pengendalian Inflasi Daerah, Percepatan Akses Keuangan Daerah dan Percepatan Pelaksanaan Berusaha	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Inflasi Daerah				83.00%	270	90.00%	297	95.00%	297	100.00%	297	100.00%	1,161.00	Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan Percepatan Akses Keuangan Daerah				45.00%		50.00%		55.00%		61.00%		61.00%		Biro Perekonomian
		% Dokumen Perimbangan Kebijakan Penyelesaian Persoalan Pelaksanaan Berusaha				53.00%		58.00%		65.00%		72.00%		72.00%		Biro Perekonomian
4.1.17.6	Program Bina Sarana Perekonomian	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perdagangan Yang Ditindaklanjuti				66.00%	305	73.00%	328	80.00%	328	88.00%	328	88.00%	1,289.00	Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Perindustrian Yang Ditindaklanjuti				50.00%		55.00%		61.00%		67.00%		67.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Koperasi Yang Ditindaklanjuti				66.00%		73.00%		80.00%		88.00%		88.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor UMKM dan Ekonomi Kreatif Yang Ditindaklanjuti				83.00%		90.00%		95.00%		100.00%		100.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Pariwisata Yang Ditindaklanjuti				33.00%		36.00%		40.00%		45.00%		45.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Infrastruktur Dasar dan Infrastruktur Fisik Yang Ditindaklanjuti				45.00%		50.00%		55.00%		61.00%		61.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan Perhubungan Yang Ditindaklanjuti				33.00%		36.00%		40.00%		45.00%		45.00%		Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Komunikasi Yang Ditindaklanjuti				33.00%		36.00%		40.00%		45.00%		45.00%		Biro Perekonomian
4.1.18	Meningkatnya Jumlah Penduduk yang Bekerja	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih		35.37%	35.82%	36.27%	36.53%	37.57%								Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.1.18.1	Program Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal	2200 orang	2200 orang	3,617.35	3000 orang	4,552.91	4000 orang	8,886.32	4500 orang	10,578.59	5000 orang	11,982.09	5000 orang	39,617.26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.1.19	Meningkatkan Hubungan Industrial Yang Harmonis	Persentase Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif		60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%						95.00%		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.1.19.1	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	60.00%	60.00%	2,622.41	70.00%	5,160.52	80.00%	7,341.21	90.00%	8,006.63	95.00%	9,023.06	95.00%	32,153.88	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.1.20	Ketersediaan Lahan Transmigrasi	Persentase Areal Transmigrasi hasil pengukuran HPL (Ha)		1,175.70	1,199.28	284.66	284.66	164	845.608	845.608	845.608	845.608	845.608	845.608		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.1.20.1	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Transmigrasi	Luasan Lahan Transmigrasi yang di manfaatkan	1.175.699 Ha	1.175.699 Ha	416.57	1.199.28 Ha	727.77	284.66 Ha	759.83	164 Ha	836.13	845.608 Ha	914.94 Ha	845.608 Ha	3,655.24	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
4.1.21	Meningkatnya Kesejahteraan Sosial	Persentase PMKS, PSKS dan Penyeenggara Kesejahteraan Sosial Lainnya yang mendapatkan penangan dan pemberdayaan		50.46	56.62	56.86	57.09	57.35								Dinas Sosial
		Persentase Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetia kawan		0	100	100	100	100								Dinas Sosial
4.1.21.1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	12.77	13.2	543.06	2.5	257.32	2.67	299.52	2.78	318	3.04	366.73	3.04	1,784.67	Dinas Sosial
4.1.21.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Dinosos)	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0.98	1.4	545.36	9.02	2,965.65	9.11	3,272.25	9.21	3,551.21	9.3	3,897.18	9.3	14,231.65	Dinas Sosial
4.1.21.3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mulia Dharma)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	773.56	100	1,029.12	100	1,161.94	100	1,289.49	100	1,418.94	100	5,673.04	Dinas Sosial
4.1.21.3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mustika Dharma)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma)	100	100	841.56	100	1,205.00	100	1,315.00	100	1,475	100	1,495.00	100	6,331.56	Dinas Sosial
4.1.21.5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPT Pantii Sosial Anak)	Persentase Anak Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam panti	100	100	1,118.00	100	1,138.00	100	1,294.40	100	1,301.70	100	1,388.58	100	6,240.67	Dinas Sosial
4.1.21.6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0.0033	16.67	544.85	37.5	615.48	37.51	717.65	37.51	781.32	37.51	860.45	37.51	3,519.74	Dinas Sosial

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
4.1.21.7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi.	100	100	212.71	100	227.00	100	251.60	100	275.76	100	281.77	100	1,248.85	Dinas Sosial
		Cakupan layanan Pemantauan dan Pengendalian Program PKH dan penyuluhan sosial	28.6	57.15	124.54	100	250.98	100	256.11	100	266.72	100	278.39	100	1,176.74	Dinas Sosial
4.1.21.8	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinerqitas Program Kesejahteraan Sosial	66.67	66.67	250.22	73.8	275.24	76.2	285.75	78.57	314.32	80.97	339.04	80.97	1,464.55	Dinas Sosial
4.1.21.9	Program Penanaman Nilai -Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Keselakawanan	Jumlah kelembagaan yang Berperan Serta dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Keselakawanan	0	0	-	712	442.37	712	486.60	712	535.26	712	588.78	712	2,053.01	Dinas Sosial
4.1.22	Meningkatnya Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Desa Membangun	52.96%	56.06%		60.79%		64.73%		68.67%		73.89%		73.89%		Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.1.22.1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Sosial	60.08%	63.18%	688.92	67.91%	3,495.60	71.85%	3,620.60	75.79%	3,940.60	81.01%	4,120.60	81.01%	15,866.32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.1.22.2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	42.15%	45.25%	621.62	49.98%	5,096.03	53.92%	5,275.00	57.86%	5,400.00	63.08%	5,585.00	63.08%	21,977.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.1.22.3	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	18	26	847.95	33	1,450.00	40	1,470.00	47	1,370.00	54	1,150.00	54	6,287.95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
4.1.23	Meningkatnya Perumusan Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	92.5%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Kesejahteraan Rakyat
4.1.23.1	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan dalam rangka Peningkatan Kesejahteraan Sosial	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Sosial	92.50%	100.00%	469.11	100%	575.96	100%	595.00	100%	612.00	100%	617.00	100%	2,869.07	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi	92.50%	100.00%	170.40	100%	267.25	100%	231.85	100%	341.85	100%	359.35	100%	1,370.70	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	92.50%	100.00%	155.00	100%	209.00	100%	227.00	100%	232.00	100%	240.00	100%	1,063.00	Biro Kesejahteraan Rakyat
5	MEWUJUDKAN MASYARAKAT YANG TERTIB															
5.1	Meningkatkan Ketertarikan dan Ketertiban Masyarakat	Konflik Sosial	0	0		0		0		0		0		0		
5.1.1	Meningkatnya Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	97,15	97,35		97,55		97,75		97,95		98,15		98,15		Badan Kesbangpol
5.1.1.1	Program pemeliharaan ketertarikan, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan)	Jumlah pertemuan unsur umat beragama di kabupaten/kota		9		12		29		36		43		129		Badan Kesbangpol
		Persentase penanganan Konflik sosial		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Kesbangpol
		Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibentuk dan dibina		31		33		35		37		39		175		Badan Kesbangpol
5.1.1.2	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda		90%		90%		90%		90%		90%				Badan Kesbangpol
		Persentase pemahaman ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat	85%	90%		90%		90%		90%		90%				Badan Kesbangpol
		Persentase pengawasan dan pembinaan kelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM	0%	19%		19%		19%		19%		19%		19%		Badan Kesbangpol
5.1.1.3	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Organisasi yang melapor dan ber - SKT	5 ormas	13 Ormas		32 Ormas		44 Ormas		57 Ormas		70 Ormas				Badan Kesbangpol
		Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik	73%	75%		75%		75%		75%		75%		75%		Badan Kesbangpol
		Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi gamil	70%	70%		70%		70%		70%		70%		70%		Badan Kesbangpol
		Persentase kelembagaan politik yang dibina	100%	100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		100.00%		Badan Kesbangpol
5.1.2	Meningkatkan kondisi umum ketertarikan dan ketertiban masyarakat di Kalimantan Barat	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penagak Perda/Perkada		100%		100%		100%		100%		100%		100%		Satpol PP
5.1.2.1	Program Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondisi/fitas Ketertiban Umum, Ketertarikan Masyarakat di Kalbar dan Pencapaian Obiek Vital Daerah	Rata-rata kejadian pelanggaran trantibum di Kalbar	-	150 Kejadian	2,164.52	130 Kejadian	2,159.90	100 Kejadian	2,483.88	100 Kejadian	2,856.46	100 Kejadian	3,284.93	100 Kejadian	12,329.91	Satpol PP
5.1.2.2	Program Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	-	60%	1,884.43	70%	2,092.67	80%	2,405.41	90%	2,766.23	100%	3,181.17	100%	12,329.91	Satpol PP
5.1.2.3	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Trantibum/linmas	Prosentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	100%	100%	682.24	100%	903.91	100%	947.50	100%	1,181.62	100%	1,253.07	100%	4,968.34	Satpol PP
		Jumlah Stakeholder/Masyarakat yang telah mengetahui, memahami, serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Trantibum Linmas	-	80 Orang	410.74	80 Orang	472.36	80 Orang	543.21	80 Orang	624.69	80 Orang	718.40	600 Orang	2,769.40	Satpol PP
		Rasio Satlinmas per desa	-	-	615.35	25%	707.65	50%	655.10	75%	753.36	100%	1,022.37	100%	3,753.83	Satpol PP
		Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materiil dan pengobatan korban dalam penagak Perda dan Perkada sesuai ketentuan	-	100%	100.00	100%	115.00	100%	132.25	100%	152.09	100%	174.90	100%	674.24	Satpol PP

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD	Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023					
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp		
5.1.2.4	Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih	-	190 orang	1,090.00	200 orang	1,253.50	200 orang	1,441.52	200 orang	1,657.75	200 orang	1,906.42	2390 orang	7,349.19	Satpol PP	
5.1.3	Meningkatnya jumlah orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Biro Hukum	
5.1.3.1	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Bantuan Hukum dan HAM	Persentase pelayanan bantuan Hukum dan HAM yang berkualitas	100%	100%	950.00	100%	959.67	100%	959.67	100%	959.67	100%	959.67	100%	4,788.65	Biro Hukum	
5.1.4	Meningkatnya Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana	9.80%	27.84%		45.88%		63.92%		81.96%		100%		100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan	3.01%	22.40%		41.80%		61.20%		80.60%		100%		100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.1.5	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	9.80%	27.84%	1,002.39	45.88%	1,221.50	63.92%	1,282.57	81.96%	1,346.70	100%	1,414.04	100%	6,267.19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebencanaan	3.01%	22.40%	267.18	41.80%	778.50	61.20%	817.43	80.60%	858.48	100.00%	901.12	100.00%	3,622.7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.1.6	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	11 Jam	11 Jam		11 Jam		11 Jam		11 Jam		11 Jam		11 Jam		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.1.6.1	Program Kedaruratan dan Logistik dalam Kebencanaan	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	11 jam	11 jam	1,250.34	11 jam	1,819.00	11 jam	2,415.77	11 jam	2,566.40	11 jam	2,738.71	11 jam	10,790.21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran Hutan dan Lahan Provisi	52.00%	100.00%	0	100.00%	181	100.00%	211	100.00%	221.5	100.00%	232.53	100.00%	846.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.1.7	Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	100%	100%		100%		100%		100%		100%		100%		Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
5.1.7.1	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100.00%	100.00%	680	100.00%	810	100.00%	940	100.00%	1070	100.00%	1200	100.00%	4,700.0	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
6	Mewujudkan pembangunan berwawasan lingkungan																
6.1	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	n/a	66.2		66.4		66.6		66.7		66.8		66.8			
6.1.1	Meningkatkan Kualitas Air dan Udara	Indeks Kualitas Air	55.8	56.2		56.6		57		57.4		57.8		57.8		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Indeks Kualitas Udara	87.9	87.914		87.928		87.942		87.956		87.970		87.91		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
6.1.1.1	Program Penataan dan Penegakan Hukum	Persentase penyelesaian pengaduan lingkungan hidup kewenangan provinsi yang ditangani	80	80	128	82	140.8	84	154.88	86	170.37	88	187.41	88	781.46	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
6.1.1.2	Program Perencanaan dan Tata Lingkungan	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	20	40	660.49	60	726.53	70	799.19	80	879.11	90	967.02	90	4,032.34	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Persentase investasi kewenangan provinsi yang memiliki dokumen lingkungan	70	75	297.33	80	327.07	85	359.77	90	395.75	95	435.33	95	1,815.25	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
6.1.1.3	Program Peningkatan Pengelolaan Sampah dan Limbah B3	Persentase limbah b3 yang dikelola dari penghasil limbah b3 yang bekerja sama dengan pengumpul limbah b3 skala provinsi	100	100	223	100	245.3	100	269.83	100	296.81	100	326.49	100	1,361.43	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Persentase Kab/Kota yang memiliki Bank Sampah	42.85714286	50		57.14		64.29		71.43		78.57		78.57		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
6.1.1.4	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia, Pengembangan Generasi Lingkungan dan Kemitraan Antar Lembaga Lingkungan Hidup	Persentase peningkatan penghargaan lingkungan hidup tingkat provinsi	11.11	22.22	246.69	33.33	271.36	44.44	298.5	55.55	328.35	66.66	361.18	66.66	1,506.08	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
6.1.1.5	Program Pengendalian Pencemaran, Kerusakan Lingkungan dan Perubahan Iklim	Status Mutu Air	50	50.4	247.5	50.8	272.25	51.2	299.47	51.6	329.42	52	362.36	52	1,511.00	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Status Kualitas Udara	85	85.4	88.48	85.8	97.32	86.2	107.06	86.6	117.76	87	129.54	87	540.16	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Ketersediaan Taman Kehati Provinsi	0	1	57.26	1	67.26	1	77.26	1	87.26	1	97.26	1	386.30	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Persentase pemulihan kerusakan lingkungan yang ditangani	ND	ND		ND		ND		ND		ND		ND		Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
		Persentase peningkatan kampung iklim Kalbar	0.11	0.13	67.8	0.15	74.58	0.17	80.04	0.19	90.24	0.21	99.27	0.21	411.93	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman dan Lingkungan Hidup	
6.1.2	Menurunnya luas kerusakan kawasan hutan melalui rehabilitasi hutan dan lahan kritis	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)		47.09		47.15		47.22		47.28		47.34		47.34		Dinas Kehutanan	
6.1.2.1	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	256 148 Ha	254,148 Ha	27,516	252,148 Ha	30,267	250,148 Ha	33,294	248,148 Ha	36,624	246,148 Ha	40,286	246,148 Ha	167,987	Dinas Kehutanan	
		Luas pengelolaan kawasan ekosistem esensial (Ha)	0 Ha	100,000 Ha		200,000 Ha		300,000 Ha		400,000 Ha		500,000 Ha		500,000 Ha		Dinas Kehutanan	
		2.3 Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah (Ha)	1 Ha	50 Ha		70 Ha		100 Ha		140 Ha		190 Ha		551 Ha		Dinas Kehutanan	

Kode	Misi/Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan	Indikator Kinerja (tujuan/impact/outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD		
				target	Rp (Juta)	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	target	Rp	
		2.4. Peningkatan Jumlah Koleksi Keaneekaragaman Hayati (Flora & Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHURA) Pandan Puloh														Dinas Kehutanan
		- Flora (Spesies)	170 spesies	175 spesies		180 spesies		185 spesies		190 spesies		195 spesies		195 spesies		Dinas Kehutanan
		- Fauna (Spesies)	57 spesies	59 spesies		61 spesies		63 spesies		65 spesies		67 spesies		67 spesies		Dinas Kehutanan
6.1.2.2	Pengelolaan daerah Aliran sungai dan rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	1.017.945 Ha	997.945 Ha	6.882.85	977.945 Ha	7.571.14	957.945 Ha	8.328.25	937.945 Ha	9.161.07	917.945 Ha	10.077.18	917.945 Ha	42.020.49	Dinas Kehutanan
		Jumlah Produksi Bibit Tanaman hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS (batang)	2.000 batang/Tahun	50.000 batang/Tahun		50.000 batang/Tahun		50.000 batang/Tahun		50.000 batang/Tahun		50.000 batang/Tahun		250.000 batang		Dinas Kehutanan
6.1.3	Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang Meningkat	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50%	55%		60%		65%		70%		75%		75%		Dinas PUPR
6.1.3.1	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persetujuan Subtansi Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	0.0%	1 Persetujuan Subtansi	1230.00	1 Persetujuan Subtansi	2850.00	2 Persetujuan Subtansi	2600.00	1 Persetujuan Subtansi	2950.00	1 Persetujuan Subtansi	2150.00	6 Persetujuan Subtansi	11.780.00	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor Dengan RTRW Provinsi	70.0%	70%	256.61	75%	300.00	80%	300.00	85%	300.00	90%	350.00	90%	1.506.61	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian RTR Kab/Kota Dengan RTRW Provinsi	70.0%	70%	101.60	75%	300.00	80%	300.00	85%	350.00	90%	350.00	90%	1.401.60	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW Provinsi	50.0%	55%	68.70	60%	1350.00	65%	1350.00	70%	950.00	75%	950.00	75%	4.668.70	Dinas PUPR

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Dalam pelaksanaan program pembangunan daerah yang telah diuraikan pada bab sebelumnya akan menggunakan proyeksi Pendapatan Daerah sebagaimana diuraikan pada Bab III dimana telah diproyeksi Pendapatan Daerah untuk tahun 2019 sampai dengan 2023. Pada bab ini akan disampaikan hubungan antara Program Pembangunan Daerah yang telah ditetapkan dalam pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran dengan Kerangka Pendanaan yang dibutuhkan.

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung
Tahun 2018 – 2023

No	URAIAN	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN (%)
		(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	(Rp)	
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	BELANJA	5,910,665,710,092	6,119,756,618,791	6,575,283,950,789	7,022,620,850,084	7,512,392,043,883	23.23
2.1.	Belanja Tidak Langsung	3,207,732,083,065	3,409,866,440,984	3,673,746,309,007	3,903,280,938,702	4,142,695,155,544	24.77
2.1.1.	Belanja Pegawai	1,265,016,263,271	1,355,132,481,899	1,528,455,543,979	1,658,447,840,539	1,788,440,137,099	33.10
2.1.2.	Belanja Bunga						-
2.1.3.	Belanja Subsidi						-
2.1.4.	Belanja Hibah	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	1,080,518,050,000	-
2.1.5.	Belanja Bantuan Sosial	14,900,000,000	14,900,000,000	14,900,000,000	14,900,000,000	14,900,000,000	-
2.1.6.	Belanja Bagi Hasil kepada Kabupaten/Kota	818,630,876,210	907,606,089,885	997,912,895,828	,097,205,228,963	1,206,377,149,245	36.95
2.1.7.	Belanja Bantuan Keuangan Kepada Kabupaten/Kota	23,666,893,584	46,459,819,200	46,459,819,200	46,459,819,200	46,459,819,200	49.06
2.1.8.	Belanja Tidak Terduga	5,000,000,000	5,250,000,000	5,500,000,000	5,750,000,000	6,000,000,000	17.82
2.2.	Belanja Langsung	2,702,933,627,026	2,709,890,177,807	2,901,537,641,782	3,119,339,911,381	3,369,696,888,338	21.27
2.2.1.	Belanja Pegawai						-
2.2.2.	Belanja Barang dan Jasa						-
2.2.3.	Belanja Modal						-

Tabel 7.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan
Provinsi Kalimantan Barat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
	WAJIB PELAYANAN DASAR																
1	Pendidikan																
1.1	Program Pendidikan menengah, vokasi dan layanan khusus	Angka Partisipasi Kasar SMA/SMK/ Paket C	81.9	81.92	602,049.46	81.94	860,923.41	81.96	930,502.79	81.98	1,006,998.14	82	1,090,781.74	82	4,491,255.54	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Murni SMA/SMK/ Paket C	57.7	58.44		60.08		60.2		60.58		62.78		62.78		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Sekolah SMA/SMK/ Paket C	57.7	58.44		60.08		60.2		60.58		62.78		62.78		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Putus Sekolah SMA/SMK	1.05	0.5		0.45		0.42		0.4		0.38		0.38		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Prestasi siswa SMA/ SMK ditingkat nasional	21	10		10		10		10		10		10		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Kabupaten/kota yang memiliki SMA/SMK pelayanan kebutuhan khusus	100	100		100		100		100		100		100		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase pemenuhan sarana dan prasarana	91.42	93.67		93.87		94.08		94.38		94.58		94.58		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.2	Program Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pemenuhan pendidik dan tenaga kependidikan	55.4	56	27,594.83	56.05	51,217.41	56.1	51,364.17	56.15	60,316.84	56.2	65,327.75	56.2	255,821.00	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Guru (UKG)	53.8	54.03		54.11		54.25		54.35		54.55		54.55		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase guru produktif yang bersertifikat kompetensi	32.5	32.7		32.9		33.1		33.3		33.5		33.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase kepala sekolah bersertifikat keahlian	97.5	97.7		97.9		98.1		98.3		98.5		98.5		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Rata-rata Nilai Uji Kompetensi Pengawas Sekolah	55.55	55.6		55.85		56.05		56.25		56.35		56.35		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Guru bersertifikat pendidik	66.7	66.8		66.9		67		67.1		67.2		67.2		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.3	Program Peningkatan mutu dan relevansi pendidikan menengah	Rata-rata capaian Ujian Nasional SMA/SMK	44.86	45.05	2,912.46	45.15	6,641.59	45.25	7,002.25	45.35	7,408.48	45.45	7,853.83	45.45	31,818.61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Persentase Kelulusan SMA/SMK	84.86	95.71		95.73		95.75		95.76		95.82		95.82		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
1.4	Program Dukungan pelayanan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan tinggi, dan pendidikan non formal	Angka Partisipasi Kasar PAUD	61	61.05	6,074.10	61.07	6,253.48	61.08	6,878.83	61.09	7,566.71	61.11	8,323.39	61.11	35,096.51	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar SD/MI/Paket A	110.2	109.55		108.85		108.25		108.05		107.85		107.85		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar SMP/MTs/Paket B	104.8	104.5		104.2		103.8		103.4		103.1		103.1		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Angka Partisipasi Kasar Perguruan Tinggi	21	21.35		21.45		21.55		21.65		21.75		21.75		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Prestasi Siswa dan pendidik tingkat nasional	3	3		3		3		3		3		3		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
		Jumlah lembaga kursus kecakapan hidup	193	193		195		195		197		197		197		Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	
2	Kesehatan																
2.1	Program Peningkatan Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak	Persentase ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal (K4)	85.94%	87.00%	2,823.00	87.50%	1,477.00	88.00%	5,301.00	88.50%	4,702.00	89.00%	5,636.00	89.00%	19,939.00	Dinas Kesehatan	
		Cakupan pertolongan (PF) persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan	66.00%	80.00%	-	81.00%	-	82.00%	-	83.00%	-	84.00%	-	84.00%	-	Dinas Kesehatan	
		Persentase kunjungan neonatal pertama (KN1)	80.00%	88.00%	-	88.50%	-	89.00%	-	89.50%	-	90.00%	-	90.00%	-	Dinas Kesehatan	
		Persentase kunjungan balita sesuai standar	59.00%	86.00%	-	87.00%	-	88.00%	-	89.00%	-	90.00%	-	90.00%	-	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase Puskesmas melaksanakan penjangkauan kesehatan untuk peserta didik kelas 1, 7 dan 10	60.00%	65.00%	-	65.50%	-	66.00%	-	66.50%	-	67.00%	-	67.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan remaja	57.00%	62.00%	-	62.50%	-	63.00%	-	63.50%	-	64.00%	-	64.50%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK)	10.00%	10.00%	-	9.00%	-	8.00%	-	7.00%	-	6.00%	-	6.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase ibu hamil yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	87.00%	80.00%	-	85.00%	-	90.00%	-	91.00%	-	92.00%	-	92.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase bayi usia < 6 bln mndot ASI eksklusif	61.00%	63.00%	-	65.00%	-	67.00%	-	69.00%	-	71.00%	-	71.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase remaja putri yang mendapat tablet tambah darah (TTD)	32.00%	34.00%	-	36.00%	-	38.00%	-	40.00%	-	42.00%	-	42.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase balita kurus	11.00%	11.00%	-	10.00%	-	9.00%	-	8.00%	-	7.00%	-	7.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Prevalensi stunting pada Balita	33.00%	32.00%	-	32.00%	-	30.00%	-	28.00%	-	26.00%	-	26.00%	-	-	Dinas Kesehatan
2.2	Program Peningkatan Kesehatan Lingkungan dan Promosi Kesehatan	Persentase Posyandu Aktif	32.00%	32.00%	1,897.00	35.00%	1,967.00	37.00%	3,567.00	39.00%	3,822.00	40.00%	4,582.00	40.00%	15,835.00	Dinas Kesehatan	
		Persentase Kabupaten/Kota yang memiliki kebijakan publik berwawasan kesehatan dan atau mendukung PHBS	78.00%	85.00%	-	90.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Pesan/tema melalui media dalam komunikasi, Informasi dan Edukasi bidang kesehatan (tema)	25	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	75	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa yang merupakan Desa Siaga	77.00%	78.00%	-	80.00%	-	82.00%	-	84.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM	33.80%	54.80%	-	60.50%	-	65.5%	-	70.00%	-	75.00%	-	75.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Desa/Kelurahan ODF	4.50%	6.40%	-	7.30%	-	8.20%	-	9.10%	-	10.00%	-	10.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase sarana air minum yg dilakukan pengawasan	41.00%	50.00%	-	55.00%	-	59.00%	-	64.00%	-	69.00%	-	69.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase TTU yg memenuhi syarat kesehatan	54.00%	58.00%	-	62.00%	-	64.00%	-	68.00%	-	72.00%	-	72.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan yg melakukan pengelolaan limbah medis sesuai standar	26.00%	36.00%	-	40.00%	-	45.00%	-	49.00%	-	54.00%	-	54.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase TPM yg memenuhi syarat kesehatan	17.98%	26.00%	-	30.00%	-	35.00%	-	39.00%	-	44.00%	-	44.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	40.00%	60.00%	-	65.00%	-	70.00%	-	75.00%	-	80.00%	-	80.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja	35.00%	50.00%	-	60.00%	-	70.00%	-	80.00%	-	90.00%	-	90.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kesehatan kerja dasar	40.00%	60.00%	-	65.00%	837.30	70.00%	921.03	75.00%	1,013.14	80.00%	1,114.45	80.00%	3,885.93	Dinas Kesehatan	
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan kegiatan kesehatan olahraga pada kelompok masyarakat di wilayah kerja	40.00%	60.00%	-	65.00%	456.35	70.00%	501.98	75.00%	552.18	80.00%	607.40	80.00%	2,117.91	Dinas Kesehatan	
		Persentase Desa/Kelurahan yg melaksanakan STBM	33.80%	54.80%	-	60.50%	36.00	65.5%	36.00	70.00%	38.00	75.00%	38.00	75.00%	148.00	Dinas Kesehatan	
2.3	Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit	Prevalensi TB per 100.000	121	152	2,614.00	172	3,554.00	192	5,070.00	212	5,816.00	232	5,320.00	232	22,374.00	Dinas Kesehatan	

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Prevalensi penderita HIV/AIDS usia 18-24 tahun	0.12%	0.45%	-	0.40%	-	0.35%	-	0.30%	-	0.25%	-	0.25%	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah kab/kota mencapai eliminasi malaria (kab/kota)	3	4	-	5	-	6	-	7	-	8	-	8	-	Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota endemis Filaria berhasil menurunkan angka mikrofilaria menjadi < 1%	0.00%	11.00%	-	11.00%	-	33.00%	-	50.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota dengan IR DBD < 49 Per 100.000 Penduduk	58.00%	38.00%	-	44.00%	-	50.00%	-	58.00%	-	65.00%	-	65.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota yang eliminasi Rabies	8.00%	0.00%	-	8.00%	-	15.00%	-	23.00%	-	29.00%	-	29.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Kab/kota yang melaksanakan kegiatan deteksi dini Hepatitis B pada kelompok beresiko	29.00%	29.00%	-	36.00%	-	43.00%	-	50.00%	-	58.00%	-	65.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase cakupan balita dengan Pneumonia yang ditangani	16.31%	20.00%	-	23.00%	-	26.00%	-	28.00%	-	30.00%	-	30.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Baduta yang mendapat imunisasi DPT/HB/Hib dan Campak Rubella	57.30%	70.00%	-	72.00%	-	74.00%	-	76.00%	-	78.00%	-	78.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direpson oleh kab/kota	85.00%	85.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan	100.00%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	70.00%	70.00%	-	70.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase desa/kelurahan yang melaksanakan kegiatan posbindu PTM	31.29%	40.00%	-	45.00%	-	50.00%	-	55.00%	-	60.00%	-	60.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah	50.00%	57.00%	-	64.00%	-	71.00%	-	85.70%	-	100.00%	-	100.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	6.21%	10.00%	-	13.00%	-	16.00%	-	19.00%	-	22.00%	-	22.00%	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kab/kota yang 5% puskesmasnya melakukan penanganan gangguan indera dan fungsional (kab/kota)	1	4	-	7	-	9	-	12	-	14	-	14	-	Dinas Kesehatan
		% puskesmas yang melakukan deteksi dini dan rujukan kasus Katarak	10.00%	10.00%	-	20.00%	-	30.00%	-	40.00%	-	50.00%	-	50.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase kab/kota yg melakukan pemeriksaan kesehatan pengemudi di terminal Utama	14.00%	21.00%	-	28.00%	-	35.70%	-	42.00%	-	50.00%	-	50.00%	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Kab/Kota yg memiliki minimal 20% Puskesmas yg menyelenggarakan upaya kesehatan jiwa dan NAPZA (kab/kota)	5	5	-	7	-	9	-	11	-	14	-	14	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten/ Kota yang mempunyai Institusi Penerima Wajib Lapori (IPWL) pecandu Narkotika yn aktif	30.00%	27.30%	-	36.00%	-	45.50%	-	63.60%	-	63.60%	-	63.60%	-	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase penduduk/warga pada kondisi kejadian luar biasa provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Prevalensi TB per 100.000	121	152	-	172	-	192	-	212	-	232	-	232	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase sinyal kewaspadaan dini yang direspn oleh kab/kota	83.00%	100.00%	48.00	100%	48.00	100.00%	58.00	100.00%	65.00	100.00%	75.00	100.00%	294.00	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Calon Jemaah Haji mendapat pemeriksaan Kesehatan	83.00%	100.00%	-	100%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang melaksanakan pengendalian PTM terpadu	70.00%	70.00%	146.19	70%	156.92	85.00%	172.61	85.00%	189.87	85.00%	208.86	85.00%	874.46	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Kabupaten/kota yang melaksanakan kebijakan Kawasan tanpa rokok minimal 50% sekolah	50.00%	57.00%	-	64%	-	71.00%	-	85.70%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase perempuan usia 30-50 tahun yang dideteksi dini kanker serviks dan payudara	6.21%	10.00%	74.98	13%	71.24	16.00%	78.36	19.00%	86.20	22.00%	94.82	22.00%	405.60	-	Dinas Kesehatan
2.4	Program Data dan Informasi Kesehatan	Persentase tersusunnya DHA dan PHA	0.00%	21.00%	1,488.00	36%	1,365.00	50.00%	1,475.00	71.00%	1,605.00	85.00%	1,686.00	85.00%	7,619.00	-	Dinas Kesehatan
		Persentase RSUD dan Puskesmas di kabupaten/kota yang BLUD	25.30%	30.00%	-	35%	-	40.00%	-	45.00%	-	50.00%	-	50.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%	-	70%	-	80.00%	-	85.00%	-	90.00%	-	90.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang menerapkan SIP elektronik online	21.00%	50.00%	-	60%	-	70.00%	-	75.00%	-	80.00%	-	80.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase tersedianya infrastruktur Sistem Informasi Kesehatan	50.00%	60.00%	-	70%	-	75.00%	-	80.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%	-	70%	29.00	80.00%	15.00	85.00%	16.00	18.00%	18.00	90.00%	78.00	-	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%	-	70%	-	80.00%	-	85.00%	-	90.00%	-	90.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase ketersediaan data dan informasi kesehatan yang berkualitas	35.00%	60.00%	17.00	70%	49.00	80.00%	52.00	85.00%	54.00	90.00%	57.00	90.00%	229.00	-	Dinas Kesehatan
2.5	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	1,827.35	88%	2,000.00	90.00%	2,304.00	92.00%	2,416.00	94.00%	2,532.00	94.00%	11,079.35	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Instalasi Farmasi melakukan manajemen pengelolaan obat dan vaksin sesuai standar	88,73%	90.00%	-	92%	-	94.00%	-	95.00%	-	96.00%	-	96.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase puskesmas yang melaksanakan pelayanan kefarmasian sesuai standar	44.69%	50.00%	-	55%	-	60.00%	-	65.00%	-	70.00%	-	70.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Penggunaan obat rasional di puskesmas	49.60%	60.00%	-	62%	-	64.00%	-	66.00%	-	68.00%	-	68.00%	-	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	2,021.00	88%	1,505.00	90.00%	2,200.00	92.00%	2,500.00	94.00%	2,800.00	94.00%	11,026.00	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	1,827.00	88%	2,000.00	90.00%	2,304.00	92.00%	2,416.00	94.00%	2,532.00	94.00%	11,079.00	-	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan di sarana pelayanan kesehatan	80.00%	85.00%	621.00	88%	640.00	90.00%	672.00	92.00%	705.00	94.00%	741.00	94.00%	3,379.00	Dinas Kesehatan
2.6	Program Pembinaan Sarana Produksi dan Distribusi Obat dan Makanan	Persentase sarana produksi distribusi obat alkes PKRT dan makanan	79.92%	80.00%	-	82%	-	84.00%	180.00	86.00%	194.00	88.00%	208.00	88.00%	582.00	Dinas Kesehatan
2.7	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase penduduk Kalimantan Barat yang memiliki Jaminan Kesehatan	75.00%	80.00%	1,954.00	100%	3,105.00	100.00%	4,236.00	100.00%	4,838.00	100.00%	5,506.00	100.00%	19,639.00	Dinas Kesehatan
		Persentase FKTP yang memberikan pelayanan kesehatan sesuai standar	22.00%	34.00%	-	46%	-	58.00%	-	78.00%	-	82.00%	-	82.00%	-	Dinas Kesehatan
		Puskesmas yang melaksanakan pelayanan kesehatan tradisional	7.00%	11.00%	-	15%	-	19.00%	-	23.00%	-	27.00%	-	27.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase FKTP yang terakreditasi	56.00%	72.00%	-	75%	-	78.00%	-	82.00%	-	85.00%	-	85.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit yang terakreditasi	65.00%	100.00%	-	100%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Labkesda yang terakreditasi	17.00%	83.00%	-	100%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Rumah Sakit dengan ketersediaan jenis pelayanan kesehatan sesuai standar	31.00%	42.00%	-	52%	-	63.00%	-	73.00%	-	88.00%	-	88.00%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase penduduk/ warga terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi yang mendapatkan pelayanan kesehatan	100.00%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100.00%	-	100.00%	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Layanan Kesehatan Massal (kegiatan)	10	11	-	11	-	12	-	12	-	12	-	12	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Puskesmas yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan Lansia	100.00%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kesehatan
		Persentase Labkesda yang terakreditasi	0.00%	100%	516.00	100%	345.00	100%	569.00	100%	615.00	100%	516.00	100%	2,561.00	Dinas Kesehatan
		Persentase FKTP yang terakreditasi	56.00%	72%	-	75%	126.00	78%	126.00	82%	130.00	85%	130.00	85%	512.00	Dinas Kesehatan
		Persentase FKTP yang terakreditasi	56.00%	72%	-	75%	79.00	78%	150.00	82%	-	85%	-	85%	229.00	Dinas Kesehatan
2.8	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan	Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	75	77	-	80	-	82	-	85	-	88	-	88	-	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	1	1	3,099.00	1	671.00	1	3,167.00	1	2,432.00	1	246.00	1	9,615.00	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	75	77	171.54	20	299.03	21	328.93	22	361.83	23	468.01	23	1,629.34	Dinas Kesehatan
		Pemenuhan sarana dan prasarana kesehatan	75	77	410.00	80	139.00	82	147.00	85	155.00	88	163.00	88	1,014.00	Dinas Kesehatan
2.9	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase Puskesmas yang minimal memiliki 5 jenis tenaga kesehatan	35.00%	45.00%	732.00	55%	744.00	65%	1,284.00	75%	1,398.00	100%	1,527.00	100%	5,685.00	Dinas Kesehatan
		Persentase RS kab/kota yang memiliki 4 Dokter Spesialis dasar dan 3 dokter spesialis penunjang	67%	80.00%	-	100.00%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya (orang)	216	230	-	250	-	270	-	300	-	320	-	320	-	Dinas Kesehatan
		Jumlah Riset Kesehatan dan Pengembangan Kesehatan yang dilaksanakan (riset)	1	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	Dinas Kesehatan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (sertifikasi)	13	18	-	22	-	26	-	30	-	34	-	34	-		Dinas Kesehatan
		Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (orang)	268	568	-	688	-	808	-	928	-	1048	-	1048	-		Dinas Kesehatan
		Akreditasi Kelembagaan Institusi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (sertifikasi)	12	6	498.06	12	547.87	13.2	602.66	14.52	662.92	15.972	729.22	54	3,040.73		Dinas Kesehatan
		Jumlah Alumni Pengembangan Kompetensi SDM Kesehatan (orang)	60	300	1,620.90	210	1,300.00	210	1,430.00	210	1,573.00	210	1,730.00	1200	7,653.90		Dinas Kesehatan
2.10	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	0.8	35,200.00	0.85	38,720.00	0.9	42,000.00	0.95	44,600.00	>95%	46,260.00	>95%	206,780.00		RSUD Dr. Soedarso
2.11	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	85.00%	0.85	2,515.66	0.85	2,747.20	0.9	2,628.00	0.95	2,656.80	>95%	2,712.36	>95%	13,260.02		RSUD Dr. Soedarso
2.12	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	70.00%	0.7	772.88	0.73	994.18	0.76	944.45	0.8	920.12	0.85	961.85	0.85	4,593.48		RSUD Dr. Soedarso
2.13	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	Paripurna	Paripurna	121.40	Paripurna	127.03	Paripurna	132.53	Paripurna	138.03	Paripurna	143.53	Paripurna	662.52		RSUD Dr. Soedarso
		Indeks Kepuasan Masyarakat	79	79	-	80	-	85	-	90	-	95	-	95	-		RSUD Dr. Soedarso
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	70.00%	70.00%	-	74.00%	-	78.00%	-	82.00%	-	85.00%	-	85.00%	-		RSUD Dr. Soedarso
2.14	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	70.00%	70.00%	45,847.24	75.00%	126,636.40	80.00%	76,391.12	83.00%	51,308.90	>85%	61,541.00	>85%	361,724.66		RSUD Dr. Soedarso
2.15	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60.00%	60.00%	4,812.20	65.00%	4,023.58	70.00%	4,035.58	75.00%	4,049.98	>80%	4,067.26	>80%	20,988.60		RSUD Dr. Soedarso
2.16	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	80.00%	2,307.75	85.00%	2,423.14	90.00%	2,544.29	95.00%	2,671.51	95.00%	2,805.09	95.00%	12,751.78		RSJ Provinsi
2.17	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	80.00%	80.00%	14,714.54	80.00%	16,910.26	85.00%	17,755.78	90.00%	18,643.56	95.00%	19,575.74	95.00%	87,599.88		RSJ Provinsi
2.18	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	70.00%	70.00%	-	73.00%	2,150.00	76.00%	1,800.00	80.00%	1,800.00	85.00%	1,800.00	85.00%	7,550.00		RSJ Provinsi
2.19	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	n/a	Utama	389.54	Paripurna	409.01	Paripurna	429.47	Paripurna	450.94	Paripurna	473.49	Paripurna	2,152.45		RSJ Provinsi
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75	75	-	80	100.00	85	100.00	90	100.00	95	100.00	95	400.00		RSJ Provinsi
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	70.00%	70.00%	116.08	74.00%	121.88	78.00%	127.98	82.00%	134.38	85.00%	141.10	85.00%	641.42		RSJ Provinsi
2.20	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	70.00%	70.00%	9,611.81	73.00%	24,685.78	76.00%	21,147.57	79.00%	15,776.20	80.00%	15,982.51	80.00%	87,203.87		RSJ Provinsi
2.21	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	60.00%	60.00%	-	65.00%	800.00	70.00%	660.00	75.00%	693.00	80.00%	727.65	80.00%	2,880.65		RSJ Provinsi
2.22	Program Perbekalan Farmasi dan Pelayanan Kefarmasian	Persentase ketersediaan obat dan bahan medis habis pakai (BMHP) RS sesuai resep	80.00%	70.00%	1,576.40	80.00%	1,650.00	80.00%	2,005.00	85.00%	2,256.00	85.00%	2,607.00	85.00%	10,094.40		RSJD
2.23	Program Upaya Pelayanan Kesehatan	Persentase ketersediaan jenis pelayanan kesehatan di RS sesuai standar	70.00%	70.00%	4,882.77	70.00%	5,760.00	80.00%	6,585.00	80.00%	7,450.00	80.00%	8,325.00	80.00%	33,002.77		RSJD Sungai Bangkong
2.24	Program Peningkatan dan Pendayagunaan SDM Kesehatan	Persentase pemenuhan kompetensi SDM Kesehatan	50.00%	70.00%	48.51	80.00%	317.21	80.00%	208.94	85.00%	131.35	85.00%	329.46	85.00%	1,035.47		RSJD Sungai Bangkong
2.25	Program Peningkatan Mutu dan Standarisasi Pelayanan RS	Akreditasi RS	n/a	Paripurna	331.28	Paripurna	885.00	Paripurna	820.00	Paripurna	935.00	Paripurna	1,060.00	Paripurna	4,031.28		RSJD Sungai Bangkong
		Indeks Kepuasan Masyarakat	75.5 Nilai Interval Konversi	78	12.96	78	15.00	78	15.00	78	20.00	78	20.00	78	82.96		RSJD Sungai Bangkong

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase Kemandirian RS membiayai Belanja Langsung	0.00%	0	-	25.00%	700.00	50.00%	700.00	60.00%	600.00	80.00%	700.00	80.00%	2,700.00		RSJD Sungai Bangkok
2.26	Program Pengadaan, Peningkatan dan Pemeliharaan Sarana Prasarana RS	Persentase Ketersediaan Sarana dan Prasarana sesuai standar	50.00%	0.7	1,199.00	70.00%	3,643.00	75.00%	3,304.00	75.00%	3,465.00	80.00%	2,626.00	80.00%	14,237.00		RSJD Sungai Bangkok
2.27	Program Peningkatan dan Pengembangan Sistem Informasi Manajemen RS	Persentase Unit Pelayanan yang terintegrasi dengan SIM RS	0.00%	0.4	200.00	60.00%	330.00	70.00%	140.00	80.00%	200.00	85.00%	310.00	85.00%	1,180.00		RSJD Sungai Bangkok
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang																
3.1	Program Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi Dalam Kondisi Mantap	762.924225	8.698963	354,334.04	9.5737705	783,899.54	10.350354	766,790.03	11.0778255	665,950.04	11.81604025	724,700.00	11.81604025	3,295,673.65		Dinas PUPR
		Panjang Jalan yang dibangun	0	10	9,000.00	32	49,500.00	28	63,200.00	12	32,400.00	12	34,200.00	94	188,300.00		Dinas PUPR
		Jumlah Jembatan Kewenangan Provinsi yang ditangani	8944	110	16,900.00	300	68,300.00	300	72,800.00	300	75,850.00	300	78,900.00	1310	312,750.00		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ.WIL. I	270.14	135.21	10,513.70	212.9	10,489.40	149.47	9,347.70	148.73	8,522.30	147.1	10,770.10	49643.2	49,643.20		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ.WIL. II	257.61	176.59	11,000.00	89.24	4,655.70	87.52	4,874.30	87.52	6,497.00	77.38	5,281.80	32308.8	32,308.80		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ.WIL. III	273.28	126.63	11,000.00	38.6	2,316.00	17.79	1,156.30	38.6	2,686.90	38.6	2,702.00	19861.2	19,861.20		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ.WIL. IV	321.33	189.41	11,000.00	94.54	5,672.40	90.92	5,185.00	90.92	5,217.20	102.51	7,746.10	34820.7	34,820.70		Dinas PUPR
		Panjang Jalan dan Jembatan yang dipelihara secara rutin UPT PJJ.WIL. V	439.11	371.57	11,000.00	177.52	8,322.40	87.67	3,995.80	87.67	4,644.50	87.67	4,682.30	32645	32,645.00		Dinas PUPR
		Persentase Peningkatan Kondisi jalan mantap	0.0314	0.0697	354,334.04	0.057	783,899.50	0.0506	766,790.00	0.0474	665,950.00	0.0481	724,700.00	0.0481	3,295,673.54		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ.WIL. I	0.176015638	0.088099039	0.21	0.138719661	0.21	0.097390454	0.19	0.096908291	0.17	0.095846229	0.22	0.176015638	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ.WIL. II	0.167851442	0.115061085	0.34	0.058146278	0.14	0.057025574	0.15	0.057025574	0.20	0.050418635	0.16	0.167851442	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ.WIL. III	0.178061574	0.082508552	0.55	0.025150676	0.12	0.011591464	0.06	0.025150676	0.14	0.025150676	0.14	0.178061574	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ.WIL. IV	0.209369604	0.123414237	0.32	0.061599609	0.16	0.059240919	0.15	0.059240919	0.15	0.066792637	0.22	0.209369604	1.00		Dinas PUPR
		Persentase Pengembalian Kondisi jalan mantap di UPT PJJ.WIL. V	0.286111745	0.242104577	0.34	0.115667047	0.25	0.05712331	0.12	0.05712331	0.14	0.05712331	0.14	0.286111745	1.00		Dinas PUPR
3.2	Program Pengelolaan Sumber Daya Air	Luas irigasi Provinsi dalam kondisi baik (Ha)	29288.5936	30227.10534	119,540.32	31212.54267	125,517.33	32247.25187	131,793.20	33333.69653	138,382.86	34474.46342	145,302.00	34474.46342	660,535.72		Dinas PUPR
		Luas peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir (Ha)	6868123.491	7266767.799	-	2293256.909	-	2732762.259	-	3194242.876	-	3678797.524	-	3678797.524	-		Dinas PUPR
		Luas wilayah terdampak penanganan pantai kritis (Ha)	7705.977	7765.977	-	7831.977	-	7904.577	-	7984.437	-	8072.283	-	8072.283	-		Dinas PUPR
		kapasitas ketersediaan air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok	2 Ltr/detik	6 Ltr/detik	-	10 Ltr/detik	-	14 Ltr/detik	-	18 Ltr/detik	-	22 Ltr/detik	-	22 Ltr/detik	-		Dinas PUPR
3.3	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Penduduk berakses air minum	55.2	58.3	8,107.81	61.4	8,513.20	64.4	8,938.86	67.4	9,385.81	70.09	9,855.10	70.09	44,800.78		Dinas PUPR
3.4	Program Pengembangan Sistem Penyediaan Kesehatan Lingkungan	Penduduk rumah tinggal berakses sanitasi	0.4838	0.5102	14,695.52	0.5463	18,430.30	0.5813	23,201.81	0.6161	28,011.90	0.6503	33,862.50	0.6503	118,202.03		Dinas PUPR
3.5	Program Pengembangan Kawasan Permukiman Perkotaan dan Pedesaan	Panjang Infrastruktur Jalan yang dibangun di Kawasan Permukiman Pedesaan	251.977 Meter	255.123 Meter	196.50	301.879 Meter	217.65	377.176 Meter	271.94	471.665 Meter	340.07	557.779 Meter	402.16	0	1,428.33		Dinas PUPR

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.6	Program Penataan Bangunan dan Lingkungan	M2 Luasan Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun	0.14392	36392	254,018.66	34572	241,317.00	32844	229,251.00	31202	217,789.00	29642	206,889.00	164652	1,149,264.66	Dinas PUPR
3.7	Program Pembinaan Jasa Konstruksi	Peningkatan Persentase kualitas Sumber Daya manusia dan Badan Usaha Jasa Konstruksi	67,92%	67,92%	-	69,29%	-	70,65%	-	72,01%	-	73,37%	-	73,37%	-	Dinas PUPR
		Jumlah Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang Lulus Pelatihan	30	0	-	60	192.00	90	201.60	120	211.68	150	222.26	150	827.54	Dinas PUPR
3.8	Program Peningkatan Pelayanan Jasa Pengujian	Peningkatan persentase kontribusi PAD Sektor jasa pengujian	152 %	100 %	658.22	100 %	691.13	100 %	725.69	100 %	761.97	100 %	800.07	100 %	3,637.10	Dinas PUPR
3.9	Program Pelayanan Produksi Konstruksi	Persentase Produksi Konstruksi	0	52 %	231.29	70 %	242.85	79,11 %	254.99	91,11 %	267.74	100 %	281.13	100 %	1,278.00	Dinas PUPR
3.10	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persetujuan Subtansi Revisi RTRW Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi	0	1 Persetujuan Subtansi	1,230.00	1 Persetujuan Subtansi	2,850.00	2 Persetujuan Subtansi	2,600.00	1 Persetujuan Subtansi	2,950.00	1 Persetujuan Subtansi	2,150.00	6 Persetujuan Subtansi	11,780.00	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Rencana Pembangunan Sektor Dengan RTRW Provinsi	0.7	0.7	256.61	0.75	300.00	0.8	300.00	0.85	300.00	0.9	350.00	0.9	1,506.61	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian RTR Kab/Kota Dengan RTRW Provinsi	0.7	0.7	101.60	0.75	300.00	0.8	300.00	0.85	350.00	0.9	350.00	0.9	1,401.60	Dinas PUPR
		Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang Dengan RTRW Provinsi	0.5	0.55	68.70	0.6	1,350.00	0.65	1,350.00	0.7	950.00	0.75	950.00	0.75	4,668.70	Dinas PUPR
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman															
4.1	Program Peningkatan dan Penataan Prasarana Sarana dan Utilitas (PSU) Permukiman	Jumlah Ketersediaan Permukiman yang terfasilitasi dengan PSU	0	1	332.00	1	365.20	1	401.72	1	441.89	1	486.08	5	2,026.89	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.2	Program Penyediaan dan Fasilitas Rumah Layak Huni dan Relokasi	Jumlah Proposal Pengajuan Unit Rumah yang dibangun dalam Penanganan Pasca Bencana Tingkat Provinsi	0	1	180.00	1	198.00	1	217.80	1	239.58	1	263.54	1	1,098.92	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.3	Program Peningkatan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Rumah Tidak Layak huni (RTLH) yang tertangani	0	0	-	1	411.78	1	452.96	1	498.25	1	547.88	1	1,910.87	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
4.4	Program Perencanaan dan Pembinaan Bidang Perumahan	Persentase Perencanaan Pembinaan Bidang Perumahan dan Permukiman	0	14.29	229.00	21.41	251.90	21.41	277.09	21.41	304.80	21.41	335.28	100	1,398.07	Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat															
5.1	Program Penciptaan, Pemeliharaan serta Pengendalian Kondusifitas Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat di Kalbar dan Pengamanan Objek Vital Daerah	Rata-rata kejadian pelanggaran tranribum di Kalbar	-	150 Kejadian	2,164.52	130 Kejadian	2,159.90	100 Kejadian	2,483.88	100 Kejadian	2,856.46	100 Kejadian	3,284.93	100 Kejadian	-	Satpol PP
5.2	Program Penegakan PERDA dan PERKADA Provinsi di Kalimantan Barat	Persentase Penanganan Pelanggaran Perda/Perkada	-	0.6	1,884.43	0.7	2,092.67	0.8	2,405.41	0.9	2,766.23	1	3,181.17	1	12,329.91	Satpol PP
5.3	Program Peningkatan Perlindungan Masyarakat, Deteksi Dini dan Pembinaan dalam Penyelenggaraan Tranribummas	Persentase rekomendasi pencegahan kewaspadaan dini	1	1	682.24	1	903.91	1	947.50	1	1,181.62	1	1,253.07	1	4,968.34	Satpol PP
		Jumlah Stakeholder/Masyarakat yang telah mengetahui, memahami, serta mampu berperan aktif dalam penyelenggaraan Tranribummas	-	80 Orang	410.74	80 Orang	472.36	80 Orang	543.21	80 Orang	624.69	80 Orang	718.40	600 Orang	2,769.40	Satpol PP
		Rasio Satlinmas per desa	-	-	615.35	0.25	707.65	0.5	655.10	0.75	753.36	1	1,022.37	1	3,753.83	Satpol PP

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase tanggap darurat bencana serta pelayanan kerugian materiil dan pengobatan korban dalam penegakkan Perda dan Perkada sesuai ketentuan	-	1	100.00	1	115.00	1	132.25	1	152.09	1	174.90	1	674.24	Satpol PP
5.4	Program Peningkatan Kompetensi Teknis Anggota Satpol PP Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Aparatur Satpol PP yang terdidik dan terlatih	-	190 orang	1,090.00	200 orang	1,253.50	200 orang	1,441.52	200 orang	1,657.75	200 orang	1,906.42	2390 orang	7,349.19	Satpol PP
5.5	Program Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Meningkatnya Penanganan dan Upaya Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam Rangka Pengurangan Resiko Bencana	0.098	0.2784	1,002.39	0.4588	1,221.50	0.6392	1,282.57	0.8196	1,346.70	1	1,414.04	1	6,267.19	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Meningkatnya Pengetahuan, Keterampilan dan Kesadaran Masyarakat terhadap Kebencanaan	0.0301	0.224	267.18	0.418	778.50	0.612	817.43	0.806	858.48	1	901.12	1	3,622.71	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.6	Program Kedaruratan dan Logistik dalam Kebencanaan	Meningkatnya Penanganan Kedaruratan dan Pendistribusian Logistik pada Daerah Terkena Bencana	11 jam	11 jam	1,250.34	11 jam	1,819.00	11 jam	2,415.77	11 jam	2,566.40	11 jam	2,738.71	11 jam	10,790.21	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
		Cakupan pelayanan bencana kebakaran Hutan dan Lahan Provinsi	52.00%	100.00%	-	100%	181.00	100%	211.00	100%	221.50	100%	232.53	100%	846.03	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.7	Program Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	Meningkatnya Penangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana	100%	100%	680.00	100%	810.00	100%	940.00	100%	1,070.00	100%	1,200.00	100%	4,700.00	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
5.8	Program pemeliharaan ketentraman, pencegahan tindak kriminal dan AGHT (Ancaman, Gangguan, Hambatan, Tantangan)	Jumlah pertemuan unsur umat beragama dikabupaten/kota	0	9	-	12	-	29	-	36	-	43	-	129	-	Badan Kesbangpol
		Persentase penanganan Konflik sosial	0	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Kesbangpol
		Jumlah kelompok sasaran kewaspadaan dini yang dibantu dan dibina	0	31	-	33	-	35	-	37	-	39	-	175	-	Badan Kesbangpol
5.9	Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan	Persentase tingkat pemahaman wawasan kebangsaan para pemuda	0%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	0%	-	Badan Kesbangpol
		Persentase pemahaman ketahanan ekonomi dan sosial budaya masyarakat	85%	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	90%	-	0%	-	Badan Kesbangpol
		Persentase pengawasan dan pembinaan kelompok sasaran OKP, ORMAS dan LSM	0%	19%	-	19%	-	19%	-	19%	-	19%	-	19%	-	Badan Kesbangpol
		Jumlah Organisasi yang melapor dan ber-SKT	5 ormas	13 Ormas	-	32 Ormas	-	44 Ormas	-	57 Ormas	-	70 Ormas	-	0	-	Badan Kesbangpol
5.10	Program Pendidikan Politik Masyarakat	Persentase generasi muda dan organisasi masyarakat yang memahami budaya dan etika politik	73%	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	75%	-	Badan Kesbangpol
		Persentase pemuda/masyarakat dalam partisipasi pemilu	70%	70%	-	70%	-	70%	-	70%	-	70%	-	70%	-	Badan Kesbangpol
		Persentase kelembagaan politik yang dibina	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Badan Kesbangpol
6	Sosial															
6.1	Program Pemberdayaan Sosial	Cakupan Layanan Pemberdayaan Sosial	12.77	13.2	543.06	2.5	257.32	2.67	299.52	2.78	318.04	3.04	366.73	3.04	1,784.67	Dinas Sosial
6.2	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (Dinsos)	Cakupan pelayanan dan rehabilitasi sosial	0.98	1.4	545.36	9.02	2,965.65	9.11	3,272.25	9.21	3,551.21	9.3	3,897.18	9.3	14,231.65	Dinas Sosial
6.3	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mulia Dharma)	Persentase Lanjut Usia Terlantar yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di dalam rantai	100	100	773.56	100	1,029.12	100	1,161.94	100	1,289.49	100	1,418.94	100	5,673.04	Dinas Sosial

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.4	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPT PSRLU Mustika Dharma)	Persentase Lanjut Usia Terfantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam panti (UPT PSRLU Mustika Dharma)	100	100	841.56	100	1.205.00	100	1.315.00	100	1.475.00	100	1.495.00	100	6.331.56	Dinas Sosial
6.5	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial (UPT Panti Sosial Anak)	Persentase Anak Terfantar yang terpenuhi kebutuhannya di dalam panti	100	100	1.118.00	100	1.138.00	100	1.294.40	100	1.301.70	100	1.388.58	100	6.240.67	Dinas Sosial
6.6	Program Pemberdayaan Fakir Miskin	Cakupan Layanan Pemberdayaan Fakir Miskin	0.0033	16.67	544.85	37.5	615.48	37.51	717.65	37.51	781.32	37.51	860.45	37.51	3.519.74	Dinas Sosial
6.7	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	Persentase Layanan Perlindungan dan Jaminan Sosial Pada Saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana daerah Provinsi	100	100	212.71	100	227.00	100	251.60	100	275.76	100	281.77	100	1.248.85	Dinas Sosial
		Cakupan layanan Pemantauan dan Pengendalian Program PKH dan penyuluhan sosial	28.6	57.15	124.54	100	250.98	100	256.11	100	266.72	100	278.39	100	1.176.74	Dinas Sosial
6.8	Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pembangunan Kesejahteraan Sosial	Persentase Kabupaten /Kota yang Terkoordinir dalam Sinergitas Program Kesejahteraan Sosial	66.67	66.67	250.22	73.8	275.24	76.2	285.75	78.57	314.32	80.97	339.04	80.97	1.464.56	Dinas Sosial
6.9	Program Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	Jumlah kelembagaan yang Berperan Serta dalam Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan, dan Kesetiakawanan	0	0	-	712	442.37	712	486.60	712	535.26	712	588.78	712	2.053.01	Dinas Sosial
LAYANAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR																
1	Tenaga Kerja															
1.1	Program Penempatan dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang bekerja di sektor formal dan informal	2200 orang	2200 orang	3.617.35	3000 orang	4.552.91	4000 orang	8.886.32	4500 orang	10.578.59	5000 orang	11.982.09	5000 orang	39.617.26	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
1.2	Program Pemberdayaan dan Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase Penyelesaian Kasus Hubungan Industrial	0.6	0.6	2.622.41	0.7	5.160.52	0.8	7.341.21	0.9	8.006.63	0.95	9.023.06	0.95	32.153.84	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak															
2.1	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase Perangkat daerah yang melaksanakan PPRG	65	65	60.00	75	475.00	85	505.00	90	535.00	100	595.00	100	2.170.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	10	10	285.00	20	1.058.00	25	955.00	30	1.220.00	35	1.075.00	35	4.593.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase jumlah keluarga yang mendapatkan pelayanan pembangunan ketahanan keluarga	45	45	262.00	65	355.00	75	220.00	85	130.00	100	140.00	100	1.107.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.2	Program Data dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data gender	65	65	270.00	75	565.00	85	665.00	95	785.00	100	855.00	100	3.140.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.3	Program Peningkatan Kualitas Hidup Perempuan	Persentase perempuan dalam organisasi kemasyarakatan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor politik, ekonomi dan hukum	-	-	-	20	200.00	25	-	30	200.00	35	-	35	400.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase Perempuan yang mendapatkan peningkatan kapasitas pada sektor ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial dan budaya	10	10	265.00	20	310.00	25	456.00	30	388.00	35	428.00	35	1,847.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.4	Program Peningkatan Perlindungan Hak Perempuan	Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan yang memiliki kapasitas SDM dan Sarana Prasarana pendukung sesuai dengan standar, termasuk KIE	100	100	1,258.00	100	1,695.00	100	2,170.00	100	2,593.00	100	2,487.00	100	10,203.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.5	Program Data dan Partisipasi Masyarakat	Persentase Perangkat Daerah yang memiliki data anak	65	65	316.00	75	565.00	85	665.00	95	785.00	100	855.00	100	3,186.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga masyarakat dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	25	25	430.00	33.33	600.00	41.67	640.00	50	675.00	58.33	710.00	58.33	3,055.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
2.6	Program Pemenuhan Hak dan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	Persentase kelembagaan pelayanan pemenuhan hak anak sesuai standar (Forum Anak Kab/Kota)	100	100	75.00	100	85.00	100	95.00	100	105.00	100	115.00	100	475.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase ketersediaan kebijakan afirmatif peningkatan pemenuhan hak anak	15	15	250.00	25	260.00	35	270.00	45	280.00	55	290.00	55	1,350.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase perangkat daerah yang melaksanakan anggaran responsif anak	11.8	11.8	510.00	17.65	538.00	23.53	566.00	23.53	594.00	29.41	622.00	29.41	2,830.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memperoleh layanan sesuai standar	78	78	660.00	78	720.00	78	790.00	78	862.00	78	935.00	78	3,967.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase kasus anak berhadapan dengan hukum (ABH) yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif (restorative justice)	75	75	120.00	80	126.00	80	132.00	85	138.00	85	144.00	85	660.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
		Persentase lembaga penyedia layanan perlindungan anak yang memiliki sarana pendukung sesuai dengan standar	50	50	1,651.00	55	1,877.00	55	1,986.00	60	1,967.00	60	2,227.00	60	9,708.00	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3	Pangan															
3.1	Program Peningkatan Ketahanan Pangan	Konsumsi energi Kkal/Kap/Hari	1833	1857	5,709.11	1895.83	5,497.93	1916.66	5,532.79	1937.5	5,572.65	1958.33	5,589.86	1958.33	27,902.34	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Konsumsi Protein prot/kap/hari	55.6	56.07	-	56.3	-	56.53	-	56.77	-	57	-	57	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Konsumsi beras penduduk	84.1	83.08333333	-	82.23611111	-	81.53009259	-	80.94174383	-	78	-	78	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persen tingkat keamanan pangan segar asal tumbuhan	78.7	80	-	82	-	84	-	86	-	90	-	90	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.1	Program penataan administrasi kependudukan	Persentase kepemilikan KTP-el	0.698	0.84	150.66	1	845.04	1	929.54	1	1,022.50	1	1,124.75	1	4,072.49	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Kartu Identitas Anak (KIA)	0.02	0.18	-	0.5	462.35	0.6	508.59	0.75	559.44	0.8	615.39	0.85	2,145.77	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Akta Kelahiran 0-18 tahun	0.8202	0.8562	130.99	0.8921	-	0.9281	269.49	0.964	296.44	1	326.09	1	1,023.01	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Akta Perkawinan, Perceraian dan Kematian	0.2	0.25	70.92	0.3	652.80	0.35	518.08	0.4	569.89	0.45	626.88	0.5	2,438.56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kepemilikan Akta Pengakuan dan Pengesahan Anak	0.1	0.15	225.63	0.2	220.96	0.25	243.06	0.3	267.36	0.35	294.10	0.4	1,251.11	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase capaian data kependudukan yang akurat dan valid	0.8	0.83	545.28	0.9	1,017.17	1	1,118.89	1	1,230.78	1	1,353.85	1	5,265.97	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase kerjasama pemanfaatan data dan dokumen kependudukan-an Provinsi Kalimantan Barat	0.0909	0.3	576.92	0.5	782.80	0.7	861.08	0.85	947.19	0.95	1,041.91	1	4,209.89	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase penyelenggaraan penataan administrasi kependudukan melalui DAK Non Fisik	0	1	1,740.48	0.995	1,920.43	1	2,042.98	1	2,247.28	1	2,472.01	1	10,423.17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa															
7.1	Program Pengelolaan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Cepat Berkembang	34	100	1,118.25	175	2,555.39	250	2,565.39	325	2,475.39	426	2,475.39	426	11,189.81	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.2	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Sosial	0.6008	0.6318	688.92	0.6791	3,495.60	0.7185	3,620.60	0.7579	3,940.60	0.8101	4,120.60	0.8101	15,866.32	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.3	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa	Persentase Indeks Ketahanan Ekonomi	0.4215	0.4525	621.62	0.4998	5,096.03	0.5392	5,275.00	0.5786	5,400.00	0.6308	5,585.00	0.6308	21,977.64	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
7.4	Program Pembangunan Kawasan Perdesaan	Jumlah Kawasan Perdesaan yang dibina	18	26	847.95	33	1,450.00	40	1,470.00	47	1,370.00	54	1,150.00	54	6,287.95	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana															
8.1	Program Fasilitasi Pembinaan Keluarga Berencana, Keluarga Sejahtera dan Pengendalian Penduduk	Persentase perangkat daerah dan mitra kerjaiswasta yang berperan aktif dalam pembinaan keluarga berencana	0.1	0.15	42.75	0.2	118.27	0.25	130.10	0.3	143.11	0.35	157.42	0.45	591.64	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
		Persentase pemberdayaan dan peningkatan peran serta ormas dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	0	0.15	43.00	0.2	43.00	0.25	47.30	0.3	52.03	0.35	57.23	0.45	242.56	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase sinkronisasi kebijakan pemerintah provinsi dan kab/kota dengan pemerintah pusat dibidang penanggulangan penduduk	0	0.15	107.15	0.5	121.53	0.75	133.68	0.8	147.05	0.9	161.76	0.9	671.17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
9	Perhubungan															
9.1	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Darat	Load Faktor (Lf)	0.5685	0.592	267.50	0.6161	290.00	0.642	315.00	0.668	340.00	70	365.00	73.2	1,577.50	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan Armada (N)	0.7846	0.8042	53.00	0.8243	2,060.00	0.8449	2,065.00	0.8661	2,070.00	0.8877	2,075.00	0.9098	8,323.00	Dinas Perhubungan
9.2	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan Laut dan SDP	Load Faktor (Lf)	0.7	41	4,458.00	46	6,519.00	51	6,530.00	56	6,542.00	61	6,556.00	66	30,605.00	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan Armada (N)	0.3	60	39.00	66	907.00	72	2,758.00	78	57.00	84	62.00	90	3,823.00	Dinas Perhubungan
9.3	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Darat	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan Jalan	0.9946	0.48	2,100.00	0.5	10,200.00	0.55	9,200.00	0.6	10,700.00	0.65	12,200.00	0.7	44,400.00	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan Terminal Tipe B	0.2857	0.3	550.00	0.315	4,200.00	0.3308	5,800.00	0.3473	5,800.00	0.3647	2,000.00	0.3829	18,350.00	Dinas Perhubungan
9.4	Program Prasarana dan Fasilitas Perhubungan Laut dan SDP	Persentase Ketersediaan Fasilitas Perengkapan SDP	0.64	9	302,041.50	10	426,199.50	11	177,450.00	12	572,100.00	13	319,400.00	14	1,797,191.00	Dinas Perhubungan
		Ketersediaan Prasarana SDP	0.64	9	68,286.50	10	23,577.55	11	6,159.00	12	880.60	13	307.50	14	99,211.15	Dinas Perhubungan
9.5	Program Pengembangan Sistem Transportasi	Ketersediaan Dokumen Perencanaan Bidang Transportasi	0.9763	0.56	3,691.50	0.61	3,235.00	0.56	3,341.50	0.35	1,441.50	0.3	1,133.20	0.3	12,842.70	Dinas Perhubungan
9.6	Program Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Perhubungan	0.8689	88.88	5,413.69	94.44	6,258.76	97.22	7,275.20	91.66	5,789.30	91.66	7,554.45	88.88	32,291.40	Dinas Perhubungan
10	Komunikasi dan Informatika															
10.1	Program Layanan Informasi Publik	Persentase PPID Pembantu (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu) seluruh OPD dengan Kategori Informatif / Zona Hijau / Nilai 80-100	0.22	0.6	336.99	0.7	180.00	0.8	449.00	0.9	898.00	1	578.00	1	2,441.99	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Rekomendasi Kebijakan terkait isu / informasi yang berkembang di masyarakat	1 rekomendasi kebijakan	3 rekomendasi kebijakan	756.79	4 rekomendasi kebijakan	750.00	6 rekomendasi kebijakan	902.00	8 rekomendasi kebijakan	1,005.00	10 rekomendasi kebijakan	1,017.00	31 rekomendasi kebijakan	4,430.79	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Persentase aduan dan informasi dari masyarakat yang ditindaklanjuti	-	0.3	-	0.5	70.00	0.6	77.00	0.75	85.00	0.9	94.00	0.9	326.00	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.2	Program Layanan Komunikasi Publik	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM)	-	21 KIM	456.77	38 KIM	580.00	38 KIM	690.00	38 KIM	760.00	39 KIM	830.00	174 KIM tiap Kecamatan	3,316.77	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah lembaga media lokal yang dibina	7 Media Lokal	5 Media Lokal	232.69	5 Media Lokal	420.00	5 Media Lokal	450.00	5 Media Lokal	480.00	10 Media Lokal	520.00	30 Media Lokal	2,102.69	Dinas Komunikasi dan Informatika
10.3	Program Pengembangan Teknologi Informatika	Persentase sistem informasi yang terstandarisasi SPBE (Sistem Informasi Berbasis Elektronik)	-	0.6	3,767.18	0.7	7,920.00	0.8	6,905.00	0.9	7,070.00	1	7,076.00	1	32,738.18	Dinas Komunikasi dan Informatika
		Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas sinyal telepon selular, internet kantor desa dan akses internet warga desa menuju desa mandiri	-	79 Desa	1,162.08	87 Desa	2,790.00	87 Desa	3,540.00	86 Desa	3,679.00	86 Desa	3,865.00	425 Desa	15,036.08	Dinas Komunikasi dan Informatika
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah															
11.1	Program Peningkatan Kualitas Koperasi	Prosentase Partisipasi Koperasi Aktif	0.6017	0.62	653.52	0.64	1,000.00	0.66	1,810.70	0.68	1,993.05	0.7	2,193.40	0.7	7,650.67	Dinas Koperasi dan UKM
		Prosentase Kepatuhan Koperasi	0.21	0.23	730.94	0.25	1,019.03	0.27	1,098.73	0.29	1,182.01	0.31	1,263.31	0.31	5,294.02	Dinas Koperasi dan UKM
		Prosentase Kualitas Usaha Koperasi	7,6 T	0.01	792.65	0.02	1,000.00	0.03	1,386.33	0.04	1,537.26	0.05	1,682.48	0.05	6,398.72	Dinas Koperasi dan UKM
		Prosentase Peserta Pelatihan Koperasi yang Meningkatkan Pemahamannya	885 Peserta	0.8939	56.76	0.9296	688.70	0.9481	727.97	0.9671	742.53	0.9864	757.38	0.9864	2,973.34	Dinas Koperasi dan UKM

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
11.2	Program Pemberdayaan dan Pengembangan UMKM	Prosentase pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang dibina	0.6017	0.62	825.78	0.64	1.300.00	0.66	1.427.05	0.68	1.567.65	0.7	1.706.62	0.7	6.827.10	Dinas Koperasi dan UKM
		Prosentase Peserta Pelatihan Usaha Mikro dan Kecil yang Meningkatkan Pemahamannya	705 Peserta	0.8888	336.51	0.9065	945.90	0.9246	1.008.68	0.943	1.028.85	0.962	1.156.20	0.962	4.476.14	Dinas Koperasi dan UKM
12	Penanaman Modal															
12.1	Program Pengelolaan Investasi	Data Potensi Investasi	1 Dokumen	1 Dokumen	1,544.45	1 Dokumen	1,777.80	1 Dokumen	1,862.75	1 Dokumen	2,016.40	1 Dokumen	2,448.43	5 Dokumen	9,649.83	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Kebijakan yang mendukung investasi	2 Kebijakan	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	3 Kebijakan	-	15 Kebijakan	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Promosi Investasi yang dilaksanakan	5 Kali	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	4 Kali	-	20 Kali	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Fasilitas kerjasama	1 kali	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	1 kali	-	5 Kali	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah perusahaan yang dipantau dan dibina	0	13 Perusahaan	-	13 Perusahaan	-	13 Perusahaan	-	14 Perusahaan	-	14 Perusahaan	-	67 Perusahaan	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah laporan LKPM	1248 LKPM	1.137 LKPM	-	1.251 LKPM	-	1.376 LKPM	-	1.514 LKPM	-	1.665 LKPM	-	6.943 LKPM	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
12.2	Program Pelayanan Perizinan	Mutu Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan	A	B	1,084.77	B	1,288.00	A	1,353.00	A	1,423.00	A	1,608.00	A	6,756.77	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
		Jumlah Izin dan Non izin yang diterbitkan	1.424 Izin dan Non Izin	1.000 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	1.350 Izin dan Non Izin	-	6.400 Izin dan Non Izin	-	Dinas Penanaman Modal dan PTSP
13	Keperguruan dan Olah Raga															
13.1	Program Pengembangan dan Pembinaan Olahraga	Persentase Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan olahraga rekreasi dan tradisional	0.7142	0.7857	470.96	0.8571	518.05	0.8571	569.86	0.9285	626.84	0.9285	689.53	1	2,875.24	Dinas Keperguruan, Olahraga dan Pariwisata
		Prestasi olahraga pelajar yang diperoleh (medali)	11	11	2,105.44	12	2,496.99	11	2,840.98	13	2,930.53	11	3,318.74	(11 POPNAS) / 13 (POPWIL)	13,692.68	Dinas Keperguruan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase peningkatan sarana dan prasarana olahraga	0	0.02	5,591.69	0.02	1,435.48	0.02	1,481.02	0.02	1,528.06	0.02	1,433.00	0.1	11,469.25	Dinas Keperguruan, Olahraga dan Pariwisata
13.2	Program Keperguruan dan Pramuka	Jumlah Pemuda dan Pramuka yang dibina	284748	285745	3,859.61	286745	6,192.58	287748	6,602.74	288755	7,047.66	289755	7,530.17	289755	31,232.76	Dinas Keperguruan, Olahraga dan Pariwisata
14	Statistik															
14.1	Program Pengelolaan Statistik Sektoral Kalimantan Barat	Persentase OPD yang data statistik sektoralnya terintegrasi dalam KALBAR SATU DATA	-	70.00%	887.13	80.00%	730.00	90.00%	760.00	100%	808.00	100%	825.70	100%	4,010.83	Dinas Komunikasi dan Informatika
15	Persandian															
15.1	Program Peningkatan Layanan Persandian	Persentase OPD yang memanfaatkan / menerapkan layanan persandian	15.00%	30.00%	993.19	50.00%	470.00	70.00%	691.00	80.00%	658.00	90.00%	725.00	90.00%	3,537.19	Dinas Komunikasi dan Informatika
16	Kebudayaan															
16.1	Program Pelestarian kebudayaan, adat istiadat dan cagar budaya	Cagar Budaya dan Warisan Budaya Tak Benda yang ditetapkan	7	2	1,439.28	2	2,873.21	2	2,981.53	2	3,155.69	2	3,397.25	17	13,846.96	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Cagar Budaya yang direvitalisasi	1	0	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Dokumentasi Budaya	3	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	13	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
16.2	Program Pengembangan budaya dan seni daerah	Pagelaran/Festival Seni Budaya yang dilaksanakan	3	3	1,539.15	3	8,543.07	3	8,662.37	3	8,848.61	3	9,103.47	18	36,696.67	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Karya Seni baru yang diinventarisir	10	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	60	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Prestasi Kesenian di tingkat nasional dan ditingkat internasional	2	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	12	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
		Pameran CB dan WBTB yang diikuti di tingkat daerah dan nasional	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	5	-	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
16.3	Program Pembinaan Tenaga Kebudayaan	Tenaga Kebudayaan yang bersertifikat	32	3	201.57	3	451.73	3	473.90	3	498.29	3	525.12	47	2,150.61	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
17	Perpustakaan															
17.1	Program Pengembangan, Pembinaan dan Pelayanan Perpustakaan	Jumlah Pustakawan dan Tenaga Teknis Perpustakaan yang dibina	65 Orang	65 Orang	144.10	65 Orang	472.87	65 Orang	462.00	65 Orang	592.70	65 Orang	454.27	325 Orang	2,125.94	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Pengunjung Perpustakaan	87.906 Orang	96.696 Orang	524.20	106.365 Orang	769.81	117.000 Orang	1,092.37	128.700 Orang	753.69	141.570 Orang	1,084.40	141.570 Orang	4,224.47	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Kegiatan Pengembangan Minat Baca	15 Kali	15 Kali	376.97	15 Kali	293.30	15 Kali	691.37	15 Kali	523.50	15 Kali	848.50	15 Kali	2,733.64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Koleksi Buku Perpustakaan	37.098 Judul	500 Judul	451.95	500 Judul	474.55	500 Judul	498.28	500 Judul	523.19	500 Judul	549.35	2500 Judul	2,497.32	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
17.2	Program Pelestarian Karya Cetak dan Karya Rekam Koleksi Daerah	Jumlah Koleksi Daerah yang Dilestarikan	5.192 Judul	300 Judul	207.23	300 Judul	216.50	300 Judul	200.00	300 Judul	200.00	300 Judul	300.00	1500 Judul	1,123.73	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18	Kearsipan															
18.1	Program Penyelamatan dan Pelestarian Arsip Daerah	Jumlah Arsip yang dikelola, dirawat dan dilestarikan	28.176 Item	28.376 Item	269.87	28.576 Item	1.265.00	28.776 Item	1,265.00	28.978 Item	1,265.00	29.176 Item	1,265.00	29.176 Item	5,329.87	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
18.2	Program Peningkatan Kualitas Sistem Informasi dan Pelayanan Kearsipan	Peningkatan SDM Pengelola Kearsipan	6 Orang	6 Orang	200.93	6 Orang	808.23	6 Orang	470.68	6 Orang	590.38	6 Orang	625.42	30 Orang	2,695.64	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Perangkat Daerah yang mengelola Arsip secara baku	3 LKD	1 LKD	445.01	2 LKD	467.26	2 LKD	490.62	2 LKD	515.16	2 LKD	540.91	12 LKD	2,458.96	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
		Jumlah Pengguna Layanan Jasa Kearsipan	600 orang	650 orang	79.66	700 orang	300.00	700 orang	300.00	700 orang	305.00	700 orang	310.00	3.450 orang	1,294.66	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
	LAYANAN URUSAN PILIHAN															
1	Pariwisata															
1.1	Program Peningkatan Pertumbuhan Usaha Pemberdayaan Masyarakat Pariwisata	Persentase Jumlah Usaha yang dibina	86.49	89.19	1,171.76	91.89	2,549.21	94.59	3,157.52	97.3	3,748.72	100	1,791.74	100	12,418.95	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase Kelompok Sadar Wisata yang dibina	65.85%	72.68%	-	79.50%	-	86.34%	-	93.17%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase Saka Pariwisata yang dibina	21.42%	35.71%	-	50.00%	-	64.28%	-	78.57%	-	100%	-	100%	-	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.2	Program Pengembangan dan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Wisatawan Nusanantara dan Mancanegara	3160895	3573000	1,703.79	4078000	2,111.62	4583000	2,141.62	5008800	2,801.62	5593000	2,806.62	5593000	11,565.27	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
		Persentase Jumlah Destinasi Wisata Unggulan	12.59	13.49	955.43	14.39	844.84	15.29	383.89	16.19	885.20	17.09	1,371.36	17.09	4,440.72	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
1.3	Program Ekonomi Kreatif	Jumlah Pelaku Ekonomi Kreatif yang dibina	0	74	760.65	102	865.08	130	997.29	158	1,168.62	186	1,366.35	186	5,157.99	Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata
2	Pertanian															
2.1	Program Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit temak/Hewan	Persentase cakupan vaksinasi rabies	29	25	2,664.96	30	3,037.33	35	3,124.72	40	3,294.93	50	3,469.94	50	15,591.88	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase hewan/temak yang terbebas hogcholera	90	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	90	-	Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Persentase penanganan parasiter pada ternak	0.27	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Persentase Penanganan Gangguan Reproduksi Ternak	1.6	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-	5	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Farm Pengunggasan Kompartemen Avian Influenza	2	2	-	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah ternak yang dilayani pada Klinik Hewan	1000	1200	-	1200	-	1300	-	1350	-	1400	-	6250	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah sampel produk ternak yang diujikan pada Lab. Keswan dan Kesmavet	2150	2350	-	2350	-	2450	-	2550	-	2650	-	2650	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.2	Program Peningkatan Produksi dan Produktivitas Peternakan	Jumlah Populasi Ternak Sapi Potong (Ekor)	112654	142768	7,280.28	148050.416	10,002.97	153528.2814	10,935.97	159208.8278	12,158.17	165099.5544	13,514.37	196796	53,891.76		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Kambing (Ekor)	161514	163950	-	165590	-	167246	-	168918	-	170607	-	170607	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Babi(Ekor)	544058	550208	-	555710	-	561267	-	566879	-	572548	-	572548	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Buras(Ekor)	6139850	6210821	-	6272929	-	6335659	-	6399015	-	6463006	-	6463006	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Petelur (Ekor)	2376995	2389691	-	2413588	-	2437724	-	2462101	-	2486722	-	2486722	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Ayam Ras Pedaging (Ekor)	56570468	57193051	-	57764981	-	58342631	-	58926057	-	59515318	-	59515318	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Populasi Ternak Itik (Ekor)	605571	586880	-	592748	-	598676	-	604663	-	610709	-	610709	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Bibit kambing yang diproduksi (ekor)	25	35	-	65	-	80	-	100	-	120	-	400	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Bibit itik yang diproduksi (ekor)	17333	12615	-	22000	-	24000	-	25000	-	26000	-	109615	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Bibit Babi yang diproduksi (ekor)	320	350	-	400	-	500	-	600	-	700	-	2550	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah Hijauan Pakan Ternak (HPT) yang diproduksi	20000	71000	-	73000	-	73000	-	73000	-	73000	-	363000	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
		Jumlah sampel pakan yang diuji	131	50	-	70	-	100	-	125	-	150	-	495	-		Dinas Pangan, Peternakan dan Kesehatan Hewan
2.3	Program Peningkatan Produksi Perkebunan	Jumlah Produksi Perkebunan Rakyat	1272006	1314303	15,821.29	1358151	17,330.12	1403608	18,989.94	1450736	20,815.74	1499600	22,824.01	1499600	95,781.09		Dinas Perkebunan
		Jumlah Produksi Perkebunan Besar	2043680	2125411	-	2210411	-	2298810	-	2390745	-	2486357	-	2486357	-		Dinas Perkebunan
		Jumlah Luas Areal Perkebunan Rakyat	1273359	1307924	-	1343589	-	1380391	-	1418371	-	1457572	-	1457572	-		Dinas Perkebunan
		Jumlah Benih Tanaman Perkebunan yang diawasi dan tersertifikasi	800000	850000	-	900000	-	950000	-	1000000	-	1050000	-	1050000	-		Dinas Perkebunan
2.4	Program Peningkatan Kesejahteraan Pekebun	Indeks harga yang diterima petani	123.13	123.15	2,244.58	123.17	2,469.04	123.19	2,715.95	123.21	2,987.54	123.23	3,286.30	123.23	13,703.41		Dinas Perkebunan
2.5	Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Tanaman Pangan	Persentase kenaikan produktivitas padi sawah	(-5.74)	0.129198966	7,677.29	0.129198966	7,830.83	0.129198966	7,987.45	0.129198966	8,147.20	0.129198966	8,310.14	0.65	39,952.90		Dinas Pertanian, TPH

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
		Persentase kenaikan produktivitas jagung	(-5,42)	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	2.53	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase kenaikan Produktivitas kedelai	(-1,99)	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	0.5	-	2.53	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase Kenaikan produksi tanaman palawia lainnya	(-0,48)	2	-	2	-	2	-	2	-	2	-	10.41	-	Dinas Pertanian, TPH
		Luas Lahan Sawah Ditanami 2 kali Setahun (Ha)	136472	138472	-	140472	-	142472	-	144472	-	146472	-	146472	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase Penambahan Benih Tanaman Pangan yang diawasi	0	6.5	-	6.5	-	6.5	-	6.5	-	6.5	-	57.42	-	Dinas Pertanian, TPH
		Produktivitas Benih Sumber Tanaman Pangan (Kg/Ha)	20.4	20.9	-	21.4	-	21.9	-	22.4	-	22.9	-	22.9	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase Serangan OPT Tanaman Pangan	3.32	3.27	-	3.22	-	3.17	-	3.12	-	3.07	-	3.07	-	Dinas Pertanian, TPH
2.6	Program Pengembangan SDM, Kelembagaan dan Pendidikan Pertanian	Jumlah Kelembagaan Pertanian (unit)	145	155	4,022.85	165	4,103.31	175	4,185.37	185	4,269.08	195	4,354.46	195	20,935.07	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase penambahan kelompok tani dari kelas pemula ke kelas lanjut	9.8	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	61.05	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase peserta diklat pertanian dengan kategori baik	40	47	-	55	-	60	-	65	-	70	-	70	-	Dinas Pertanian, TPH
2.7	Program Peningkatan Produksi dan Agribisnis Hortikultura	Persentase peningkatan luas panen hortikultura	0	2	3,634.83	2	3,707.52	2	3,781.68	2	3,857.31	2	3,934.45	10.41	18,915.79	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase Peningkatan Produksi Florikultura	0	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.02	-	0.1	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase Pertambahan Pelaku Agribisnis Hortikultura yang dibina	0	10	-	10	-	10	-	10	-	10	-	61.05	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase pertambahan benih tanaman hortikultura bermutu	0	3.64	-	3.64	-	3.64	-	3.64	-	3.64	-	19.57	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase Pertambahan benih tanaman hortikultura yang diawasi	0	9.5	-	9.5	-	9.5	-	9.5	-	9.5	-	57.42	-	Dinas Pertanian, TPH
		Persentase serangan OPT Tanaman Hortikultura	0	1.4	-	1.36	-	1.32	-	1.28	-	1.24	-	1.24	-	Dinas Pertanian, TPH
3	Kehutanan															
3.1	Penatagunaan dan Pengelolaan Hutan	Luas peningkatan pengelolaan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	1559700	1660000	11,274.36	1760000	12,401.80	1860000	13,641.98	1960000	15,006.17	2060000	16,506.79	2060000	68,831.10	Dinas Kehutanan
		Luas efektif peningkatan areal kelola 17 Unit Manajemen Kesatuan Pengelolaan Hutan KPH (Ha)	0	1700	-	3400	-	5100	-	6800	-	8500	-	8500	-	Dinas Kehutanan
3.2	Penyuluhan dan Pengembangan Perhutanan Sosial	Jumlah kelompok masyarakat yang mendapatkan akses pengelolaan sumber daya hutan melalui HD, HKm, HTR, dan Hutan Adat (Kelompok)	78	88	4,704.20	98	5,174.62	108	5,692.08	118	6,261.29	128	6,887.42	128	28,719.61	Dinas Kehutanan
3.3	Peningkatan Informasi dan Sinergi Pembangunan Kehutanan	Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan (%)	70 %	75 %	1,176.59	80 %	1,294.25	85 %	1,423.67	90 %	1,566.04	95 %	1,722.65	95 %	7,183.20	Dinas Kehutanan
		Persentase peningkatan kualitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan (%)	85 %	87 %	-	89 %	-	91 %	-	93 %	-	95 %	-	95 %	-	Dinas Kehutanan
3.4	Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam dan ekosistem	Luas penurunan kerusakan kawasan hutan produksi dan hutan lindung (Ha)	256 148 Ha	254.148 Ha	27,515.81	252.148 Ha	30,267.39	250.148 Ha	33,294.13	248.148 Ha	36,623.54	246.148 Ha	40,285.90	246.148 Ha	167,986.77	Dinas Kehutanan
		Luas pengelolaan kawasan ekosistem esensial (Ha)	0 Ha	100.000 Ha	-	200.000 Ha	-	300.000 Ha	-	400.000 Ha	-	500.000 Ha	-	600.000 Ha	-	Dinas Kehutanan
		2.3 Luas Peningkatan areal Konservasi Ekosistem Lahan Basah (Ha)	1 Ha	50 Ha	-	70 Ha	-	100 Ha	-	140 Ha	-	190 Ha	-	551 Ha	-	Dinas Kehutanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		2.4. Peningkatan Jumlah Koleksi Keaneekaragaman Hayati (Flora & Fauna) Kawasan Taman Hutan Raya (TAHLIRAL) Pandan Puluh	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	-	Dinas Kehutanan
		- Flora (Spesies)	170 spesies	175 spesies	-	180 spesies	-	185 spesies	-	190 spesies	-	195 spesies	-	195 spesies	-	-	Dinas Kehutanan
		- Fauna (Spesies)	57 spesies	59 spesies	-	61 spesies	-	63 spesies	-	65 spesies	-	67 spesies	-	67 spesies	-	-	Dinas Kehutanan
3.5	Pengelolaan daerah Aliran sungai dan rehabilitasi Hutan dan Lahan	Luas penurunan lahan kritis didalam dan diluar kawasan hutan (Ha)	1.017.945 Ha	997.945 Ha	6.882.85	977.945 Ha	7.571.14	957.945 Ha	8.328.25	937.945 Ha	9.161.07	917.945 Ha	10.077.18	917.945 Ha	42.020.49	-	Dinas Kehutanan
		Jumlah Produksi Bibit Tanaman hutan dan Multi Purpose Trees Spesies /MPTS (batang)	2.000 batang/Tahun	50.000 batang/Tahun	-	50.000 batang/Tahun	-	50.000 batang/Tahun	-	50.000 batang/Tahun	-	50.000 batang/Tahun	-	250.000 batang	-	-	Dinas Kehutanan
4	Energi dan Sumber Daya Mineral																
4.1	Program Pengembangan Dan Pengendalian Ketenagalistrikan	Persentase Badan Usaha penyediaan dan pemanfaatan tenaga listrik non PLN yang memiliki perizinan di bidang ketenagalistrikan	23.7	32	142.82	41.2	682.71	50.5	785.11	59.8	902.88	69.1	1.038.31	69.1	3.551.84	-	Dinas ESDM
		Persentase Desa Berlistrik	79	81	139.83	83	760.80	85	799.93	87	844.91	89	896.65	89	3.442.12	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.2	Program Penelitian, Pengembangan dan Pengelolaan Energi	Persentase Kontribusi Bauran Energi berbasis EBT	0.71	0.71	762.95	0.71	11.127.39	0.71	15.040.00	0.71	16.902.00	0.71	19.424.80	0.71	63.257.15	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.3	Program Penelitian, Pengembangan Geologi Air Tanah	Prosentase cakupan penelitian di cekungan Air Tanah prioritas	0	20	595.48	20	2.542.30	20	3.601.15	20	3.428.82	20	4.035.65	100	14.203.40	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
		Zona konservasi air tanah yang ditetapkan	0	0	-	0	-	0	-	0	-	1	100.00	1	100.00	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.4	Program Pembinaan, Pengembangan dan pemanfaatan Sumber Daya Air Tanah	Total pendapatan daerah di sektor air tanah (Juta Rupiah)	200	250	398.59	300	2.158.38	350	3.159.64	400	2.921.08	450	3.451.74	450	12.089.43	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.5	Program Pembinaan dan Pengawasan Pertambangan Mineral dan Batubara	Total pendapatan daerah di sektor Mineral dan Batubara	100	105	319.86	110	1.867.84	115	2.625.51	120	2.536.84	125	3.009.87	125	10.359.92	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
4.6	Program Pembinaan Perlindungan Lingkungan Pertambangan Mineral dan Batubara	Persentase wilayah pertambangan yang sudah direklamasi	0	0.12	409.18	0.12	3.054.02	0.12	3.644.88	0.12	4.020.36	0.12	4.475.66	0.6	15.604.10	-	Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral
5	Perdagangan																
5.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Perdagangan Luar Negeri	Nilai Transaksi Perdagangan (US\$ Juta)	0	1150	1.397.53	1200	4.240.00	1400	2.875.00	1500	2.995.00	1550	2.843.00	1550	14.350.53	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai Ekspor Kalbar (US\$ Juta)	0	850	-	900	-	950	-	1100	-	1200	-	1200	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pelayanan dan Pengujian Mutu Barang dan Kalibrasi Peralatan (Sertifikat)	1454	800	-	900	-	1000	-	1100	-	1100	-	4900	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
5.2	Program Pengembangan Perdagangan Dalam Negeri, Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	Inflasi Bahan Makanan (%)	0	3.8	1.070.35	3.7	1.925.57	3.6	2.110.61	3.5	2.453.39	3.4	2.926.57	3.4	10.486.50	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
6	Perindustrian																
6.1	Program Pembangunan dan Pemberdayaan Industri	Jumlah Kerjasama Bidang Industri (MoU)	0	1	3.371.95	1	6.103.59	3	6.422.24	3	6.704.89	5	7.016.63	5	29.619.30	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Jumlah Pengawasan dan Fasilitasi Perizinan Perusahaan Industri (Perusahaan)	0	30	-	50	-	50	-	75	-	75	-	75	-	-	Dinas Perindustrian dan Perdagangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
		Nilai investasi PMA Bidang industri (US\$ Juta)	0	199.68	-	205.67	-	212.86	-	222.66	-	234.46	-	234.46	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Nilai Investasi PMDN Bidang Industri (Rp. Milyar)	0	1803.1	-	1857.2	-	1922.2	-	2010.6	-	2117.2	-	2117.2	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan SDM Industri (Tenaga Kerja/Konsultans Industri)	0	40	-	40	-	60	-	60	-	80	-	280	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Monitoring dan Evaluasi Ketersediaan SDA Sebagai Bahan Baku Industri (Komoditi)	0	2	-	2	-	3	-	3	-	4	-	4	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan, Pemberdayaan dan Pemanfaatan Teknologi Industri, Kreativitas dan Inovasi Industri Unggulan Provinsi (Komoditi)	0	1	-	2	-	2	-	3	-	3	-	3	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pembangunan dan Pemberdayaan IKM Unggulan Provinsi (Unit Usaha IKM)	0	25	-	50	-	75	-	100	-	125	-	375	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengembangan Perwilayahan Industri (WPPI, KI, SIKIM)	0	6	-	6	-	7	-	8	-	9	-	9	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Standarisasi dan Fasilitasi Penerapan Industri Hijau (Perusahaan)	0	12	-	14	-	16	-	18	-	20	-	20	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Pengelolaan data dan Sistem Informasi Industri (Sistem Informasi)	0	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-	1	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Fasilitasi Kemasan Produk Industri (Produk)	0	24	-	24	-	24	-	24	-	24	-	120	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
		Peningkatan Kapasitas IKM (Orang)	0	174	-	174	-	174	-	174	-	174	-	870	-		Dinas Perindustrian dan Perdagangan
7	Transmigrasi																
7.1	Program Peningkatan Kualitas Pemukiman Transmigrasi	Luasan Lahan Transmigrasi yang di manfaatkan	1.175.699 Ha	1.175.699 Ha	416.57	1.199.28 Ha	727.77	284.66 Ha	759.83	164 Ha	836.13	845.608 Ha	914.94	845.608 Ha	3.655.24		Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
8	Kelautan dan Perikanan																
8.1	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)	165,445.27	165,614.34	1,837.75	168,926.63	3,896.00	172,305.16	4,090.80	175,751.26	4,295.34	179,266.29	4,510.11	179,266.29	18,630.00		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Perikanan yang didaratkan di pelabuhan (Ton)	4,704.92	4,750.00	-	4,800.00	-	4,850.00	-	4,900.00	-	5,000.00	-	5,000.00	-		Dinas Kelautan dan Perikanan
8.2	Program Pengembangan Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)	83,227.39	84,000.00	3,070.02	85,680.00	4,840.00	87,393.60	5,082.00	89,141.47	5,336.10	90,924.30	5,602.91	90,924.30	23,931.03		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Produksi Benih/ Benur Unggul Komoditas Ikan Air Rawa dan Laut (ekor)	2,662,900.00	12,200,000.00	-	12,444,000.00	-	12,693,000.00	-	12,947,000.00	-	13,205,600.00	-	13,205,600.00	-		Dinas Kelautan dan Perikanan
8.3	Program Pengolahan, Pemasaran dan Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	Angka Konsumsi makan Ikan (Kg/Kapita/Thn)	38.91	39.05	2,738.83	39.1	3,590.00	39.15	3,769.50	39.2	3,957.98	39.25	4,155.87	39.25	18,212.18		Dinas Kelautan dan Perikanan
		Jumlah Layanan Uji Mutu Hasil Perikanan yang diberikan kepada unit pengolahan Ikan dan Masyarakat (kali)	315	325	-	335	-	345	-	355	-	365	-	365	-		Dinas Kelautan dan Perikanan
8.4	Program Pengelolaan Sumberdaya Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil	Jumlah Kawasan Konservasi yang dilata menuju pengelolaan yang efektif (Kawasan)	0	1	1,796.42	2	2,060.00	3	2,163.00	4	2,271.15	5	2,384.71	5	10,675.28		Dinas Kelautan dan Perikanan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
8.5	Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	Cakupan Wilayah Laut Sampai dengan 12 Mil yang diawasi dari IUU fishing dan kegiatan yang merusak sumberdaya kelautan dan perikanan (%)	42.85	44	723.84	48	1,730.00	52	1,816.50	56	1,907.33	60	2,002.69	64.4204	8,180.36	Dinas Kelautan dan Perikanan
PENUNJANG URUSAN																
1	Sekretariat Daerah															
1.1	Program Bina Administrasi Pembangunan	Persentase OPD dalam ketepatan waktu penyampaian laporan pelaksanaan pembangunan	n/a	100% OPD Tepat Waktu	1,500.00	100% OPD Tepat Waktu	1,575.00	100% OPD Tepat Waktu	1,653.75	100% OPD Tepat Waktu	1,736.44	100% OPD Tepat Waktu	1,823.26	100% OPD Tepat Waktu	8,288.45	Biro Adm PBJ
		Persentase OPD dalam ketepatan sasaran antara realisasi dan target pelaksanaan pembangunan	0	100% OPD Tepat Sasaran	1,100.00	100% OPD Tepat Sasaran	1,155.00	100% OPD Tepat Sasaran	1,212.75	100% OPD Tepat Sasaran	1,273.39	100% OPD Tepat Sasaran	1,337.06	100% OPD Tepat Sasaran	6,078.20	Biro Adm PBJ
1.2	Program Pengembangan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa	Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa	n/a	100.00%	2,501.00	100.00%	1,900.00	100.00%	1,995.00	100.00%	2,094.75	100.00%	2,199.49	100.00%	10,690.24	Biro Adm PBJ
		Pengelolaan Pengadaan Secara Elektronik	n/a	100.00%	523.59	100.00%	2,060.00	100.00%	2,163.00	100.00%	2,271.15	100.00%	2,384.71	100.00%	9,402.45	Biro Adm PBJ
		Pembinaan Dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa	n/a	100.00%	527.93	100.00%	3,880.00	100.00%	4,074.00	100.00%	4,277.70	100.00%	4,491.59	100.00%	17,251.22	Biro Adm PBJ
1.3	Program Manajemen Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase penatausahaan BMD yang sesuai ketentuan	59.69%	67.00%	1,764.29	74.00%	1,874.20	81.00%	1,965.46	88.00%	2,061.75	95.00%	2,164.09	95.00%	9,829.79	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase Penggunaan dan Pemanfaatan BMD yang sesuai ketentuan	97.00%	98.00%	1,058.50	99.00%	1,111.42	100.00%	1,166.99	100.00%	1,193.74	100.00%	1,286.61	100.00%	5,817.26	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase Pengamanan dan Pemeliharaan BMD yang sesuai ketentuan	70.98%	76.15%	1,380.66	80.15%	1,384.97	90.42%	1,473.40	95.91%	1,570.67	100.00%	1,677.68	100.00%	7,487.38	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase BMD yang dilakukan penilaian dalam rangka penyusunan neraca, pemanfaatan dan pemindahtanganan	100.00%	100.00%	424.56	100.00%	350.00	100.00%	367.50	100.00%	385.88	100.00%	405.17	100.00%	1,933.11	Biro Pengelolaan Aset
		Persentase Pemindahtanganan BMD yang sesuai ketentuan	61.95%	72.00%	537.10	77.00%	569.33	83.00%	603.49	89.00%	639.70	96.00%	678.08	96.00%	3,027.70	Biro Pengelolaan Aset
1.4	Program Pelayanan Kelistrikan, Sound System dan Telekomunikasi	Persentase penanganan gangguan kelistrikan, sound system dan telekomunikasi lingkup kompleks Kantor Gubernur dan Rumah Jabatan	95.34%	100.00%	1,626.83	100.00%	1,545.12	100.00%	1,699.63	100.00%	1,869.60	100.00%	2,056.56	100.00%	8,797.74	Biro Pengelolaan Aset
1.5	Program Peningkatan kualitas Pelayanan Informasi Publik	Persentase Informasi publikasi pemberitaan Melalui media cetak, Media elektronik dan media online, media luar ruang	80.00%	90.00%	2,706.62	93.00%	3,184.77	95.00%	3,557.87	98.00%	3,993.25	100.00%	4,520.98	100.00%	17,963.49	Biro Humas dan Protokol
		Persentase Peningkatan Jumlah Media Publikasi	75.00%	80.00%	-	86.00%	-	95.00%	-	98.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	Biro Humas dan Protokol
1.6	Program Peningkatan Pelayanan Keprotokolkan	persentase layanan Tamu dan Pendampingan Pimpinan sesuai SOP	80.00%	90.00%	1,366.34	93.00%	1,484.78	95.00%	1,634.36	98.00%	1,953.31	100.00%	2,148.65	100.00%	8,587.44	Biro Humas dan Protokol
1.7	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Instansi Pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Instansi Pemerintah	85.00%	90.00%	492.13	94.00%	533.94	96.00%	588.33	98.00%	647.17	100.00%	710.88	100.00%	2,972.45	Biro Humas dan Protokol
1.8	Program penataan kualitas Dokumentasi dan Informasi Hukum	persentase dokumentasi produk hukum daerah dan sosialisasi produk hukum	100.00%	100.00%	450.00	100.00%	460.00	100.00%	490.00	100.00%	490.00	100.00%	520.00	100.00%	2,410.00	Biro Hukum
1.9	Program peningkatan kualitas produk hukum	persentase produk hukum daerah yang harmonis	100.00%	100.00%	1,183.35	100.00%	1,200.00	100.00%	1,200.00	100.00%	1,200.00	100.00%	1,200.00	100.00%	5,983.35	Biro Hukum
1.10	Program peningkatan kualitas pembinaan dan pengawasan produk hukum Kabupaten/Kota Se-Kalbar	Persentase produk hukum Kabupaten/Kota yang mendapatkan pengawasan dan pembinaan	100.00%	100.00%	1,120.50	100.00%	1,135.00	100.00%	1,135.00	100.00%	1,135.00	100.00%	1,135.00	100.00%	5,660.50	Biro Hukum

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
1.11	Program Peningkatan Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan Yang Baik	Persentase jumlah penyelenggaraan administrasi KDH dan DPRD	100.00%	100.00%	794.76	100.00%	795.00	100.00%	796.00	100.00%	797.00	100.00%	798.00	100.00%	3,980.76	Biro Pemerintahan
		Persentase penataan dan pelaporan kinerja kepala daerah atas penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan ketentuan	100.00%	100.00%	1,892.10	100.00%	1,893.00	100.00%	1,894.00	100.00%	1,895.00	100.00%	1,896.00	100.00%	9,470.10	Biro Pemerintahan
1.12	Program Penataan Daerah	Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Provinsi Kapuas Raya sesuai kewenangan/neraturan	0.00%	20.00%	200.00	40.00%	250.00	60.00%	300.00	80.00%	350.00	100.00%	400.00	100.00%	1,500.00	Biro Pemerintahan
		Persentase ketersediaan dokumen persiapan pembentukan Kabupaten baru sesuai kewenangan/neraturan	0.00%	20.00%	250.00	40.00%	250.00	60.00%	250.00	80.00%	250.00	100.00%	250.00	100.00%	1,250.00	Biro Pemerintahan
		Jumlah Permendagri Batas antar Daerah	27	3	330.00	3	330.00	2	200.00	0	200.00	0	200.00	35 (14 Permendagri, 13 Draft Permendagri dan Fasilitas Pusat, 8 Fasilitas Provinsi)	1,260.00	Biro Pemerintahan
		Persentase pembinaan penyelenggaraan urusan konkuren	0	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	0	-	Biro Pemerintahan
1.13	Program Peningkatan, Pengembangan dan Penguatan Kerjasama Dalam dan Luar Negeri	Persentase Kab/Kota dan Perangkat Daerah Provinsi yang tertib administrasi dalam melakukan kerja sama sesuai dengan ketentuan yang berlaku	100%	100%	513.54	100%	564.89	100%	621.38	100%	683.52	100%	751.87	100%	3,135.20	Biro Pemerintahan
1.14	Program Peningkatan Pembangunan Wilayah Perbatasan	Jumlah rekomendasi kebijakan bidang pengelolaan wilayah perbatasan	1	2 Dok Rekomendasi	182.23	3 Dok Rekomendasi	200.45	3 Dok Rekomendasi	220.50	3 Dok Rekomendasi	242.55	3 Dok Rekomendasi	266.80	14 Dok Rekomendasi	1,112.53	Biro Pemerintahan
1.15	Program Peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	Persentase peningkatan Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah dan Sekretaris Daerah	83.33%	100.00%	5,601.02	100%	6,242.91	100%	6,674.01	100%	7,624.11	100%	8,602.70	100%	34,744.75	Biro Umum
1.16	Program Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	Persentase Perkuatan Kapasitas Kelembagaan dan Institusi Pemerintah	92.30%	100.00%	2,870.07	100%	2,855.68	100%	3,032.91	100%	3,359.37	100%	3,558.70	100%	15,676.73	Biro Umum
1.17	Program Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	Persentase Peningkatan Pengelolaan Administrasi Keuangan Setda	100.00%	100.00%	296.22	100%	311.10	100%	326.75	100%	343.09	100%	360.28	100%	1,637.44	Biro Umum
1.18	Program Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	Persentase Penertiban Aset di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100.00%	100.00%	30,777.00	100%	33,854.70	100%	37,240.20	100%	40,964.30	100%	45,060.70	100%	187,896.90	Biro Umum
1.19	Program Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang ditata	15 PD	17 PD	284.32	19 PD	219.00	21 PD	245.00	25 PD	270.00	25 PD	270.00	0	1,288.32	Biro Organisasi
1.20	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	IKM Pemerintah Provinsi Kalbar	82,49 (Baik)	85 (Baik)	-	87 (Baik)	-	89 (Sangat Baik)	-	91 (Sangat Baik)	-	93 (Sangat Baik)	-	93 (Sangat Baik)	-	Biro Organisasi
1.21	Program Penataan Ketatalaksanaan	Jumlah Kebijakan Penerapan Standarisasi, Sistem dan Prosedur	2 Kebijakan	3 Kebijakan	-	4 Kebijakan	-	5 Kebijakan	-	6 Kebijakan	-	7 Kebijakan	-	7 Kebijakan	-	Biro Organisasi
1.22	Program Peningkatan Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Aparatur	Persentase perangkat daerah yang telah dilakukan pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	20.00%	20.00%	-	40.00%	-	60.00%	-	80.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	Biro Organisasi

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab	
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode			
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	
1.23	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Prosentase PNS Selda yang mengikuti kegiatan peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	10.00%	16.00%	-	32.00%	-	48.00%	-	64.00%	-	80.00%	-	80.00%	-	-	Biro Organisasi
1.24	Program Pengembangan dan Pengelolaan Bahan Pustaka	Presentase Peningkatan Pengelolaan Bahan Pustaka	100.00%	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Biro Organisasi
1.25	Program Pengembangan Pengawasan dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan	Prosentase laporan kinerja dan perjanjian kinerja perangkat daerah yang telah direvisi	100.00%	100.00%	405.74	100.00%	516.21	100.00%	595.03	100.00%	674.25	100.00%	765.16	100.00%	2,956.39	-	Biro Organisasi
1.26	Program Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	Persentase Pembinaan dan Peningkatan Pelestarian Kerukunan Umat Beragama	93.61%	100.00%	3,842.07	1	3,342.17	100.00%	3,423.39	100.00%	3,501.89	100.00%	3,555.89	100.00%	17,665.41	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Jumlah Peningkatan Kualitas Keagamaan Tokoh Agama dan Masyarakat	394 Orang	409 Orang	456.32	409 Orang	1,234.63	409 Orang	1,295.00	409 Orang	1,375.00	409 Orang	1,430.00	409 Orang	5,790.94	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
1.27	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Dalam Rangka Peningkatan Kualitas Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga di Kalbar	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	99.60%	100.00%	388.90	100.00%	354.00	100.00%	659.54	100.00%	465.00	100.00%	719.54	100.00%	2,586.99	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
		Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Pemuda dan Olahraga	99.60%	100.00%	84.49	100.00%	187.00	100.00%	220.00	100.00%	235.00	100.00%	250.00	100.00%	976.49	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
1.28	Program Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	Persentase Peningkatan Fasilitas, Koordinasi, Pembinaan dan Monev Kebijakan Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	99.60%	100.00%	148.06	100.00%	244.91	100.00%	253.10	100.00%	255.00	100.00%	262.00	100.00%	1,163.08	-	Biro Kesejahteraan Rakyat
1.29	Program Bina Perekonomian Daerah Dibidang Sumberdaya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	Tersedianya Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral, Jumlah Rumusan Kebijakan Perekonomian Daerah di Bidang Sumber Daya Pertanian, Kelautan dan Perikanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan Serta Energi dan Sumberdaya Mineral	0.00%	75.00%	1,061.86	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	Biro Perekonomian
1.30	Program Bina Sarana Perekonomian Daerah	Tersedianya Kebijakan Bidang Perekonomian Daerah Kalimantan Barat	0.00%	60.00%	781.49	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	0.00%	-	-	Biro Perekonomian
1.31	Program Bina Penanaman Modal, Investasi, Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Investasi dan Penanaman Modal	0.00%	0.00%	-	79.00%	222.00	83.00%	200.00	87.00%	200.00	93.00%	200.00	93.00%	822.00	-	Biro Perekonomian
		% Kinerja Lembaga Keuangan Daerah dan BUMD	0.00%	0.00%	-	79.00%	-	83.00%	-	87.00%	-	93.00%	-	93.00%	-	-	Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor BUMD	0.00%	0.00%	-	82.50%	-	90.00%	-	95.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Biro Perekonomian
1.32	Program Bina Peningkatan Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam, Mineral dan Energi, Kehutanan dan Lingkungan Hidup serta Ketahanan Pangan	% Terlaksananya Kebijakan Sektor Sumber Daya Pertanian, Sumber Daya Alam yang Ditindaklanjuti	0.00%	0.00%	-	75.00%	1,285.00	83.00%	1,431.00	91.00%	1,431.00	100.00%	1,431.00	100.00%	5,578.00	-	Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan Sektor Mineral dan Energi yang Ditindaklanjuti	0.00%	0.00%	-	75.00%	-	83.00%	-	91.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Biro Perekonomian
		% Terlaksananya Kebijakan di Sektor Kelistrikan dan Gas yang Ditindaklanjuti	0.00%	0.00%	-	75.00%	-	83.00%	-	91.00%	-	100.00%	-	100.00%	-	-	Biro Perekonomian

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
2.1	Program Penyusunan Rencana Pembangunan	Prosentase Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dan Perangkat Daerah yang telah disusun	100	100	2,186.00	100	2,290.00	100	1,670.00	100	1,730.00	100	2,725.00	500	10,601.00	Bappeda
2.2	Program Pengembangan Data Perencanaan Pembangunan	Prosentase Data yang dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan pembangunan	n/a	40	863.73	45	1,252.63	50	1,229.00	55	1,286.20	60	1,546.01	60	6,177.58	Bappeda
2.3	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	94,96 %	0.95	1,406.47	96.00%	2,595.44	97.00%	2,951.27	98.00%	3,111.77	99.00%	3,840.32	485.00%	13,905.27	Bappeda
2.4	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Ekonomi	90.00%	100.00%	1,793.02	100.00%	2,557.01	100.00%	2,591.91	100.00%	2,819.11	100.00%	3,056.51	500.00%	12,817.56	Bappeda
2.5	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Tingkat Konsistensi Penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	100.00%	100.00%	1,480.17	100.00%	2,333.00	100.00%	2,567.95	100.00%	3,953.14	100.00%	3,396.11	500.00%	13,730.38	Bappeda
2.6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase rata-rata capaian kinerja fungsional perencana Bappeda Prov. Kalbar	n/a	82	248.93	84	727.62	86	853.00	88	887.00	90	923.00	90	3,639.55	Bappeda
2.7	Program Perencanaan Pembangunan Kerjasama Wilayah Se Kalimantan	Persentase Usulan Kegiatan Perencanaan Pembangunan Wilayah Se Kalimantan yang di Akomodir Dalam Dokumen Perencanaan	20.00%	25.00%	346.45	30.00%	457.81	35.00%	285.00	40.00%	287.00	50.00%	300.00	50.00%	1,676.25	Bappeda
2.8	Program Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	Persentase Tingkat Capaian indikator kinerja tujuan dan sasaran pembangunan daerah	75.00%	80.00%	750.91	85.00%	1,147.47	90.00%	977.28	95.00%	1,002.13	100.00%	1,126.97	100.00%	5,004.75	Bappeda
2.9	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Manusia, Sosial dan Pemerintahan (PMSP)	47,37 %	0.5742	392.96	67.47%	318.74	77.42%	310.00	87.42%	321.00	97.42%	333.10	97.42%	1,675.80	Bappeda
2.10	Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Ekonomi	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Ekonomi	0	0	-	0.00%	299.99	90.00%	329.99	90.00%	362.99	90.00%	399.29	90.00%	1,392.25	Bappeda
2.11	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	Persentase Pencapaian Indikator Kinerja Daerah pada Bidang Pembangunan Sarana dan Prasarana Wilayah	0	0	-	100.00%	300.00	100.00%	300.00	100.00%	300.00	100.00%	300.00	400.00%	1,200.00	Bappeda
3	Keuangan															
3.1	Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Jumlah Perda APBD dan PAPBD Provinsi Kalimantan Barat	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,379.77	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,522.07	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,742.95	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5,972.67	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6,211.58	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	28,829.04	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6.58	0	-	0	-	0	-	0	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	6.58	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	-	1 Perda APBD dan 1 Perda PAPBD	5.96	0	6.56	0	6.82	0	7.09	0	26.43	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.2	Program Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase Laporan Keuangan SKPD sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)	1	100.00%	4,312.58	100.00%	5,050.54	100.00%	4,485.09	100.00%	4,664.49	100.00%	4,851.07	100.00%	23,363.77	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
3.3	Program Pembinaan dan Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Kabupaten dan kota	Persentase Raperda / Raperdaka Kab / Kota tentang APBD yang dievaluasi Gubernur paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran	0.95	95.00%	3,166.14	95.00%	3,266.14	95.00%	3,396.78	95.00%	3,532.65	95.00%	3,673.96	95.00%	17,035.67	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.4	Program Pembinaan Fasilitasi Bansos dan Hibah	Persentase tersalurinya dana Hibah dan Bansos	0.95	95.00%	602.01	95.00%	602.01	95.00%	626.09	95.00%	651.13	95.00%	677.18	95.00%	3,158.42	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.5	Program Peningkatan Kualitas Pelayanan	Persentase Indeks Kepuasan Masyarakat	0.8	80.00%	951.72	80.00%	984.88	80.00%	1,024.28	80.00%	1,065.25	80.00%	1,107.86	80.00%	5,133.99	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.6	Program Peningkatan Koordinasi Pemungutan	Persentase tercapainya pajak daerah	90	90.00%	801.04	90.00%	1,732.01	90.00%	1,801.29	90.00%	1,873.35	90.00%	1,948.28	90.00%	8,155.97	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	51.93	100.00%	25.00	100.00%	62.15	100.00%	64.64	100.00%	67.22	100.00%	270.94	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	549.90	0.00%	695.90	100.00%	723.74	100.00%	752.69	100.00%	782.80	100.00%	3,505.03	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	500.00	100.00%	767.20	100.00%	805.56	100.00%	837.78	100.00%	871.30	100.00%	3,781.84	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	362.25	100.00%	46.80	100.00%	58.08	100.00%	60.40	100.00%	62.82	100.00%	590.35	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	350.00	100.00%	350.00	100.00%	385.00	100.00%	400.40	100.00%	416.42	100.00%	1,901.82	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	502.27	100.00%	531.61	100.00%	662.49	100.00%	688.99	100.00%	716.55	100.00%	3,101.91	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	345.85	100.00%	395.00	100.00%	395.00	100.00%	410.80	100.00%	427.23	100.00%	1,973.88	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	307.10	100.00%	320.00	100.00%	337.81	100.00%	351.32	100.00%	365.38	100.00%	1,681.61	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	438.65	100.00%	480.00	100.00%	499.20	100.00%	519.17	100.00%	539.94	100.00%	2,476.96	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	462.01	100.00%	500.00	100.00%	520.00	100.00%	540.80	100.00%	562.43	100.00%	2,585.24	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	404.45	100.00%	332.15	100.00%	345.44	100.00%	359.25	100.00%	373.62	100.00%	1,814.91	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
			90	100.00%	734.22	100.00%	630.11	100.00%	655.31	100.00%	681.52	100.00%	708.79	100.00%	3,409.95	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			90	100.00%	501.01	100.00%	530.29	100.00%	551.50	100.00%	573.60	100.00%	596.50	100.00%	2,752.90	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
3.7	Program Peningkatan Pengelolaan PAD	Persentase Tercapainya Pendapatan Asli Daerah	100	100.00%	2,841.16	100.00%	4,395.93	100.00%	4,571.77	100.00%	4,754.64	100.00%	4,944.83	100.00%	21,508.33	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			100	100.00%	1,290.36	100.00%	1,396.25	100.00%	1,743.06	100.00%	1,812.78	100.00%	1,885.29	100.00%	8,127.74	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			100	100.00%	-	100.00%	416.85	100.00%	458.54	100.00%	476.88	100.00%	495.95	100.00%	1,848.22	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			100	100.00%	51.35	100.00%	55.00	100.00%	57.20	100.00%	59.49	100.00%	61.87	100.00%	284.91	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			100	100.00%	325.48	100.00%	420.98	100.00%	437.82	100.00%	455.33	100.00%	473.55	100.00%	2,113.16	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
			100	100.00%	239.33	100.00%	218.53	100.00%	227.27	100.00%	236.36	100.00%	245.82	100.00%	1,167.31	Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan														#N/A	
4.1	Program Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM Aparatur Sipil Negara	Persentase Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas SDM ASN	54.00%	75.00%	3,517.34	85.00%	3,517.34	95.00%	3,517.34	100%	3,517.34	100%	3,517.34	100%	17,586.70	Badan Kepegawaian Daerah
4.2	Program Pembinaan Aparatur Sipil Negara	Persentase Pembinaan Aparatur Sipil Negara	95.00%	100.00%	782.24	100.00%	782.24	100.00%	782.24	100%	782.24	100%	782.24	100%	3,911.20	Badan Kepegawaian Daerah
4.3	Program Layanan Administrasi dan Informasi Aparatur Sipil Negara	Persentase Layanan Administrasi dan Informasi yang diberikan	100.00%	100.00%	1,516.04	100.00%	1,516.04	100.00%	1,516.04	100%	1,516.04	100%	1,516.04	100%	7,580.20	Badan Kepegawaian Daerah
4.4	Program Pengembangan Kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	Jumlah alumni pengembangan kompetensi SDM Pemerintahan Daerah	796	2699	18,554.06	1594	13,187.04	1594	13,088.54	1684	15,231.98	1709	15,421.45	9280	75,483.07	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.5	Program Sertifikasi Kompetensi ASN	Jumlah SDM Aparatur yang memperoleh sertifikasi kompetensi	88	100	261.71	120	320.00	120	350.00	120	380.00	120	400.00	580	1,711.71	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4.6	Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Institusi Pengembangan Kompetensi	Akreditasi Kelembagaan Institusi dan penyelenggaraan pengembangan kompetensi	4 Sertifikasi	6 Dokumen	2,378.48	6 Dokumen	2,701.54	6 Dokumen	3,069.44	6 Dokumen	3,356.09	6 Dokumen	2,759.16	7 Dokumen	14,264.71	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
5	Penelitian dan Pengembangan														#N/A	
5.1	Program Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan	Jumlah Rekomendasi Kelembagaan yang diusulkan oleh Bidang Sosial dan Pemerintahan	-	8 Rekomendasi	1,135.00	6 Rekomendasi	1,074.00	7 Rekomendasi	1,323.00	11 Rekomendasi	1,734.00	7 Rekomendasi	1,689.00	39 Rekomendasi	6,955.00	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.2	Program Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan	Jumlah Rekomendasi Kelembagaan yang diusulkan oleh Bidang Ekonomi dan Pembangunan	-	5 Rekomendasi	866.00	9 Rekomendasi	1,088.00	7 Rekomendasi	1,126.00	7 Rekomendasi	1,284.00	9 Rekomendasi	1,583.00	37 Rekomendasi	5,947.00	Badan Penelitian dan Pengembangan

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
5.3	Program Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah Rekomendasi Kelitbitan yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	-	-	-	1 Rekomendasi	250.00	2 Rekomendasi	335.00	1 Rekomendasi	325.00	1 Rekomendasi	370.00	5 Rekomendasi	1,280.00	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah Rekomendasi Inovasi Daerah yang diusulkan oleh Bidang Inovasi dan Teknologi	-	1 Rekomendasi	817.00	3 Rekomendasi	970.00	3 Rekomendasi	1,118.00	3 Rekomendasi	1,100.00	3 Rekomendasi	1,266.00	13 Rekomendasi	5,271.00	Badan Penelitian dan Pengembangan
5.4	Program Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya	Jumlah Kerjasama Kelitbitan	-	2 Perjanjian	419.00	2 Perjanjian	1,301.00	2 Perjanjian	1,476.00	2 Perjanjian	1,675.00	2 Perjanjian	1,903.00	10 Perjanjian	6,774.00	Badan Penelitian dan Pengembangan
		Jumlah Publikasi Penelitian, Perencanaan dan Inovasi Daerah	-	2 Terbitan	103.00	9 Buku, 2 Terbitan	318.00	9 Buku, 2 Terbitan	362.00	9 Buku, 2 Terbitan	413.00	9 Buku, 2 Terbitan	471.00	36 Buku, 10 Terbitan	1,667.00	Badan Penelitian dan Pengembangan
6	Pengawasan															#N/A
6.1	Program Peningkatan Kinerja Rutin Pengawasan	Persentase tingkat kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	12,834.26	100%	14,117.69	100%	15,529.45	100%	17,082.40	100%	18,790.64	100%	78,354.44	Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan keuangan dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian dokumen laporan kinerja dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
		Persentase kontribusi perbaikan terhadap sasaran pemeriksaan kinerja	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
		Persentase peningkatan penilaian hasil Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (FKPPD) Kab/Kota	5%	5%	-	5%	-	5%	-	5%	-	5%	-	25%	-	Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian realisasi anggaran dan pengadaan barang jasa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
		Persentase peningkatan maturitas SPIP	0	3,80%	-	7,60%	-	11,40%	-	15,20%	-	19,00%	-	19,00%	-	Inspektorat
		Persentase peningkatan penyelesaian tindak lanjut hasil temuan BPK dan APIP	0%	2%	-	2%	-	2%	-	2%	-	2%	-	10%	-	Inspektorat
6.2	Program Pengawasan Prioritas Nasional	Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana desa dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	1,600.21	100%	1,760.23	100%	1,936.26	100%	2,129.88	100%	2,342.87	100%	9,769.46	Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian kegiatan dana BOS dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
		Persentase tingkat kesesuaian kegiatan PPRG dengan ketentuan, standar, rencana atau norma yang ditetapkan	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
		Persentase tingkat partisipasi aktif Inspektorat dalam kegiatan pencegahan anti korupsi	100%	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	100%	-	Inspektorat
6.3	Program Peningkatan Kapabilitas Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)	Persentase peningkatan kapabilitas APIP	0%	9,85%	756.60	19,70%	832.26	29,55%	915.49	39,40%	1,007.03	49,25%	1,107.74	49,25%	4,619.12	Inspektorat

Kode	Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Perangkat Daerah Penanggung Jawab
				2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode		
				target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	target	Rp (Juta)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)
6.4	Program Pengawasan Reformasi Birokrasi	Persentase peningkatan pelaksanaan reformasi birokrasi	0	3,52%	1,132.58	7,05%	1,245.84	10,58%	1,370.42	14,11%	1,507.46	17,64%	1,658.21	17,64%	6,914.51	Inspektorat
		Persentase peningkatan pengaduan yang ditindaklanjuti	0%	5%	-	10%	-	15%	-	20%	-	25%	-	25%	-	Inspektorat
6.5	Program Penegakan Integritas	Jumlah kegiatan pencegahan anti korupsi yang dilaksanakan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	538.55	5 Kegiatan	592.40	5 Kegiatan	651.64	5 Kegiatan	716.81	5 Kegiatan	788.49	5 Kegiatan	3,287.89	Inspektorat
7	Sekretariat Dewan															
7.1	Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah	Jumlah Rancangan PERDA (RAPERDA) yang ditetapkan oleh DPRD dan Kepala Daerah	12 Raperda	12 Raperda	8,397.67	12 Raperda	8,817.55	12 Raperda	9,258.43	13 Raperda	9,721.35	13 Raperda	10,207.42	13 Raperda	46,402.42	Sekretariat DPRD
7.2	Program Peningkatan Pelayanan Kelembagaan DPRD	Persentase Penyelenggaraan layanan Sekretariat DPRD	82.00%	85.00%	56,129.24	85.00%	58,935.70	85.00%	61,882.48	85.00%	64,976.61	85.00%	75,275.35	85.00%	317,199.38	Sekretariat DPRD
8	Fungsi Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat															
8.1	Program peningkatan partisipasi dan kemitraan antar sektor dan pemda	Persentase fasilitasi pelaksanaan tugas dan kegiatan pemda	0	90,47%	250.99	100%	289.29	100%	300.11	100%	320.16	100%	348.00	100%	1,508.55	Badan Penghubung
8.2	Program Peningkatan Layanan Penghubung	Persentase penyelenggaraan layanan penghubung sesuai standar	0	98,63%	1,054.82	100%	1,160.30	100%	1,276.33	100%	1,403.96	100%	1,544.35	100%	6,439.75	Badan Penghubung

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Pada bab ini menguraikan kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah meliputi indikator kinerja utama daerah yang menggambarkan kinerja kepala daerah dan indikator sasaran pembangunan daerah yang menggabungkan indikator kinerja perangkat daerah dalam mendukung indikator utama daerah.

8.1. Indikator Kinerja Utama Daerah

Penetapan Indikator Kinerja Utama Daerah ditampilkan pada tabel berikut :

Tabel 8.1

Indikator Kinerja Utama Daerah Tahun 2019-2023

No	Indikator Kinerja Utama	Kondisi Kinerja Awal RPJMD	Target Capaian Kinerja					Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Indeks Infrastruktur	57,15	56,61	59,93	63,00	65,94	68,86	71,84
2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
3	Nilai SAKIP	B	B	B	BB	BB	A	A
4	Indeks Pembangunan Manusia	66,26	67,2	67,87	68,69	69,68	70,78	70,78
5	Pertumbuhan Ekonomi	5,06	5,2	5,35	5,62	5,83	6,15	6,15
6	Gini Rasio	0,33	0,33	0,32	0,30	0,28	0,27	0,27
7	Desa Mandiri	1	63	159	239	319	425	425
8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4,26	3,9	3,63	3,47	3,26	3,07	3,07
9	Angka Kemiskinan	7,37	6,92	6,43	5,99	5,38	5	5
10	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0
	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66,1	66,2	66,4	66,6	66,7	66,8	66,8

8.2. Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator kinerja penyelenggaraan daerah merupakan indikator sasaran pembangunan yang mendukung tercapainya indikator kinerja utama daerah, dijelaskan dalam tabel berikut :

Tabel 8.2
Penetapan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
	ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT							
	Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi							
1.1	Indeks Infrastruktur	56.61	59.93	63.00	65.94	68.86	71.84	71.84
1.2	Indeks Reformasi Birokrasi	B	B	B	BB	BB	A	A
1.3	Nilai SAKIP Provinsi Kalimantan Barat	B	B	B	BB	BB	A	A
1.4	Indeks Pembangunan Manusia	66.26	67.2	67.87	68.69	69.68	70.78	70.78
1.5	Pertumbuhan Ekonomi	5.06	5.2	5.35	5.62	5.83	6.15	6.15
1.6	Gini Rasio	0.33	0.33	0.32	0.30	0.28	0.27	0.27
1.7	Desa Mandiri	1	63	159	239	319	425	425
1.8	Tingkat Pengangguran Terbuka	4.26	3.9	3.63	3.47	3.26	3.07	3.07
1.9	Angka Kemiskinan	7.37	6.92	6.43	5.99	5.38	5	5
1.10	Konflik Sosial	0	0	0	0	0	0	0
1.11	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	66.1	66.2	66.4	66.6	66.7	66.8	66.8
	ASPEK PELAYANAN UMUM							
	LAYANAN URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR							
1	Pendidikan							
1.1	Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7.48	7.78	8.2	8.9	9.5	10.4	10.4
1.2	Harapan Lama Sekolah (tahun)	12.5	12.9	13.2	13.7	14.2	14.5	14.5
1.3	Angka Melek Aksara	98.24	98.3	98.34	98.39	98.43	98.45	98.45
2	Kesehatan							
2.1	Angka Kematian Ibu melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup	95	95	94	93	92	91	91
2.2	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup	7	7	7	7	7	6	6
2.3	Angka Kematian Balita per 1000 Kelahiran Hidup	8	8	8	8	8	7	7
2.4	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.92	69.95	69.97	69.9	70	70	70
2.5	BOR	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%	60-80%
2.6	LOS (hari)	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari	6-9 hari
2.7	TOI (Hari)	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari	1-3 hari
2.8	BTO (Kali)	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
2.9	NDR	<50/1000	<50/1000	<50/1000	<50/1000	<50/1000	<50/1000	<50/1000
2.10	GDR	<75/1000	<75/1000	<75/1000	<75/1000	<75/1000	<75/1000	<75/1000
2.11	BOR	81.4	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%	60-85%
2.12	LOS (hari)	132	100	100	100	100	100	100
2.13	TOI (Hari)	5.2	3	3	3	3	3	3
2.14	BTO (Kali)	2.7	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
2.15	NDR	9.38	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000
2.16	GDR	9.38	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000
2.17	BOR	80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80	60-80
2.18	LOS (hari)	50	50	50	50	50	50	50
2.19	TOI (Hari)	2	2	2	2	2	2	2
2.20	BTO (Kali)	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50	40-50
2.21	NDR	0	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000	< 3/1000
2.22	GDR	0	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000	< 10/1000
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
3.1	Peningkatan persentase kemandapan jalan provinsi	49.71%	56.68%	62.38%	67.44%	72.18%	76.99%	76.99%
3.2	Persentase irigasi Provinsi dalam kondisi baik	46.76%	48.26%	49.83%	51.48%	53.22%	55.04%	55.04%
3.3	Persentase peningkatan / pemeliharaan sungai sebagai pengendalian banjir	46.76%	49.47%	52.46%	55.60%	58.89%	62.35%	62.35%
3.4	Persentase Berkurangnya pantai kritis.	56.85%	56.52%	56.14%	55.76%	52.35%	54.92%	54.92%
3.5	Persentase rumah tangga berakses sanitasi	48,38%	51,02%	54,63%	58,13%	61,61%	65,03%	65,03%
3.6	Jumlah Kabupaten yang tertangani Infrastruktur Jalan Permukiman Pedesaan sesuai dengan Indeks Desa Membangun	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten	12 Kabupaten
3.7	Jumlah Permukiman Perkotaan yang tertangani Infrastrukturnya	2 Kota	2 Kota	4 Kota	6 Kota	10 Kota	14 Kota	14 Kota
3.8	Bangunan Gedung Pemerintah yang terbangun (%)	14.4%	22.1%	21.0%	19.9%	19.0%	18.0%	0.0%
3.9	Persentase Tenaga Kerja Ahli Konstruksi yang bersertifikat	67,92%	67,92%	69,29%	70,65%	72,01%	73,37%	73,37%
3.10	Presentase data yang tersedia di SIPJAKI	21.4%	35.7%	50.0%	64.3%	78.6%	92.9%	92.9%
3.11	Persentase peningkatan pelayanan mutu jasa konstruksi	66.0%	66.0%	78.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%
3.12	Persentase Produksi Konstruksi	0.0%	52 %	70 %	79,11 %	91,11 %	100 %	100 %

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.13	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50.0%	55.0%	60.0%	65.0%	70.0%	75.0%	75.0%
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman							
4.1	Jumlah Proponan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana dan yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Provinsi	0	1	1	1	0	0	0
4.2	Jumlah Penyediaan Penataan Kawasan Permukiman	0	1	1	1	0	0	0
5	Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat							
5.1	Jumlah masyarakat yang memperoleh layanan dalam penegakkan Perda/Perkada	0	1	1	1	1	1	1
5.2	Persentase pembentukan Pokmas/Destana di daerah rawan bencana	9.80%	27.84%	45.88%	63.92%	81.96%	100.00%	100.00%
5.3	Persentase Jumlah orang yang dilatih/diberi pengetahuan	3.01%	22.40%	41.80%	61.20%	80.60%	100.00%	100.00%
5.4	Rata-rata waktu respon kejadian bencana	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam	11 Jam
5.5	Persentase penyelesaian rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah pasca bencana	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
5.6	Skor Indeks Demokrasi Aspek Kebebasan Sipil	97,15	97,35	97,55	97,75	97,95	98,15	98,15
6	Sosial							
6.1	Persentase PMKS, PSKS dan Penyeleggara Kesejahteraan Sosial Lainnya yang mendapatkan penanganan dan pemberdayaan	0	50.46	56.62	56.86	57.09	57.35	0
6.2	Persentase Penanaman Nilai-Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawanan	0	0	100	100	100	100	0
	LAYANAN URUSAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR							
1	Tenaga Kerja							
1.1	Persentase Penempatan Tenaga Kerja Terlatih	0.00%	35.37%	35.82%	36.27%	36.53%	37.57%	0.00%
1.2	Persentase Hubungan Industrial yang harmonis dan kondusif	0.00%	60.00%	70.00%	80.00%	90.00%	95.00%	95.00%
2	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak							
2.1	Indeks Pembangunan Gender (IPG)	68.5	68.5	70	70.5	80	80.5	80.5
2.2	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	64.46	64.46	65.96	66.46	66.96	67.46	67.46
2.3	Rasio Kekerasan terhadap perempuan dan anak	100	100	100	100	100	100	100
3	Pangan							
3.1	Skor PPH (Pola pangan Harapan)	79.43	83.62	85.71	87.81	89.9	92	92
4	Pertanahan							
5	Lingkungan Hidup							
5.1	Indeks Kualitas Air	55.8	56.2	56.6	57	57.4	57.8	57.8
5.2	Indeks Kualitas Udara	87.9	87.914	87.928	87.942	87.956	87.97	87.91
6	Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil							
6.1	Persentase kepemilikan dokumen penduduk-an, akurasi data penduduk-an, kerjasama dan pemanfaatan data dan dokumen penduduk-an di Kalimantan Barat	38.99	48.66	61.32	68.97	75.2	79.29	82.14
7	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa							
7.1	Persentase Status Perkembangan Desa/Kelurahan	33.42%	66.86%	75.08%	70.12%	81.83%	88.77%	88.77%
7.2	Persentase Indeks Desa Membangun	52.96%	56.06%	60.79%	64.73%	68.67%	73.89%	73.89%
8	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana							
8.1	Persentase fasilitasi penyelenggaraan program KB, KS dan Pengendalian Penduduk	3.33	15	30	41.67	46.67	53,33	60
9	Perhubungan							
9.1	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Darat	56.85%	59.20%	61.61%	64.20%	66.80%	70.00%	73.20%
9.2	Persentase Ketersediaan Sarana Perhubungan Laut dan SDP	27.00%	32.00%	37.00%	42.00%	47.00%	52.00%	57.00%
9.3	Persentase Penurunan Jumlah Laka Lantas per tahun	6.69%	6.50%	6.31%	6.12%	5.93%	5.74%	0.00%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
9.4	Ratio Jumlah Terminal Terhadap Penumpang Angkutan Umum	1170312.5	936250	780208.33	668750	585156.25	520138.9	0
9.5	Persentase penurunan Jumlah Laka SDP per tahun	27.00%	32.00%	37.00%	42.00%	47.00%	52.00%	0.00%
9.6	Ratio Jumlah Pelabuhan Terhadap Penumpang Angkutan SDP	635788	635788	569756	637967	467807	432011	0
9.7	Persentase Pengembangan Sistem Transportasi	10.00%	33.47%	50.06%	64.65%	74.28%	100.00%	0.00%
9.8	Persentase Kecukupan angkutan umum dan prasarana yang layak	80.00%	83.70%	86.70%	90.30%	94.00%	98.00%	0.00%
10	Komunikasi dan Informatika							
10.1	Kategori Keterbukaan Informasi Perangkat daerah dengan penilaian masuk dalam Kategori Informatif (Zona Hijau/nilai 80-100)	0	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100	Kategori Informatif / Zona Hijau / nilai 80-100
10.2	Indeks SPBE	2.55	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6	2.6
10.3	Jumlah Desa yang didukung pembangunan fasilitas infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi	0	79 Desa	159 Desa	239 Desa	319 Desa	425 Desa	425 Desa
11	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah							
11.1	Prosentase Koperasi Berkualitas	21.00%	23.00%	25.00%	27.00%	29.00%	31.00%	31.00%
11.2	Prosentase Pelaku Usaha Mikro dan Kecil yang Naik Kelas	0.00%	0.91%	1.82%	2.73%	3.64%	4.55%	4.55%
12	Penanaman Modal							
12.1	Jumlah Nilai Investasi	13,18 T	18,75 T	19,41 T	20,09 T	20,79 T	21,52 T	100,56 T
13	Kepemudaan dan Olah Raga							
13.1	Angka Harapan Hidup (Tahun)	69.92	69.95	69.97	69.9	70	70	70
13.2	Indeks pembangunan pemuda	47.5	48,2	48,6	49,2	49,9	50,7	50,7
14	Statistik							
14.1	Persentase OPD yang data statistik sektoral terinventarisasi, terupdate, valid dan terintegrasi	15.00%	70.00%	80.00%	90.00%	100.00%	100.00%	100.00%
15	Persandian							
15.1	Persentase penerapan pengamanan informasi dengan pola hubungan komunikasi sandi antar Perangkat Daerah provinsi	15.00%	30.00%	50.00%	70.00%	80.00%	90.00%	90.00%
16	Kebudayaan							
16.1	Jumlah peningkatan warisan budaya benda dan tak benda yang diapresiasi	3	5	5	6	7	7	7
17	Perpustakaan							
17.1	Cakupan Kunjungan Perpustakaan	0	96.696 orang	106.365 orang	117.000 orang	128.700 orang	141.570 orang	590.331 orang
17.2	Koleksi Daerah yang dilestarikan	0	5.492 Judul	5.792 Judul	6.092 Judul	6.392 Judul	6.692 Judul	30.460 Judul
18	Kearsipan							
18.1	Persentase perangkat daerah dalam pengelolaan arsip dengan kategori cukup	6.67%	13.33%	20.00%	26.67%	40.00%	53.33%	53.33%
18.2	Persentase Lembaga Kearsipan Daerah Kab/Kota dalam pengelolaan kearsipan dengan kategori cukup	20.00%	29.00%	43.00%	57.00%	71.00%	86.00%	86.00%
	LAYANAN URUSAN PILIHAN							
1	Pariwisata							
1.1	Pertumbuhan Sektor Pariwisata di dalam PDRB	10.22	10.53	10.84	11.17	11.50	11.85	11.85
2	Pertanian							
2.1	Jumlah Wilayah Terkendali PHMS/ Zoonosis	4	5	6	7	7	8	8
2.2	Jumlah Produksi Daging Peternakan (Ton)	71,560.00	76,111.00	76,873.00	77,642.00	78,417.00	82,785.00	82,785.00
2.3	Jumlah Produksi Telur (Ton)	34,689.02	35,382.80	36,090.46	36,812.27	37,548.51	38,299.48	38,299.48
2.4	Pertumbuhan PDRB Sektor Peternakan (%)	3.98	4	4.25	4.5	4.75	5.5	5.5
2.5	NTP Peternakan	93.95	95.16	96.37	97.58	98.79	100	100
2.6	Pertumbuhan PDRB Sektor Perkebunan ADHK (%)	4	4.47	4.52	4.57	4.62	4.67	4.67
2.7	Jumlah Produksi Perkebunan (Ton)	3,315,686.00	3,439,714.00	3,568,561.00	3,702,418.00	3,841,481.00	3,985,958.00	3,985,958.00
2.8	NTP PR	94.44	95.55	96.66	97.78	98.89	100	100
2.9	NTP Tanaman Pangan	94.41	96.06	96.54	97.03	97.51	98	98
2.10	Jumlah Produksi Tanaman Pangan (Ton)	1,549,989.00	1,607,700.00	1,655,920.00	1,733,635.00	1,739,657.00	1,791,780.00	1,791,780.00
2.11	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Pangan (%)	3.5	3.64	3.7856	3.937024	4.09450496	4.258285158	4.26
2.12	Jumlah Produksi Tanaman Hortikultura (Ton)	385,220.00	396,770.00	408,670.00	420,935.00	433,570.00	446,575.00	446,575.00
2.13	NTP Hortikultura	101.02	102.03	102.08	102.13	102.18	102.23	102.23
2.14	Laju Pertumbuhan PDRB Tanaman Hortikultura (%)	8.40	8.82	9.26	9.72	10.21	10.72	10.72
3	Kehutanan							
3.1	Produksi Kayu Bulat (M³)	981,200.00	1,050,000.00	1,100,000.00	1,150,000.00	1,200,000.00	1,250,000.00	1,250,000.00

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
3.2	Pertumbuhan PDRB Sektor Kehutanan ADHK	1.5	1.55	1.6	1.65	1.7	1.75	1.75
3.3	Indeks Tutupan Hutan (ITH) Pembentuk Indeks Kualitas Tutupan Lahan (%)	0	47.09	47.15	47.22	47.28	47.34	47.34
4	Energi dan Sumber Daya Mineral							
4.1	Rasio Elektrifikasi (%)	83	85	87	89	91	93	93
4.2	Daya Mampu Listrik di Kalbar (MW)	0	670	915	1093	1193	1296	1296
4.3	Laju Pertumbuhan PDRB Sektor Pertambangan ADHK (Persen)	7.45	7.47	7.49	7.51	7.53	7.55	7.55
5	Perdagangan							
5.1	Pertumbuhan Sektor Perdagangan Terhadap PDRB	4.45	4.8	5.2	5.5	6	6.5	6.5
6	Perindustrian							
6.1	Pertumbuhan Sektor Industri di dalam PDRB	0	5.25	6.5	7	7.5	8	8
8	Transmigrasi							
8.1	Persentase Areal Transmigrasi hasil pengukuran HPL (Ha)	0	1175.699	1199.28	284.66	164	845.608	0
9	Kelautan dan Perikanan							
9.1	Produksi Perikanan (Ton)	240,294.00	249,614.34	254,606.63	259,698.76	264,892.73	270,190.59	270,190.59
9.2	Laju Pertumbuhan PDRB atas dasar harga konstan sub sektor perikanan (%)	3.17	3.22	3.27	3.32	3.37	3.42	3.42
9.3	NTP Perikanan (%)	103.50	104.00	104.50	105.00	105.50	106.00	106.00
PENUNJANG URUSAN								
1	Sekretariat Daerah							
1.1	Kualitas Pengendalian Administrasi Pembangunan di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat	Baik	Baik	Baik	Baik	Baik Sekali	Baik Sekali	Baik Sekali
1.2	Proses Pengadaan memenuhi prinsip-prinsip pengadaan Barang/Jasa	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.3	Persentase Pengelolaan Barang Milik Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.4	Persentase Dokumentasi dan Publikasi Pemberitaan melalui Media Cetak Elektronik, Online dan Media Luar Ruang	77.5	85	89.5	95	98	100	100
1.5	Persentase Pelayanan pimpinan Pemerintah Provinsi kalbar dan Tamu Pimpinan sesuai Standart Pelayanan	82.50%	90.00%	93.50%	95.50%	98.00%	100.00%	100.00%
1.6	Penataan perundang-undangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.7	Pengelolaan Penyelenggaraan Pemerintahan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
1.8	Pembentukan Provinsi Kapuas Raya (Status Hukum)	AMPRES	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100% (1 Provinsi)	100% (1 Provinsi)
1.9	Pembentukan Kabupaten	3 AMPRES	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100% (5 Kabupaten)	100% (5 Kabupaten)
1.10	Segmen Batas Daerah	27	3	3	2	0	0	35
1.11	Jumlah Perangkat Daerah dan Kabupaten/Kota yang menyelenggarakan kerjasama dengan daerah lain dan pihak ketiga di Dalam Negeri dan Luar Negeri	1	1	1	1	1	1	1
1.12	Persentase peningkatan pengelolaan wilayah perbatasan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.13	Persentase pelayanan pelayanan umum dan pimpinan	87.81%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.14	Persentase pengelolaan administrasi keuangan dan aset di lingkungan Sekretariat Daerah dan Rumah Jabatan	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.15	Persentase kelembagaan perangkat daerah yang ditata tepat fungsi dan tepat ukuran	41.00%	46.00%	51.00%	57.00%	62.00%	68.00%	68.00%
1.16	IKM Provinsi Kalimantan Barat	80,33 (Baik)	83 (Baik)	85 (Baik)	87 (Baik)	89 (Baik)	91 (Sangat Baik)	91 (Sangat Baik)
1.17	Persentase Perangkat Daerah yang melakukan penataan sistem manajemen SDM Aparatur berdasarkan merit sistem	20.00%	20.00%	40.00%	60.00%	80.00%	100.00%	100.00%
1.18	Komponen SAKIP Nilai pelaporan kinerja	0	10.5	11	11.5	12	12.5	12.5
1.19	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Agama	93.61%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.20	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Pendidikan, Kebudayaan, Pemuda dan Olahraga	99.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.21	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan di Bidang Kesehatan dan Keluarga Berencana	99.60%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.22	Pertumbuhan dan Pemerataan Ekonomi yang meningkat	5.28%	5.28%	5.39%	5.40%	5.51%	5.62%	5.62%
1.23	Terkendalinya Inflasi Daerah	3.60%	3.60%	3.52%	3.47%	3.41%	3.36%	3.36%

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD
			2019	2020	2021	2022	2023	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1.24	Persentase Peningkatan Kualitas Kebijakan Bidang Kesejahteraan Sosial	92.50%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
1.25	Persentase orang atau kelompok masyarakat miskin yang memperoleh bantuan hukum litigasi dan non litigasi	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%
2	Perencanaan Pembangunan							
2.1	Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	21.04	21.07	22	23	24	25	25
2.2	Nilai SAKIP Komponen Capaian Kinerja	12.61	13	14	15	16	17	17,00
3	Kuangan							
3.1	Opini BPK terhadap laporan Keuangan Pemerintah Daerah	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP
3.2	Persentase Pencapaian target pendapatan daerah	100	100	100	100	100	100	100
4	Kepegawaian serta Pendidikan dan Pelatihan							
4.1	Persentase Aparatur sesuai dengan manajemen karier	54.00%	59.00%	76.00%	86.00%	92.00%	100.00%	100
4.2	Persentase SDM Pemerintahan Daerah yang mengikuti pengembangan kompetensi	7.36%	24.95%	14.73%	14.73%	15.57%	15.80%	85.78%
5	Penelitian dan Pengembangan							
5.1	Jumlah Hasil Rekomendasi yang ditindaklanjuti untuk mendukung kebijakan daerah	-	14 Rekomendasi	19 Rekomendasi	19 Rekomendasi	22 Rekomendasi	20 Rekomendasi	94 Rekomendasi
6	Pengawasan							
6.1	Persentase tindak lanjut hasil temuan BPK yang selesai ditindaklanjuti	88.00%	89.00%	90.00%	91.00%	92.00%	95.00%	95.00%
6.2	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan BPK	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%
6.3	Persentase tindak lanjut hasil temuan APIP yang selesai ditindaklanjuti	85.00%	87.00%	89.00%	91.00%	93.00%	95.00%	95.00%
6.4	Persentase penyelesaian temuan keuangan hasil pemeriksaan APIP	85.00%	86.00%	87.00%	88.00%	89.00%	90.00%	90.00%
6.5	Level maturitas SPIP	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
6.6	Jumlah Partisipasi Kegiatan Prioritas Nasional	5	5	6	6	6	7	7
6.7	Level Kapabilitas APIP	Level 3 DC	Level 3	Level 3	Level 3	Level 3	Level 4	Level 4
6.8	Jumlah pedoman/standar pengawasan internal	10	11	12	13	14	15	15
6.9	Hasil survey kepuasan eksternal (dari OPD)	-	Baik	Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik
7	Sekretariat Dewan							
7.1	Indeks Kepuasan Pelayanan DPRD	0	81	82	83	84	85	85
8	Fungsi Penunjang Koordinasi Pelaksanaan Urusan Pemerintahan dan Pembangunan dengan Pemerintah Pusat							
8.1	Persentase sistem pelayanan dan koordinasi kelembagaan yang baik terhadap Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dilingkungan Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	0	90,47%	100%	100%	100%	100%	100%
8.2	Persentase kegiatan kegiatan Layanan Penghubung Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta	0	98,63%	100%	100%	100%	100%	100%
	ASPEK DAYA SAING DAERAH							
	Fokus Kemampuan Ekonomi							
	Urusan Pertanian							
1.1	NTP Peternakan	93.95	95.16	96.37	97.58	98.79	100	100
1.2	NTP PR	94.44	95.55	96.66	97.78	98.89	100	100
1.3	NTP Tanaman Pangan	94.41	96.06	96.54	97.03	97.51	98	98
1.4	NTP Hortikultura	101.02	102.03	102.08	102.13	102.18	102.23	102.23
1.5	NTP Perikanan (%)	103.5	104	104.5	105	105.5	106	106
	Fokus Wilayah/Infrastruktur							
	Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang							
1.1	Peningkatan persentase kemantapan jalan provinsi	49.71%	56.68%	62.38%	67.44%	72.18%	76.99%	76.99%
1.2	Persentase Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	50.00%	55.00%	60.00%	65.00%	70.00%	75.00%	75.00%

BAB X PENUTUP

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan kesinambungan dari RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2008-2013 dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005-2025. Dokumen ini merupakan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan di Provinsi Kalimantan Barat dalam pelaksanaan pembangunan periode 2018-2023.

10.1. Pedoman Transisi

Dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023, maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2019. Ketentuan transisi ini juga berlaku pada dokumen Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

10.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat dalam menyusun Renstra PD Tahun 2018-2023. Setiap tahunnya, RPJMD ini dijabarkan ke dalam perencanaan tahunan yang tertuang dalam dokumen RKPD Provinsi Kalimantan Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dari RPJMD ini, yaitu:

1. Seluruh stakeholder pembangunan termasuk di dalamnya DPRD, instansi pemerintah daerah, instansi vertikal, dunia usaha, organisasi non pemerintah dan komponen masyarakat lainnya berkewajiban untuk melaksanakan program-program dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan sebaik-baiknya.
2. Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Barat dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan daerah wajib mengarahkan pelaksanaan RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023 dengan menggerakkan semua potensi daerah secara optimal.
3. Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat wajib mengkoordinasikan pelaksanaan program-program di dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018-2023.

4. Perangkat Daerah (PD) Provinsi Kalimantan Barat wajib menyusun Rencana Strategis PD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan selama periode lima tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, dengan berpedoman kepada RPJMD ini dan memperhatikan standar pelayanan minimal (SPM) yang telah ditetapkan. Selanjutnya Renstra PD dijabarkan ke dalam Rencana Kerja (Renja) PD setiap tahunnya.
5. Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban mempedomani RPJMD ini dalam menyusun dan/atau mengevaluasi RPJMD Kabupaten/Kota untuk selanjutnya menyelaraskan sasaran dan program pembangunan Kabupaten/Kota dengan sasaran dan program pembangunan Provinsi.
6. Dalam rangka mengefektifkan pelaksanaan RPJMD ini, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan pemantauan, fasilitasi dan mediasi dalam proses penjabaran RPJMD ini ke dalam Renstra PD Provinsi.
7. Bappeda Provinsi Kalimantan Barat wajib melakukan evaluasi terhadap capaian indikator kinerja dalam RPJMD ini setiap tahun berdasarkan data yang diperoleh dari lembaga resmi atau penelitian yang dilakukan oleh Bappeda sendiri.
8. Dalam rangka mewujudkan keselarasan dan konsistensi perencanaan antara Pusat dan Daerah, pada tahun 2020 akan dilakukan penyesuaian antara RPJMD Provinsi Kalimantan Barat dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang akan ditetapkan pada tahun tersebut.
9. Mengingat peran penting organisasi perangkat daerah dan sumberdaya aparatur sebagai salah satu instrument dalam mewujudkan ketercapaian visi, misi dan sasaran pembangunan yang termuat dalam RPJMD, maka penyusunan organisasi perangkat daerah dan penataan aparatur harus berpedoman kepada RPJMD. Hal ini dimaksudkan untuk membagi atau memisahkan secara jelas tanggung jawab perangkat daerah dan menempatkan aparatur sesuai kompetensinya.

GUBERNUR KALIMANTAN BARAT,

SUTARMIDJI